

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi landasan untuk pencapaian tujuan organisasi BII yang lebih kompetitif.

Implementation of GCG principles is the basic pillar in achieving BII's objective to be a more competitive organization.





Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat nilai dan posisi daya saing usaha BII dalam industri perbankan

A consistent implementations of GCG will strengthen the value and competitiveness of BII in the banking industry

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

BII berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat nilai dan posisi daya saing usaha BII dalam industri perbankan yang semakin kompetitif dan kompleks sekaligus mempertahankan keunggulan dan perkembangan usaha BII secara sehat dan berkesinambungan.

GCG dan Tingkat Kesehatan Bank

Penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank selain profil risiko, rentabilitas dan permodalan baik bank secara individual maupun konsolidasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, serta Surat Edaran Bank Indonesia ("SEBI") No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan prinsip GCG secara konsolidasi, BII telah melakukan analisa dan memberikan rekomendasi pelaksanaan prinsip GCG pada anak perusahaan agar selaras dengan standar penerapan prinsip GCG Bank dan industri yang terkait dengan anak perusahaan.

Good Corporate Governance Implementation

BII is fully committed in implementing GCG principles throughout the organization by referring to the prevailing rules and regulations.

Consistent Implementation of GCG will strengthen BII's value and competitiveness in the increasingly competitive and complex banking industry, while at the same time maintain BII's business excellence and growth in a sustainable manner.

GCG and Bank Soundness Rating

As stipulated in Bank Indonesia Regulation No.13/1/PBI/2011 dated January 5, 2011 and Bank Indonesia circular letter No. 13/24/DPNP dated October 25, 2011 concerning of Bank Soundness Rating, the implementation of the GCG principles is one of the key factors in assessing bank's soundness rating, beside of risk profile, profitability and capital adequacy assessment for both individual and consolidated basis.

As part of efforts to improve the implementation of GCG on a consolidated basis, BII has analyzed and provide recommendations on GCG implementation to its subsidiaries, so that they can meet the implementation standard of GCG principles on Banking industry and subsidiaries' related industry.

Kode Etik dan Budaya Kepatuhan

Komitmen BII dalam pelaksanaan GCG juga dilakukan melalui pengembangan lingkungan kerja berdasarkan Kode Etik dan Budaya Kepatuhan, yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam bertindak dan berperilaku serta merupakan bagian dari proses penilaian kinerja seluruh karyawan.

Budaya Kepatuhan merupakan bagian dari tata cara usaha BII sehari-hari baik dalam bertransaksi maupun dalam hal berhadapan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). BII senantiasa meningkatkan fungsi kepatuhan dan peran Satuan Kerja Kepatuhan guna mendukung kegiatan usaha Bank dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan Pelaksanaan GCG terdiri dari transparansi penerapan pelaksanaan GCG dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG yang menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan BII.

Laporan Pelaksanaan GCG merupakan bentuk transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik sesuai dengan penerapan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta SEBI Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum ("PBI GCG").

Sepanjang tahun 2012, Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan atas pelaksanaan GCG di BII. Pembahasannya dilakukan secara rutin dalam agenda pertemuan Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil *self assessment* 2012, diperoleh nilai komposit 1.1 dengan Predikat Komposit Sangat Baik. Hasil *self assessment* tersebut menunjukkan perbaikan atas penilaian di tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut berkat komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris dan Direksi melalui kompetensi, integritas, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dimilikinya serta dengan dukungan penuh komite, yang membantu tugas Dewan Komisaris dan Direksi, satuan kerja pendukung lainnya serta seluruh karyawan BII.

Code of Conduct and Compliance Culture

BII's commitment in GCG implementation is carried out through the development of work environment based on the Code of Conduct and Compliance Culture, which guide the behavior of employees and become a part of the staff's performance appraisal.

Compliance Culture has become part of the bank's daily business process in conducting transactions and dealing with the stakeholders. BII continually improves compliance function and the role of the Compliance Unit to support the Bank's business activities and constantly comply to the prevailing regulations as well as prudential banking principles.

GCG Implementation Report

The GCG implementation report consists of transparency on the implementation of GCG principles and summary of the GCG self-assessment which is an integral part of BII Annual Report.

The GCG Implementation Report is a form of transparency of financial and non-financial conditions to the public in accordance to Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 dated January, 30 2006, as amended by Bank Indonesia Regulation No.8/14/PBI/2006 dated October, 5 2006 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 9/12/DPNP dated May, 30 2007 concerning of The Implementation of GCG for Commercial Banks.

During 2012, BOC, BOD and all staffs are committed to conduct improvement on GCG implementation in BII. Discussion on GCG actions are held in BOC regularly.

Based on the self-assessment results in 2012, a composite score of 1.1 with Very Good on the Composite Predicate was obtained. The result of this assessment shows improvements from the previous assessment. This is attained through the high commitment of the Board of Commissioners and Directors who have competency, integrity, reputation, experience, and expertise, supported by complete functional committees and supporting units.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Inisiatif Utama sebagai Pendukung Pelaksanaan GCG 2012

Selama tahun 2012, BII telah melakukan berbagai inisiatif penting sebagai upaya pendukung terkait dengan peningkatan penerapan GCG antara lain sebagai berikut:

1. Arahan dari Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian "*Tone from the Top*" - dimana seluruh inisiatif dan kegiatan usaha BII senantiasa berpedoman pada prinsip GCG serta pemantauan yang konsisten atas pencapaian seluruh upaya tersebut pada pembahasan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Di tahun 2013 - pelaksanaan GCG merupakan bagian dari Pencapaian Penilaian Kinerja Direksi.
3. Penyempurnaan proses governance diseluruh lini usaha BII, termasuk penyempurnaan pelaksanaan governance pada anak perusahaan BII.
4. Secara konsisten memantau dan memastikan kepatuhan atas seluruh komitmen BII kepada pihak otoritas.
5. Pembaruan berbagai ketentuan internal sebagai parameter untuk senantiasa berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku seperti ketentuan tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Database hasil pemeriksaan pihak otoritas. Dengan adanya database yang terintegrasi tersebut, BII melakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang ada maupun pembuatan ketentuan baru sebagai pedoman pelaksanaan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan lainnya.
7. Penyempurnaan terkait komite-komite antara lain:
 - Pembentukan *Internal Audit Committee* (IAC) yaitu komite level Direksi yang bertugas memantau status temuan pemeriksaan dari sudut perspektif bankwide.
 - Human Capital Committee melaksanakan pertemuan secara berkala dengan agenda khusus untuk mendiskusikan semua aspek sumber daya manusia termasuk pengembangan bakat karyawan.
 - Asset & Liability Committee juga terlibat dalam pemberian persetujuan produk baru yang diperkirakan akan berdampak pada profitabilitas dan likuiditas.
8. Melakukan pengarahan serta koordinasi pelaksanaan prinsip GCG pada anak perusahaan BII, yaitu PT Wahana Otto Mitra Multiartha Finance (WOM) dan PT BII Finance Center (BIIF). Secara umum anak perusahaan telah melaksanakan

Key Initiatives to improve GCG implementation in 2012

During 2012, BII has already conducted several initiatives to support the improvement of GCG implementation as follows :

1. Directions from Board of Commissioners and Directors is part of "*Tone from the Top*" message - where all initiatives and business activities will always refer to GCG principles and consistently monitored on Board of Commissioners and Directors discussion level.
2. In 2013, GCG implementation has become part of Directors' Performance Evaluation.
3. Improvement on governance process in all line of business, including enhancement on governance implementation in subsidiaries.
4. Continuously monitor and ensure fulfillment all BII's commitment to regulators.
5. Update on internal policies by referring to Bank Indonesia regulation and other prevailing rules and regulations, such as Commissioners and Directors internal disciplinary rules.
6. Establishment of regulators examination findings database. With this integrated database, BII will be able to improve the existing policies and establishing new policies as a guideline to the implementation of the prudential principles and other necessary action plans.
7. Improvements related to the committees, among others:
 - Establishment of Internal Audit Committee (IAC), Directors level committee in charge to monitor audit findings status on bank-wide perspective.
 - Human Capital Committee conducts periodic meetings with special agendas to discuss all human resources aspects, including employee talent development.
 - Asset & Liability Committee involved in providing approval to new products that will bring implication on profitability and liquidity.
8. Give a clear direction and coordinate on the implementation of GCG principles in subsidiaries, PT Wahana Otto Mitra Multiartha Finance (WOM) and PT BII Finance Center (BIIF). In general, subsidiaries have already implement the

dengan baik prinsip GCG dalam kegiatan usahanya. Rekomendasi untuk melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan prinsip GCG telah diberikan kepada masing-masing anak perusahaan baik melalui meeting maupun pengarahan lainnya.

Secara lengkap hal tersebut telah disampaikan melalui Hasil Self Assessment GCG BII 2012 yang disampaikan ke Bank Indonesia.

Berikut disampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang mencakup transparansi struktur tata kelola, kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan GCG di BII, serta pengungkapan penting lainnya yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder).

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan penuh yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam koridor yang ditetapkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Pelaksanaan RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPST diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Selama 2012, RUPST telah diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 19 April 2012. RUPSLB sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 16 Januari 2012 dan tanggal 19 April 2012.

GCG principles in their business activities well. Recommendations to improve the implementation of GCG principles have been provided to subsidiaries through meetings and other directions.

The full initiatives of GCG improvement are conveyed through the 2012 BII GCG Self Assessment Results which is submitted to Bank Indonesia.

The following is the GCG Implementation Report which includes governance structure transparency, summary of the implementation of BII GCG self-assessment, as well as other important disclosures required by the stakeholders.

Corporate Governance Structure

General Meeting of Shareholders (GMS)

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest body in the Limited Liability Company, which has the full authority which is not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors, within the limits specified in the Limited Liability Company Act and/or the Articles of Association.

Implementation of the GMS consists of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). AGM is held within a period of 6 (six) months after the fiscal year ends, while EGMS can be held at any time based on the need of the company's interests.

During 2012, the AGM has been held one (1) time which is on 19 April 2012. EGMS as many as 2 (two) times, on 16 January 2012 and 19 April 2012.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) Kamis, 16 Januari 2012 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGM) Thursday, 16 January 2012

A. Proses Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Hasil RUPSLB

Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPSLB telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. Notifications, Announcements, Invitations and Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders Process

The process of notification, announcement, summon and reporting the results of the EGM has been implemented in accordance with prevailing regulations.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan Invitation	Hasil Resolution
RUPSLB – 16 Januari 2012 EGMS – 16 January 2012			
<p>6 Desember 2011 Surat pemberitahuan ke Bapepam-LK, IDX (Surat No.S.2011.587/Dir Compliance) 6 December 2011 Notification Letter to Bapepam-LK (Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency), IDX.</p> <p>Paling lambat 7 hari kalender sebelum tanggal pemberitahuan di surat kabar. At the latest 7 (seven) days before publication on newspaper.</p> <p>Peraturan No. IX.I.1 tentang Rencana Pelaksanaan RUPS. Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17-01-1996. Regulation no IX.I.1 concerning of GMS implementation plan, attachment of Bapepam decision No. Kep-60/PM/1996 Dated on 17-01-1996</p>	<p>15 Desember 2011 Pemberitahuan melalui “Harian Ekonomi Neraca” dan “Investor Daily”. 15 December 2011 Publication on daily newspapers “Harian Ekonomi Neraca” and “Investor Daily”.</p> <p>Minimal 14 hari kalender sebelum panggilan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal panggilan. At least 14 calendar days before invitation date excluding notification and invitation dates.</p> <p>(Pasal 11.2 Anggaran Dasar BII) (Articles 11.2 of BII’s Articles of Association)</p>	<p>30 Desember 2011 Panggilan melalui “Harian Ekonomi Neraca” dan “Investor Daily”. 30 December 2011 Invitations were placed in daily newspapers “Harian Ekonomi Neraca” and “Investor Daily”.</p> <p>Minimal 14 hari kalender sebelum RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB. At least 14 calendar days before EGMS excluding invitation and EGMS dates.</p> <p>(Pasal 11.3 Anggaran Dasar BII) (Articles 11.3 of BII’s Articles of Association)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 18 Januari 2012 Hasil RUPSLB dilaporkan kepada Bapepam-LK, IDX 18 January 2012 Resolution of the EGMS are reported to Bapepam-LK, IDX Paling lambat 2 hari kerja setelah RUPSLB. At the latest 2 (two) working days after EGMS. 18 Januari 2012 Hasil RUPSLB disampaikan melalui “Harian Ekonomi Neraca” dan “Investor Daily”. 18 January 2012 The EGMS resolutions were published through daily newspapers “Harian Ekonomi Neraca” and “Investor Daily”. <p>Paling lambat 2 hari kerja setelah RUPSLB At the latest 2 (two) working days after EGMS</p>

B. Agenda RUPSLB 16 Januari 2012

1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Lokasi dan Kehadiran RUPSLB 16 Januari 2012

RUPSLB dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, bertempat di Ruang Paseo, Plaza BII Tower 2, Lantai 39, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 54.756.633.070 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh) saham atau sama dengan 97,29% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, yaitu total 56.281.990.760 (lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh) saham. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPSLB telah terpenuhi.

B. Agenda of EGMS on 16 January 2012

1. Change in the Composition of the Board of Directors of the Company.
2. Amendment to the Articles of Association of the Company.

C. Venue and Attendance of EGMS 16 January 2012

The EGMS was held on Monday, 16 January 2012, at the Paseo Room, Plaza BII Tower 2, 39th floor, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350.

The EGMS was attended by the shareholders of the company and/or their proxies who represent 54,756,633,070 (fifty-four billion, seven hundred fifty six million, six hundred thirty three thousand, and seventy) or 97.29% (ninety-seven point twenty nine percent) of the total shares with valid voting rights, which have been issued by the company up to the position on 29 December 2011, with a total of 56.281.990.760 (fifty-six billion, two hundred eighty-one million, nine hundred ninety thousand, seven hundred and sixty) shares issued by the company. Therefore, the quorum requirement to conduct the EGMS has been fulfilled.

D. Hasil Keputusan RUPSLB – 16 Januari 2012

Hasil Keputusan RUPSLB, antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Ridha DM Wirakusumah sebagai Presiden Direktur yang pengunduran dirinya telah menjadi efektif sejak tanggal 19 Juli 2011 dan untuk I Gusti Made Mantera sebagai Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 24 Agustus 2011; disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan pemikiran, kerja keras serta jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan. Khusus untuk pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas masa jabatan beliau selama tahun 2011, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2011.
2. Menyetujui untuk mengangkat Dato' Khairussaleh bin Ramli sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2011.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ani Pangestu sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2011.
4. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya RUPSLB ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

D. Results of EGMS Decision – 16 January 2012

Result of EGMS Decision – including as follows:

1. Received and endorsed resignation of Ridha DM Wirakusumah as President Director which effective on 19 July 2011 and resignation of I Gusti Made Mantera as Director of the Company effective on 24 August 2011; accompanied by gratitude for his contributions of thoughts, merit and, hard work for the improvement of the Company. Particularly for the acquittance and discharge on responsibility (*acquit et de charge*) over his term of office in 2011, will be decided in the AGMS for the 2011 fiscal year.
2. Agreed to appoint Dato' Khairussaleh bin Ramli as President Director of the Company as of the closing of the EGMS until the remaining term of office the members of the Board of Directors, that is until the closing of the AGMS of the Company for the 2011 fiscal year.
3. Agreed to appoint Ani Pangestu as a Director of the Company as of the closing of the EGMS until the remaining term of office of the members of Board of Directors, that is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the 2011 fiscal year.
4. Determined that effective from the closing of the EGMS, composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris President Commissioner
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Komisaris Commissioner
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris Commissioner
4	Putu Antara	Komisaris Independen Independent Commissioner
5	Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner
6	Taswin Zakaria	Komisaris Independen Independent Commissioner
7	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Direksi | Board of Directors

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Dato' Khairussaleh Bin Ramli	Presiden Direktur President Director
2	Rahardja Alimhamzah	Direktur Director
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Direktur Director
4	Thilagavathy Nadason	Direktur Director
5	Stephen Liestyo	Direktur Director
6	Rita Mirasari	Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan atau <i>Corporate Secretary</i> Director of Compliance and Corporate Secretary
7	Hedy Maria Helena Lapien	Direktur Director
8	Jenny Wiriyanto	Direktur Director
9	Ani Pangestu	Direktur Director

dengan ketentuan bahwa pengangkatan Dato' Khairussaleh bin Ramli selaku Presiden Direktur Perseroan dan Ani Pangestu sebagai Direktur akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dengan diangkatnya Presiden Direktur baru, maka tugas Rahardja Alimhamzah sebagai pejabat sementara Presiden Direktur menjadi berakhir sejak diterimanya persetujuan dari Bank Indonesia atas pengangkatan Dato' Khairussaleh bin Ramli sebagai Presiden Direktur, dan selanjutnya Rahardja Alimhamzah akan kembali menjalankan tugas sebagai Direktur Perseroan.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris (bilamana perlu), dan memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dimaksud.

with a note that the appointment of Dato' Khairussaleh bin Ramli as the President Director of the Company and Ani Pangestu as Director will be effective upon receiving approval from Bank Indonesia. After appointment of new President Director, the role of Rahardja Alimhamzah as the acting President Director will end upon the approval of Bank Indonesia on Dato' Khairussaleh bin Ramli appointment as President Director, Rahardja Alimhamzah will perform his former duties as a Director of the Company.

- Granted authority and proxy to the Board of Directors of the Company with substitution right to declare in a separate deed before the Notary (if necessary), and notify or register to relevant authorities with respect to changes in the composition of the Board of Directors referred to.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) Kamis, 19 April 2012 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) Thursday, 19 April 2012

A. Proses Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Hasil RUPST

Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPST telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. Notifications, Announcements, Invitations and Resolution of Annual General Meeting of Shareholders Process

The process of notification, announcement, Invitation and reporting the results of GMS has been conducted in accordance with prevailing regulations.

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan Invitation	Hasil Resolution
RUPST - 19 April 2012			
<p>12 Maret 2012 Surat pemberitahuan ke Bapepam-LK, IDX (Surat No.S.2012.128/Dir Compliance) 12 March 2012 Notification Letter to Bapepam-LK (Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency), IDX</p> <p>Paling lambat 7 hari kalender sebelum tanggal pemberitahuan di surat kabar. At the latest 7 (seven) days before publication on newspaper.</p> <p>Peraturan No. IX.1.1 tentang Rencana Pelaksanaan RUPS. Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17-01-1996 Regulation No. IX.1.1 concerning GMS Implementation Plan, Attachment of Bapepam Decision No. Kep-60/PM/1996 dated on 17-01-1996</p>	<p>20 Maret 2012 Pemberitahuan melalui "Harian Ekonomi Neraca" dan "Investor Daily". 20 March 2012 Publication on daily news papers "Harian Ekonomi Neraca" and "Investor Daily"</p> <p>Minimal 14 hari kalender sebelum panggilan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal panggilan. At least 14 calendar days before invitation date excluding notification and invitation dates.</p> <p>(Pasal 11.2 Anggaran Dasar BII) (Articles 11.2 of BII's Articles of Association)</p>	<p>4 April 2012 Panggilan melalui "Harian Ekonomi Neraca" dan "Investor Daily". 4 April 2012 Invitations were placed in daily news papers "Harian Ekonomi Neraca" and "Investor Daily".</p> <p>Minimal 14 hari kalender sebelum RUPST dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPST. At least 14 calendar days before AGMS excluding invitation and AGMS dates.</p> <p>(Pasal 11.3 Anggaran Dasar BII) (Articles 11.3 of BII's Articles of Association)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 23 April 2012 Hasil RUPST dilaporkan kepada Bapepam-LK, IDX 23 April 2012 Resolutions from the AGMS are reported to Bapepam-LK, IDX <p>Paling lambat 2 hari kerja setelah RUPST. At the latest 2 (two) working days after AGMS</p> <ul style="list-style-type: none"> 23 April 2012 Hasil RUPST disampaikan melalui Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily. 23 April 2012 The AGMS resolutions were published through daily news papers Harian Ekonomi and Investor Daily <p>Paling lambat 2 hari kerja setelah RUPST. At the latest 2 (two) working days after AGMS</p>

B. Lokasi dan Kehadiran RUPST 19 April 2012

RUPST dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012, bertempat di Function Room, Gedung Sentral Senayan III, Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

RUPST dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 54.791.022.435 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima) saham atau sama dengan 97,35% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh lima persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal 3 April 2012, yaitu total 56.281.990.760 (lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPST telah terpenuhi.

C. Agenda RUPST 19 April 2012

- Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

B. Venue and Attendance of AGM 19 April 2012

The AGMS was held on Thursday, 19 April 2012, at the Function Room, Sentral Senayan Building III, 28th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

The AGMS was attended by the shareholders of the company and/or their proxies who represent 54,791,022,435 (fifty-four billion, seven hundred ninety-one million, twenty two thousand, four hundred and thirty five) or 97.35% (ninety-seven point thirty-five percent) of the total shares with valid voting rights, which have been issued by the company up to the position on 3 April 2012, with a total of 56,281,990,760 (fifty-six billion, two hundred eighty-one million, nine hundred ninety thousand, seven hundred and sixty) shares issued by the company. Therefore, the quorum requirement for the implementation of the AGMS has been fulfilled.

C. AGMS Agenda on 19 April 2012

- Report of the BOD on the Company's performance for the fiscal year ended on 31 December 2011 and the ratification of the Balance Sheet and Profit/ Loss for the year ended on 31 December 2011.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011.
 3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2012 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
 4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan.
 - b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.
 6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
 7. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Determining the use of the net profit of the Company for the year ended 31 December 2011.
 3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm that will audit the Company's financial reports for the 2012 fiscal year and set honorarium of Public Accountant as well as other requirements.
 4. Determining honorarium and/or other benefits for the Board of Commissioners of the Company.
 5. Delegation of authority to the Board of Commissioners to determine:
 - a. Salary and/or other allowances for the Board of Directors.
 - b. Salary and/or other allowances for the Sharia Supervisory Board.
 6. Appointment of members of Board of Commissioners and Board of Directors due to end of the term of office.
 7. Appointment of members of the Sharia Supervisory Board.

D. Hasil Keputusan RUPST 19 April 2012

Hasil Keputusan RUPST - Agenda pertama:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Suherman & Surja" (*member firm of Ernst & Young*) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2011 mengenai tindakan pengawasan dan kepengurusannya selama tahun buku 2011 tersebut; sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2011, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (*prudential banking*) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.
 4. Menerima dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan atas penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi yaitu: Obligasi Sub Ordinas I, Obligasi Berkelanjutan I, dan Obligasi Sub Ordinas Berkelanjutan
1. Receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year ended 31 December 2011.
 2. Approve and ratify the Statement of Financial Position and Profit/Loss Statements for the fiscal year ended 31 December 2011, as audited by Public Accountant Firm "Purwantono, Suherman & Surja" (member firm of Ernst & Young) with the opinion of "unqualified".
 3. Granted full acquaintance and discharge on responsibility (*acquit et de charge*) for all members of the Boards of Commissioners and Board of Directors of the Company who served in the fiscal year 2011 on the management and supervisory roles; as long as such actions of management and supervisory were reflected in the Company's financial statements during 2011, and were not violate sound prudential banking principle and were not categorized as act of crime.
 4. Receive and approve the Report of the Board of Directors regarding the use of funds from the Bonds public offering, namely Subordinated Bonds I, Sustainable Bonds I and Sustainable Subordinated Bonds I, as reported by the Board

I, sebagaimana laporan Direksi Perseroan kepada Bapepam-LK berturut-turut melalui surat bernomor: S.2011.393/DIR COMPLIANCE tanggal 27 Juli 2011 dan nomor: S.2012.012/DIR COMPLIANCE tanggal 9 Januari 2012.

of Directors to Bapepam-LK consecutively by mail numbered: S.2011.393 / DIR COMPLIANCE dated 27 July 2011 and No: S.2012.012/DIR COMPLIANCE dated 9 January 2012.

Hasil Keputusan RUPST - Agenda kedua:

1. Menyetujui pencadangan biaya sebelum laba bersih sebesar Rp14.628.336.000,- (empat belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk digunakan sebagai pemberian bonus bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta menyetujui pelaksanaan pembagian diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi termasuk penetapan besarnya bonus maupun pembagiannya diantara mereka, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi/keputusan dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang telah disahkan sebesar Rp668.962.617.320,- (enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk:
 - a. Sebesar Rp66.896.261.732,- (enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh satu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai "Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
 - b. Sebesar Rp602.066.355.588,- (enam ratus dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.
3. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham dari laba bersih tahun buku 2011.

Hasil Keputusan RUPST - Agenda ketiga:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam-LK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2012; dan

Result of AGMS Decision – Second agenda:

1. Approved reserve of fund before net income of Rp14,628,336,000,- (fourteen billion six hundred twenty eight million three hundred thirty six thousand rupiah) to be used as bonus for the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as approved the distribution between each member of Board of Commissioners and Board of Directors include determine amount of the bonus and distribution between them, carried out with regard to the recommendation/decision of the Remuneration and Nomination Committee of the Company.
2. Approved the allocation of BII's net profit that had been endorsed amounted to of Rp668,962,617,320,- (six hundred sixty eight billion nine hundred sixty two million six hundred seventeen thousand three hundred twenty rupiah) for:
 - a. General Reserves amounting to Rp66,896,261,732,- (sixty six billion eight hundred ninety six million two hundred sixty one thousand seven hundred thirty two rupiah) to comply with the provision of Article 70 paragraph 1 Limited Liabilities Company Act and Article 25 of Articles of Association
 - b. The Company's Retained Earnings amounting to Rp602,066,355,588 (six hundred two billion sixty six million three hundred fifty five thousand five hundred eighty eight rupiah).
3. Agreed not to distribute dividends to shareholders from net profit of fiscal year 2011.

Result of AGMS Decision – Third agenda:

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to:
 - a. Appoint a Public Accountant registered at Bapepam-LK and officially affiliated with one of the world's biggest public accounting firms to audit the financial statements for fiscal year 2012; and

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

- b. Menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan RUPST - Agenda Keempat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2012.

Hasil Keputusan RUPST - Agenda Kelima:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2012 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2012.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2012 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2012.

Hasil Keputusan RUPST - Agenda Keenam:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya RUPST, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.

- b. Setting the honorarium for the Public Accountant Firm as well as other requirements in relations to the appointment of the Public Accountant Firm.
2. Authorized the Board of Commissioners and the Board of Directors to take necessary actions in relation to the appointment of Public Accountants Firm in accordance to the prevailing regulations.

Result of AGMS Decision – Fourth agenda:

1. Approved the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine the honorarium and/or other benefits for Board of Commissioners for the fiscal year 2012 with due observance to advice and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company. The amount of honorarium and/or other benefits determined for members of the Board of Commissioners will be published in the Company's 2012 Annual Report.

Result of AGMS Decision – Fifth agenda:

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other allowances for members of the Board of Directors for the 2012 fiscal year with due observance to the advice and recommendation of Remuneration and Nomination Committee. Salary and/or other benefits determined for members of the Board of Directors will be published in BII's 2012 Annual Report.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other allowances for members of the Sharia Supervisory Board for the fiscal year 2012 with due observance to advice and recommendation of Remuneration and Nomination Committee. Salary and/or other benefits determined for members of the Sharia Supervisory Board will be published in BII's 2012 Annual Report.

Result of AGMS Decision – Sixth agenda:

1. Approved to dismiss with honour all members of the Board of Commissioners and Directors due to the end of their term of office as of the closure of AGMS, along with gratitude for their services so far for the growth of the Company.

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

2. Approved to reappoint members of the Board of Commissioners, with the following composition:

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris President Commissioner
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Komisaris Commissioner
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris Commissioner
4	Putu Antara	Komisaris Independen Independent Commissioner
5	Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner
6	Taswin Zakaria	Komisaris Independen Independent Commissioner
7	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner

Dan juga menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

And also approve to reappoint members of the Board of Directors of the Company, with the following composition:

Direksi | Board of Directors

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Dato' Khairussaleh Bin Ramli	Presiden Direktur President Director
2	Rahardja Alimhamzah	Direktur Director
3	Ghazali Bin Mohd Rasad	Direktur Director
4	Thilagavathy Nadason	Direktur Director
5	Stephen Liestyo	Direktur Director
6	Rita Mirasari	Direktur yang membawahkan Kepatuhan dan Corporate Secretary Director of Compliance and Corporate Secretary
7	Hedy Maria Helena Lopian	Direktur Director
8	Jenny Wiriyanto	Direktur Director
9	Ani Pangestu	Direktur Director

Keseluruhannya diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2015, satu dan lain hal dilakukan dengan tetap memberlakukan ketentuan dalam kontrak kerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tersebut dengan Perseroan.

The whole is appointed for the term of office commencing from the closing of this AGMS until the adjournment of the AGMS in 2015, while enacting the employment contract of each member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company.

3. Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi selama masa jabatan Direksi tersebut akan ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

3. Approved that the distribution of duties and authorities between the Board of Directors during the term of office will be determined by the Board of Directors itself via Board of Directors' Decree.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Menerima laporan Direksi tentang pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2015, dengan susunan sebagai berikut:
4. Agree to delegate authority and proxy to the Board of Directors of the Company to restate and/or reaffirmed in a notarial deed (including making amendments and/or additions) such changes on Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, and to provide authority and power to the Directors of the Company with substitution right to the notary to register, obtain acceptance of notification/ seek for approval from the competent authority, and therefore also entitle to submit letters and other documents;
In brief, all necessary act in accordance with prevailing regulations.
 5. Received the Directors report on the appointment of members of Audit Committee of the Company for a term commencing from the closing of this AGMS until the AGMS in 2015, with the following composition:

Anggota Komite Audit | Audit Committee Member

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota Chairman
2	Putu Antara	Anggota Member
3	Spencer Lee Tien Chye	Anggota Member
4	Agus Kretarto	Anggota Member
5	Nina Diyanti Anwar	Anggota Member

Hasil Keputusan RUPST - Agenda Ketujuh:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan usaha Syariah Perseroan.
 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
1. Approved and dismissed with honour all members of the Company's Sharia Supervisory Board due to the end of their term of office as of the closure of the AGMS, along with gratitude for their services so far for the growth of the Sharia business of the Company.
 2. Approved to reappoint members of the Company's Sharia Supervisory Board, with the following composition:

Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Dr. M. Anwar Ibrahim, MA	Ketua Chairman
2	Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi, SH, MM	Anggota Member
3	Dr. Abdul Jabar Majid MA	Anggota Member

Keseluruhannya diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2015.

- Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan/mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang bilamana hal tersebut dipersyaratkan dan karenanya berhak pula untuk mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

All is appointed for the term of office commencing from the closing of this AGMS until the adjournment of the AGMS in 2015.

- Agree to delegate authority and proxy to Board of Directors of the Company to restate and/or reaffirm in a notarial deed (including making amendments and/or additions) the changes on Sharia Supervisory Board of the Company, and to provide authority and power to the Directors of the Company with right to substitute before the Notary to register, obtaining acceptance notification/seek approval from the competent authority, and therefore also entitled to submit letters and other documents; in brief, all necessary acts in accordance with prevailing regulations.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) Kamis, 19 April 2012
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGM) Thursday, 19 April 2012**

A. Proses Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Hasil RUPSLB 19 April 2012

RUPSLB 19 April 2012 diselenggarakan bersamaan dengan RUPST. Proses pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan dan pelaporan hasil RUPSLB telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. Notifications, Announcements, Invitations and Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders Process 19 April 2012

The EGMS was held on 19 April 2012 along with the AGMS. The process of notification, announcement, invitations and reporting the results of the EGMS has been implemented in accordance with prevailing regulations.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Pemberitahuan Notification	Pengumuman (Iklan Pemberitahuan) Announcement	Pemanggilan Invitation	Hasil Resolution
RUPSLB - 19 April 2012 EGMS - 19 April 2012			
<p>12 Maret 2012 Surat pemberitahuan ke Bapepam-LK, IDX (Surat No.S.2012.128/Dir Compliance) 12 March 2012 Notification Letter to Bapepam-LK (Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency), IDX</p> <p>Paling lambat 7 hari kalender sebelum tanggal pemberitahuan di surat kabar. At the latest 7 (seven) days before publication on newspaper.</p> <p>Peraturan No. IX.I.1 tentang Rencana Pelaksanaan RUPS. Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17-01-1996 Regulation no IX.I.1 concerning GMS implementation plan, attachment of Bapepam decision No. Kep-60/PM/1996 Dated on 17-01-1996</p>	<p>20 Maret 2012 Pemberitahuan melalui "Harian Ekonomi Neraca" dan "Investor Daily". 20 March 2012 publication on daily newspapers "Harian Ekonomi Neraca" and "Investor Daily"</p> <p>Minimal 14 hari kalender sebelum panggilan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal panggilan. At least 14 calendar days before invitation date excluding notification and invitation dates.</p> <p>(Pasal 11.2 Anggaran Dasar BII) (Articles 11.2 of BII's Articles of Association)</p>	<p>4 April 2012 Panggilan melalui "Harian Ekonomi Neraca" dan "Investor Daily". 4 April 2012 Invitations were placed in daily newspapers "Harian Ekonomi Neraca" and "Investor Daily".</p> <p>Minimal 14 hari kalender sebelum RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB. At least 14 calendar days before EGMS excluding invitation and EGMS dates.</p> <p>(Pasal 11.3 Anggaran Dasar BII) (Articles 11.3 of BII's Articles of Association)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 23 April 2012 Hasil RUPSLB dilaporkan kepada Bapepam-LK, IDX 23 April 2012 Resolutions from the EGMS are reported to Bapepam-LK, IDX <p>Paling lambat 2 hari kerja setelah RUPSLB. At the latest 2 (two) working days after AGMS</p> <ul style="list-style-type: none"> 23 April 2012 Hasil RUPSLB disampaikan melalui Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily. 23 April 2012 The EGMS resolutions were published through daily newspapers Harian Ekonomi and Investor Daily <p>Paling lambat 2 hari kerja setelah RUPSLB. At the latest 2 (two) working days after EGMS</p>

B. Lokasi dan Kehadiran RUPSLB 19 April 2012

RUPSLB dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012, bertempat di Function Room, Gedung Sentral Senayan III, Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham perseroan dan/atau kuasanya yang diwakili sejumlah 54.791.022.435 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima) saham atau sama dengan 97,35% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh lima persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal 3 April 2012, yaitu total 56.281.990.760 (lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan RUPSLB telah terpenuhi.

C. Agenda RUPSLB 19 April 2012

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Venue and Attendance of EGM 19 April 2012

The EGMS was held on Thursday, 19 April 2012, at the Function Room, Sentral Senayan Building III, 28th Floor, Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

The EGMS was attended by the shareholders of the company and/or their proxies who represented 54,791,022,435 (fifty-four billion, seven hundred ninety-one million, twenty two thousand, four hundred and thirty five) or 97.35% (ninety-seven point thirty-five percent) of the total shares with valid voting rights, which have been issued by the company up to 3 April 2012, with a total of 56.281.990.760 (fifty-six billion, two hundred eighty-one million, nine hundred ninety thousand, seven hundred and sixty) shares issued by the company. Therefore, the quorum requirement to conduct of the EGMS has been fulfilled.

C. Agenda of EGM on 19 April 2012

Amendment on the Article of Association of the Company.

D. Hasil Keputusan RUPSLB 19 April 2012

1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 15.8 dan Pasal 18 ayat 18.6 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan prosedur pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris beranggotakan para professional yang berpengalaman dalam industri perbankan.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik GCG yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), serta Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu bertindak secara independen termasuk pemberian saran atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

A. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2012, anggota Dewan Komisaris BII berjumlah 7 (tujuh) orang, termasuk Presiden Komisaris.

Jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yaitu 9 (sembilan) orang.

Susunan selengkapnya sebagai berikut:

	Jabatan	Nama Name	Position
1	Presiden Komisaris	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor *)	President Commissioner
2	Komisaris	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar *)	Commissioner
3	Komisaris	Spencer Lee Tien Chye *)	Commissioner
4	Komisaris Independen	Putu Antara **)	Independent Commissioner
5	Komisaris Independen	Umar Juoro **)	Independent Commissioner
6	Komisaris Independen	Taswin Zakaria **)	Independent Commissioner
7	Komisaris Independen	Budhi Dyah Sitawati **)	Independent Commissioner

Keterangan | Note:

*) Anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing, kewarganegaraan Malaysia dan tidak berdomisili di Indonesia.
Member of the Board of Commissioners, foreign worker, Malaysian Citizen and not domiciled in Indonesia.

**) Anggota Dewan Komisaris kewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
Member of the Board of Commissioners, Indonesian Citizen and domiciled in Indonesia

D. Results of EGM Decision 19 April 2012

1. Approve the amendment to Article 15, paragraph 15.8 and Article 18 paragraph 18.6 of Articles of Association of the Company regarding to resignation procedures of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

The Board of Commissioners (BOC)

BOC consists of experienced professionals in the banking industry.

BOC committed to implement good and transparent GCG practices as well as the ethical and moral principles.

BOC has clear authority and responsibility in accordance to the Articles of Association which refers to Limited Liabilities Company Law, the regulations of Bank Indonesia, the provisions of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK), as well as the Guidelines and Rule of Conduct of the Board of Commissioners.

BOC performs the monitoring function on the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors by acting independently including and providing advice on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.

A. Number, Composition & Criteria of the Board of Commissioners

As of 31 December 2012, BOC of BII has 7 (seven) members, including the President Commissioner.

The total BOC members is less than the Board of Directors members which is 9 (nine) people.

The full composition as follows:

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Jumlah, komposisi dan kriteria Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris BII dipimpin oleh Presiden Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia berjumlah 4 (empat) orang.
3. Lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia, yaitu dari 7 (tujuh) orang anggota Dewan Komisaris, 4 (empat) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Asing (warga negara Malaysia).
4. Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
5. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan Bank Indonesia.

The number, composition, and criteria of BOC have complied with the regulation of Bank Indonesia, as follows:

1. BOC of BII is chaired by a President Commissioner.
2. 4 (four) members of BOC are domiciled in Indonesia.
3. More than 50% (fifty percent) of BOC members are Indonesian, ie from 7 (seven) members of BOC, 4 (four) are Indonesian and 3 (three) are foreigners (Malaysian citizens).
4. Members of BOC have passed the Fit and Proper Test.
5. Replacement and/or appointment of a Commissioner have considered recommendations of the Remuneration and Nomination Committee as well as approved by the GMS and Bank Indonesia.

Dewan Komisaris Berkewarganegaraan Asing

Description of the Foreign Citizen Member of the Board of Commissioners

No	Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	KITAS		IMTA		Jabatan Position
			Ijin Kerja Licence	Masa Berlaku Validity	No. Ijin Licence	Masa Berlaku Validity	
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor *)	Malaysia	Tidak dipersyaratkan untuk memiliki KITAS karena tidak berdomisili di Indonesia KITAS is not required since they are do not reside in Indonesia		KEP.14959/MEN/P/IMTA/2012	13 July 2013	Presiden Komisaris President Commissioner
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar *)	Malaysia			KEP.14958/MEN/P/IMTA/2012	10 August 2013	Komisaris Commissioner
3	Spencer Lee Tien Chye *)	Malaysia			KEP.14960/MEN/P/IMTA/2012	19 August 2013	Komisaris Commissioner

B. Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Independensi dan aspek Transparansi Dewan Komisaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan pribadi dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

B. Independency and Transparency of the Board of Commissioners

Independency and transparency aspect of BOC is as stated in the personal statement letter signed by each member of BOC.

Anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta pemegang saham pengendali Bank.

Lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dari 7 (tujuh) orang Anggota Dewan Komisaris, 4 (empat) orang adalah Komisaris Independen yaitu Putu Antara, Umar Juoro, Taswin Zakaria dan Budhi Dyah Sitawati.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau dengan pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya dengan BII, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Member of BOC does not have family relationships with others, up to the second degree and/or the Board of Directors as well as controlling shareholders of the Bank.

More than 50% (fifty percent) of the number of members of BOC are independent commissioners. Out of 7 (seven) members of BOC, 4 (four) are Independent Commissioner, namely Putu Antara, Umar Juoro, Taswin Zakaria and Budhi Dyah Sitawati.

Independent Commissioner is a member of BOC who do not have financial, management, ownership and/or family relationship with other BOC members, the Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationships with BII, that would affect their ability to act independently.

Members of BOC did not take advantage of the Bank for personal, family, and/or other parties purposes that may harm or reduce the profit of the Bank.

Members of the BOC do not take and/or receive personal advantage from the Bank other than the remuneration and other facilities set forth by the GMS.

Transparansi Hubungan Keluarga | Family Relationship Transparency

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Lainnya Other Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	-	v	-	v	-	v
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	-	v	-	v	-	v
3	Spencer Lee Tien Chye	-	v	-	v	-	v
4	Putu Antara	-	v	-	v	-	v
5	Umar Juoro	-	v	-	v	-	v
6	Taswin Zakaria	-	v	-	v	-	v
7	Budhi Dyah Sitawati	-	v	-	v	-	v

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Transparansi Hubungan Keuangan | Financial Relationship Transparency

No	Nama Name	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Lainnya Other Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	-	v	-	v	v	-
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	-	v	-	v	v	-
3	Spencer Lee Tien Chye	-	v	-	v	v	-
4	Putu Antara	-	v	-	v	-	v
5	Umar Juoro	-	v	-	v	-	v
6	Taswin Zakaria	-	v	-	v	-	v
7	Budhi Dyah Sitawati	-	v	-	v	-	v

Transparansi Kepemilikan Saham

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham jika mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor baik pada BII, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Shareholding Transparency

Members of BOC shall disclose their share ownership if reaching 5% (five percent) or more, either at the BII, other Banks, Non Bank Financial Institutions, and other companies, located both on shore or off shore. Disclosure can be seen in the table below:

Transparansi Kepemilikan Saham | Shareholding Transparency

No	Nama Name	Perusahaan Lainnya Other Company	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Company	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
3	Spencer Lee Tien Chye	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
4	Putu Antara	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
5	Umar Juoro	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	
6	Taswin Zakaria	Tidak ada None	Tidak ada None	Pan Pacific Insurance, Jakarta	5%
				Equatorial Capital, Jakarta, Singapore	50%
7	Budhi Dyah Sitawati	PT Lintas Jeram Nusantara, Jakarta	Tidak ada None	Tidak ada None	25%
		PT Bangkit Maju Wisata, Purwokerto			55%
		PT Apsara Selaras Investa, Jakarta			25%
		PT Bravo Outdoor Supplies & Services, Jakarta			25%

Transparansi Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perusahaan Dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi

Dewan Komisaris tidak menjadi pengurus pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Relationship and Supervision Transparency Between The Company and Subsidiaries and its Affiliated Companies

None of the members of Board of Commissioners is in charge of management in the Subsidiary and Affiliated Companies as listed in the table below:

No	Nama Name	BANK	WOM	BII FINANCE
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	PK	-	-
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	K	-	-
3	Spencer Lee Tien Chye	K	-	-
4	Putu Antara	KI	-	-
5	Umar Juoro	KI	-	-
6	Taswin Zakaria	KI	-	-
7	Budhi Dyah Sitawati	KI	-	-

Keterangan | Note:

PK - Presiden Komisaris | President Commissioner; **KI** - Komisaris Independen | Independent Commissioner; **K** - Komisaris | Commissioners; **WOM**: PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

C. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

C. Concurrent Position of the Board of Commissioners

All members of BOC do not have concurrent position except for the matters that have been allowed by Bank Indonesia Regulation concerning of implementation of Good Corporate Governance.

Concurrent Position of BOC as listed in the table below:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris | Concurrent Position of the Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Perusahaan/ Organisasi/Lembaga Lain Position at Other Companies/ Organization/ Institution	Perusahaan/Organisasi/ Lembaga Lain Company/Organization/ Other Institution
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris President Commissioner	Direktur Director	ICLIF Leadership and Governance Center, Malaysia
			Ketua Chairman	Malayan Banking Berhad, Malaysia
			Ketua Chairman	Maybank Investment Bank Berhad
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Komisaris Commissioner	President & CEO	Malayan Banking Berhad, Malaysia
			Non-Executive Director	Mayban Ageas Holdings Berhad, Malaysia
			Non-Executive Director	Maybank Investment Bank Berhad

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris | Concurrent Position of the Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position	Jabatan di Perusahaan/ Organisasi/Lembaga Lain Position at Other Companies/ Organization/ Institution	Perusahaan/Organisasi/ Lembaga Lain Company/Organization/ Other Institution
			Non-Executive Director	Cagamas Holdings Berhad, Malaysia
			Council Representative/ Chairman	Association of Banks in Malaysia
			Non-Executive/ Chairman	Malaysian Electronic Payment System Sdn Bhd
			Council Member/Vice Chairman	Institute of Bankers Malaysia
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris Commissioner	Non-Executive	Maybank Philippines Incorporated, Philippines
			Non-Executive Director	Boardroom Limited, Singapore
			Non-Executive	Maybank (Cambodia) Plc.
4	Putu Antara	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
5	Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	Senior Fellow	The Habibie Center
			Ketua	Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)
			Anggota	Komite Ekonomi Nasional (KEN)
			Senior Research Fellow	Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore
6	Taswin Zakaria **)	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris	PT Jasa Angkasa Semesta (JAS),Tbk.
7	Budhi Dyah Sitawati **)	Komisaris Independen Independent Commissioner	Technical Adviser	PT Prima Wahana Caraka (PwC – Tax, Indonesia)

D. Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

D. Appointment and Term of Office the Board of Commissioners

Replacement and/or appointment of member of BOC has considered recommendations of the Remuneration and Nomination Committee as well as approved by the GMS.

Pengangkatan dan Masa Jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Term of Office for each member of BOC is as follows:

Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris | Appointment and Term of Office of the BOC

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Persetujuan Approval Date		Masa Jabatan s/d Tenure until
			RUPS GMS	Bank Indonesia	
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris President Commissioner	28 January 2010	1 April 2010	RUPST 2015
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Komisaris Commissioner	01 December 2008	12 March 2009	RUPST 2015
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris Commissioner	01 December 2008	20 February 2009	RUPST 2015
4	Putu Antara	Komisaris Independen Independent Commissioner	05 September 2002	22 October 2002	RUPST 2015
5	Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	05 September 2002	07 November 2002	RUPST 2015
6	Taswin Zakaria	Komisaris Independen Independent Commissioner	16 December 2003	31 March 2004	RUPST 2015
7	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	27 August 2010	1 April 2011	RUPST 2015

E. Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan baik melalui rapat Dewan Komisaris maupun secara tertulis terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan Direksi dalam hal sebagai berikut:
 - a. Untuk membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.
 - b. Untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan hak barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, tidak termasuk penjualan eks agunan dalam rangka penyelamatan piutang.
 - c. Untuk membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/mengagunkan kekayaan milik Bank.

E. Authorities of the Board of Commissioners

BOC has the authority as governed in the Articles of Association of the Company including the following:

1. BOC has the authority to give approval through BOC meeting or written approval to actions which will be carried out by the Board of Directors:
 - a. To purchase or in other manner, to obtain immovable goods (rights over land and/or buildings) and/or company(ies), which is not for the purpose of asset restructuring.
 - b. To sell or, in other manner, to transfer rights of immovable goods (rights over land and/or buildings) and/or company(ies), which is not for the purpose of asset restructuring.
 - c. To put lien/mortgage over land (security rights), to pledge or by other manner to put lien/mortgage assets of the Company as collateral.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

- d. Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan baik sebagian atau seluruhnya dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Bank dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris.
 - f. Untuk melakukan Transaksi Valuta Asing (Foreign Exchange) dan derivative yang berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan Bank-Bank baik di dalam maupun di luar negeri, dimana Bank harus menandatangani perjanjian seperti ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) atau perjanjian lain yang setara.
 - g. Untuk meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Bank dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris, kecuali ketentuan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan Dewan Komisaris.
 - h. Mengeluarkan surat jaminan bank atau dengan cara lain menjadi penjamin (borg) atau avalis untuk menjamin pembayaran hutang atau kewajiban keuangan orang/pihak Lain.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.
 3. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya untuk selanjutnya, dalam jangka waktu 45 hari kalender atau jangka waktu lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. To subscribe or to participate or to relinquish either a part or the entire shares of a company or other bodies/agencies or incorporate new companies which are not within the framework of asset restructuring, in accordance to the prevailing laws and regulations.
 - e. To borrow money or to receive credit facilities or other banking facilities which are not the Bank's daily activities in the amount as determined from time to time by the BOC Meeting, unless the applicable laws require to do so.
 - f. To conduct Foreign Exchange Transactions and derivatives in the form of interest rate or foreign exchange again with Banks both on shore and off-shore, where Bank have to sign agreements, such as ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) or other similar contracts.
 - g. To lend money or to provide loan/credit facilities or other banking facilities which is not bank's daily activities in the amount as determined from time to time by BOC Meeting, unless the applicable laws require to do so.
 - h. To issue letter of guarantee or by other means/manner to be a guarantor or avalist to guarantee debt payment or other persons/parties financial obligation.
2. In carrying out its duties, BOC is entitled to obtain expert assistance for a limited period of time.
 3. Based on BOC meeting decision, BOC has the right to temporarily discharge member of the Board of Directors in case of Director acts contrary to the Articles of Association and/ or the prevailing laws and regulations. This temporary discharge should notified to the relevanted director along with the reason of the discharge within a period of 45 (forty five) calendar days or other period stipulated by the prevailing laws.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
6. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala, melalui pemberian arahan, nasihat maupun meminta pertanggungjawaban Direksi dalam setiap keputusan yang diambil. Pengawasan tersebut dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yang diwujudkan melalui:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

F. Duties and Responsibilities of The Board of Commissioners

1. BOC is responsible for the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors on a regular basis, through the provision of directives, advice or requesting Directors accountability for each decision made. Supervision is carried out, among others, through regular meetings between BOC and the Board of Directors or reports submitted by SKAI, Audit Committee, Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee, Compliance Director or any other written communication.
2. In performing its duties and responsibilities, BOC must actively ensure the implementation of GCG principles in each of the Bank's business activities at all organization levels which include:
 - a. Implementation of duties and responsibilities of the BOC and Board of Directors;
 - b. Completeness and implementation of committee and working unit who manage the Bank's internal control function;
 - c. Implementation of compliance, internal and external audit functions;
 - d. Implementation of risk management, including the internal control system;

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - f. Rencana strategis Bank;
 - g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 5. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah menjalankan tugasnya secara efektif, dimana tugas dan tanggung jawabnya akan diuraikan secara khusus dalam laporan ini.
 6. Pengangkatan anggota komite telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
 7. Dewan Komisaris berkewajiban memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 8. Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan oleh otoritas lainnya.
 9. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan mekanisme rapat yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja.
 10. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- e. Provision of funds for related parties and large exposures;
 - f. The Bank strategic plan;
 - g. Transparency of the Banks' financial and non-financial conditions.
3. BOC gives direction, monitors and evaluates the implementation of the Bank's strategic policy.
 4. BOC is not involved in the decision making process of Bank's operational activities, except in the provision of funds to related parties, or other matters set forth in the Articles of Association and/or legislation in force in order to carry out the oversight function.
 5. BOC has established Audit Committee, Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee, which have effectively carried out their duties, whose duties and responsibilities will be specifically described in this report.
 6. Appointment of committee members has been made by the Board of Directors based on decisions reached at BOC meeting.
 7. BOC shall notify Bank Indonesia at the latest 7 (seven) working days after found:
 - a. Violations in financial and banking regulations; and
 - b. Situations that probably threaten the Bank's business sustainability.
 8. Through the Audit Committee, BOC ensures that the Board of Directors has followed up audit findings and recommendations from SKAI, external auditors, Bank Indonesia and/or examination by other regulators.
 9. BOC already has guidance and working rules that include work ethics, work time and meeting mechanisms used as parameters in assessing performance.
 10. BOC has provided sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

G. Pengungkapan Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur Penetapan Remunerasi dilaksanakan sebagai berikut:



G. Disclosures on Remuneration Procedure

The procedure for Remuneration is as follows:

H. Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai salah satu tolak ukur penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris, setiap tahun anggota Dewan Komisaris melakukan *Board self assessment* untuk mengukur kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris maupun kinerja anggota Dewan Komisaris lain.

Parameter yang dijadikan acuan dalam melakukan penilaian *self assessment* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi, Keahlian dan Pengalaman
Pengungkapan kualifikasi profesional, pengalaman, keahlian, segmen industry, dan efektivitas komite-komite yang ada di BII maupun Dewan Komisaris di dalam rapat.
2. Rencana Strategis
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam strategi pengembangan dan kinerja Perusahaan
3. Manajemen Risiko
Keterlibatan Dewan Komisaris dalam melakukan kajian terhadap manajemen risiko, *Compliance* dan pengendalian risiko
4. Pemantauan Kinerja Manajemen (KPI Direksi)
Keterlibatan dalam memantau kinerja Direksi dan kebijakan strategis bank dalam menjalankan bisnis selama satu tahun.

H. Assessment of the Performance of the Board of Commissioners

As one of the assessment parameters on BOC performance, each year BOC conducts Board self assessment to measure the performance of each members of BOC and the performance of the other members of the BOC.

Parameters used as a reference in performing the self assessment include the following:

1. Competence, Expertise, and Experience
Disclosure of professional qualifications, experience, expertise, industry segment, and the effectiveness of existing committees in the bank as well as Board of Commissioners and level of attendance in the meetings.
2. Strategic Plan
Board of Commissioners' involvement in development strategy and corporate performance
3. Risk Management
Board of Commissioners' involvement in conducting review on risk management, compliance, and risk control
4. Monitoring Management Performance (KPI of the Board of Directors)
Involvement in performance monitoring of the Directors and Bank's strategic policy in conducting business during the year.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

5. Lainnya

Informasi terkait dengan tingkat kehadiran, efektivitas tindak lanjut permasalahan yang ada, akses pada Dewan Komisaris/Direksi maupun komite-komite yang ada, kecukupan/akurasi data yang digunakan oleh Dewan Komisaris dalam memantau kinerja serta penatausahaan administrasi aktivitas Dewan Komisaris

Hasil dari *self assessment* tersebut menjadi salah satu parameter dalam penetapan/pengangkatan anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme tata kelola Perusahaan.

5. Others

Information related to the level of attendance, effectiveness of following-up issues, access to the Board of Commissioners/Board of Directors and existing committees, data adequacy/accuracy used by BOC in performance monitoring and administration of the Board of Commissioners' activities.

The results of the self assessment will be used as one of reference in the establishment/appointment of members of BOC through the corporate governance mechanism.

I. Remunerasi untuk Setiap Anggota Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi & Nominasi.

I. Remuneration for Each Member of the Board of Commissioners

The amount of salary or honorarium or remuneration and/or allowances for members of BOC is set by the GMS taking into account the recommendations of the Remuneration & Nomination Committee.

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris untuk 2012

Package/Policy of Remuneration and Other Facilities for BOC in 2012

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type or Remuneration and other Facility	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun **) Total amount received in 1 year				
		Dewan Komisaris Board of Commissioners				
		Orang Members	2012 Jutaan Rupiah Million Rupiah	2011 Jutaan Rupiah Million Rupiah		
1	- Honorarium	7	9,552	9,548		
	- Tantiem		3,280	3,408		
	- Tunjangan		-	-		
	Remunerasi bruto (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Gross remuneration (salary, bonus, regular benefit, bonus and other benefits in the form of non natura)		12,832	12,956		
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, kesehatan dan sebagainya) yang *) : Other benefits in the forms of natura (housing, transportation, health and so on) that:	7	441	316		
	a. dapat dimiliki be held				-	-
	b. tidak dapat dimiliki can not be held				-	-

Keterangan | Notes:

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah | In Rupiah Equivalent

***) Sebelum dipotong pajak | Before tax deduction

Jumlah Anggota Dewan Komisaris yang Menerima Paket Remunerasi dalam 1 Tahun dikelompokan kisaran tingkat penghasilan
Board of Commissioners Members Receiving Remuneration Package within 1 year grouped in a range of income level

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun *) Remuneration per member within one year	Jumlah Komisaris Number of Commissioner
Di atas Rp2 miliar More than Rp2 billion	2
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Between Rp1 billion and Rp2 Billion	5
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Between Rp500 million and Rp. 1 billion	-
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	-

Keterangan | Notes:

*) Yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak (bruto) | Net received before tax deducted

J. Rapat Dewan Komisaris

1. Frekuensi Rapat

Selama 2012, Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sebanyak 11 (sebelas) kali yang dihadiri secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi, dimana 8 (delapan) kali rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.

Dengan demikian dalam penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG.

2. Tingkat Kehadiran

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama 2012 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Direksi turut menghadiri rapat Dewan Komisaris untuk agenda pembahasan yang terkait bidang tugasnya.

J. Board of Commissioners Meeting

1. Meeting Frekuensi

During 2012, BOC already held 11 (eleven) meetings both direct meeting or through teleconference, including 8 (eight) meetings that were physically attended by all members of BOC or through teleconference.

Thus, BOC meeting frequency has met Bank Indonesia Regulation concerning of implementation of GCG.

2. Attendance

The attendance of Board of Commissioners' members meeting during 2012 can be seen in the table below. The board of Directors will also attend the meetings if the meeting agenda is related to their area of responsibility.

Rapat Dewan Komisaris 2012 | Board of Commissioners Meetings 2012

No	Nama Name	Jabatan Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance	Berhalangan Absent
			27 January	21 February	30 March	20 April	30 April	25 May	22 June	27 July	28 September	29 October	3 December			
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Presiden Komisaris President Commissioner	√	*)	√	√	*)	√	√	√	√	√	√	11	11	-
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Komisaris Commissioner	√	*)	√	*)	*)	*)	√	√	√	√	√	11	11	-
3	Spencer Lee Tien Chye	Komisaris Commissioner	√	√	√	√	*)	√	√	X	X	√	√	11	9	2
4	Putu Antara	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11	11	-

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Rapat Dewan Komisaris 2012 | Board of Commissioners Meetings 2012

No	Nama Name	Jabatan Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Frekuensi Frequency	Kehadiran Attendance	Berhalangan Absent
			27 January	21 February	30 March	20 April	30 April	25 May	22 June	27 July	28 September	29 October	3 December			
5	Umar Juoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	√	11	10	1
6	Taswin Zakaria	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11	11	-
7	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11	11	-

Keterangan | Notes:

√ : Hadir | Present

X : Absen | Absent

*) : Melalui teknologi telekonferensi | Participated through teleconference (conference call)

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta tidak pernah ada perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris.

Dengan demikian dalam hal pengambilan keputusan serta dokumentasi hasil rapat Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia terkait GCG.

4. Agenda Rapat

Dewan Komisaris memiliki Agenda Rapat Dewan Komisaris secara tahunan. Materi yang akan dibahas dalam Agenda Rapat Dewan Komisaris dapat disesuaikan berdasarkan masukan di Rapat Dewan Komisaris secara bulanan.

3. Decision Making Mechanism

Decision making in meetings of BOC has been made based on consensus agreement. All decisions of BOC shall be binding for all members of the Board of Commissioners.

The resolutions of BOC meeting have been set forth in the minutes of meetings, well documented, and there was no dissenting opinions that occurred during the meetings of BOC.

Therefore, all decision making processes and documentation of meetings of BOC have complied with Bank Indonesia regulations concerning of implementation of GCG.

4. Meeting Agenda

BOC has an annual Agenda of Board of Commissioners meetings. Issues which will be discussed in BOC Meeting Agenda can be customized based on the input of monthly meetings of BOC.

Beberapa hal penting yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris selama 2012 sebagai berikut:

Several important items which is discussion in the BOC meeting in 2012 is as follows:

Agenda Utama Rapat Dewan Komisaris 2012 | Main agenda the Board of Commissioners Meetings 2012

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Utama Rapat Dewan Komisaris Main Agenda of the Board of Commissioners Meetings
27 January 2012	No. 01/KOM/01.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 20 December 2011 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 20 December 2011 3. Update on the external audit for the year ended 31 December 2011 4. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for December'11 5. WOM Update 6. Branch Opening Update 7. Report from Chairmen of the Committees 8. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2012
21 February 2012	No.02/KOM/02.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. BII's Audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2011
30 March 2012	No. 04/KOM/03.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 24 February 2012 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 24 February 2012 3. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for February'12 4. AGMS & EGMS 2012 5. GCG & Annual Report 6. Corporate Responsibility Update 7. Report from Chairman of Committees 8. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2012 9. Others
20 April 2012	No. 05/KOM/04.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 30 March 2012 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 30 March 2012 3. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for March'12 4. BNM CRR Update 5. Report from Chairmen of the Committees 6. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2012
30 April 2012	No. 06/KOM/04.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. BII's Financial Statements for three-month period ended 31 March 2012
25 May 2012	No. 07/KOM/05.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 20 April 2012 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 20 April 2012 3. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for April'12 4. Operation Update 5. BOC and BOD Manual 6. Human Capital 7. Report from Chairman of the Committees 8. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2012
22 June 2012	No. 08/KOM/06.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 25 May 2012 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 25 May 2012 3. Setting a fresh strategic direction for BII 4. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for May'12 5. Revised Rencana Bisnis Bank (RBB) 2012 to Bank Indonesia 6. Treasury 7. Report from Chairmen of Committees 8. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2012

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Agenda Utama Rapat Dewan Komisaris 2012 | Main agenda the Board of Commissioners Meetings 2012

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Utama Rapat Dewan Komisaris Main Agenda of the Board of Commissioners Meetings
27 July 2012	No. 09/KOM/07.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 22 June 2012 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 22 June 2012 3. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for June'12 4. Long Form Financial Statements & BI Publication Report 5. Transforming to Become the Leading Relationship Bank in Indonesia by 2015 Update 6. Basel II Progress Update 7. E-Channel Update 8. Human Capital 9. Global Wholesale Banking Update 10. Compliance Effectiveness Report 11. BNM CRR Update 12. Report from Chairmen of Committees 13. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2012
28 September 2012	No. 10/KOM/09.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 27 July 2012 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 27 July 2012 3. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for June'12 4. SME Banking Update 5. Preliminary Review of AOP 2013 6. Human Capital 7. Data Centre Relocation Project 8. Report from Chairmen of Committees 9. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2012
29 October 2012	No. 11/KOM/10.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 28 September 2012 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 28 September 2012 3. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for September 2012 4. Long Form Financial Statements & BI Publication Report 5. Annual Operating Plan 2013 6. Consumer Banking Update 7. Branch Opening and Sales & Distribution Update 8. Internal Audit Plan 2013 9. Report from Chairmen of Committees 10. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2012 11. Others – RBBR/GCG Monthly Update
03 December 2012	No. 12/KOM/12.2012 <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of BOC Meeting held on 29 October 2012 2. Matters Arising from the Minutes of BOC Meeting held on 29 October 2012 3. CEO Update & Review of Group Overall Financial Performance for October 2012 4. BNM Composite Risk Rating Update 5. Anti Money Laundering & Anti Fraud Strategy 6. Report from Chairmen of Committees 7. BOC Annual Outline Agenda for the Year 2013 8. Other Matters: A. New Regulations of Bank Indonesia

K. Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pelatihan
Selama 2012, training & pelatihan yang telah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

K. Participation of BOC in Training
During 2011, BOC participated in various training programs as detailed below:

Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pelatihan 2012 | Participation of Board of Commissioners in Training 2012

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar Training/Seminar	Waktu & Tempat Pelaksanaan Date & Venue
1	Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin bin Megat Mohd Nor	Invest Malaysia 2012	29 - 30 Mei 2012 Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
		International Monetary Conference (IMC)	4 - 5 Juni 2012 The Grand Hotel, Stockholm, Sweden
		Ageas Partnership Days	11 - 12 Juni 2012 Marmara Taksim Hotel, Istanbul, Turkey
		Risk Management Training – in preparation for the BI Risk Management Examination	21 Juni 2012 Mercantile Athletic Club, WTC Building, Jakarta, Indonesia
		Khazanah Megatrends 2012	1 - 2 Oktober 2012 Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
		PNB Nominee Director's Luncheon & Executive Luncheon Talk 2012	9 Oktober 2012 KL Hilton Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
2	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	-	-
3	Spencer Lee Tien Chye	-	-
4	Putu Antara	Kongres PERBANAS	31 Oktober 2012 The Ritz Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia
		Risk Masterclass Workshop	8 - 9 November 2012 Sentral Senayan 3, Lt. 28, Jakarta, Indonesia
5	Umar Juoro	Seminar FKDKP	26 April 2012 The Hotel Sunan, Solo, Indonesia
		Kongres PERBANAS	31 Oktober 2012 The Ritz Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia
		Risk Masterclass workshop	8 - 9 November 2012 Sentral Senayan 3, Lt. 28, Jakarta, Indonesia
		Seminar Evolution of Banking Supervision	11 - 14 Desember 2012 Paris, Perancis
6	Taswin Zakaria	Kongres PERBANAS	31 Oktober 2012 The Ritz Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia
		Risk Masterclass workshop	8 - 9 November 2012 Sentral Senayan 3, Lt. 28, Jakarta, Indonesia
7	Budhi Dyah Sitawati	Kongres PERBANAS	31 Oktober 2012 The Ritz Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia
		Risk Masterclass workshop	8 - 9 November 2012 Sentral Senayan 3, Lt. 28, Jakarta, Indonesia
		Seminar IKAI	6 Desember 2012 Pomelotel Patra Kuningan, Jakarta, Indonesia

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

L. Rekomendasi Dewan Komisaris di tahun 2012

Dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya terkait dengan pelaksanaan atas pengendalian internal Perseroan, Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan serta rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris maupun pembahasan dalam Komite yang membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi maupun Komite Pemantau Risiko.

Berikut disampaikan ringkasan hasil rekomendasi serta masukan penting Dewan Komisaris selama tahun 2012:

1. Arahan dalam penetapan strategi bisnis Perseroan hingga tahun 2015.
2. Dalam rangka pengelolaan anak perusahaan, BOC memberikan masukan atas hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Direksi dalam rangka pengelolaan anak perusahaan, serta memberikan rekomendasi atas opsi pengembangan kinerja anak perusahaan.
3. Memberikan arahan masukan untuk mendukung pengembangan Perbankan Konsumer.
4. Memberikan saran untuk mempertimbangkan pengembangan platform TI berskala regional.
5. Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia, BOC memberikan saran terhadap produktivitas karyawan, perhatian yang lebih besar atas tingkat atrisi karyawan, serta program pengembangan karyawan berbakat.
6. Dalam rangka mendukung ekspansi bisnis Perseroan, BOC memberikan persetujuan terhadap rencana korporasi Perseroan sepanjang tahun 2012, yaitu penerbitan obligasi sub-ordinasi Berkelanjutan I Tahap II. Persetujuan untuk tidak membagikan dividen atas laba tahun 2011 guna memperkuat struktur permodalan Bank.
7. Dalam rangka memastikan pemenuhan *Good Corporate Governance*, BOC melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas Laporan GCG Perseroan Tahun 2011, Rencana Bisnis Bank Tahun 2012 dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2012, Rencana Bisnis Bank Tahun 2013, Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 31 Maret 2012, Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2012 dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Periode yang berakhir pada 30 September 2012.

L. BOC Recommendations in 2012

In implementing the supervisory function particularly related to the implementation of the Company's internal control, BOC actively provides input and recommendations through discussions at the meetings of BOC as well as discussions in the Committees which assists in smoothing supervising duty of BOC namely the Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee as well as Risk Oversight Committee.

The following is the summary of the recommendations as well as important guidance from BOC in 2012:

1. Provided direction on Company's business strategy until 2015.
2. Relating to supervision of subsidiaries, BOC provided advice on issues which need attention from Directors in terms of subsidiaries supervision, as well as provide recommendations about subsidiaries performance enhancement.
3. Provided direction to support the development of Consumer Banking.
4. Providing advice to consider the development of a regional scale IT platform.
5. With regard to Human Resources Development, BOC provided advice on employee productivity, greater attention on employee attrition rate and talented employee development programs.
6. In order to support the business expansion, BOC gave approvals to corporate actions during 2012, such as the issuance of the Sustainable sub-ordinated bonds I Phase II. approval for not distributing dividends on earnings in 2011 to strengthen the capital structure of the Bank.
7. In order to ensure compliance with Good Corporate Governance, BOC conduct evaluations and approve the 2011 Corporate Governance Report, 2012 Bank's Business Plan and Revision of the 2012 Bank's Business Plan, 2013 Bank's Business Plan, Consolidated Financial Statements for the period ended 31 March 2012, Consolidated Financial Statements for the Period ended 30 June 2012 and Consolidated Financial Statements for the Period ended 30 September 2012.

Laporan Komite Audit

Audit Committee Report

Komite Audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pengawasan sesuai dengan prinsip GCG, terutama berkaitan dengan audit, kepatuhan, kualitas dan transparansi informasi keuangan/akuntansi.

A. Dasar Pembentukan Komite Audit

1. Peraturan Bapepam-LK No IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 .
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 beserta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.
3. Pedoman GCG dan Piagam Komite Audit BII.

B. Susunan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit

1. Pengangkatan
Komite Audit yang ada diangkat berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2012 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2012.01/DIR COMPLIANCE tanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Audit Periode 2012-2015.
2. Persyaratan, Susunan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit
 - a. Anggota Komite Audit berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris serta 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan Perbankan.
 - b. Lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

The Audit Committee is a committee established by the Board of Commissioners to assist the supervisory function in accordance with the principles of GCG, particularly in relation to the audit, compliance, the quality and transparency of financial/accounting information.

A. The Audit Committee is established by virtue of

1. BAPEPAM-LK Regulation No.IX.I.5 regarding Establishment and Guidelines of Audit Committees, which is an attachment of the Decree of Chairman of BAPEPAM-LK No.Kep-29/PM/2004 dated September 24, 2004 as amended by the Decree of Chairman of BAPEPAM-LK No.Kep-643/BL/2012 dated December 7, 2012.
2. Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 as amended by Bank Indonesia Regulation No.8/14/2006 dated October 5, 2006 and Bank Indonesia Circular Letter No.9/12/DPNP dated May 30, 2007 regarding Implementation of GCG for Commercial Banks.
3. BII GCG Manual and Audit Committee Charter.

B. Composition, Expertise and Independence of The Audit Committee Members

1. The Appointment
The current Audit Committee was appointed based on the Board of Commissioners' meeting resolution dated April 19, 2012 which was further stipulated by the Board of Directors' Decree No. SK.2012.01/DIR COMPLIANCE dated April 19, 2012 regarding Stipulation of Composition of the Audit Committee Members for the period of 2012-2015.
2. The Audit Committee Members Requirements, Composition, Expertise and Independency
 - a. The Audit Committee members consist of 5 (five) persons, which comprise an Independent Commissioner as the Chairman, an Independent Commissioner, a Commissioner and 2 (two) Independent Parties who have expertise in Accounting and Banking.
 - b. More than 51% (fifty one percent) of the Audit Committee member are Independent Commissioners and Independent Parties.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

- c. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal ini juga dinyatakan dalam 'Surat Pernyataan Independensi Komite Audit dari masing-masing anggota Komite Audit tanggal 19 April 2012.
- d. Tidak ada Anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit.
- e. Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit dapat dilihat pada Bab Data Perusahaan bagian Profil Komite Audit dalam buku Laporan Tahunan ini.

Dengan demikian persyaratan, susunan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit BII telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

- c. Audit Committee members have no financial, management, share ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or Controlling Shareholders, or relationship with the Bank, which could affect their ability to act independently. It is also stated in the 'Statement of the Audit Committee Independence' of each member of the Audit Committee on 19 April 2012.
- d. No member of the Board of Directors member serves as an Audit Committee Member.
- e. All of the Audit Committee Members have integrity, good characters and good morals.

Summary profile of the Audit Committee Members can be found in this Annual Report Corporate Data, Audit Committee Profile section.

As such, the terms and composition, expertise and independency criteria of the Audit Committee members comply with the provisions of Bank Indonesia and BAPEPAM-LK.

Susunan Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 19 April 2012 Composition of The Audit Committee up to April 19, 2012

No	Nama Name	Posisi Di Dalam Komite Position in Committee	Keterangan Note
1	Taswin Zakaria	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Budhi Dyah Sitawati	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	Spencer Lee Tien Chye	Anggota Member	Komisaris Commissioner
4	Hadi Indraprasta	Anggota Member	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Perbankan Independent Party, with expertise in Finance and Banking
5	Setiawan Kriswanto	Anggota merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif Member and Executive Secretary	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Akuntansi Independent Party with expertise in Finance and Accounting

Susunan Anggota Komite Audit sejak 19 April 2012 | Composition of The Audit Committee since April 19, 2012

No	Nama Name	Posisi Di Dalam Komite Position in Committee	Keterangan Note
1	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Putu Antara	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	Spencer Lee Tien Chye	Anggota Member	Komisaris Commissioner
4	Agus Kretarto	Anggota Member	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan Perbankan Independent Party, with expertise in Accounting and Banking
5	Nina Diyanti Anwar	Anggota merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif Member and Executive Secretary	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan Perbankan Independent Party with expertise in Accounting and Banking

Independensi Anggota Komite Audit | Independency of Members of the Audit Committee

Kriteria Independensi	BDS	PA	SL	AK	NDA	Independency Criteria
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	v	Does not have share holding relationship with any members of Boards of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect their ability to act independently.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	x	v	v	Does not have financial relationship with any members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect their ability to act independently.
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	x	v	v	Does not have management relationship with any members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect their ability to act independently.
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	v	Does not have family relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect their ability to act independently.

Keterangan | Description:

BDS : Budhi Dyah Sitawati; **PA** : Putu Antara; **SL** : Spencer Lee Tien Chye; **AK** : Agus Kretarto; **NDA** : Nina Diyanti Anwar

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

3. Periode Jabatan Anggota Komite Audit

- a. Periode jabatan anggota Komite Audit tidak ada yang lebih lama dari periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Masa jabatan anggota Komite Audit tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite, atau tidak lagi bekerja untuk Bank, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan untuk mengubah susunan keanggotaan komite (yang mana yang lebih dahulu).

C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit bertanggung jawab untuk memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Tugas Utama Komite Audit meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunannya.
2. Menelaah kualitas dan transparansi informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, termasuk menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
4. Melakukan penelaahan berkala terhadap Piagam Audit Intern, rencana kerja audit intern dan pelaksanaannya oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

3. Terms of Office of The Audit Committee Members

- a. The terms of office of the Audit Committee members shall not be longer than the term of office of that of the Board of Commissioners member and can be appointed again only for the next period.
- b. The terms of office of the Audit Committee members are until the closure of Annual General Meeting of Shareholders held in year 2015, except if a member withdraws from the Committee or resigns from the Bank, or when the Board of Commissioners decides to change the composition of the Audit Committee (whichever comes first).

C. Duties and Responsibilities of The Audit Committee

Based on the Audit Committee Charter, the Audit Committee is responsible for providing professional and independent opinions to the Board of Commissioners of the reports or other matters submitted by the Board of Directors as well as identifying issues that require the attention of the Board of Commissioners.

Main duties of the Audit Committee are as follows:

1. To prepare annual activity plan.
2. To review the quality and transparency of financial information that will be issued by the Bank such as financial reports, projections and other financial information, including assessing compliance with applicable accounting standards.
3. To review the Bank's compliance with the laws and regulations in the capital market legislation and other regulations related to the activities of the Bank.
4. To regularly review the Internal Audit Charter, work plans and implementation of internal audit by the Internal Audit Unit (SKAI).

5. Memberi masukan dalam proses pemilihan Auditor Ekstern (Auditor Independen) dengan menelaah independensi dan objektivitas, kualitas pelayanan serta kewajaran biaya yang diajukan oleh Auditor Ekstern.
 6. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak-lanjut hasil pemeriksaan SKAI, Auditor Ekstern, Bank Indonesia, serta auditor lainnya (BNM).
 7. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank dan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank serta adanya potensi benturan kepentingan.
5. To provide input in the selection process of an External Auditor (Independent Auditor) by reviewing the independence and objectivity, quality of services and the reasonableness of fee submitted by the External Auditor.
 6. To review and monitor the follow-up results of SKAI, the External Auditor, Bank Indonesia, as well as other auditor (BNM).
 7. To review complaints to the Bank and the Bank's accounting and financial reporting as well as any potential conflicts of interest.

D. Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

1. Frekuensi Rapat Komite Audit
Selama 2012, Komite Audit menyelenggarakan 16 (enam belas) kali rapat, yang terdiri dari rapat Komite Audit dengan SKAI & Internal Audit Committee, Auditor Eksternal, Unit kerja Finance & Accounting maupun dengan unit kerja terkait lainnya seperti unit kerja Kepatuhan dan unit kerja Anti Fraud.

Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan hanya dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Pengambilan keputusan pada rapat komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.

2. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

D. Meetings Frequency and Attendance of The Audit Committee

1. Frequency Of the Audit Committee Meetings
During 2012, the Audit Committee held 16 (sixteen) meetings, which consist of the Audit Committee meetings with SKAI & the Internal Audit Committee, the External Auditor, the Finance & Accounting Department as well as with other related units such as the Compliance and Anti-Fraud unit.

Audit Committee meetings were held in accordance with the needs of the Bank and only conducted if attended by at least 51% (fifty one percent) of the committee members, including an Independent Commissioner and an Independent Party.

Decision makings in the committee meetings were by consensus or by voting.

2. Attendance list of Audit Committee members on Audit Committee Meetings is as follows:

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Komite Audit 2012

Frequency of Meetings And Meeting Attendance of The Audit Committee

No	Anggota Komite Audit The Audit Committee Member	Rapat Dengan Meeting with	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jumlah Rapat Number of Each type of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance
			17 January	26 January	21 February	22 February	29 March	19 April	26 April	24 May	20 June	19 July	26 July	26 September	24 October	25 October	29 November		
1	Taswin Zakaria	SKAI	-	v	-	v	v	v	Keanggotaan sebagai anggota Komite Audit berakhir pada 19 April 2012									4	6
		FAD	v	-	v	-	-	-	Position as Chairman and member of Audit Committee ended on 19 April 2012									2	
		EY	-	-	-	-	-	-										-	
2	Budhi Dyah Sitawati	SKAI	-	v	-	v	v	v	-	v	v	v	-	v	v	-	v	10	16
		FAD	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	5	
		EY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	1	
3	Putu Antara	SKAI	Keanggotaan sebagai anggota Komite Audit dimulai pada 19 April 2012					-	-	v	v	v	-	v	v	-	v	6	10
		FAD	Appointment as Audit Committee member started on 19 April 2012					-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	3	
		EY						-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	1	
4	Spencer Lee Tien Chye	SKAI	-	v	-	v	v	v	-	v	v	v	-	v	v	-	v	10	13
		FAD	x	-	v	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	v	-	2	
		EY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	1	
5	Setiawan Kriswanto	SKAI	-	v	-	v	v	v	Keanggotaan sebagai anggota Komite Audit berakhir pada 19 April 2012									4	6
		FAD	v	-	v	-	-	-	Term as Audit Committee member ended on 19 April 2012									2	
		EY	-	-	-	-	-	-										-	
6	Hadi Indraprasta	SKAI	-	v	-	v	v	v	Keanggotaan sebagai anggota Komite Audit berakhir pada 19 April 2012									4	6
		FAD	v	-	v	-	-	-	Term as Audit Committee member ended on 19 April 2012									2	
		EY	-	-	-	-	-	-										-	
7	Agus Kretarto	SKAI	-	-	-	-	-	-	-	v	v	v	-	v	v	-	v	6	10
		FAD	Keanggotaan sebagai anggota Komite Audit dimulai pada 19 April 2012					-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	3	
		EY	Appointment as Audit Committee member started on 19 April 2012					-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	1	
8	Nina Diyanti Anwar	SKAI	-	-	-	-	-	-	-	v	v	v	-	v	v	-	v	6	10
		FAD	-	v	-	-	-	-	-	v	-	-	-	v	-	v	-	3	
		EY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	v	-	1	

Keterangan:

- V** : Hadir
- X** : absen
- EY** : Ernst & Young
- SKAI** : Satuan Kerja Audit Intern
- FAD** : Finance & Accounting Division
- Rapat pada tanggal 17 Januari 2012 dan 21 Februari 2012 diikuti pula oleh EY
- Rapat pada tanggal 26 April 2012 diikuti pula oleh SKAI
- Rapat pada tanggal 24 Mei , 26 September, 24 Oktober dan 29 November 2012 diikuti pula oleh IAC
- Rapat pada tanggal 20 Juni 2012 diikuti pula oleh IAC, FAD dan unit kerja Kepatuhan
- Rapat pada tanggal 26 Juli 2012 diikuti pula oleh EY
- Rapat pada tanggal 25 Oktober 2012 diikuti pula oleh SKAI

Descriptions:

- V** : Present
- X** : Absent
- EY** : Ernst & Young
- SKAI** : Satuan Kerja Audit Intern
- FAD** : Finance & Accounting Division
- Meetings on 17 January and 21 February 2012 were also attended by EY
- Meeting on 26 April 2012 was also attended by SKAI
- Meetings on 24 May, 26 September, 24 October and 29 November 2012 were also attended by IAC
- Meeting on 20 June 2012 was also attended by IAC, FAD and Compliance unit
- Meeting on 26 July 2012 was also attended by EY
- Meeting on 25 October 2012 was also attended by SKAI

Semua rapat memenuhi persyaratan kuorum. Hasil rapat Komite Audit dilaporkan oleh Ketua Komite kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.

All of the meetings met the quorum requirement. The resolutions of the Audit Committee meetings were reported by the Chairman of the Committee to the Board of Commissioners.

3. Agenda Rapat Komite Audit
Agenda Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

3. Audit Committee Meeting Agenda
Below are the Audit Committee Meetings Agendas during 2012:

Agenda Utama Rapat Komite Audit 2012 | Main Agenda of the 2012 Audit Committee Meeting

No	Tanggal Rapat Komite Audit Date of the Audit Committee Meeting	Agenda Utama Rapat Komite Audit	Main Agenda of Audit Committee Meeting
1	17 January 2012	Penelaahan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2011	Review of Financial Statements for year ended December 31, 2011
2	26 January 2012	Temuan audit IT, Pengembangan Audit Rating baru, KPI untuk SKAI dan Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 15 Januari 2012	IT Audit Findings, Development of new audit rating, SKAI's KPI and Internal Audit Reports up to Jan 15, 2012,
3	21 February 2012	Diskusi atas Laporan Keuangan 31 Desember 2011	Discussion on Financial Statements for year ended December 31, 2011
4	22 February 2012	Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 13 Februari 2012	Internal Audit Reports up to February 13, 2012
5	29 March 2012	Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 13 Maret 2012	Internal Audit Reports up to March 13, 2012
6	19 April 2012	Penyesuaian Annual Operating Plan (AOP) 2012 dan Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 9 April 2012	Rolling Forecast of AOP 2012, and Internal Audit Reports up to April 9, 2012
7	26 April 2012	Penelaahan atas Laporan Keuangan 31 Maret 2012	Review of Financial Statements as of March 31, 2012
8	24 May 2012	Trend pada Post Approval Review dan Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 7 Mei 2012	Post Approval Review Trend and Internal Audit Reports s up to May 7, 2012
9	20 June 2012	Implikasi Revisi Standar Akuntansi, Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 6 Juni 2012 dan tindak lanjutnya termasuk atas hasil audit Bank Negara Malaysia (BNM).	Implications of the Revised Accounting Standards, Internal Audit Reports up to June 6, 2012 and the follow up including on BNM audit result.
10	19 July 2012	Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 3 Juli 2012 dan tindak lanjutnya oleh manajemen dan IAC, serta Peninjauan AOP 2012	Internal Audit Reports up to July 3, 2012 and the follow up by management and IAC, and AOP 2012 Rolling Forecast
11	26 July 2012	Penelaahan atas Laporan Keuangan 30 Juni 2012	Review of Financial Statements as of June 30, 2012

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Agenda Utama Rapat Komite Audit 2012 | Main Agenda of the 2012 Audit Committee Meeting

No	Tanggal Rapat Komite Audit Date of the Audit Committee Meeting	Agenda Utama Rapat Komite Audit	Main Agenda of Audit Committee Meeting
12	26 September 2012	Tindak lanjut Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 15 Agustus 2012, Update diskusi dengan BI, Pengembangan ROCAM, dan pengkinian informasi oleh Unit Anti Fraud	Follow up of Internal Audit Reports up to August 15, 2012, Update on Discussion with BI, Development of ROCAM, dan update by the Anti Fraud Unit
13	24 October 2012	Evaluasi GCG, AOP 2013 dan tindak lanjut Laporan-laporan Internal Audit sampai tanggal 30 September 2012	Evaluation on GCG, AOP of 2013, and follow up of Internal Audit Reports up to September 30, 2012
14	25 October 2012	Penelaahan atas Laporan Keuangan 30 September 2012	Review of Financial Statements as of September 30, 2012
15	25 October 2012	Rapat Awal untuk audit umum tahun buku 2012 oleh Auditor Independen	Kick-off meeting for general audit 2012 by Independent Auditor
16	29 November 2012	Tindak lanjut laporan-laporan Internal Audit sampai 31 Oktober 2012, KPI SKAI tahun 2013, dan update tentang Corrective Action Tracking System (CATS)	Follow up of Internal Audit Reports up to October 31, 2012, SKAI's KPI for 2013, and CATS (Corrective Action Tracking System) update

E. Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Selama 2012, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya sebagai berikut:

E. Brief Report of the Audit Committee Activities

In 2012, the Audit Committee carried out activities in accordance with its duties and responsibilities. This can be seen through the committee's work program and its realization as follows:

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit | Brief Report of the Audit Committee Activities

No	Program Kerja 2012	2012 Work Program	Realisasi	Realization
1	Melakukan review dan membahas laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan yang akan dipublikasikan	To review and discuss on quarter, half year, and annual financial statements prior to publications	Mereview Laporan Keuangan triwulan 1, 2, 3 dan 4 (tahunan) yang akan dipublikasikan, melalui rapat dengan Direktur Keuangan, Divisi Akuntansi & Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik (Auditor Independen).	Reviewed BII's Financial Statements for quarter 1, 2, 3, and 4 (annual) prior to publication, through meetings with Director of Finance, Finance & Accounting Division and/or Public Accounting Firm (Independent Auditor)
2	Turut serta dalam proses pemilihan Auditor Independen tahun buku 2012	To be involved in the process of selecting the Bank's independent auditor for year 2012	Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kembali Purwantono, Suherman & Surja (Anggota Ernst & Young Global) untuk melakukan review atas laporan Keuangan 30 Juni 2012 serta melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2012.	Audit Committee evaluated and submitted recommendations to BOC on the re-appoint of KAP Purwantono, Suherman & Surja (Member of Ernst & Young Global) to provide review on half year financial statements as of June 30, 2012 and general audit service on Financial Statements for 2012 fiscal year.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit | Brief Report of the Audit Committee Activities

No	Program Kerja 2012	2012 Work Program	Realisasi	Realization
3	Melakukan review atas penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan membantu Dewan Komisaris dalam penyusunan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis	To review the drafting of Bank's Business Plan and assist the Board of Commissioners in preparing its oversight report	Melakukan review atas Rencana Bisnis Bank dan membantu Dewan Komisaris menyiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis semester II tahun 2011 dan semester I tahun 2012 untuk disampaikan kepada BI.	Reviewed the Bank's Business Plan and assisted the BOC in preparing the "Business Plan Supervisory Report" for semester II of 2011 and semester I of 2012 to be submitted to BI.
4	Melakukan evaluasi atas rencana kerja SKAI, efektivitas fungsi audit, dan mereview laporan & membahas hasil audit SKAI	To evaluate SKAI annual audit plans, the effectiveness of audit function, to review SKAI report and discuss the audit results	Mengevaluasi rencana audit tahun 2012 sebelum diketahui oleh Dewan Komisaris; melakukan review dan pembahasan dengan SKAI atas hasil auditnya.	Evaluated 2012 SKAI audit plan before submission to the BOC for acknowledgment; reviewed and discussed with SKAI regarding their Audit reports.
5	Memantau tindak lanjut Manajemen atas rekomendasi dari hasil audit Bank Indonesia, Audit Eksternal dan SKAI	To monitor the management's follow up on recommendations made by BI, External Auditor, and SKAI	Membahas dengan SKAI & Internal Audit Committee atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Eksternal dan Internal serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi BI	Conducted discussions with SKAI & Internal Audit Committee to follow up recommendations from external and internal auditors and also monitored the follow up on BI's recommendations

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Lembar Persetujuan Laporan Komite Audit Approval Sheet Audit Committee Report



Budhi Dyah Sitawati

Ketua merangkap Anggota (Komisaris Independen)
Chairman and Member (Independent Commissioner)



Putu Antara

Anggota (Komisaris Independen)
Member (Independent Commissioner)



Spencer Lee Tien Chye

Anggota (Komisaris)
Member (Commissioner)



Agus Kretarto

Anggota
(Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang
Akuntansi dan Perbankan)
Member
(Independent Party, with expertise in Accounting and
Banking)



Nina Diyanti Anwar

Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota
(Pihak Independen, yang memiliki keahlian
di bidang Akuntansi dan Perbankan)
Executive Secretary and Member
(Independent Party, with expertise in Accounting and
Banking)

Laporan Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee Report

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

A. Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

1. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 beserta Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.
2. Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

B. Susunan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Pengangkatan
Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko yang ada adalah berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2012 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2012.002/DIR COMPLIANCE tanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Periode 2012 – 2015.
2. Susunan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko
 - a. Anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua, 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
 - b. Lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - c. Seluruh Pihak Independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

The Risk Oversight Committee is a committee established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory duties and functions particularly in addressing issues relating to implementation of risk management policy.

A. The Risk Oversight Committee is established by virtue of:

1. Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 further confirmed by Circular Letter of Bank Indonesia. No 9/12/DPNP dated May 30, 2007 regarding GCG implementation in Commercial Banks.
2. The Risk Oversight Committee Charter.

B. Composition, Expertise and Independence of Risk Oversight Committee Members

1. The Appointment
The appointment of Risk Oversight Committee Members was based on the Board of Commissioners meeting held on April 19, 2012 and further stipulated by Board of Directors' Decree No. SK.2012.002/DIR COMPLIANCE dated April 19, 2012 regarding the Stipulation of Risk Oversight Committee Composition for the Period of 2012-2015.
2. The Risk Oversight Committee Members Composition, Expertise and Independence
 - a. The Risk Oversight Committee members consist of 7 (seven) persons, that comprise of an Independent Commissioner as the Chairman, 3 (three) Independent Commissioners, 1 (one) Commissioner, an Independent Party who has expertise in Finance and 1 (one) Independent Party who has expertise in Risk Management.
 - b. More than 51% (fifty one percent) of Risk Oversight Committee members are Independent Commissioners and Independent Parties.
 - c. None of the ROC members (Independent Commissioners and Independent Parties) has financial, management, share ownership and/or family relationship with

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

- dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Tidak ada Anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
 - e. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab Data Perusahaan bagian Profil Risk Oversight Committee dalam buku Laporan Tahunan ini.

Dengan demikian Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan persyaratan, susunan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite.

the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the bank, as this relationship may affect their ability to act independently in performing its duties.

- d. No member of the Board of Directors serves as a member of the Risk Oversight Committee.
- e. All members of the Risk Oversight Committee have integrity, morals and good characters.

Brief profiles of each member of the Risk Oversight Committee can be found in this Annual Report's Corporate Data, Risk Oversight Committee Profile Section.

As such, The Risk Oversight Committee structure, membership composition, expertise and independency criteria comply with Bank Indonesia Regulations.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko | Composition of The Risk Oversight Committee

No	Nama Name	Posisi Di Dalam Komite Position in Committee	Keterangan Note
1	Taswin Zakaria	Ketua merangkap Anggota Chairman and Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Putu Antara	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	Umar Juoro	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
4	Spencer Lee Tien Chye	Anggota Member	Komisaris Commissioner
5	Budhi Dyah Sitawati	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
6	Farid Harianto	Anggota Member	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko Independent Party, with expertise in Risk Management
7	Agus Kretarto	Anggota merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif Member and Executive Secretary	Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang Keuangan/Akuntansi Independent Party with expertise in Finance/ Accounting

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko Independency of Members of The Risk Oversight Committee

Kriteria Independensi	TZ	PA	UJ	BDS	SL	FH	AK	Independency Criteria
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	v	v	v	Does not have share ownership relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	x	v	v	Does not have financial relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	x	v	v	Does not have management relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v	v	v	v	v	v	v	Does not have family relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.

Keterangan | Description:

TZ : Taswin Zakaria; **PA** : Putu Antara; **UJ** : Umar Juoro; **BDS** : Budhi Dyah Sitawati; **SL** : Spencer Lee Tien Chye; **FH** : Farid Harianto; **AK** : Agus Kretarto

3. Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko
 - a. Periode jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak ada yang lebih panjang dari periode jabatan anggota Dewan Komisaris.
 - b. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015, kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite, atau tidak lagi bekerja untuk Bank, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan untuk mengubah susunan keanggotaan komite (yang mana yang lebih dahulu).
3. Term of Offices of The Risk Oversight Committee Members
 - a. The term of office of the Risk Oversight Committee member shall not be longer than the term of office of that of the Board of Commissioners member.
 - b. Terms of offices of the Risk Oversight Committee members are until the closure of Annual General Meeting of Shareholders held in year 2015, except if a member withdraws from the Committee or resigns from the Bank, or when the Board of Commissioners decides to change the composition of the Risk Oversight Committee (whichever comes first).

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

C. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan mengkaji kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk dipresentasikan dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris:
 - a. Kerangka dan kebijakan Manajemen Risiko Bank
 - b. Kebijakan serta limit treasury dan Financial Institution
 - c. Kebijakan kredit
 - d. Kebijakan di bidang risiko operasional termasuk Teknologi Informasi
 - e. Kebijakan di bidang risiko likuiditas
 - f. Kebijakan di bidang risiko pasar
2. Melakukan review dan menilai kebijakan dan prosedur untuk melaksanakan program stress testing, dan mereview efektivitas program stress testing.
3. Mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan manajemen risiko dengan kebijakan manajemen risikonya.
4. Mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian serta kesesuaian terhadap kerangka kerja kebijakan dan sistem pengendalian yang dibangun oleh unit-unit terkait.
5. Melakukan review atas Rencana Bisnis Bank sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit-unit Manajemen Risiko.
7. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan informasi pemantauan risiko dan pelaksanaan tanggung jawabnya.
8. Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris ataupun Anggota Komite Pemantau Risiko.

D. Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat resmi selama tahun 2012.
2. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

C. Duties And Responsibilities Of The Risk Oversight Committee

Under the Risk Oversight Committee Charter, the duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee include:

1. Evaluating and reviewing risk management strategies and policies before they are submitted to the Board of Commissioners for approval:
 - a. Bank Risk Management framework and policy
 - b. Treasury and Financial Institution limits and policies
 - c. Credit policy
 - d. Policies of operational risk, including Information Technology
 - e. Policies in liquidity risk
 - f. Policies in market risk
2. Conducting reviews and assessments on policies and procedures for stress testing programs, and reviewing the stress testing program effectiveness.
3. Evaluating compliance of risk management implementation with risk management policy.
4. Evaluating compliance to the prudential principles policy framework and control systems pre-established by relevant units.
5. Conducting review on the Bank's Business Plan before submission to the Board of Commissioners for approval.
6. Overseeing and evaluating the performance of the Risk Management Committee and Risk Management units.
7. Providing advice to the Board of Commissioners with regards to risk oversight information and the Board's performance responsibilities.
8. Other issues deemed necessary by the Board of Commissioners and the Risk Oversight Committee.

D. Frequency Of Meetings And Meeting Attendance Of The Risk Oversight Committee

1. The Risk Oversight Committee held 10 (ten) formal meetings during 2012.
2. Attendance of Members of the Risk Oversight Committee Meeting is presented in the table below:

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko Frequency of Meetings And Meeting Attendance of The Risk Oversight Committee

No	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee Member	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Jumlah Rapat Total Meetings
		26 January	22 February	29 March	18 April	24 May	21 June	19 July	26 September	24 October	29 November		
1	Taswin Zakaria	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	10	10
2	Putu Antara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	10	10
3	Umar Juoro	v	v	v	x	v	x	v	v	v	v	10	8
4	Spencer Lee Tien Chye	v	v	v	v	v	x	v	x	v	v	10	8
5	Budhi Dyah Sitawati	v	v	v	v	v	v	x	v	v	v	10	9
6	Farid Harianto	x	x	v	v	v	v	v	x	v	v	10	7
7	Agus Kretarto	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	10	10

Descriptions | Keterangan :

V : Hadir | Present X : absen | Absent

Semua rapat memenuhi persyaratan quorum. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dilaporkan oleh Ketua Komite kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris yang pada umumnya diselenggarakan satu hari kerja setelah Rapat Komite Pemantau Risiko.

All of the meetings met the quorum requirement. The resolutions of the Risk Oversight Committee meetings were reported by the Chairman of the Committee to the Board of Commissioners one working day after each of Risk Oversight Committee Meetings

E. Laporan Singkat Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Kegiatan Komite Pemantau Risiko selama 2012 secara ringkas dapat diuraikan melalui rapat-rapat sebagai berikut:

E. Brief Report of the Risk Oversight Committee Activities

Brief summary of the Risk Oversight Committee activities during 2012 is described through meetings below:

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Brief Report of the Risk Oversight Committee Activities

No	Tanggal Date	Pembahasan Utama	Main Agenda
1	26 January	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko kredit, semua segmen: konsumsi, SME, komersial, korporasi, WOM & BIIF. b). Risiko pasar & likuiditas. c). Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal. d). Enterprise Risk Dashboard (ERD) dan Risk Exception Report (RER). e). Risk Heat Map(RHM). f). Peringkat Risiko Komposit BNM. g). Rencana Pendidikan tahun 2012. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk, all segments: consumer, SME, commercial, corporate, WOM & BIIF. b). Market & liquidity risks. c). Internal Capital Adequacy Assessment Process. d). Enterprise Risk Dashboard (ERD)and Risk Exception Report (RER). e). Risk Heat Map(RHM). f). BNM Composite Risk Rating. g). Learning Plan 2012
2	22 February	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko kredit: semua segmen, WOM & BIIF b). Risiko pasar & likuiditas. c). ERD & RER. d). Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko dan Profil Risiko. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk, all segments, WOM & BIIF b). Market & liquidity risks. c). ERD & RER. d). Risk Based Bank Rating (RBBR) & Risk Profile.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Brief Report of the Risk Oversight Committee Activities

No	Tanggal Date	Pembahasan Utama	Main Agenda
3	29 March	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko kredit : semua segmen, WOM & BIIF. b). Risiko pasar & likuiditas. c). ERD & RER. d). Kebijakan kredit. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk : all segments, WOM & BIIF. b). Market & liquidity risks. c). ERD & RER. d). Credit policy.
4	18 April	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko kredit : semua segmen, WOM & BIIF. b). Risiko pasar & likuiditas. c). Pedoman Manajemen Risiko, ERD & RHM Kuartalan. d). Update kepatuhan. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk : all segments, WOM & BIIF b). Market & liquidity risk. c). Risk Management Guideline, ERD & Quarterly RHM. d). Compliance update
5	24 May	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko Kredit: semua segmen, WOM & BIIF. b). Risiko pasar & likuiditas. c). Profil Risiko, ERD & Group Stress Test. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk: all segments, WOM & BIIF. b). Market & liquidity risks . c). Risk Profile, ERD & Group Stress Test.
6	21 June	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko kredit: semua segmen, WOM & BIIF. b). Risiko pasar & likuiditas. c). ERD. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk: all segments, WOM & BIIF. b). Market & liquidity risks. c). ERD.
7	19 July	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko kredit: semua segmen, WOM & BIIF. b). Risiko operasional ATM. c). Risiko pasar & likuiditas. d). Tingkat Kesehatan Bank, RHM & ERD. e). Profil Risiko Bisnis Syariah. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk : all segments, WOM & BIIF. b). ATM operational risk. c). Market & liquidity risks. d). Risk Based Bank Rating, RHM & ERD . e). Sharia Business Risk Profile.
8	26 September	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko kredit : semua segmen, WOM & BIIF. b). Risiko pasar & likuiditas. c). ERD. d). Structured Trade & Commodity Financing. e). Update atas komentar BI. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk: all segments & WOM & BIIF. b). Market & liquidity risks . c). ERD. d). Structured Trade & Commodity Financing. e). Update on BI's concerns.
9	24 October	<p>Pokok bahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko pasar: semua segmen, WOM & BIIF. b). Risiko pasar & likuiditas. c). ERD, RHM & Profil Risiko. d). Update tentang Teknologi Informasi. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk: all segments, WOM & BIIF. b). Market & liquidity risks. c). ERD, RHM & Risk Profile. d). Information Technology update.
10	29 November	<p>Membahas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Risiko kredit: semua segmen, 25 debitur terbesar, WOM & BIIF. b). Risiko & likuiditas pasar. c). Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran. d). Update tentang Teknologi Informasi. e). Tingkat Kesehatan Bank & GCG. 	<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Credit risk: all segments, top 25 debtors, WOM & BIIF. b). Risk & Market Liquidity. c). Payment Card Industry Data Security Standard. d). Information Technology update. e). RBBR & GCG.

Lembar Persetujuan
Laporan Pemantau Risiko
Approval Sheet
Risk Oversight Committee Report



Taswin Zakaria
Ketua (Komisaris Independen)
Chairman (Independent Commissioner)



Putu Antara
Anggota (Komisaris Independen)
Member (Independent Commissioner)



Umar Juoro
Anggota (Komisaris Independen)
Member (Independent Commissioner)



Budhi Dyah Sitawati
Anggota (Komisaris Independen)
Member (Independent Commissioner)



Spencer Lee Tien Chye
Anggota (Komisaris)
Member (Commissioner)



Farid Harianto
Member
Anggota (Pihak Independen)
Memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko
(Independent Party, with expertise in Risk
Management)



Agus Kretarto
Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota
(Pihak Independen, yang memiliki keahlian di bidang
Keuangan/Akuntansi)
Executive Secretary and Member
(Independent Party, with expertise in Finance/
Accounting)

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi

Report of the Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya hal-hal terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Remuneration and Nomination Committee is a committee at the BOC level responsible to assist in carrying out the duties and functions of supervision in particular matters relating to remuneration and nomination policies.

A. Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 beserta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG (GCG) Bagi Bank Umum.
2. Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi.

A. Basis of Remuneration and Nomination Committee Establishment

1. Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006, as amended by Bank Indonesia Regulation No.8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 along with Bank Indonesia Circular Letter No.9/12/DPNP on 30 May 2007 about the implementation of good corporate governance (GCG) for Commercial Banks.
2. Guidelines of Remuneration & Nomination Committee.

B. Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Pengangkatan
Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2012 adalah berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2012 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2012.003/DIR COMPLIANCE tanggal 19 April 2012 tentang Penetapan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 2012 – 2015.
2. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumberdaya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
 - b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BII telah ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

B. Structure and Membership of the Remuneration and Nomination

1. Appointment
Appointment of Members of the Remuneration and Nomination Committee as of December 2012 is based on the Board of Commissioners meeting on 19 April 2012 and established by Decree of No.SK.2012.002/DIR COMPLIANCE dated 19 April 2012 on the establishment of the Risk Monitoring Committee Member Composition Period 2012-2015.
2. The composition of the Nomination and Remuneration Committee Member
 - a. In accordance to the provisions of Bank Indonesia GCG, members of the Remuneration and Nomination Committee should consist of at least one Independent Commissioner as Chairman concurrently as a member, a Commissioner and an Executive Officer who oversees human resources or a representative of employees.
 - b. Members of the Remuneration and Nomination Committee has been stipulated more than 3 (three) members while the number of Independent Commissioners is at least 2 (two) people.

- c. Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.
- d. Dewan Komisaris wajib mengkaji ulang masa jabatan dan kinerja Komite dan semua anggota Komite minimal satu kali dalam satu tahun untuk menentukan apakah Komite telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
- e. Tidak ada Anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- c. The term of service of the Chairman and Members of the Committee depends on the term of service of the Commissioner and Executive Officer concerned. However, the Board has the right, from time to time, to replace them.
- d. The Board of Commissioners shall review the term of service and performance of the Committee and all members of the Committee at least once a year to determine whether the Committee has been carrying out its duties.
- e. No Member of the Board of Directors that are members of the Remuneration and Nomination Committee.
- f. All members of the Remuneration and Nomination Committee have integrity, good character and morals.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan April 2012 adalah sebagai berikut :

The composition of the Nomination and Remuneration Committee Member until April 2012, are as follow:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (Januari - April 2012)

Composition of the Remuneration and Nomination Committee (January - April 2012)

No	Name Nama	Position Jabatan	Note Keterangan
1	Umar Juoro	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Taswin Zakaria	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Anggota Member	Komisaris Commissioner
4	Prabowo Bayu Waskito	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif Member and Executive Secretary	Pejabat Eksekutif Executive Officer

Sejak tanggal 19 April 2012, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berubah menjadi sebagai berikut:

Since the 19th of April 2012, members of the Remuneration and Nomination Committee have been changed as follows:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (April – Desember 2012)

Composition of The Remuneration and Nomination Committee (April - December 2012)

No	Name Nama	Position Jabatan	Note Keterangan
1	Umar Juoro	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Budhi Dyah Sitawati ^{*)}	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner
3	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	Anggota Member	Komisaris Commissioner
4	Paulus Danang Yanri Hatmoko ^{**)}	Anggota merangkap Sekretaris Member and Secretary	Pejabat Eksekutif Executive Officer

Keterangan | Description:

^{*)} Menggantikan Taswin Zakaria efektif per 19 April 2012 | Replacing Taswin Zakaria effective per 19 April 2012

^{**)} Menggantikan Prabowo Bayu Waskito efektif per 19 April 2012 | Replacing Prabowo Bayu Waskito effective per 19 April 2012

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Riwayat singkat masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Bab Data Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

A brief profile of each member of the Remuneration and Nomination Committee can be found in this Annual Report, Chapter Corporate Data.

3. Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikansaham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Independency of Members of the Remuneration and Nomination Committee

The entire Independent Party member of Remuneration and Nomination Committee has no financial relation, management, ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Independency of Members of the Remuneration And Nomination Committee

Independency Criteria	Anggota Committee				Independency Criteria
	UJ	BDS	DSW	PDY	
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	Does not have share ownership relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	X	√	Does not have financial relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	X	√	Does not have management relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√	√	√	√	Does not have family relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or with the Bank, as this relationship may affect its independency in performing their duties.

Keterangan | Description:

UJ = Umar Juoro; BDS = Budhi Dyah Sitawati; DSW = Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar; PDY = Paulus Danang Yanri Hatmoko

√ = Benar; X = Tidak Benar

Dengan demikian Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan persyaratan, susunan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite.

Thus, the Remuneration and Nomination Committee has complied with Bank Indonesia rules regarding requirements, membership, expertise and independence of members of the Committee.

4. Kewajiban anggota Komite

Setiap anggota dari Komite wajib untuk:

- a. Menggunakan waktu yang mencukupi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan optimal.
- b. Patuh pada standar etika yang tercantum pada Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku perusahaan.

5. Pelaporan

- a. Ketua komite wajib memberikan rekomendasi komite dan melaporkan setiap perkembangan kepada Dewan Komisaris.
- b. Pada setiap akhir tahun finansial berjalan, Komite wajib untuk mengkaji ulang setiap laporan yang berkaitan dengan Komite dan laporan tersebut wajib dimasukkan dan dipublikasikan di laporan tahunan Bank.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Nominasi

- a. Mengembangkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan nominasi dan prosedur untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Komite Independen, Dewan Pengawas Syariah, dan *Executive Vice President* untuk diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk mengisi posisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu yang dinominasikan, untuk kemudian diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota Komite Independen yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
- d. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan rekomendasi dari Direksi.
- e. Mengawasi Dewan Komisaris terkait dengan jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangan (dari status independen dan non-independen).

4. Obligations of Committee Members

Each member of the Committee is obliged to:

- a. Allocate sufficient time to carry out the duties and responsibilities optimally.
- b. Comply with the ethical standards set forth in the Code of Ethics and Conduct Guidelines of the company.

5. Reporting

- a. Chairman of the committee shall provide recommendation and report of any developments to the Board of Commissioners.
- b. At the end of each running financial year, the Committee is required to review any report relating to the Committee and the report shall be included and published in the annual report of the Bank.

C. Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

1. Nominations

- a. Developing and recommending to the Board regarding policies and procedures for the appointment of nominees and/or replacement of the Board of Commissioners, Board of Directors, the Independent Committees, the Sharia Supervisory Board and Executive Vice Presidents to be submitted at the General Meeting of Shareholders.
- b. Providing recommendations regarding candidates to fill the position of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board, which is based on competence, ability, and experience of each nominated individual and then submit the recommendations to the General Meeting of Shareholders.
- c. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates to become members of the Independent Committee based on competency, ability, and experience of the nominated individuals.
- d. Reviewing and approving the appropriate candidates to serve as Executive Vice Presidents based on the recommendations of the Board of Directors.
- e. Supervising the Commissioners related to the number, competence, ability, and balance (of the status of independent and non-independent).

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

- f. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
 - g. Mengkaji kandidat-kandidat potensial untuk posisi pengganti pada nominasi President Komisaris dan President Direktur bagi anak perusahaan.
2. Remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi dari kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi Direksi, Komite Independen dan Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, untuk kemudian diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara umum, untuk kemudian diajukan kepada Direksi.
 - d. Memastikan keselarasan antara keputusan remunerasi dengan kinerja financial dan hasil pencadangan, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan kelompok yang setara, dan juga sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
 - e. Memberikan rekomendasi paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada pemegang saham mayoritas.
 - f. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepengkatan bagi Direksi.
 3. Manajemen Kinerja
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kerangka Pengelolaan Kinerja dan/atau model yang juga termasuk penentuan sasaran, kriteria keberhasilan dan juga tolok ukur bagi *scorecard* Direksi dalam tahun finansial.
 - b. Menilai dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja, pengembangan, dan keefektifan dari anggota Direksi, dan juga prosedur penilaian yang bersangkutan minimal satu kali dalam satu tahun.
- f. Assisting and/or recommending to the Board of Commissioners regarding the promotion, confirmation and termination of term of office of members of the Board of Directors.
 - g. Assessing the potential candidates for the position President Commissioners and the President Director of the subsidiary.
2. Remuneration
 - a. Conducting an evaluation of the remuneration policy and/or plans the terms and conditions of the duty for the Board of Directors, the Independent Committee and Sharia Supervisory Board.
 - b. Providing recommendations to the Board related to remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
 - c. Providing recommendations to the Board in relation to remuneration policy for Executive Officers and employees in general, to be submitted to the Board of Directors.
 - d. Ensuring alignment between remuneration decisions with financial performance and results of the backup, performance appraisal, equality with peer groups, as well as long-term goals and strategies of the Bank.
 - e. Providing recommendations of remuneration package for members of the Board of Commissioners to the majority shareholders.
 - f. Proposing and recommending to the Board of Commissioners regarding to the Board of Director rank.
 3. Performance Management
 - a. Providing recommendations to the Board of Commissioners of the Performance Management Framework and/or models that also included the determination of objectives, success criteria and benchmarks for the Board of Directors scorecard within the financial year.
 - b. Assessing and evaluating the overall performance, development, and effectiveness of the Board of Directors, as well as the relevant assessment procedures at least once a year.

- c. Melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap setiap sistem pengukuran terbaru untuk meningkatkan keefektifan dari proses penilaian kinerja bagi Direksi.
 4. Rencana Suksesi dan Pengelolaan Talent
 - a. Mengkaji proses pengelolaan Talent, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi dan juga proyek-proyek besar lainnya yang berkenaan dengan Human Capital dan/atau inisiatif untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
 - b. Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan Kerangka Pengembangan Kepemimpinan, rencana suksesi dan pengembangan bagi Dewan untuk memastikan kelanjutan dari rencana suksesi.
 - c. Memastikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Independen, Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terbaru di industri.
 - d. Mengawasi kebijakan pengembangan perusahaan untuk memastikannya sejalan dengan sasaran dan strategi keseluruhan *Human Capital*.
 5. Lain-lain
 - a. Menyetujui penunjukan konsultan eksternal dan/atau penasihat yang berkaitan dengan area tanggung jawab Komite.
 - b. Melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi untuk setiap permasalahan dan/atau konflik kepentingan yang mempengaruhi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - c. Mengimplementasikan tugas dan/atau tanggung jawab lainnya yang dibebankan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
 - d. Mengkaji proyek-proyek besar berkaitan dengan Human Capital atau inisiatif yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- c. To identify and provide recommendations on any new measurement system to enhance the effectiveness of the performance appraisal process for the Board of Directors.
 4. Succession Planning and Talent Management
 - a. Assessing Talent management processes, such as including planning and developing a succession plan for the Board of Directors as well as other major projects related to Human Capital and/or initiatives to support the implementation of the principles of Good Corporate Governance.
 - b. To monitor and to provide input to the Board of Directors related to the Leadership Development Framework, and developing succession plans for the Board to ensure the continuation of a succession plan.
 - c. Ensuring members of the Board of Commissioners, Board of Directors, the Independent Committee, the Sharia Supervisory Board in order to obtain an appropriate and sustainable development as well as keeping abreast with the latest developments in the industry.
 - d. Supervising the company's policy to ensure development in line with the overall goals and strategies of Human Capital.
 5. Others
 - a. Approving the appointment of external consultants and/or advisors related to the area of responsibility of the Committee.
 - b. To identify and make recommendations for appropriate solutions to address any issues and/or conflicts of interest that affects the Board of Commissioners and Board of Directors.
 - c. Implementing tasks and/or other responsibilities imposed by the Board of Commissioners from time to time.
 - d. Reviewing major projects related to Human Capital or initiatives which refer to the principles of Good Corporate Governance.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

D. Program Kerja Komite Remunerasi Dan Nominasi Beserta Realisasinya

Selama 2012, program kerja beserta realisasi yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:

1. Melakukan evaluasi dan review terhadap kinerja Direksi selama tahun 2011 dalam Balanced Scorecard 2011.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal kebijakan remunerasi serta pembaharuan kontrak anggota Direksi di tahun 2012.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai alokasi pembayaran bonus kinerja dan kenaikan gaji untuk karyawan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Melakukan review terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris serta pembaharuan kontrak bagi anggota Dewan Komisaris di tahun 2012.
5. Menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja terhadap penilaian kinerja bagi Direksi pada Balanced Scorecard 2012.
6. Mengevaluasi serta menetapkan kebijakan remunerasi bagi anggota komite independen di BII (Komite Audit, Komite Pengawasan Risiko, dan Dewan Pengawas Syariah).
7. Melakukan nominasi serta memberikan rekomendasi dalam pengangkatan anggota dari komite independen.
8. Melakukan nominasi serta memberikan rekomendasi calon Direktur Retail Banking kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham.

E. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Frekuensi dan Kuorum
 - a. Sesuai dengan charter komite, komite diwajibkan mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun, sesuai dengan kebutuhan Bank. Selama 2012, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah diadakan 4 (empat) kali.
 - b. Semua rapat harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

D. Remuneration and Nomination Committee's Program and Its Realization

In 2012, the work program and its realization carried out by the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. Evaluated and reviewed the performance of the Board of Directors for 2011 in the 2011 Balanced Scorecard.
2. Provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy and renewal of the Board of Directors contracts in 2012.
3. Provided recommendations to the Board of Commissioners concerning the allocation of the performance bonus payments and salary increases for employees, members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Conducted a review of the remuneration policy of the Board of Commissioners and renewal contracts for members of the Board of Commissioners in 2012.
5. Setting Performance Achievement indicators for performance assessment of the Board of Directors of the Balanced Scorecard 2012.
6. Evaluated and established the remuneration policy for the members of the independent committees in BII (Audit Committee, Risk Oversight Committee, and Sharia Supervisory Board).
7. Nominated and gave recommendations on the appointment of members of the independent committee.
8. Nominated candidates and provided recommendations for the position of Retail Banking Director, to the Board of Commissioners to be approved at the General Meeting of Shareholders.

E. Remuneration and Nomination Committee Meeting

1. Frequency and Quorum
 - a. In accordance with the charter of the committee, the committee is required to hold meetings minimum 4 (four) times a year, in accordance with the requirements of the Bank. During 2012, the Remuneration and Nomination Committee meetings were held 4 (four) times.
 - b. All meetings must be attended by at least 51% of the number of members, including 1 (one) Independent Commissioner and Executive Officers.

- c. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengadakan rapat jika ada masalah penting yang perlu segera didiskusikan dan diputuskan oleh Komite.
 2. Notifikasi
 - a. Sebelum diadakannya rapat Komite, salah satu anggota akan mengirimkan pemberitahuan tertulis untuk menginformasikan tanggal, waktu, tempat, dan objektif dari rapat tersebut. Pemberitahuan ini wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
 - b. Periode pemberian notifikasi dapat dipersingkat dalam kasus adanya kepentingan yang bersifat emergensi atau jika disetujui oleh semua anggota Komite.
 3. Agenda & Laporan
 - a. Agenda dan laporan wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dijadwalkan atau jika terjadi kasus rapat emergensi maka diberikan pada saat rapat berjalan.
 4. Metode Resolusi
 - a. Semua rapat wajib dipimpin oleh Ketua Komite.
 - b. Jika Ketua berhalangan hadir, maka anggota lainnya dalam Komite harus memilih satu anggota untuk memimpin rapat.
 - c. Keputusan yang dihasilkan dari rapat harus didapat dari persetujuan penuh. Dalam keadaan di mana persetujuan sepenuhnya tidak dapat terpenuhi maka resolusi dari Komite harus diputuskan berdasarkan suara mayoritas dari seluruh anggota.
 - d. Setiap anggota yang memiliki kepentingan pada subjek-subjek tertentu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara mereka. Jika terjadi hal tersebut, maka jumlah suara yang tidak dapat digunakan tidak akan dimasukkan ke dalam jumlah suara anggota yang sah untuk dihitung.
- c. Chairman of the Remuneration and Nomination Committee may hold meetings when there are important issues that need to be discussed and decided by the Committee.
 2. Notifications
 - a. Prior to a meeting of the Committee, one member will send a written notice to inform the date, time, place, and the objective of the meeting. This notice shall be given to each member of the Committee at least 5 (five) working days prior to the date of the meeting.
 - b. The notification period may be shortened in case of any emergencies that are of interest or if approved by all members of the Committee.
 3. Agenda & Reports
 - a. Agenda and reports required to be given to each member of the Committee at least 5 (five) working days prior to the scheduled meeting or if an emergency meeting is held, they will be given while the meeting is in progress.
 4. Resolution Methods
 - a. All meetings shall be chaired by the Chairman of the Committee.
 - b. If the Chairman is unable to attend, other members of the Committee shall elect one member to chair the meeting.
 - c. Decisions resulting from the meeting should be obtained with the full consensus. In circumstances where consensus cannot be met, then the resolution of the Committee should be decided by a majority vote of all members.
 - d. Any members who have an interest in certain subjects are not allowed to use their voting rights. If happened so, then their votes that cannot be used, will not be counted as legitimate.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

- e. Setiap rekomendasi Komite wajib diberikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- f. Spesialis dan/atau konsultan internal atau eksternal, Direksi dan karyawan lainnya dapat diundang untuk menghadiri rapat dimana kehadiran mereka dianggap layak seperti diputuskan oleh Ketua Komite.

- e. Any recommendations of the Committee shall be provided to the Board of Commissioners for approval.
- f. Specialist and/or internal or external consultants, directors and employees can be invited to attend meetings where their presence is considered appropriate as determined by the Chairman of the Committee.

5. Notulen Rapat

- a. Setiap diskusi yang terjadi pada rapat Komite didokumentasikan melalui Notulen Rapat. Notulen rapat berisikan agenda, poin-poin diskusi penting, semua keputusan yang diambil, dan pandangan yang bertentangan. Notulen ditandatangani oleh semua anggota Komite yang hadir pada rapat.
- b. Notulen Rapat wajib ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota yang hadir pada saat rapat dan disimpan sebagai catatan setelah disetujui oleh ketua dan salinan dari notulen akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite.
- c. Pendapat yang bertentangan (jika ada) wajib untuk di-dokumentasikan dengan layak dalam Notulen Rapat.

5. Minutes of Meetings

- a. Any discussions occurred at the Committee meetings are documented through minutes of meetings. Minutes of the meetings contain the agenda, important discussion points, all decisions taken, and the opposing views if any. The Minutes are signed by all members of the Committee present at the meeting.
- b. Minutes of the Meeting shall be signed by the Chairman and all the members present at the meeting and kept as a record after it is approved by the chairman and a copy of the minutes will be distributed to each member of the Committee.
- c. Opinions to the contrary (if any) required to be documented properly in the Minutes.

F. Tingkat Kehadiran Dalam Rapat

Tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat adalah sebagai berikut:

F. Meeting Attendance

Attendance of each member of the Remuneration and Nomination Committee in the meeting as follow:

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi | Risk Oversight Committee Activities Meeting

No	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Member	1	2	3	4	Total Jumlah Rapat Total Meeting
		5 March 2012	23 March 2012	24 May 2012	27 Juli 2012	
1	Umar Juoro	v	v	v	v	4
2	Taswin Zakaria	v	v	*)		2
3	Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar	v	v	v	v	4
4	Prabowo Bayu Waskito	v	v	*)		2
5	Budhi Dyah Sitawati		**)	v	v	2
6	Paulus Danang Yanri Hatmoko		**)	v	v	2

Keterangan | Description:

*) Tidak menjabat sebagai anggota Komite sejak 19 April 2012

**) Efektif menjabat sebagai anggota Komite sejak 19 April 2012

Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi
Report of the Remuneration and Nomination Committee



Umar Juoro
Ketua (Komisaris Independen)
Chairman (Independent Commissioner)



Dato' Sri Abdul Wahid bin Omar
Anggota (Komisaris)
Member (Commissioner)



Budhi Dyah Sitawati
Anggota (Komisaris Independen)
Member (Independent Commissioner)



Paulus Danang Yanri Hatmoko
Anggota merangkap Sekretaris (Pejabat Eksekutif)
Member and Secretary (Executive Officer)

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Direksi

Anggota Direksi beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan.

Anggota Direksi diangkat melalui RUPS yang pelaksanaannya mengikuti tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang yang berlaku.

Direksi bertanggung jawab penuh atas kelangsungan usaha Bank jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang sesuai dengan target usaha dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.

Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

A. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Per 31 Desember 2012, anggota Direksi berjumlah 9 (Sembilan) orang yang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.

Susunan Direksi BII pada periode 2012 adalah sebagai berikut:

Board of Directors

The Board of Directors ("BOD") consists of experienced professionals in the banking industry.

Members of the BOD are appointed by the GMS, in which the implementation of the appointment shall follow procedures of nomination, replacement, and dismissal of directors in accordance with the Articles of Association, and the terms and conditions set by Bank Indonesia and the prevailing Law.

The BOD assumes full responsibility for the Bank's long term sustainability, in achieving business performance in accordance to the business targets, and accountable for the performance through the GMS.

The BOD has a clear authority and responsibility in accordance to the Company's Articles of Association which refers to the Company Act, Bank Indonesia regulation, the provisions of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK) and the Internal guidelines of Directors.

A. Number, Composition and Criteria of the BOD

As of 31 December 2012, members of the BOD consist of 9 (nine) persons chaired President Director.

BII's BOD composition for the 2012 period is as follows:

No	Jabatan	Nama Name	Position
1	Presiden Direktur	Dato' Khairussaleh bin Ramli*)	President Director
2	Direktur	Ghazali bin Mohd Rasad*)	Director
3	Direktur	Thilagavathy Nadason*)	Director
4	Direktur	Rita Mirasari	Director
5	Direktur	Rahardja Alimhamzah	Director
6	Direktur	Stephen Liestyo**	Director
7	Direktur	Jenny Wiriyanto	Director
8	Direktur	Hedy Maria Helena Lapian	Director
9	Direktur	Ani Pangestu	Director

Keterangan | Note

*) Anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing. | Member of the Board of Commissioners, foreign worker.

***) Stephen Liestyo telah mengundurkan diri pada tanggal 30 Oktober 2012 dan mulai berlaku efektif tanggal 31 Januari 2013 | Stephen Liestyo has resignation on 30 October 2012 and will be effective as of 31 January 2013

Jumlah, komposisi dan kriteria Direksi tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu:

1. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.
2. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
3. Rincian kualifikasi Direktur disajikan dalam profil singkat Direksi yang disampaikan secara terpisah pada Laporan Tahunan ini.
4. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
6. Dari susunan Direksi BII, terdapat tiga Direktur berkewarganegaraan asing yaitu Dato' Khairussaleh bin Ramli, Ghazali bin Mohd Rasad dan Thilagavathy Nadason yang telah memenuhi persyaratan Bank Indonesia terkait Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, dengan data-data sebagai berikut:

The number, composition and criteria of the BOD are in compliance to Bank Indonesia regulation concerning the implementation of Good Corporate Governance as follow :

1. All members of the BOD are domiciled in Indonesia.
2. All members of the BOD have met the requirements of integrity, competence, financial reputation and have passed the Fit and Proper Test.
3. Details of the Director's qualifications are presented in the brief profiles of the Directors that are presented separately in this Annual Report.
4. Replacement and/or appointment of members of the BOD have taken into account the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee.
5. All members of the BOD do not give general authority to any other party that resulted in the transfer of the duties and functions of the Board of Directors.
6. Based on current BOD composition, there are three Directors with foreign nationalities, namely Dato' Khairussaleh bin Ramli, Ghazali bin Mohd Rasad and Thilagavathy Nadason that have met the requirements of Bank Indonesia regarding utilization of Foreign Workers, with the following data:

Keterangan Direksi Berkewarganegaraan Asing

No	Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	KITAS		IMTA		Jabatan Position
			Ijin Kerja Licence	Masa Berlaku Validity	No. Ijin Licence	Masa Berlaku Validity	
1	Dato' Khairussaleh Bin Ramli	Malaysia	2C21JD4095-M	31 Des 2013	KEP.03879/MEN/P/IMTA/ 2013	31 December 2013	Presiden Direktur President Director
2	Ghazali bin Mohd Rasad	Malaysia	2C21JE0104AL	25 May 2012	KEP.11417/MEN/P/IMTA/2012	25 May 2013	Direktur Director
3	Thilagavathy Nadason	Malaysia	2D11JCo010-H (KITAP)	7 August 2014	KEP.15176/MEN/P/IMTA/ 2012	7 August 2013	Direktur Director

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

B. Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan masing-masing Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

B. Appointment and Term of Office of the Board of Directors

Term of Office of each Members of the BOD is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Persetujuan Approval Date		Masa Jabatan s/d Tenure until
			RUPS GMS **	Bank Indonesia	
1	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Direktur President Director	16 January 2012	17 April 2012	RUPST 2015
2	Rahardja Alimhamzah	Direktur Director	20 March 2009	18 May 2009	RUPST 2015
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur Director	20 March 2009	18 May 2009	RUPST 2015
4	Rita Mirasari	Direktur Director	20 March 2009	18 May 2009	RUPST 2015
5	Thilagavathy Nadason	Direktur Director	20 March 2009	4 August 2009	RUPST 2015
6	Stephen Liestyo*)	Direktur Director	20 March 2009	18 May 2009	RUPST 2015
7	Jenny Wiriyanto	Direktur Director	29 May 2009	20 October 2009	RUPST 2015
8	Hedy Maria Helena Lapian	Direktur Director	27 August 2010	27 April 2011	RUPST 2015
9	Ani Pangestu	Direktur Director	16 January 2012	26 April 2012	RUPST 2015

Catatan:

*) Stephen Liestyo telah menyampaikan surat pengunduran dirinya pada tanggal 30 Oktober 2012.

Stephen Liestyo has already given resignation letter at 30 Oktober 2012.

***) RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham | GMS: General Meeting of Shareholder.

Pada tanggal 16 Januari 2012, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan menyetujui pengangkatan Dato' Khairussaleh bin Ramli sebagai Presiden Direktur dan Ani Pangestu sebagai Direktur.

On 16 January 2012, the Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the appointment of Dato' Khairussaleh bin Ramli as the President Director and Ani Pangestu as a Director.

Pada tanggal 17 April 2012, Dato' Khairussaleh bin Ramli efektif menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sesuai Surat Bank Indonesia No.14/35/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 11 April 2012 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*). Terhadap Pengangkatan Presiden Direktur Perseroan, maka tugas Rahardja Alimhamzah sebagai pejabat sementara Presiden Direktur berakhir dan selanjutnya kembali menjalankan tugas sebagai Direktur Perseroan.

On 17 April 2012, Dato' Khairussaleh bin Ramli effectively serves as the President Director of the Company in accordance to the Letter of Bank Indonesia No.14/35/GBI/DPIP/Rahasia dated 11 April 2012 on the decision of Fit and Proper Test. Due to the Appointment of the President Director of the Company, therefore the task of Rahardja Alimhamzah as acting President Director ended and he resumed to his position as a Director of the Company.

Pada tanggal 26 April 2012, Ani Pangestu efektif menjabat sebagai Direktur Human Capital Perseroan sesuai Surat Bank Indonesia No.14/33/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 3 April 2012 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Terhadap Pengangkatan Direktur Perseroan.

On 26 April 2012, Ani Pangestu effectively serves as the Director of the Human Capital of the Company in accordance to Bank Indonesia Letter No.14/33/GBI/DPIP/Rahasia dated 3 April 2012 on the decision of Fit and Proper Test on the Appointment Company's Director.

Pada tanggal 30 Oktober 2012, Stephen Liestyo telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Direktur BII. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BII, maka pengunduran diri Stephen Liestyo menjadi efektif terhitung 90 hari sejak tanggal 30 Oktober 2012 tanpa memerlukan persetujuan RUPS, yaitu pada tanggal 31 Januari 2013. Perseroan telah memberitahukan pengunduran diri Stephen Liestyo kepada Bank Indonesia berdasarkan surat No.S.2013.54/DIR COMPLIANCE tanggal 1 Februari 2013. Proses pengunduran diri Stephen Liestyo telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta No.06 tanggal 6 September 2012.

Bersamaan dengan perubahan struktur organisasi BII yang baru, bergabung Lani Darmawan yang dicalonkan sebagai Direktur, Retail Banking menggantikan Stephen Liestyo, pada jajaran Direksi BII. Pengangkatan Lani Darmawan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan seluruh stakeholders dalam RUPS dan juga Pihak Otoritas. Lani Darmawan akan melapor secara langsung kepada Presiden Direktur. Diharapkan dengan arahan dan kepemimpinan Lani Darmawan, BII dapat memaksimalkan Retail Banking sebagai salah satu lini bisnis yang berkembang untuk mencapai visi, misi dan aspirasi BII yang dicita-citakan.

C. Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance yakni menjadi anggota Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Selain sebagai anggota direksi, Stephen Liestyo merupakan Komisaris WOM Finance sejak April 2010. Rangkap jabatan ini masih sesuai dengan PBI tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Tidak ada anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

On 30 October 2012 Stephen Liestyo submitted letter of resignation. Under the provisions of the Articles of Association of the Company the resignation of Stephen Liestyo became effective 90 days from the date of 30 October 2012 without requiring approval from the GMS, which is on 31 January 2013. The Company has notified the resignation of Stephen Liestyo to Bank Indonesia by the letter No.S.2013.54/DIR COMPLIANCE dated 1 February 2013. Stephen Liestyo's resignation process is already in line with the Articles of Association of the Company as stated in the deed No. 06 dated 6 September 2012.

Along with enhancement to the senior management team of BII, Lani Darmawan has joined. She was nominated as Director, Retail Banking, in the BOD BII. Lani Darmawan's appointment will be effective upon approval of all stakeholders in the GMS and regulator. Lani Darmawan will report directly to the President Director. With her experience and leadership, Lani Darmawan is expected to lead Retail Banking as one of the growing business lines to achieve the vision, mission and aspirations of BII.

C. Concurrent Position of the BOD

All members of the BOD does not have a concurrent position except for matters that have been stipulated in Bank Indonesia Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance. For example, a member of the Board of Commissioners may have concurrent position in order to carry out the task of supervision on investments in non-bank subsidiaries that are controlled by the Bank.

In addition to being a member of the Board of Directors, Stephen Liestyo serves as a Commissioner of WOM Finance since April 2010. This concurrent position still in line with Regulation on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

None of the members of the BOD is a member of the Audit Committee, Risk Management Committee and Remuneration and Nomination Committee.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

D. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi

Antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi terdapat hubungan kepengurusan sebagai berikut:

D. Management and Supervisory Relationships Between the Company, Subsidiaries and Affiliated Companies

Relationship between BOD members with the Company, Subsidiaries and Affiliated Companies are as follows:

No	Nama Name	BII	WOM	BII Finance
1	Dato' Khairussaleh Bin Ramli	PD	-	-
2	Ghazali bin Mohd Rasad	D	-	-
3	Rita Mirasari	D	-	-
4	Thilagavathy Nadason	D	-	-
5	Stephen Liesty	D	K	-
6	Rahardja Alimhamzah	D	-	-
7	Jenny Wiriyanto	D	-	-
8	Hedy Maria Helena Lopian	D	-	-
9	Ani Pangestu	D	-	-

Keterangan | Note:

BII – PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. | WOM – PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. | BII Finance
PD – Presiden Direktur | D – Direktur | K – Komisaris

E. Independensi dan Transparansi Direksi

Independensi dan aspek Transparansi Direksi sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan pribadi dari seluruh anggota Direksi.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BII maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).

Anggota Direksi berkomitmen dalam melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

E. Independency and Transparency of the Board of Directors

Independency and transparency aspect of the BOD is as stated in the personal statement letter signed by each BOD member.

All BOD members did not have family and financial relationships with other members of the BOD and/or members of the BOC.

No Directors, either individually or jointly, have shareholdings of more than 25% of paid-in capital in another company.

None of the BOD members have 5% or more shares in BII and/or in other banks and companies (both domestic and overseas).

BOD members are committed to comply with the Codes of Ethics and Conduct.

Members of the BOD did not take and/or receive personal benefit from the Bank other than the remuneration and other facilities set forth by the General Meeting of Shareholders.

Transparansi Hubungan Keluarga | Transparency of family relation

No	Name Nama	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Lainnya Other Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Dato' Khairussaleh Bin Ramli	-	v	-	v	-	v
2	Ghazali bin Mohd Rasad	-	v	-	v	-	v
3	Rita Mirasari	-	v	-	v	-	v
4	Thilagavathy Nadason	-	v	-	v	-	v
5	Stephen Liestyo	-	v	-	v	-	v
6	Rahardja Alimhamzah	-	v	-	v	-	v
7	Jenny Wiriyanto	-	v	-	v	-	v
8	Hedy Maria Helena Lapian	-	v	-	v	-	v
9	Ani Pangestu	-	v	-	v	-	v

Transparansi Hubungan Keuangan | Transparency of financial relation

No	Name Nama	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Lainnya Other Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
1	Dato' Khairussaleh Bin Ramli	-	v	-	v	-	v
2	Ghazali bin Mohd Rasad	-	v	-	v	-	v
3	Rita Mirasari	-	v	-	v	-	v
4	Thilagavathy Nadason	-	v	-	v	-	v
5	Stephen Liestyo	-	v	-	v	-	v
6	Rahardja Alimhamzah	-	v	-	v	-	v
7	Jenny Wiriyanto	-	v	-	v	-	v
8	Hedy Maria Helena Lapian	-	v	-	v	-	v
9	Ani Pangestu	-	v	-	v	-	v

Transparansi Kepemilikan Saham

Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Pengungkapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Share Ownership Transparency

Board of Directors members must disclose shareholdings 5% (five percent) or more either at the Bank's or other banks and other companies, located inside and outside the country. The disclosure can be seen in the table below:

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Saham Mencapai 5% atau lebih dari Modal Disetor

No	Nama Name	Perusahaan Lainnya Other Company	Bank Lain Other Bank	Pemegang Saham Lainnya Non-Bank Financial Institution
1	Dato' Khairussaleh Ramli	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Ghazali bin Mohd Rasad	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Rita Mirasari	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Thilagavathy Nadason	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Rahardja Alimhamzah	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
6	Jenny Wiriyanto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
7	Hedy Maria Helena Lopian	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
8	Ani Pangestu	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
9	Stephen Liestyo	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

F. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi untuk meningkatkan *shareholders value*.
2. Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Bapepam-LK dan otoritas lainnya yang berwenang.
3. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Perusahaan membentuk beberapa komite di bawah Direksi sebagai berikut:
 - a. Komite Manajemen Risiko
 - b. Komite Aset dan Liabilities (ALCO)
 - c. Komite Teknologi Informasi

F. Duties and Responsibilities of the Board of Directors

1. The BOD assumes full responsibility for the Bank's professional business development and risk management by promoting prudential banking and GCG principles in all Banking activities at all levels of the organization in order to increase shareholder value.
2. The BOD has carried out its duties and responsibilities in managing the Company in accordance to their authority as stipulated in the Articles of Association and consistently complied with the applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia, the Ministry of Finance, Bapepam and LK, and other competent authorities.
3. The BOD follows up audit results and recommendations issued by the internal auditor and external auditors as well as the results of investigation by Bank Indonesia and/or other authorities.
4. The BOD has formed Internal Audit Working Unit (SKAI), Risk Management Working Unit (SKMR) and Compliance Working Unit.
5. To support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Company established committees under the BOD as follows:
 - a. Risk Management Committee
 - b. Assets and Liabilities Committee (ALCO)
 - c. IT Steering Committee

- d. Komite Human Capital
- e. Komite Internal Audit (IAC)
Informasi lengkap mengenai komite-komite ini akan dipaparkan lebih rinci pada sub judul Komite-Komite.
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai menggunakan media yang mudah diakses oleh pegawai.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat direksi.
11. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
12. Direksi hanya merangkap jabatan menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada Entitas Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
13. Direksi bertanggungjawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
14. Direksi bertanggung jawab dalam hal berikut:
 - a. Membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
 - b. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UU PT dan dokumen keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perusahaan lainnya.
- d. Human Capital Committee
- e. Internal Audit Committee (IAC)
Detail information of these committees will be presented in the Committees sub section.
6. The BOD is accountable to the GMS for the execution of its duties.
7. The BOD discloses the Bank's strategic human resources policies to the employees using easily accessed internal media.
8. The BOD does not use individual advisor and/or professional consultant services except for specific projects, under a clearly defined agreement that covers scope of work, responsibilities, duration of services and costs, as well as Independent consultants that have the qualification to carry out specific projects.
9. The BOD has provided data and information in a complete, timely, updated and accurate manner to the Board of Commissioners.
10. The BOD currently has guidelines and procedures that contain work ethics, work schedules and meetings of the Board of Directors.
11. The BOD does not delegate its duties and responsibilities to other parties causing transfer of duties and functions of the Directors.
12. In order to perform supervisory duties, the BOD may have concurrent positions as a member of a Board of Commissioners in Nonbank Subsidiary Entities that are controlled by the Bank.
13. The BOD is accountable for all information of the Bank disclosed to public by the Corporate Secretary.
14. The BOD is responsible:
 - a. To prepare List of Shareholders, Special List, GMS Resolutions and Minutes of the BOD Meetings.
 - b. To prepare an Annual Report in accordance with the Article No. 66 of the Company Law and financial documentation in accordance with the Law on Corporate Documentation.
 - c. To maintain all of Bank's lists, minutes and documents in point (a) and (b) and other documents of the Company.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

15. Direktur memiliki kewajiban pelaporan kepada Direksi Bank mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Bank dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

15. Members of BOD shall report to concerning their, and/or their family's shareholdings in any other bank and company which are listed in the special list.

G. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Secara garis besar ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

G. Scope of Work and Responsibility of Each BOD Member

In general, the scope of work and responsibilities of each member of the board is as follows:

No	Nama Name	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Scope of Duties and Responsibilities
1	Dato' Khairussaleh Ramli	Presiden Direktur President Director
2	Rahardja Alimhamzah	Direktur Corporate Banking Director Corporate Banking
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Direktur Operations & Syariah Banking Director of Operations and IT
4	Rita Mirasari	Direktur Legal & Kepatuhan dan Corporate Secretary Legal & Compliance Director and Corporate Secretary
5	Thilagavathy Nadason	Direktur Finance Finance Director
6	Stephen Liestyo	Direktur Consumer Banking Consumer Banking Director
7	Jenny Wiriyanto	Direktur SME & Commercial Banking SME & Commercial Director
8	Hedy Maria Helena Lopian	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
9	Ani Pangestu	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director

H. Kewenangan Direksi

Direksi memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar diantaranya sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam beberapa hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini disyaratkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris atau persetujuan tertulis dari seluruh anggota Dewan Komisaris, yakni:

- a. Membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang.

H. Authority of the Board of Directors

The authority of the BOD as stipulated in the Articles of Association is as follows:

1. The BOD shall be entitled to represent the Company within and outside a court of law, to bind the Company with other parties, and to take all acts concerning both the management and the ownership of the Company, but with the restriction that the approval of the BOC is required in some cases as stipulated in the Articles of Association.

The actions hereunder shall obtain approval from a meeting of the BOC or written approval from all BOC members:

- a. To purchase or in other manner, to obtain immovable goods (rights over land and/or buildings) and/or company(ies), which is not for the purpose of securing receivables;

- | | |
|---|--|
| <p>b. Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak barang-barang tidak bergerak (hak-hak atas tanah dan/atau bangunan) dan/atau perusahaan, tidak termasuk penjualan eks agunan dalam rangka penyelamatan piutang.</p> <p>c. Membebaskan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/mengagunkan kekayaan milik perseroan.</p> <p>d. Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan baik sebagian atau seluruhnya dalam Bank atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>e. Meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari Bank dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>f. Melakukan Transaksi Valuta Asing (Foreign Exchange) dan derivative yang berbentuk suku bunga dan nilai tukar dengan Bank-Bank baik di dalam maupun di luar negeri, dimana Bank harus menandatangani perjanjian seperti ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) atau perjanjian lain yang setara.</p> <p>g. Untuk meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang bukan merupakan kegiatan usaha Bank dalam jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris.</p> | <p>b. To sell or, in other manner, to transfer rights of immovable goods (rights over land and/or buildings) and/or company(ies), which is not for the purpose of securing receivables.</p> <p>c. To put lien/mortgage over land (security rights), to pledge or by other manner to put lien/mortgage assets of the Company as collateral.</p> <p>d. To subscribe or to participate or to relinquish both a part or the entire shares of a company or other bodies/agencies or incorporate new companies which are not for the purpose of asset restructuring, in accordance to the prevailing regulations.</p> <p>e. To borrow money or to receive credit facilities or other banking facilities which are not the Company's daily activities in the amount as determined from time to time by the Board of Commissioners' Meeting.</p> <p>f. To conduct Foreign Exchange Transactions and derivatives in the form of interest rate or currency both domestic and off-shore Bank where the Bank must sign agreements as an ISDA (International Swap Dealers Association), ICOM (International Currency Options Market) or other equivalent contracts.</p> <p>g. To lend money or to provide loan/credit facilities or other banking facilities which is not the bank's business in the amount as determined from time to time by Board of Commissioners' Meeting.</p> |
|---|--|

Mengeluarkan surat jaminan bank atau dengan cara lain menjadi penjamin (*borg*) atau avalis untuk menjamin pembayaran hutang atau kewajiban keuangan orang/pihak lain.

To issue letter of guarantee or by other means/manner to be a guarantor or avalist to guarantee payment of debt or other persons/parties financial obligation.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai total kekayaan Bank (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban) sebagaimana dinyatakan dalam neraca Bank yang terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan publik baik dalam 1 (satu) transaksi</p> | <p>2. Legal action to transfer, to renunciate, or to pledge as collateral, or more than 50% (fifty percent) of the total value of Company property (after deducting all liabilities) as stated in the Company's most recent balance sheet audited by public accountant firms, either in 1 (one) transaction or series of separate transactions, or are related to one another,</p> |
|---|--|

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank dan disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dan dalam hal kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Bank, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam nomer 2 di atas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Bank sesuai dengan pertimbangan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
4. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

within 1 (one) fiscal year must be approved by General Meeting of Shareholders, attended by shareholders or legal proxy representing at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and approved by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total votes legally cast at that meeting.

In case the aforementioned quorum requirement is not met, then a second GMS may adopt resolutions if it is attended by Shareholders or their legal proxies representing at least $\frac{2}{3}$ of the total shares with valid voting rights and may only be carried out if it is approved by at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total votes legally cast at this meeting.

If the quorum requirement is not met in the Second GMS, then upon Company request, the requirement of quorum, number of votes to adopt resolutions, invitation and date of GMS will be determined by the Chairman of Bapepam

3. Legal action to transfer, to pledge as collateral, or to renunciate Company owned property, mentioned in the point (2) shall be published in at least in 2 (two) Indonesian newspaper, 1 (one) of them with national circulation and other at the domicile location of its Head Office, in line with BOD consideration, no longer than 30 (thirty) calendar days following the legal act.
4. In order to implement general control as stated in the Standard of Implementation of the Bank's Internal Audit Function, the BOD is responsible to establish an internal control structure, to ensure the implementation of internal audit function within each level of management, and to follow up audit findings in accordance with the policies or directives from the Board of Commissioners.

- | | |
|--|--|
| <p>5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;</p> <p>6. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) kelompok orang dalam bentuk komite untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Bank.</p> <p>7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>8. Menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Bank, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> | <p>5. The BOD is entitled for certain actions to appoint one or more person as representative or attorney, by delegating authority person stipulated in the power of attorney;</p> <p>6. The BOD may appoint an individual or a committee to implement the management of certain business activities of the Company.</p> <p>7. The distribution of duties and authorities of each member of the BOD is established by the General Meeting of Shareholders and the General Meeting of Shareholders may delegate such authority to the Board of Commissioner.</p> <p>8. To conduct a legal action in the form of transactions which contain conflict of interest between personal economic interests of the Board of Directors, the Board of Commissioners or the major shareholders with the economic interests of the Company, the BOD requires approval by the GMS attended by Shareholders who do not have a conflict of interest.</p> |
|--|--|

Dalam hal BII mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam nomer 8 di atas.

In the event that BII's interest is conflicting with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by another Director, and in the event that the Company interest is conflicting with the interests of all members of the Board of Directors, then the Company will be represented by the Board of Commissioners, without prejudice to the provisions in number 8 above.

I. Pengungkapan Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi dilaksanakan sebagai berikut:

I. Disclosure on the Procedures of Remuneration determination of the BOD Members

The procedure for Remuneration Determination is as follows:



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

J. Besarnya Remunerasi Untuk Setiap Anggota Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi disetujui oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris, maka hal tersebut ditetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

K. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi anggota Direksi.

Sesuai Keputusan RUPS, Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut:

J. Amount of Remuneration for Each BOD Member

The amount of the salaries or remuneration and/or benefits for members of the BOD is to be approved by the GMS. In the event that the BOC is assigned by the GMS to determine the salaries and benefits of the BOD, the matter will be decided in a GMS meeting based on the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.

K. Package/Remuneration Policy and Other Facilities for the member of Board of Directors.

Based on the GMS, Package/Remuneration Policy and Other Facilities for the BOD for 2012 are as follows:

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type or Remuneration and other Facility	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun**) Amount received in 1 year **) Direksi Board of Directors			
		2012 (Orang) (Members)	2011 Orang Members	2012 (Jutaan Rupiah) (Million Rupiah)	2011 (Jutaan Rupiah) (Million Rupiah)
1	- Honorarium	9	9	23,460	23,762
	- Tantiem			12,004	17,536
	- Tunjangan lain			3,941	2,657
	Remunerasi bruto (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Gross remuneration (salary, bonus, benefits regular, bonus and other perks in the form of non natura)			39,405	43,955
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, kesehatan dan sebagainya) yang *: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	9	9	-	-
	Other facilities in the forms of (housing, transportation, health and so on) that *: a. be held b. can not be held			10,020	-
				3,153	1,888

Keterangan:

* Dinilai dalam ekivalen Rupiah | In IDR equivalent

***) Sebelum dipotong pajak | Prior to tax deduction

L. Paket Remunerasi Direksi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan (1 Tahun)

L. BOD Remuneration Package grouped in a range of income level (1 Year)

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun *) Remuneration per member within one year	Jumlah Direksi Number of Directors
Di atas Rp2 miliar More than Rp2 billion	9
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Between Rp1 billion and Rp2 Billion	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Between Rp500 million and Rp. 1 billion	-
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	-

*) Yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak (*bruto*) | deducted

M. Penilaian terhadap Kinerja Direksi

BII menggunakan pendekatan Balanced Scorecard dalam melaksanakan implementasi strategi dan monitoring kinerja. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan perusahaan yang menilai prestasi dan penghargaan berdasarkan basis kinerja. Sasaran strategis diterjemahkan menjadi Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan sampai jajaran paling bawah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa strategi dapat fokus dan berjalan dengan baik.

Kerangka KPI 2012 yang digunakan telah disusun agar dapat dengan mudah mencapai tujuan strategi yang ditetapkan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. *Financial Perspective* (pemantauan biaya)
2. *Business Process Improvement*
3. *Customer perspective*
4. *Talent Management and Employee Engagement*

Prosedur penilaian dan persetujuan KPI adalah sebagai berikut:

1. Penetapan KPI oleh Direksi
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan penilaian atas KPI
3. Proses persetujuan dari Dewan Komisaris.

KPI Direksi untuk tahun 2012 telah disetujui oleh rapat Dewan Komisaris.

M. Performance Assessment of BOD

BII uses the Balanced Scorecard approach on the strategy implementation and performance monitoring. This is in line with Company policy to assess achievement and reward based on performance. Strategic objectives are converted into Key Performance Indicators (KPIs) agreed upon by the BOD and linked to the bottom line. This is done to ensure that the strategy can be focused and worked well.

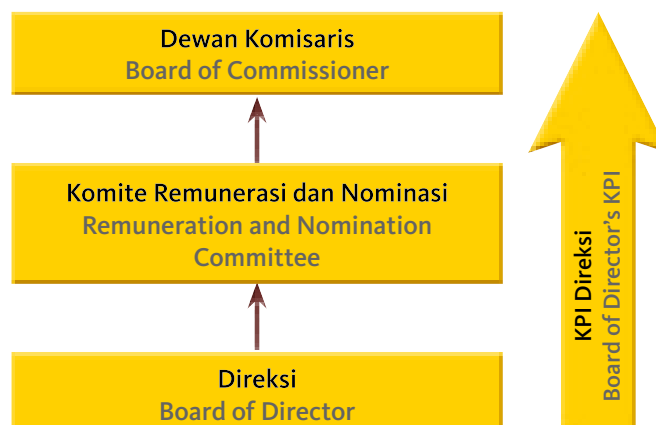
KPI framework for 2012 was structured to easily reach the goals set out in the strategy with the following assessment criteria:

1. Financial Perspective
2. Business Process Improvement
3. Customer perspective
4. Talent Management and Employee Engagement

KPI assessment and approval procedures are as follow:

1. The BOD formulate the KPI
2. The Remuneration and Nomination Committee assesses the KPI
3. Approval process from the Board of Commissioners.

KPI BOD for 2012 was approved by the Board of Commissioners meeting.



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

N. Rapat Direksi

Selama 2012 telah diselenggarakan 38 (tiga puluh delapan) kali rapat Direksi, dengan perincian daftar hadir anggota Direksi sebagai berikut:

N. The BOD Meeting

During 2012 the BOD held 38 (thirty eight) meetings periodically with the following details:

No	Nama Name	Jumlah Rapat Meeting Held	Jumlah Kehadiran Attendance	Tidak Hadir Absent
1	Dato' Khairussaleh Ramli	38	37	1
2	Rahardja Alimhamzah	38	34	4
3	Ghazali bin Mohd Rasad	38	31	7
4	Rita Mirasari	38	34	4
5	Thilagavathy Nadason	38	35	3
6	Stephen Liestyo	38	31	7
7	Jenny Wiriyanto	38	34	4
8	Hedy Maria Helena Lapian	38	35	3
9	Ani Pangestu	38	35	3

Rincian Kehadiran Masing-masing Anggota Direksi | Attendance Details of Each Members of the BOD

No	Tanggal Date	KR	RA	RM	GMR	SL	JW	HL	TN	AP	Keterangan Note
1	17 Januari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
2	26 Januari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
3	3 Februari	**)	√	√	√	X	√	√	√	√	SL : on leave
4	17 Februari	X	√	√	√	X	√	√	X	√	KR : Business trip SL : Business trip TN : Business trip
5	20 Februari	**)	√	√	√	√	√	√	√	√	-
6	28 Februari	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
7	16 March	√	√	X	√	X	√	√	√	√	RM : on leave, SL : on business trip
8	21 March	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
9	27 March	√	√	√	√	√	X	√	√	√	JW : on leave
10	10 April	√	X	√	√	√	√	√	√	X	RA : on business trip. AP : on business trip.
11	18 April	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
12	24 April	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
13	8 May	√	√	√	X	√	√	√	√	√	GMR : on training
14	15 May	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
15	22 May	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
16	29 May	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
17	12 June	√	√	X	√	√	√	√	√	√	RM: on leave
18	20 June	√	X	X	√	√	√	√	√	√	RM: on leave RA : on leave
19	26 June	√	X	√	√	√	X	√	√	√	RA: on leave, JW: on sick leave
20	10 July	√	√	√	√	√	√	X	√	√	HL: on leave
21	17 July	√	√	√	√	√	X	√	√	√	JW: on leave
22	31 July	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-

Rincian Kehadiran Masing-masing Anggota Direksi | Attendance Details of Each Members of the BOD

No	Tanggal Date	KR	RA	RM	GMR	SL	JW	HL	TN	AP	Keterangan Note
23	7 August	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
24	14 August	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
25	15 August	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
26	29 August	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
27	12 September	√	√	√	√	X	√	√	√	√	SL: on leave
28	25 September	√	√	√	√	X	√	X	√	√	SL: on leave HL: on leave
29	11 October	√	√	√	√	√	√	X	√	√	HL: on business trip
30	16 October	√	X	√	X	√	√	√	√	√	RA: on business trip GMR: on pilgrim leave
31	22 October	√	√	X	X	√	√	√	√	√	RM: on training GMR: on pilgrim leave
32	30 October	√	√	√	X	√	√	√	√	√	GMR: on pilgrim leave
33	6 November	√	√	√	X	√	√	√	√	√	GMR: on pilgrim leave
34	13 November	√	√	√	X	√	X	√	X	X	GMR: on pilgrim leave JW: on leave TN: on leave AP: on leave
35	20 November	√	√	√	X	√	√	√	√	X	GMR: on pilgrim leave AP: on leave
36	27 November	√	√	√	√	X	√	√	X	√	SL: on sick leave TN: on training
37	14 December	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
38	27 December	**)	**)	√	√	X	√	√	√	√	SL: on gardening leave
TOTAL		38	38	38	38	38	38	38	38	38	
ATTEND		37	34	34	31	31	34	35	35	35	
ABSENT		1	4	4	7	7	4	3	3	3	
Percentage		97%	89%	89%	82%	84%	89%	92%	92%	92%	

Keterangan | Note :

**) Melalui Telekonferensi | Trough Conference Call

O. Rapat Direksi

O. Board of Director's Meeting

Tanggal Rapat Direksi Date Board of Directors Meeting	Agenda Utama Rapat Main Agenda Meeting
17 January 2012	No. 01/DIR/01.2012 1. Audit Finding for 31 December 2011 2. 10 Years Forecast 3. BOD wrap up
26 January 2012	No.02/DIR/01.2012 1. BOD Balanced Scorecard 2. Cleopatra project update 3. Fast & Furious Project Update 4. BOD wrap up
3 February 2012	No. 03/DIR/02.2012 1. BOD Balanced Scorecard 2. January 2012 Month Result 3. BOD wrap up

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Tanggal Rapat Direksi Date Board of Directors Meeting	Agenda Utama Rapat Main Agenda Meeting
17 February 2012	No. 04/DIR/02.2012 1. Business Process Efficiency 2. Bali Marathon Update
20 February 2012	No. 05/DIR/02.2012 1. BII's Financial Statements for the Period Ended 31 December 2011
28 February 2012	No. 06/DIR/02.2012 1. January 2012 Performance (CEO Update) 2. BOD Meeting Governance 3. Others
16 March 2012	No. 07/DIR/03.2012 1. Matters Arising from the last BOD Meeting 2. Update of Branch KPI 2012 Socialization & Sharing Key Challenge 3. Updates on Bali Marathon Project 4. Bonus Pool, Multiplier Matrix and Salary Increase
21 March 2012	No. 08/DIR/03.2012 1. Matters Arising from the last BOD Meeting 2. AGMS & EGMS 2012 3. GCG Report 4. CEO Update and Financial Performance February 2012 5. AOP 2012 loan and deposit and market share 6. CSR Update
27 March 2012	No. 09/DIR/03.2012 1. Matters Arising from the Previous BOD Meeting 2. Record Center Relocation 3. Angry Bird Card 4. Strategic Direction & Aspiration, Business Plan & Targets for BII 5. 2012 Balanced Scorecard for CEO and BOD
10 April 2012	No. 10/DIR/04.2012 1. Matters Arising from the Last BOD Meeting 2. New Salary Structure 3. Update on Business Process Efficiency 4. March' 12 & 1Q12 Results 5. Others
18 April 2012	No. 11/DIR/04.2012 1. Matters arising from the BOD Meeting 21 March 2012 2. CEO Update & Group Overall Financial Performance March'12 3. BNM CRR Update 4. New Salary Range
24 April 2012	No. 12/DIR/04.2012 1. Minutes of BOD Meeting 27 March'12 2. Matters Arising from the BOD meeting 27 March'12 3. Others
8 May 2012	No. 13/DIR/05.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 10 April 2012 2. Matters Arising from the BOD Meeting on 10 April 2012 3. Trade Finance 4. Cash Management 5. Others

Tanggal Rapat Direksi Date Board of Directors Meeting	Agenda Utama Rapat Main Agenda Meeting
15 May 2012	No. 14/DIR/05.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 18 April 2012 2. Matters Arising from the BOD meeting on 18 April 2012 3. Balanced CEO Scorecard & Performance Management System 4. CEO Update 5. Group Overall Financial Performance April'12 and Directorates Performance 6. Operation Update 7. BOD & BOC Manuals 8. Others
22 May 2012	No. 15/DIR/05.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 24 April 2012 2. YTD Complaint Report 3. Streamlining Credit Process 4. Syariah Business Strategy 5. Strategic Initiative Process Update 6. Others
29 May 2012	No. 16/DIR/05.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 08 May 2012 2. Matters Arising from the Last BOD Meeting 3. Wealth Management 4. 1Q2012BTS FX Review 5. Anti Fraud Strategy 6. Others
12 June 2012	No. 17/DIR/06.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 15 May 2012 2. Matters Arising from previous meetings 3. Enablers to grow Bancassurance Business 4. Business Process Efficiency Update 5. Centralization of Trade Processing 6. Others
20 June 2012	No. 18/DIR/06.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 22 May 2012 2. Matters Arising from the BOD Meeting on 22 May 2012 3. Revised RBB 2012 4. Liquidity Update 5. Group Overall Financial Performance May'12 6. Others
26 June 2012	No 19/DIR/06.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 29 May 2012 2. Matters Arising from the BOD Meeting on 29 May 2012 3. Lay out of Ground Floor SS3 4. Directorate Performance Update 5. Audit Findings 6. Others
10 July 2012	No. 20/DIR/07.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 12 June 2012 2. Matters Arising from the BOD Meeting on 12 June 2012 3. Cost & Benefit Analysis for DBDS Enhancement Phase II 4. Bali Marathon – Post Event Review 5. Preliminary Financial Results 1H12 & Projection for 2012 6. Others

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Tanggal Rapat Direksi Date Board of Directors Meeting	Agenda Utama Rapat Main Agenda Meeting
17 July 2012	No. 21/DIR/07.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 20 June 2012 2. Matters Arising from the BOC Meeting on 22 June 2012 3. Transforming to be the Leading Relationship Bank In Indonesia 4. Human Capital – Attrition & Talent Management 5. Compliance Effectiveness Report 6. BNM CRR Update 7. Others
31 July 2012	No. 22/DIR/07.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 26 June 2012 2. Matters Arising from the BOC Meeting on 26 June 2012 3. BIIF Annual GMS 2011 through Resolution 4. Service Measurement Alternative 5. S&D operating model and Branch Transformation 6. Others
07 August 2012	No. 23/DIR/08.2012 1. S&D operating model and Branch Transformation 2. Others
14 – 15 August 2012	No. 24/DIR/08.2012 1. Develop Distinctive Proposition and Business Model for Mass affluent 2. Others
29 August 2012	No. 25/DIR/08.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 17 & 31 July 2012 2. Matters Arising from the previous BOD Meetings 3. Group Performance for July 2012 and Peers Performance Review 4. Directorate Performance Update 5. Others
12 September 2012	No. 26/DIR/09.2012 1. Action item from last meeting 2. Other PMO update
25 September 2012	No. 27/DIR/09.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 7 & 29 August 2012 2. Matters Arising from the previous BOD Meetings 3. Group Performance as of August'12 and AOP 2013 4. Others
11 October 2012	No. 28/DIR/10.2012 1. ICES 2. Action item from last meeting 3. Other PMO update
16 October 2012	No. 29/DIR/10.2012 1. Minutes of BOD Meeting 25 September 2012 2. Matters Arising from the previous BOD Meetings 3. Risk Masterclass 4. Financial Result 3Q12 5. Business Directorates Performance 6. Others
22 October 2012	No. 30/DIR/10.2012 1. Credit Committee Terms & Reference 2. Web Online Credit Application 3. Others

Tanggal Rapat Direksi Date Board of Directors Meeting	Agenda Utama Rapat Main Agenda Meeting
30 October 2012	No. 31/DIR/10.2012 1. Action item from the last meeting 2. Upgrade Credit Risk Tools and Policies to enable business growth 3. Other PMO update
06 November 2012	No. 32/DIR/11.2012 1. Corporate Gift & Entertainment Policy
13 November 2012	No. 33/DIR/11.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 16 October 2012 2. Matters Arising from Previous Meeting 3. Complaint Report Q2-Q3 2012 4. Mumbai Branch Update 5. Action Item from Last Meeting 6. Other PMO update
20 November 2012	No. 34/DIR/11.2012 1. Minutes of BOD Meeting on 22 October 2012 2. Matters Arising from BOD Meeting on 22 October 2012 3. October'12 Performance Review 4. BNM 2012 CRR Update 5. Credit Process Streamline Update 6. Others
27 November 2012	No. 35/DIR/11.2012 1. Action Item from Last Meeting 2. Accelerate Account Planning Implementation (Update) 3. Other PMO update 4. New Regulation from Bank Indonesia 5. Appointment of independent Commissioner of BII Finance
14 December 2012	No. 36/DIR/12.2012 1. Action Item from Last Meeting 2. Review IMPACT Program Implementation 3. BII & Directorate Business Performance Review 4. Transaction Banking – Business Plan 5. New Rules of Bank Indonesia 6. Others
27 December 2012	No. 37/DIR/12.2012 1. Projection of Year-End 2012 Loans, LDR, Loans Impairment and Provision

P. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- b. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* apabila ada.
- c. Tidak terdapat *dissenting opinions* selama penyelenggaraan Rapat di tahun 2011.

P. Decision making mechanism

- a. Decisions making process at the BOD meetings are performed on the basis of deliberation to reach a consensus or by majority vote when no consensus is reached.
- b. The result of BOD meetings are set forth in the minutes of meetings, well documented, which also includes of dissenting opinions (if any)
- c. There were no dissenting opinions during 2012.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Q. Pengungkapan Lainnya

Rasio Gaji Tertinggi dan terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah di BII pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Q. Other Disclosures

Highest and Lowest Salary Ratio

Ratios of highest to lowest salaries in BII in 2012 are as follows:

No	Jenis Rasio Type of Ratio	Rasio Ratio
a	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest salary to lowest	110,6 x
b	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest Director salary to lowest	1,7 x
c	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest Commissioner salary to lowest	1,3 x
d	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi The ratio of the highest Director salary to the highest top official's	1,7 x

Perincian Remunerasi Komite-Komite (tidak termasuk anggota Komite yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris)
Committee Remuneration (not including Committee Member from BOC)

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type or Remuneration and other Facility	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun**) Amount received in 1 year **)			
		2012 (Orang) (Members)	2011 Orang Members	2012 (Jutaan Rupiah) (Million Rupiah)	2011 (Jutaan Rupiah) (Million Rupiah)
1	- Honorarium	3	4	1,011	1,223
	- Tantiem			218	364
	- Tunjangan lain			0	0
	Jumlah	3	4	1,229	1,587

Keterangan | Note :

* Dinilai dalam ekivalen Rupiah | In IDR equivalent

***) Sebelum dipotong pajak | Prior to tax deduction

Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank

Buy back shares atau buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama 2012, BII tidak melakukan transaksi Buy back shares atau buy back obligasi.

Shares Option

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Bank's Buy Back Shares and Buy Back Bonds

Buy back shares or buy back the bonds is defined as an effort to reduce the number of shares or bonds issued by the Bank by buying back shares or bonds. The payment procedures are carried out in accordance with applicable regulations.

During 2012, BII did not perform any Buy back shares or buy back bonds transaction.

Shares Option

Shares option is an option to the member of BOC, BOD and executive officer to purchase shares through share offer or option offer. This serves as compensation provided to BOC, BOD and executive officer and approved in the AGM and/or the company's article of association.

Selama 2012 BII tidak memberikan opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif

Pernyataan Pengendalian Intern

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai sebagai salah satu pilar yang fundamental dalam pelaksanaan GCG secara konsisten.

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan oleh:

1. Direksi dan seluruh unit kerja terkait, yang memberikan arahan, petunjuk dan pengawasan
2. Komite Audit
3. Seluruh karyawan

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut

Sistem pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, atau kerugian, atau terjadinya kondisi yang tidak terduga.

Evaluasi dan Lingkungan Pengendalian Intern

Pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian intern.

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian intern dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk meminimalkan risiko.

There was no share option provided by BII during 2012.

Statement on Internal Control

Responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Board of Commissioners and Board of Directors are committed in ensuring that internal control has been performed adequately as one of fundamental part on the implementation of a consistent GCG.

Internal Control is a process performed by:

1. Directors and related working unit, which provides governance, guidance, and oversight,
2. Audit Committee,
3. All employees.

The Directors acknowledge its responsibility for maintaining a sound internal control system in order to achieve Corporate objectives.

The Board of Commissioners, supported by the Audit Committee, are responsible for observing the attainment of internal control in the Bank's activities in general, including the policies of Directors who established the internal controls.

Accordingly, internal control could provide only reasonable and not absolute assurance against material misstatement or loss or the occurrence of unforeseeable circumstances.

Evaluation and Environment of Internal Control

Internal control was implemented in an effective and efficient manner, no compromise in implementing control procedure and maintaining a general sound control environment

In general, the internal control system was well functioned. Issues related to the adequacy of internal control were reported to the Directors, and has been followed up consistently to minimize risk.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite-komite yang telah dibentuk.

Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

Penilaian Risiko dan Pengelolaan Risiko

Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan telah diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespon kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh BII yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja ini diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

Unit Kerja terkait melakukan review data secara berkala atas keberadaan dan efektivitas pengendalian, pembagian tugas yang memadai, dan verifikasi rutin atas akurasi.

Informasi dan Komunikasi

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Perusahaan, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

Report was submitted to Board of Commissioner through all committees has been formed.

The Board of Commissioners, through its various Committees, regularly reviews the internal control environment and provides independent assessment which is communicated to the Directors to be acted upon.

Risk Assessment and Risk Management

Risks that could effect on the Bank's achievement of the Bank's objectives have been continuously identified, assessed, monitored and managed. Adequate procedures to anticipate, identify and respond to events and barriers that would influence the achievement of objectives is in place.

The Board of Commissioners and Board of Director, through the Risk Oversight Committee and Risk Management Committee, ensures that Directors have implemented risk management properly.

Control Activities

Policies and procedures of risk control has been implemented by supporting unit which was formed by BII such as Risk Management Committee and Audit Committee. Activities, duty and responsibility of the working units are described on the other part of GCG report.

The relevant working units regularly assess the existence and effectiveness of internal control, establish adequate segregation of duties, perform routine verification on the data accuracy.

Information and Communication

Information gathering procedures and information technology plans were in place to produce reports of business activities, financial position, risk management implementation and regulatory compliance that support the tasks of The Directors and Board of Commissioners. Directors have identified pertinent information to the Company, summarized and communicated it in a form and timeframe that enables employees to carry out their responsibilities and external stakeholders to be aware of the Company's conditions.

Pemantauan

Direksi, Unit Kerja terkait dan Audit Intern melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala.

Audit Intern didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai untuk mengevaluasi keseluruhan sistem pengendalian intern atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. Audit Intern senantiasa menyampaikan hasil temuan audit kepada Komite Audit dan IAC agar kelemahan atau kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.

Direksi dan Pejabat Perusahaan memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi Audit Intern.

R. Keikutsertaan Direksi dalam Pelatihan

Selama 2012, pelatihan yang telah diikuti Direksi adalah sebagai berikut:

Monitoring

Directors, relevant working unit and Internal Audit perform an ongoing monitoring activities on the effectiveness of the internal control system implementation. Monitoring for key risks have been prioritized and is part of daily activities, including regular evaluation.

Internal Audit is supported by human resources with adequate competencies and sufficient number of staff to evaluate internal control for key strategies, operation and financial information processing. Internal Audit reports audit findings to the Audit Committee and IAC, so deficiencies in internal control can be improved.

The Directors and Company officers are committed and have implemented follow-up actions on the results of the monitoring and Internal Audit's recommendation.

R. Boards Participation In Training

During 2012, members of the Board of Directors participated in the following trainings:

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar Training/Seminar	Waktu & Tempat Pelaksanaan Date & Venue
1	Dato' Khairussaleh bin Ramli	Sertifikasi Kompetensi Level 5 Bank Risk Management	16 Maret 2012 Jakarta, Indonesia
		Training Program Risk Management Competency for Banking Professional Level 5	7 Maret 2012 Jakarta, Indonesia
		Executive Distance Learning on Islamic Banking Training	1 & 5 Sept 2012 Jakarta, Indonesia
		Asian Banking CEO 2012	29 -30 Nov 2012 Singapore
		Annual Risk Workshop	23 Oktober 2012 Kuala Lumpur

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar Training/Seminar	Waktu & Tempat Pelaksanaan Date & Venue
2	Rahardja Alimhamzah	Asia Corporate & Investment Banking Roundtable	26 - 27 Oktober 2012 Hongkong, Hyatt Hotel Hongkong
		Training Selections Scorecards & Capital Level BOD (Basel II)	1 November 2012 Sentral Senayan 3, lantai 27, Jakarta, Indonesia
		Risk Marter Class	8 - 9 November 2012 Sentra Senayan 3, lantai 28, Jakarta, Indonesia
		PT. Kim Eng Securities Indonesia Investor Forum	28 November 2012 Financial Club, Jakarta, Indonesia
		Oliver Wyman FS Leadership Forum	29 November 2012 Four Season Hotel, Jakarta, Indonesia
3	Ghazali bin Mohd Rasad	Sertifikasi Kompetensi Level 5 Bank Risk Management	12 Juni 2012 Jakarta, Indonesia
		Workshop Organisasi Cabang	13 Juni 2012 Hotel Atlet Century, Jakarta, Indonesia
		Bank Indonesia & Islamic Development Bank "Inaugural Lecture of IDB Regional Lecture Series on Islamic Finance"	19 Desember 2012 Bank Indonesia Jakarta, Indonesia
4	Thilagavathy Nadason	Maybank Group Rsk Masterclass	2012 Jakarta, Indonesia
		Strategic Balance Sheet Management	2012 Kuala Lumpur
		IFRS Training	2012 Jakarta, Indonesia
		Bank Regulation : Basel & Beyond	2012 Hong Kong

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar Training/Seminar	Waktu & Tempat Pelaksanaan Date & Venue
5	Rita Mirasari	Seminar Otoritas Jasa Keuangan "Tantangan Dewan Komisioner menghadapi Dampak Krisis"	13 Februari 2012 Ballroom Puliman Hotel, Jakarta, Indonesia
		Peran Bank Dalam Mencegah & Manangani Kejahatan Perbankan Yang menggunakan Produk Bank Berisiko Tinggi (High Risk Product)	1 Maret 2012 Hotel Santika Premiere, Jogyakarta, Indonesia
		Seminar Nasional: Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank dalam Penerapan Strategi Anti Fraud	7 Maret 2012 Hotel Le Meridien, Jakarta, Indonesia
		The Compliance Programme and Team Effectiveness Programme	27 April 2012 Malaka, Kuala Lumpur
		Seminar Perbarindo	29 Juni 2012 Nuri Room, Lobby Lower JCC Jakarta, Indonesia
		Kesiapan Perbankan Menghadapi Pembatasan Pemilikan Saham Bank	13 September 2012 Hotel Sultan, Jakarta, Indonesia
		Training Selection Scorecards and Capital Lever	1 November 2012 Sentral Senayan III, lantai 27, Jakarta, Indonesia
		Risk Master Class 2012	8 November 2012 Sentral Senayan III, lantai 28 Jakarta, Indonesia
		Seminar Nasional IBI "Economic Outlook 2013: Dalam Perspektif Ekonomi Global yang penuh Ketidakpastian"	12 Desember 2012 Grand Ballroom, Hotel Kempinski, Jakarta, Indonesia
6	Stephen Liestyo	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Level 5	12 Juni 2012 Jakarta, Indonesia
		Basel II, BII Maybank	1 Nov 12 Jakarta, Indonesia
		Maybank Group Risk Masterclass 2012	8 - 9 November 2012 Sentra senayan 3, lantai 28, Jakarta, Indonesia

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

No	Nama Name	Pelatihan/Seminar Training/Seminar	Waktu & Tempat Pelaksanaan Date & Venue
7	Jenny Wiriyanto	Bank Risk Management Level 5	12 Juni 2012 Jakarta, Indonesia
		Business Innovation & Growth Strategies with Mohan Sawhney	03 Juli 2012 The Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Indonesia
		Maybank Group Risk Masterclass 2012	8 - 9 November 2012 Sentra Senayan 3, lantai 28, Jakarta, Indonesia
8	Hedi Maria Helena Lopian	Maybank CRO Summit 2012	8 Juni 2012 Menara Maybank, Kuala Lumpur
		IIF Membership Meeting	11 - 13 Oktober 2012 Tokyo, Jepang
		Risk Masterclass	8 - 9 November 2012 Sentral Senayan 3, Jakarta, Indonesia
9	Ani Pangestu	Risk Management Competency for Banking Profession - Level 5	2 Februari 2012 Jakarta, Indonesia
		Forum Human Capital Perbankan Indonesia	10 Februari 2012 Bali, Indonesia
		Hay Group Indonesia Executive Rewards Forum 2012	2 Maret 2012 Jakarta, Indonesia
		2012-Indonesia Certificate in Banking Risk & Regulation Level 5 Exam Preparation	22 Maret 2012 Jakarta, Indonesia
		Manajemen Risiko Perbankan Level 5	31 Maret 2012 Jakarta, Indonesia
		2012 BCG Leaders' Forum "The Rise of the Southeast Asia Challengers and the War for Talent"	31 Oktober 2012 Jakarta, Indonesia

Komite-Komite Di Bawah Direksi

1. Komite Manajemen Risiko (RMC)

Dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang mungkin timbul, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk melalui surat edaran No.SE.2012.022/DIR RISK MGMT tanggal 17 September 2012 tentang Komite Manajemen Risiko dan merupakan pembaharuan dari surat edaran yang telah ada sebelumnya.

Tujuan pembentukan untuk mengelola secara efektif potensi risiko yang mungkin timbul serta untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Committees Under the Board of Directors

1. Risk Management Committee (RMC)

In order to manage potential risks that may arise effectively, the Board of Directors established Risk Management Committee to determine, review and continuously improve the implementation of policies and methodologies used to manage risks.

Base of the Establishment of Risk Management Committee

The Risk Management Committee was established through the circular letter No.SE.2012.022/DIR RISK MGMT dated 17 September 2012 on Risk Management Committee and is a renewal of the previous existing circular.

The objective is to manage effectively potential risks through determining, reviewing and continuously improving the implementation of policies and methodologies used for managing risks.

Struktur Dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko | Structure and Membership of the Risk Management Committee

No	Jabatan Position	Keterangan Description
Anggota Member		
1	Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director
2	Wakil Ketua/Anggota Vice Chairman/Member	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
3	Anggota Member	Direktur Keuangan Finance Director
4	Anggota Member	Direktur Perbankan Wholesale Wholesale Banking Director
5	Anggota Member	Direktur Perbankan UKM SME Banking Director
6	Anggota Member	Direktur Perbankan Konsumer Consumer Banking Director
7	Anggota Member	Direktur Legal & Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Legal & Compliance Director and Corporate Secretary
8	Anggota Member	Direktur Operasional dan TI Operation & IT Director
Undangan Tetap Permanent Invitees		
1	Direktur Sumber daya Manusia Human Capital Director	
2	Basel & Enterprise Risk Management Head Basel & Enterprise Risk Management Head	
3	Credit Review Head Credit Review Head	
4	Corporate & SME Credit Policy and Portfolio Management Head Corporate & SME Credit Policy and Portfolio Management Head	
5	Consumer Credit Policy and Portfolio Management Head Consumer Credit Policy and Portfolio Management Head	
6	Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional Operation Risk Management Head	
7	Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko Pasar Market Risk Management Head	
8	Kepala SKAI Internal Audit Head (SKAI)	
Undangan Tidak Tetap Invitee		
1	Pihak internal BII lain jika diperlukan	
Sekretariat Secretary		
1	Basel & Enterprise Risk Management	

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Tujuan Komite Manajemen Risiko

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, *system* dan *tools* pengelolaan risiko termasuk rencana-rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- b. Melakukan kajian terhadap risiko bank dan anak perusahaan secara keseluruhan termasuk eksposur atas kredit secara berkala dan memastikan bahwa eksposur dikelola dengan baik.
- c. Menetapkan koreksi atau ratifikasi atas keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- d. Memastikan kecukupan sumber daya serta sistem dalam penerapan manajemen risiko.
- e. Membangun budaya manajemen risiko pada seluruh level organisasi.

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

- a. Mengkaji skenario stress testing dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset melalui serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- b. Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko.
- c. Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia.
- d. Menyetujui produk kredit baru dan layanannya.
- e. Menyetujui Kebijakan Perkreditan tingkat segmentasi (Credit Policy Level 2).
- f. Menyetujui limit Industri.
- g. Mengkaji dan melakukan penilaian terhadap proses manajemen risiko operasional dan langkah mitigasi risiko.
- h. Mengkaji dan menyetujui kebijakan kredit (termasuk Credit Program/PDA) dan acuan risiko yang mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dari aktivitas bisnis.

The Objectives of the Risk Management Committee

- a. Approved the Bank's and its subsidiaries' risk management policies, including strategic frameworks, methodologies, systems and tools of risk management, including contingency plans and ensure the implementation that covers credit risk, operational risk, market risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategy risk, and compliance risk.
- b. Conduct comprehensive reviews on the risks of the bank and its subsidiaries, including credit exposures on a regular basis and ensure that the exposure is managed properly.
- c. Determine corrections or rectifications of business decisions that have not been made with normal procedures.
- d. Ensuring the adequacy of resources and system in the implementation of risk management.
- e. Promote risk management culture at all levels in the organization.

Duties and Authorities of the Risk Management Committee

- a. Assess the stress testing scenarios and the risk impacts on capital adequacy, profitability and asset quality through and recommend the necessary corrective actions.
- b. Approve strategic actions arising from external regulations that affect the practice of risk management.
- c. Approve action plans to mitigate risks that become Bank Indonesia's concern.
- d. Approve new credit products & services.
- e. Approve credit Policy on segment level (Credit Policy Level 2).
- f. Approve industry limit.
- g. Review and assess operational risk management processes and risk mitigation.
- h. Review and approve credit policies (including Credit Program/PDA) and risk references including credit risk, market risk and operational risk of the business activity.

- i. Menyetujui pendelegasian limit wewenang kredit.
- j. Menyetujui metodologi dan model penentuan bunga kredit.
- k. Menyetujui model pengukuran risiko.
- l. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh unit terkait di BII Maybank agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- m. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh Direksi dan Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Manajemen Risiko

- a. Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan rapat non-rutin/luar biasa bilamana diperlukan.
- b. Rapat Komite Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua dan dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- c. Setiap anggota dapat meminta rapat luar biasa untuk membahas agenda yang mendesak dengan memberitahu sekretaris panitia dalam waktu tidak kurang dari 24 jam.
- d. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh minimal 51% dari anggota; termasuk dan dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- e. Keputusan adalah berdasarkan musyawarah mufakat.
- f. Hasil rapat harus dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- g. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) selama pertemuan komite harus secara jelas dinyatakan dengan jelas di dalam risalah rapat.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama 2012 telah diadakan Rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 11 (sebelas) kali.

- i. Approve credit limit delegation.
- j. Approve methodologies and models to determine lending rate.
- k. Approve risk measurement models.
- l. Conduct monitoring and provide strategic directions to business initiatives and major business projects and ensure it will supported by all relevant units in BII Maybank, so that it will in line with the company's objectives.
- m. Carrying out other responsibilities delegated by the Board of Directors and the Risk Monitoring Committee.

Risk Management Committee Meeting

- a. The Risk Management Committee holds at least 4 (four) meetings a year and holds non-regular meeting whenever necessary.
- b. Risk Management Committee Meeting is chaired by the Risk Management Committee Chairman and by the Vice Chairman if the Chairman is not able to attend the meeting
- c. Each member may request an extraordinary meeting to discuss an urgent agenda by telling the committee secretary less than 24 hours before the meeting.
- d. Meetings are entitled to take legal and binding decisions if attended and/or represented by at least 51% of the members and is attended by Chairman and/or Vice Chairman.
- e. Decision is based on the consensus agreement.
- f. The results of the meeting shall be stated in the minutes of the meeting and well documented.
- g. Differences of opinion (dissenting opinion) during a committee meeting should clearly be stated in the minutes of the meeting.

Meeting Frequency and Attendance in the Risk Management Committee Meeting

During the 2012, Risk Management Committee Meeting was held 11 (eleven) times.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Tingkat Kehadiran Direksi Pada Rapat Komite Manajemen Risiko Directors' Attendance in the Risk Management Committee Meeting

No	Name Nama	Tanggal Date											Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		24 January	21 February	20 March	18 April	22 May	20 June	17 July	24 September	19 October	23 November	14 December			
1	Dato' Khairussaleh Ramli	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	v	11	8	73
2	Hedy Lopian	v	v	v	v	v	v	v	x ¹⁾	v	v	v	11	10	91
3	Ghazali Bin Mohd. Rasad	v	v	v	v	v	v	v	v	x	x	v	11	9	82
4	Jenny Wiriyanto	v	x	v	v	v	v	x	v	x	v	v	11	8	73
5	Rahardja Alimhamzah	v	v	v	v	v	x	v	v	v	v	v	11	10	91
6	Rita Mirasari	x	v	v	v	v	x	v	v	v	x	v	11	8	73
7	Stephen Liestyo	x	v	v	v	v	x	v	x ¹⁾	v	v	v	11	8	73
8	Thilagavathy Nadason	v	x	v	v	v	x	v	v	v	v	v	11	9	82

Keterangan | Description:

V : Hadir | Present

X : Tidak Hadir | Absent

x¹⁾ : Cuti | On leave

Keputusan Rapat Komite Manajemen Risiko

- Keputusan yang tertulis dalam risalah rapat disirkulasikan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan masukan lebih lanjut yang kemudian akan dikaji terlebih dahulu pada agenda rapat berikutnya, sebelum kemudian ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua. Notulen/risalah rapat adalah hasil keputusan yang sah untuk kemudian disirkulasikan kepada Direksi dan unit kerja terkait serta didokumentasikan dengan baik.
- Keputusan yang sah mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
- Apabila diperlukan, keputusan rapat Komite Manajemen Risiko ditindaklanjuti dengan Keputusan, Surat Edaran, Memorandum oleh unit kerja yang terkait.

Tanggung Jawab Sekretaris Komite

- Membuat undangan rapat dan menyusun agenda rapat.
- Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan rapat.
- Mencatat, merumuskan dan menyajikan hasil rapat serta mendokumentasikan perbedaan pendapat (bila ada) dalam rapat.
- Mendistribusikan hasil rapat kepada semua anggota komite, Direksi dan unit kerja terkait.

Decisions of Risk Management Committee Meeting

- The decisions written in the minutes of the meeting are circulated to all members for further input which will then be reviewed prior to the next meeting agenda, before signed by the Chairman/Vice Chairman. Minutes/minutes of the meetings are legitimate decisions that will be circulated to the Directors and relevant work units and are well documented.
- Legitimate and binding decision to all members either present or not present.
- If necessary, the decision of the Risk Management Committee meeting will be followed up by Decree, Circular Letter, Memorandum by the related working units.

Responsibilities of the Committee's Secretary

- Prepare meeting invitations and setting the meeting agenda.
- Prepare and collect meeting materials.
- Record, formulate and present results of the meeting as well as documenting dissenting opinions (if any) in the meeting.
- Distribute the minutes of the meeting to all members of the committee, the Board of Directors and related units.

Agenda Utama Rapat Komite Manajemen Risiko | Main Agenda of RMC Meeting

No	Tanggal Date	Agenda
1	24 January 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) - Enterprise Risk Dashboard (ERD) and Risk Exceptions - Risk Heat Map - Checklist in Deciding to Close Branch in Case of Emergency Situation - BNM Composite Risk Rating (CRR)
2	21 February 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Based Bank Rating (RBBR) and Risk Profile
3	20 March 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Enterprise Risk Dashboard (ERD) and Risk Exceptions - Stress Testing Scenario - Risk Management Framework
4	18 April 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Management Guidelines - Quarterly Risk Heat Map as of 1Q2012 - Enterprise Risk Dashboard (ERD) and Risk Exception - BNM Composite Risk Rating Report - BI Audit Commitment Report
5	22 May 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consumer Portfolio update - WOM Portfolio update - Corporate and Commercial Portfolio update - SME Portfolio update - Trading Risk Management Framework - Market Risk update - Treasury Portfolio Risk update - Risk Profile Bank - Enterprise Risk Dashboard (ERD) - Group Stress Testing - Business Continuity Management - Operational Risk Dashboard - Operational Risk Events
6	20 June 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Consumer Portfolio update - WOM Portfolio update - BII Finance Update - Corporate Portfolio Update - Commercial Portfolio Update - SME Portfolio Update - Market Risk Update - Basel & ERM : Enterprise Risk Dashboard (ERD) - Operational Risk Dashboard - Structured Trade and Commodity Finance (STCF)
7	17 July 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Trading Book Policy Statement (TBPS) - Retail Consumer Banking Credit Policy Manual (RCPM) - Risk Heat Map, Risk Based Bank Rating (RBBR) and Enterprise Risk Dashboard (ERD) - Sharia Risk Profile
8	24 September 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Interbank Limit Policy - Credit Policy Level 2 - PITA Product Program - Risk Acceptance Criteria (RAC) BII Sinergi (Distribution Card+) - Enterprise Risk Dashboard (ERD), Group Stress Testing (GST) - Consumer & Subsidiaries Portfolio Update - Commercial Portfolio Update - Corporate Portfolio Update - SME Portfolio Update - Business Continuity Management (BCM) Update - Operational Risk Management (ORM) Dashboard

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

No	Tanggal Date	Agenda
9	19 October 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Product Development Assessment (PDA) for BII Finance, WOM, Credit Card and Mortgage - Credit Policy Level 2 Small, Medium & Emerging - Pilot Project Distributor/Dealer Financing Leads Conversion Through Telesales - Enterprise Risk Dashboard (ERD), Risk Heat Map, Risk Profile, Medium Commercial Scorecard (MCS) - Operational Risk Management (ORM) Framework - Unit Usaha Sharia (UUS) Risk Profile - WOM : Portfolio, Risk Heat Map, Risk Profile - BII Finance : Enterprise Risk Dashboard (ERD), Risk Heat Map, Risk Profile - Consumer & Subsidiaries Portfolio Update - Commercial Portfolio Update - Corporate Portfolio Update - SME Portfolio Update - Market Risk Update - Business Continuity Management (BCM) Update - Other notes from RMC
10	23 November 2012	<ul style="list-style-type: none"> - WOM : Portfolio, Enterprise Risk Dashboard (ERD) - BII Finance : Portfolio, Enterprise Risk Dashboard (ERD) - Enterprise Risk Dashboard (ERD) - Revision of Credit Policy related to new PBI No.14/15/PBI/2012 - Consumer & Subsidiaries Portfolio Update - Commercial Portfolio Update - Corporate Portfolio Update - SME Portfolio Update - Market & Liquidity Risk Management Update - Operational Risk Dashboard
11	14 December 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Non Bank Financial Institution Scorecards - Risk Appetite Statement 2013 - Incident Management & Data Collection (IMDC), Key Risk Indicator (KRI) - Business Continuity Management (BCM) Framework - Industry Limit Portfolio

2. Asset & Liabilities Management Committee (ALCO) dan Asset Liabilities Management (ALM)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. Penyempurnaan fungsi dan tanggung jawab ALCO telah dilakukan melalui Surat Edaran No.SE.2012.003/PRES DIR tanggal 6 Juni 2012.

Asset & Liabilities Management (ALM) adalah penerapan manajemen keuangan dan risiko dalam pengelolaan posisi neraca Bank (*on dan off balance sheet*) untuk memperoleh profil *risk/return* yang paling optimum sehingga dapat meningkatkan *stakeholder value*.

Fokus area *Asset & Liabilities Management (ALM)* adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen risiko suku bunga
- b. Manajemen risiko likuiditas
- c. Manajemen pengelolaan modal
- d. Manajemen atas eksposur mata uang

2. Asset & Liabilities Management Committee (ALCO) dan Asset Liabilities Management (ALM)

ALCO is a committee established by The BOD. Management has improved the functions and responsibilities of ALCO based on SE No.2012.003/PRES DIR dated 6 June 2012.

Asset & Liabilities Management (ALM) is the implementation of financial and risk management in managing the Bank's balance sheet position (on and off balance sheet) to obtain the optimum risk/return profile in order to enhance stakeholder value.

Focus area of *Asset & Liabilities Management (ALM)* is as follows:

- a. Interest rate risk management
- b. Liquidity risk management
- c. Capital management
- d. Currency exposure management

Terdapat 2 aspek berkaitan dengan fungsi *Asset & Liabilities Management (ALM)*, yaitu:

1. Fungsi pengambilan keputusan:
Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)
2. Fungsi *support ALM*:
ALM Support Unit

There are 2 aspects related to the function of *Assets & Liabilities Management (ALM)*, namely:

1. The decision making function:
Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)
2. *ALM support function*:
ALM Support Unit

Komposisi keanggotaan ALCO | ALCO membership composition

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Presiden Direktur President Director	Ketua Chairman
2	Treasurer Treasurer	Wakil Ketua Vice Chairman
3	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Anggota Member
4	Direktur Perbankan Korporasi Corporate Banking Director	Anggota Member
5	Direktur Perbankan SME SME Banking Director	Anggota Member
6	Direktur Perbankan Konsumer Consumer Banking Director	Anggota Member
7	Direktur Keuangan Finance Director	Anggota Member
8	Direktur Operasional Director of Operations	Anggota Member
9	Asset & Liability Management Support Unit Head Asset & Liability Management Support Unit Head	Sekretaris Secretary

No	Undangan Tetap Dalam Rapat ALCO Permanent Invitees in ALCO Meetings
1	Direktur Legal & Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Legal & Compliance Director and Corporate Secretary
2	Direktur Human Capital Director of Human Capital
3	Head, Economic Research Head, Economic Research
4	Head, Global Markets Trading Head, Global Markets Trading
5	Head, Global Markets Balance Sheet & Liquidity Management Head, Global Markets Balance Sheet & Liquidity Management
6	Head, Market Risk Management Head, Market Risk Management

Keterangan | Description :

Komposisi keanggotaan sesuai dengan No.SE.2012.003/PRESDIR tanggal 6 Juni 2012 tentang *Assets & Liabilities Management* dan *Assets & Liabilities Management Committee (ALCO)*

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur neraca yang terus berubah untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.

1. Membuat metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan bank dalam hal risiko pasar (suku bunga, nilai tukar dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
2. Menyetujui kebijakan, strategi dan pedoman risiko suku bunga.
3. Menyetujui kebijakan, strategi dan pedoman likuiditas dan pendanaan.

Duties and Responsibilities of ALCO

Provides strategic direction of ALM and ensure tactical follow-up to establish a balance sheet structure that is constantly changing in order to achieve the performance objectives within the determined risk parameters.

1. Establish measurement methodology from bankwide perspective for market risk (interest rates, exchange rates and the value of securities) and liquidity risk.
2. Approves the interest rates risk policy, strategy, and guidelines.
3. Approves the liquidity and funding policy, strategy, and guidelines.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

4. Menentukan limit keseluruhan untuk tiap mata uang dalam pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas, memonitor dan memutuskan untuk menyetujui/tidak menyetujui eksekusi limit jika dan saat terjadi eksekusi limit, sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.
 5. Membuat standar dan kebijakan untuk *internal transfer pricing*.
 6. Memonitor dan mengelola konsolidasi posisi likuiditas dan suku bunga.
 7. Menentukan tingkat suku bunga *earning assets* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya sasaran likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur balance sheet yang konsisten dengan strategi ALM.
 8. Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
 9. Mengelola struktur modal perusahaan dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
 10. Mengelola portofolio investasi bank.
 11. Di mana dan pada waktu dapat diterapkan, melakukan hedging terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing.
 12. Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari pemerintah dan Bank Indonesia.
 13. Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
4. Determines the overall limit for each currency in the management of market risk and liquidity risk, monitor and decided to approve/disapprove the excess limit if and when excess limit occurs, in accordance with the risk management policy that has been set.
 5. Establish an internal transfer pricing standard and policy.
 6. Monitor and manage consolidated liquidity position and interest rates of the bank.
 7. Determines interest rate level for the earning assets and liabilities' to ensure that the interest rates level may encourage optimum use of funds, cost of funds, fulfillment of the liquidity objectives, and balance sheet structure that is consistent with the ALM strategy.
 8. Determines the policy on cost (fee) charged in a variety of products and services.
 9. Manages the company's capital structure and capital utilization amongst various business units.
 10. Manages the bank's investment portfolio.
 11. Where and when applicable, to perform hedging on invested capital and profits in foreign currencies.
 12. Monitors the bank's compliance with regulations, relevant guidelines from the government and Bank Indonesia.
 13. Approve new products in relation to determining the interest rates level and other matters relating to exposure to market and liquidity risks.

Rapat ALCO

Pada 2012, ALCO bertemu sebanyak 12 kali, dengan perincian sebagai berikut:

ALCO Meeting

in 2012, ALCO held 12 meetings, with the following details:

Daftar Kehadiran Anggota Dalam Rapat ALCO 2012**Attendance List of ALCO Meetings 2012**

No	Nama Name	Tanggal Date												Jumlah Rapat Total Meeting
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		12 January 2012	22 February 2012	05 April 2012	25 April 2012	23 May 2012	28 June 2012	25 July 2012	30 August 2012	24 September 2012	31 October 2012	05 December 2012	12 December 2012	
ALCO Member														
1	Presiden Direktur President Director	x	x	x	v	v	v	v	v	v	v	v	v	9
2	Treasurer Treasurer	v	v	x	v	v	v	x	v	v	v	v	v	10
3	Direktur Keuangan Finance Director	v	v	x	x	v	v	x	v	v	v	v	v	9
4	Direktur Perbankan Korporasi Corporate Banking Director	x	v	v	v	v	x	v	v	v	v	v	v	10
5	Direktur Perbankan SME SME Banking Director	v	x	x	v	x	v	v	v	v	v	x	v	8
6	Direktur Perbankan Konsumer Consumer Banking Director	v	v	v	v	v	v	v	v	x	v	v	v	11
7	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	v	v	x	v	v	v	v	v	x	v	v	v	10
8	Direktur Operasional & IT Operations & IT Director	v	x	x	v	v	v	v	x	v	x	v	v	8

Berdasarkan surat edaran No.SE.2012.003/PRES DIR tanggal 6 Juni 2012 tentang Assets & Liabilities Management Dan Assets & Liabilities Management Committee (ALCO), rapat ALCO juga dihadiri oleh undangan tetap lainnya antara lain Direktur Legal & Compliance, Direktur Human Capital, Economic Research Head, Market Risk Management Head, Global Markets Balance Sheet & Liquidity Management Head dan Global Markets Trading Head.

Agenda ALCO

Agenda ALCO minimum mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Meninjau risalah rapat sebelumnya dan melakukan tindak lanjut atas persoalan yang timbul (jika ada).
2. Meninjau dan melakukan analisis prospek ekonomi, politik dan pasar termasuk evaluasi atas *country risk*.
3. Melakukan analisis atas neraca beserta perubahan komposisinya.
4. Melakukan analisis *net interest income*.
5. Melakukan analisis likuiditas dan *liquidity gap*.

Based on circular letter No.SE.2012.003/PRES DIR dated 6 Juni 2012 concerning Assets & Liabilities Management and Assets & Liabilities Management Committee (ALCO), ALCO Meeting was attending by others invitee include Compliance & Legal Director, Human Capital Director, Head Economic Research, Head Market Risk Management, Head Global Markets Balance Sheet & Liquidity Management and Head Global Markets Trading

ALCO Agenda

ALCO agenda contains at least the following:

1. Review the previous Minutes of the Meeting and follow-up on any issues arised (if any).
2. Review and analyze the prospects of economy, politic, and market including the evaluation on *country risk*.
3. Analyze balance sheet as well as any changes on its composition.
4. Analyze *net interest income*.
5. Analyze *liquidity and liquidity gap*.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

6. Rasio konsentrasi likuiditas.
 7. Melakukan analisis *mismatch* suku bunga dan analisa sensitivitas.
 8. Neraca tertimbang berdasarkan resiko, asset yang disesuaikan dengan risiko dan *return on capital*.
 9. Perkembangan produk-produk pesaing dan tingkat suku bunganya.
 10. Meninjau tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga.
 11. Meninjau masalah terkini berkenaan dengan peraturan dan kepatuhan.
 12. Meninjau proposal dan eksekusi limit.
 13. Eksposur atas risiko pasar dan likuiditas.
 14. Memberikan persetujuan untuk proposal Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), dan proposal suku bunga Kredit dan Deposito.
 15. Membahas perkembangan bisnis terbaru terkait dengan *Assets dan Liabilities*.
6. Liquidity concentration ratio.
 7. Analyzing interest rates mismatch and sensitivities.
 8. Risk weighted balance sheet, risk adjusted assets, and return on capital.
 9. The developments of competitor products and the interest rates level.
 10. Reviewing the credit interest rates level and third party funds.
 11. Reviewing the latest issues relating to regulation and compliance.
 12. Reviewing proposals and excess limit.
 13. Market and liquidity risk exposures.
 14. Providing approval on Prime Lending Rate, Credit and Deposit interest rates proposal.
 15. Discuss the latest business developments relating to assets and liabilities.

Realisasi Kerja ALCO 2012

Kebijakan dan pedoman Risiko Pasar untuk *Trading book*, *Bankwide Liquidity Risk*, *Interest Rate Risk in the Banking Book* dan *Liquidity Contingency Plan (LCP)* telah diperbaharui pada tahun 2012 untuk menyesuaikan perkembangan kondisi ekonomi global. Kebijakan yang terkandung di dalamnya selaras dengan peraturan terbaru dari Bank Indonesia, Basel, IAS/PSAK dan Maybank Grup.

Bank juga telah memperbaharui limit-limit yang berkaitan dengan *treasury portfolio* dan *banking book* dimana limit tersebut telah disetujui oleh ALCO pada bulan April 2012 untuk *trading book limit* dan bulan Juni 2012 untuk *banking book limit*.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2012, Perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), BII menghitung, melaporkan dan mempublikasikan SBDK untuk 3 (tiga) jenis kredit dalam Rupiah, yaitu kredit korporasi, kredit ritel dan kredit konsumsi (terdiri dari KPR dan Non KPR). Review untuk SBDK dilakukan secara reguler pada pertemuan ALCO.

3. IT Steering Committee (ITSC)

IT Steering Committee adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang disesuaikan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank serta memantau efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan TI.

ALCO Work Realization for 2012

Market Risk policy and guidelines for the Trading Book, Bankwide Liquidity Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book and Liquidity Contingency Plan (LCP) has been revisited in 2012 to align with the latest developments in the global economic conditions. The content of these policies are in line with the latest regulations of Bank Indonesia, Basel, IAS/PSAK and Maybank Group.

The Bank has also renewed the limits related to treasury portfolio and the banking book where the limit has been approved by ALCO in April 2012 for the trading book limit and in June 2012 for banking book limit.

In accordance to the Circular Letter of Bank Indonesia No.13/5/DPNP dated 8 February 2012, pertaining to the Transparency of Information on Base Lending Interest Rates, BII has calculated, report and publish the prime lending rate for three (3) types of credit in Rupiah, namely, the corporate credit, retail credit and consumer credit (consist of mortgage and non-mortgage). Review for SBDK is performed regularly through the ALCO meeting.

3. IT Steering Committee (ITSC)

IT Steering Committee is a committee established by the BOD and serves to provide recommendations to the BOD regarding the IT strategic plan in line with the Bank's business activities. In addition, the committee is also responsible in monitoring the effectiveness and efficiency of IT policy implementation.

A. Dasar Pembentukan ITSC

- PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- SE BI No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Surat Edaran No.SE.2012.021/DIR OPS & IT tanggal 12 Oktober 2012 tentang IT Steering Committee ITSC.

B. Struktur Keanggotaan ITSC

Mengingat adanya perubahan struktur organisasi pada level Direksi dan Senior Management IT, maka struktur keanggotaan ITSC disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Susunan Keanggotaan ITSC terdiri dari:

- Anggota IT Steering Committee dan yang mempunyai hak suara; dan
- Undangan Tetap.

Struktur Keanggotaan ITSC

Berdasarkan Surat Edaran No.SE.2012.021/DIR OPS & IT tanggal 12 Oktober 2012 tentang IT Steering Committee ITSC

A. The Base of ITSC Establishment

- PBI No.9/15/PBI/2007 dated 30 November 2007 on Application of Risk Management in Information Technology by Commercial Banks
- SE BI No.9/30/DPNP dated 12 December 2007 on Application of Risk Management in Information Technology by Banks.
- Circular Letter No.SE.2012.021/DIR OPS & IT dated 12 October 2012 on IT Steering Committee ITSC.

B. ITSC Membership Structure

Given the changes in the organizational structure at the level of the BOD and IT Senior Management, the ITSC membership structure is aligned with the bankwide changes.

Membership composition of ITSC comprises of:

- Member of IT Steering Committee with voting rights; and
- Permanent Invitee.

ITSC Membership Structure

Based on Circular Letter No.SE.2012.021/DIR OPS & IT dated 12 October 2012 on IT Steering Committee ITSC

No	Anggota IT Steering Committee dan yang mempunyai hak suara Member of IT Steering Committee and with voting right	Position Jabatan
1	Presiden Direktur President Director	Ketua Chairman
2	Direktur Operasional & TI Operations and IT Director	Wakil Ketua Co Chairman
3	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Anggota Member
4	Direktur Keuangan Finance Director	Anggota Member
5	Direktur Perbankan <i>Wholesale</i> Wholesale Banking Director	Anggota Member
6	Direktur Perbankan Konsumer Consumer Banking Director	Anggota Member
7	Direktur Perbankan UKM SME Banking Director	Anggota Member
8	Kepala Unit Kerja Teknologi Informasi Information Technology Head	Anggota Member

Nama Direktorat merujuk pada SE No.2012.007/PRES DIR perihal Struktur Organisasi BII yang terakhir

Name of Directorate refers to the circular letter No.SE.2012.007/PRES DIR

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

No	Undangan Tetap Dalam Rapat IT Steering Committee IT Steering Committee Permanent Invitee
1	Direktur Legal & Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Legal & Compliance Director and Corporate Secretary
2	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director
3	Kepala Unit kerja SKAI Chief of SKAI
4	Front End Development Head Front End Development Head
5	IT Planning & Services Head IT Planning & Services Head
6	IT Operations & Services Head IT Operations & Services Head
7	Project Management Head Project Management Head
8	Information Security Head Information Security Head
9	Back End Development Head Back End Development Head

Selain undangan tetap, IT Steering Committee dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat.

Untuk memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan IT Steering Committee meeting paling sedikit dihadiri oleh 5 orang anggota dan dalam kondisi anggota tidak bisa hadir dapat didelegasikan kepada pejabat penggantinya.

In addition to regular attendees, IT Steering Committee may invite other officer that relevant with subject matters discussed in the meeting.

To constitute a quorum, each implementation of IT Steering Committee meeting is attended by at least five members of the IT Steering Committee and in the event that the member is unable to attend, he/she may be delegated to appointed officer.

C. Wewenang dan Tanggung Jawab IT Steering Committee

Wewenang dan tanggung jawab IT Steering Committee adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, IT Steering Committee memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. IT Steering Committee juga menetapkan status prioritas

C. Duties and Responsibilities of IT Steering Committee

The authority and responsibility of IT Steering Committee are to provide recommendations to the Board of Directors which include:

- Information Technology Strategic Plan in line with the strategic plan of the Bank's business activities. In providing recommendations, the IT Steering Committee also considers the efficiency and effectiveness, and other matters as follows:
 - Implementation plan (*road-map*) to meet the IT needs in supporting the Bank's business strategy. The road map consists of the current state, future state and the steps to be taken to achieve the future state.
 - The resources needed.
 - Advantages/benefits to be obtained when the plan is implemented.
- Formulation of main IT policies and procedures such as security policy and risk management related to the use of IT in the Bank.
- The conformity between the approved IT projects and the IT Strategic Plan. IT Steering Committee also set the priority status of IT

proyek TI yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan.

- d. Memantau kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati dalam Service Level Agreement. IT Steering Committee bertanggung jawab melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- g. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. IT Steering Committee dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka IT Steering Committee harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.
- j. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Milyar rupiah.
- k. Untuk setiap proyek TI yang sudah disetujui dalam IT Steering Committee, sudah termasuk persetujuan *business casenya* sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No.SE.2011.014/DIR FIN & IT tentang Persetujuan Pengeluaran Biaya.

D. Aktivitas IT Steering Committee

1. Frekuensi Rapat

IT Steering Committee melakukan pertemuan minimum setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan

projects that are critical (posing significant impact on the operation of the Bank), such as core banking applications, production servers and network topology.

- d. Monitoring the suitability between the implementation of IT projects with the project plan as agreed in Service Level Agreement. IT Steering Committee is responsible to complete the recommendations with the analysis of IT main projects to enable BOD to take decisions efficiently.
- e. Suitability of management information systems that support the Bank's business activities.
- f. The effectiveness of risk mitigation measures on Bank investments in the IT sector and the investments contributing to the achievement of the Bank's business objectives.
- g. Monitoring of IT performance, and efforts of improvement, for example by detecting IT obsolescence and measuring the effectiveness and efficiency of the implementation of IT security policy.
- h. Efforts to resolve IT related problems, which cannot be solved by working unit users and organizers. The IT Steering Committee facilitates the relationship between working units.
- i. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank. Should the resource is not adequate and the Bank has to use outsourced services in the implementation of IT, the IT Steering Committee should ensure that Bank has a policy and related procedures.
- j. Evaluation and approval for IT projects implementation that require investment more than Rp. 1 billion.
- k. For any IT project that has been approved by the IT Steering Committee, it already includes agreement for business case as stipulated in the Circular No.SE.2011.014/DIR FIN & IT on Expenses Agreement.

D. IT Steering Committee Activity

1. Meeting Frequency

The IT Steering Committee holds at least one meeting every 3 (three) months to discuss important/urgent issues effectively and

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

IT Steering Committee dapat memutuskan untuk merubah frekuensi pertemuan agar dapat mengakomodasi permasalahan IT lebih awal.

Selama 2012, ITSC telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 8 (delapan) kali rapat.

efficiently in accordance to the authority and responsibility that has been determined.

IT Steering Committee may change meeting frequency in order to accommodate IT problems earlier.

During 2012, ITSC held 8 (eight) meetings.

2. Data Kehadiran Rapat Anggota ITSC

2. ITSC Member Attendance Data

No	Nama Name	2012								Jumlah Kehadiran Total Attendance
		1 21 February	2 28 February	3 1 May	4 5 June	5 7 August	6 2 October	7 6 November	8 4 December	
Anggota IT Steering Committee IT Steering Committee Member										
1	Presiden Direktur President Director		v *	v	v	v	v	v	v	7
2	Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Operations and IT Director	v	v	v	x	v	v	x	v	6
3	Direktur Keuangan Finance Director	v	v	v	v	v	v	v	v	8
4	Direktur Perbankan Konsumer *** Consumer Banking Director	v	v	v	v	v	v	v	x	7
5	Direktur Perbankan Wholesale Wholesale Banking Director	v	v	v	v	v	v	v	v	8
6	Direktur Perbankan UKM SME Banking Director	x	v	v	v	v	x	x	x	4
7	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	v	v	v	v	v	v	v	v	8
8	Kepala Unit Kerja Teknologi Informasi Information Technology Head	v	v	v	v	v	v	v	v	8
Undangan Invitee										
1	Direktur Legal & Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Legal & Compliance Director and Corporate Secretary	v **	v **	v	v	v	v	v	v	8
2	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director		v *	v	v	v	v	x	v	6

Keterangan | Description:

■ Belum menjadi Anggota maupun Undangan ITSC | Not yet become member or invitee of ITSC

* Kehadiran Presiden Direktur & Direktur Sumber Daya Manusia pada 28 Februari 2012 dalam kapasitasnya sebagai undangan
The attendance of President Director and Human Capital Director on 28 February 2012 as invitee

** Kehadiran Direktur Legal & Kepatuhan dan Corporate Secretary pada 21 Februari dan 28 Februari 2012 dalam kapasitasnya sebagai Anggota ITSC
The attendance of Legal & Compliance Director and Corporate Secretary on 21 February and 28 February 2012 as ITSC Member

*** Efektif mengundurkan diri per Januari 2013 | Resigned effective as of January 2013

X : Tidak Hadir | Absent

V : Hadir | Present

3. Risalah Rapat

Setiap rapat harus dibuat Risalah Rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota IT Steering Committee dan peserta lain yang hadir dalam pertemuan tersebut.

3. Minutes of the Meeting

The Minutes of each meeting has been prepared and distributed to all members of IT Steering Committee and other meeting attendees.

4. Agenda Rapat ITSC 2012**4. ITSC 2012 Meeting Agenda**

No	Tanggal Date	Agenda
1	21 February 2012/ 28 February 2012	No.M.2012.014/DIR FIN & IT a. Review ITSC MOM (18 November 2011) b. ITSP Presentation c. IT TP Benefit – Cost Analysis Update d. Approval for Loyalty System Business Case Approval for IT Data Centre Relocation Branch Optimization Development Cost e. System Availability Update f. IT Projects 2012 Updates
2	1 May 2012	No.M.2012.022/DIR FIN & IT a. Review ITSC MOM (21 & 28 Februari 2012) a. ITSC Approval Business Case a. System Availability Update (as of April 2012) b. SKN Problem c. IT Projects 2012 Update
3	5 June 2012	No.M.2012.028/DIR FIN & IT a. IT SC Approval Business Case b. System Availability Update (as of April 2012)
4	7 August 2012	No.M.2012.034/DIR OPS & IT - IT a. Maybank Presentation on ON/2 dan Data Centre Review b. Review ITSC MOM (3 Juli 2012) b. ITSC Approval : Business Case, Project Approval, ITSC Governance a. System Availability Update (as of July 2012) b. Critical Application Category c. IT Projects 2012 Update
5	2 October 2012	No.M.2012.041/DIR OPS & IT-IT a. Review ITSC MOM (7 Agustus 2012) b. ITSC Approval Business Case c. System Availability Update (as of September 2012) d. IT Projects 2012 Updates
6	6 November 2012	No.M.2012.050/DIR OPS & IT – IT a. Review ITSC MOM (2 October 2012) b. IT SC Approval (List of Major Applications) ITSC Approval Business Case c. Server Utilization – Performance Report d. IT Projects in 2012 - Updates
7	4 December 2012	No.M.2012.051/DIR OPS & IT – IT a. Review ITSC MOM (6 November 2012) b. Core Banking Assessment by IBM c. ITSC Approval d. Information Updates e. Key IT Projects in 2012 - Updates

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

4. Komite Human Capital

A. Dasar Pembentukan

Direksi membentuk Komite Human Capital untuk mendapatkan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting dalam hal pengembangan organisasi, *Compensation & Benefit*, *Talent Management*, *Succession Management* serta kebijakan baru terkait dengan pemberdayaan SDM dan pokok persoalan kunci di bidang SDM yang berdampak terhadap risiko keuangan dan/atau reputasi organisasi.

Komite Human Capital bertanggung jawab kepada Direksi.

B. Struktur Keanggotaan Komite Human Capital

4. Human Capital Committee

A. Basis for Establishment

BOD established the Human Capital Committee to obtain strategic directions and important decision making in the areas of organizational development, Compensation & Benefit, Talent Management, Succession Management and new policies related to the Bank's human resource development and other key issues that may financially or reputationally affect the organization.

Human Capital Committee reports to the Board of Directors.

B. Human Capital Committee Membership Structure

No	Nama Name	Jabatan Position
Anggota Member		
1	Presiden Direktur President Director	Ketua Chairman
2	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	Anggota Member
3	Direktur Perbankan Konsumer Consumer Banking Director	Anggota Member
4	Direktur Perbankan Wholesale Wholesale Banking Director	Anggota Member
5	Direktur Perbankan UKM SME Banking Director	Anggota Member
6	Direktur Keuangan Finance Director	Anggota Member
7	Direktur Operasional & TI Operations & IT Director	Anggota Member
8	Pejabat Eksekutif Human Capital Human Capital Executive Officer	Sekretaris Secretary
Undangan Invitee		
1	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Undangan Invitee
2	Direktur Legal & Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Legal & Compliance Director and Corporate Secretary	Undangan Invitee

Catatan | Note:

Nama Direktorat merujuk pada Surat Edaran No.SE.2012.007/PRES DIR perihal Struktur Organisasi PT Bank Internasional Indonesia, Tbk tanggal 14 Desember 2012.

Name of Directorate refers to the Circular Letter No.SE.2012.007/PRES DIR on Organizational Structure of PT Bank International Indonesia Tbk dated 4 December 2012.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Human Capital

1. Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana fungsinya sebagai *supervisory/advisory* dalam menunjang proses transformasi BII pada area pengembangan organisasi, kebijakan *compensation & Benefit*, manajemen suksesi dan implementasi kebijakan-kebijakan SDM di tingkat strategis.

C. Duties and Responsibilities of the Human Capital Committee

1. Assisting the BOD in fulfilling its responsibilities as supervisory/advisory in supporting transformation process in the areas of organizational development, compensation & benefits policy, succession management and implementation of HR policies at the strategic level.

- Membantu Direksi dalam memberikan arahan dan mengambil keputusan yang terkait dengan nominasi/promosi serta remunerasi di tingkat pejabat Kepala Unit Kerja/Kepala Kantor Wilayah.

D. Rapat Human Capital Committee

Selama 2012 Komite Human Capital telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Assisting the Directors in providing guidance and taking decisions related to the nomination/promotion and remuneration at the Division Head Unit/Head of Regional Office.

D. Human Capital Committee Meeting

During 2012, the Human Capital Committee held 10 (ten) meetings.

Kehadiran Rapat Anggota Komite Human Capital 2012 Meeting Attendance of Human Capital Committee Member 2012

No	Name Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Total
		06 March 2012	03 April 2012	01 May 2012	05 June 2012	02 July 2012	7 August 2012	12 September 2012	2 Oktober 2012	6 November 2012	04 December 2012	
1	Presiden Direktur President Director	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
2	Direktur Sumber Daya Manusia Human Capital Director	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
3	Direktur Perbankan Konsumer Consumer Banking Director	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	9
4	Direktur Perbankan Wholesale Wholesale Banking Director	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
5	Direktur Perbankan UKM SME Banking Director	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
6	Direktur Keuangan Finance Director	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10
7	Direktur Operasional & TI Operations & IT Director	√	√	√	x	√	√	√	√	x	x	7
Undangan Invitee												
1	Direktur Legal & Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Legal & Compliance Director and Corporate Secretary	√	√	√	x	√	√	√	√	√	√	9
2	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	√	x	√	√	√	√	√	√	√	√	9

Keterangan | Description:

- *) Baru menjadi anggota per Mei 2012 dan kehadiran pada bulan Maret dan April sebagai undangan.
Appointed as member per May 2012 and attendance in March and April as invitee

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

E. Agenda Rapat

E. Meeting Agenda

Tanggal Date	Agenda
06 Maret 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revision of Charter of HC Committee 2. 2011 Balance Scorecard Rating Result 3. Recruitment and MPP Approval Matrix 4. Direct Contract Staff 5. Employee Loan 6. HC Organization & People
03 April 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Productivity Improvement Project Kick Off 2. Branch Recruitment 3. HC Readiness 4. JE Band Splitting 5. BII Country Talent Review (CTR)
01 May 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matters arising from last meeting 2. Human Capital Dashboard 3. Outsourcing
05 June 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matters arising from last meeting 2. Internal Customer Engagement Survey (ICES) 3. Other matters
02 July 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matters arising from last meeting 2. Job Evaluation – BOD-1 positions
07 August 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matters arising from last meeting 2. EES – My Voice 2012 3. Others
12 September 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matters arising from last meeting 2. Sales Incentive Plan 3. HC Policy Update 4. Others
02 October 2012	BII Country Talent Review (CTR)
06 November 2012	1. 2013 Committee Meeting Fixed Agenda
04 December 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matters arising 2. BII's CEO Scorecard

F. Program Kerja Komite Human Capital Beserta Realisasinya

Selama 2012, Komite Human Capital telah menghasilkan keputusan terkait dengan kebijakan di bidang SDM yaitu:

1. Penentuan parameter penilaian kinerja individual dalam kaitannya dengan *Performance Management System*;
2. Penentuan remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan;
3. Pengendalian jumlah karyawan terkait produktifitas karyawan;
4. Program retensi dan pengembangan bagi karyawan berpotensi;
5. Meninjau peraturan terkait tenaga kerja beserta dampaknya;
6. Penetapan penggantian pejabat eksekutif.

F. Human Capital Committee Work Program and Realization

During 2012, Human Capital Committee has made decisions with regards to human resource policies, which were:

1. Determine individual performance assessment parameters in relation to Performance Management System;
2. Determine remuneration for all employees;
3. Monitor the number of employees with regards to employee productivity;
4. Retention program for potential employees;
5. Reviewing relevant labor regulations and the impacts;
6. Decide on replacements of executive officers.

5. Internal Audit Komite (IAC)

Internal Audit Committee merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi pada bulan Mei 2012 untuk membantu kinerja Direksi dalam memastikan pelaksanaan komitmen Bank kepada pihak otoritas yang berwenang serta melakukan evaluasi atas hasil temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal maupun eksternal serta pihak otoritas berwenang.

Tujuan Pembentukan Internal Audit Committee

1. Memastikan bahwa manajemen telah memberikan tanggapan atas keseluruhan temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor (eksternal dan internal) dan regulator;
2. Memastikan bahwa temuan audit beserta rekomendasinya telah ditindaklanjuti oleh unit kerja secara tepat waktu dan efektif;
3. Memastikan keefektifan tindak lanjut manajemen dalam melaksanakan rekomendasi audit;
4. IAC akan menindaklanjuti komentar yang disampaikan oleh Komite Audit yang ditujukan untuk direksi.

Dasar Pembentukan Internal Audit Komite

IAC dibentuk pada bulan Mei 2012 berdasarkan keputusan Direksi yang dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi tanggal 8 Mei 2012 pada agenda Lainnya, terkait pembentukan *Internal Audit Committee*. Berdasarkan keputusan Direksi tersebut juga telah dibuat *Term of Reference* dari *Internal Audit Committee*.

Tugas Dan Tanggung Jawab IAC

1. Mendiskusikan seluruh laporan hasil audit (SKAI, laporan eksternal auditor dan regulator).
2. Segala hal yang berhubungan dengan audit dan kejadian *Fraud* harus diinformasikan segera kepada IAC .
3. Melakukan pengawasan atas efektivitas tindak lanjut manajemen yang berkaitan dengan temuan audit.
4. Melakukan follow up dan monitoring atas status rekomendasi yang telah diberikan oleh SKAI, eksternal auditor dan regulator.
5. Mendiskusikan ringkasan laporan audit sebelum dikirimkan kepada Komite Audit.
6. Melakukan review atas ringkasan temuan audit yang belum ditindaklanjuti beserta statusnya.

5. Internal Audit Committee (IAC)

The Internal Audit Committee is a committee formed by the BOD to ensure our commitment to regulator and conducts evaluation on the finding and recommendation from internal or external auditor, as well as regulator to assist in monitoring internal and external findings as well as the resolutions in accordance to the commitments.

Objectives of Internal Audit Committee

1. To ensure that management has responded all findings and recommendations provided by the auditors (external and internal) and the regulator;
2. To ensure that the audit findings and its recommendation has been followed up by the working unit in a timely and effective manner;
3. To ensure the effectiveness of the management's follow-up in implementing audit recommendations;
4. IAC will follow up on any comments made by the Audit Committee which is addressed to the Board of Directors.

The Basis of Internal Audit Committee Establishment

IAC was established in May 2012 based on Board of Director resolution dated 8 May 2012 under the agenda of Others, related to the establishment of the Internal Audit Committee. Based on the decision of the Board of Directors, terms of reference of the Internal Audit Committee has also been made.

Duties and Responsibilities of IAC

1. Discuss all audit reports (SKAI, external auditors and regulator comments).
2. All matters related to audit and fraud occurrences must be notified immediately to the IAC.
3. Conduct monitoring on the effectiveness of management's follow-up related to audit findings.
4. Conduct follow-up and monitoring on recommendation status provided by the Internal Audit Unit, external auditors and regulators.
5. Discuss the summary of audit report before it is conveyed to the Audit Committee.
6. Review the summary of audit findings which have not been followed up and their status.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Susunan Internal Audit Komite | Composition of the Internal Audit Committee

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Presiden Direktur President Director	Ketua Chairman
2	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Vice Chairman Wakil Ketua
3	Direktur Legal & Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Legal & Compliance Director and Corporate Secretary	Anggota Member
4	Direktur Operasional & TI Operations & IT Director	Anggota Member
5	Direktur Perbankan UKM SME Banking Director	Anggota Member
6	Kepala Unit Kerja Kepatuhan Head of Compliance	Anggota Member
7	Kepala Unit Kerja Anti Money Laundering & Assurance Head of Anti Money Laundering & Assurance	Anggota Member
8	Kepala Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional Head of Operational Risk Management	Anggota Member

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran IAC

2012 IAC telah menyelenggarakan rapat selama sebanyak 7 (tujuh) kali.

IAC Meeting Frequency and Attendance

IAC has held 7 (seven) meeting during 2012

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran IAC | IAC Meeting Frequency and Attendance Level

No	Anggota IAC Member of IAC	1	2	3	4	5	6	7	Jumlah Rapat Total Meeting
		16 Mei 2012	13 Juni 2012	11 Juli 2012	18 Juli 2012	17 September 2012	4 Oktober 2012	21 November 2012	
1	Direktur Keuangan Finance Director	x	√	√	x	√	x	√	4
2	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	√	√	x	√	x	√	√	5
3	Direktur Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan Compliance & Legal Director, Corporate Secretary	√	x	√	√	√	√	√	6
4	Direktur Operasional & TI Operational & IT Director	√	x	x	√	√	√	x	4
5	Direktur Perbankan UKM SME & Commercial Banking Director	x	√	√	x	√	√	x	4
6	Kepala Unit Kerja Kepatuhan Head of Compliance	√	√	√	x	√	√	√	6
7	Kepala Unit Kerja Anti Money Laundering & Assurance Head of Anti Money Laundering & Assurance	√	√	√	x	√	√	√	6
8	Kepala Unit Kerja Operational Risk Management Head of Operational Risk Management	√	√	√	√	√	x	√	6

Risalah rapat IAC diinformasikan oleh Ketua Komite kepada President Direktur dan Audit Komite.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan IAC

Selama 2012, kegiatan IAC secara ringkas adalah membahas status temuan audit baik yang berasal dari SKAI, eksternal auditor dan regulator. IAC juga memberikan rekomendasi secara *bankwide* khususnya atas temuan audit yang bersifat sistemik.

Untuk temuan yang melewati jatuh tempo, perpanjangan jatuh tempo penyelesaian dapat diberikan oleh Internal Audit Committee (IAC) namun perpanjangan *target date* tersebut tidak merubah status temuan menjadi *outstanding*, temuan tersebut tetap dikategorikan sebagai *overdue* dengan tujuan Direktur terkait dapat melakukan monitoring yang lebih baik serta mengupayakan penyelesaian temuan audit oleh unit kerja di bawah supervisinya.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia ("BI") melalui PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 ("PBI Fungsi Kepatuhan") mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BII telah menunjuk "Rita Mirasari" sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan tersebut telah disetujui BI pada tanggal 18 Mei 2009 sesuai dengan surat BI No. 11/60/GBI/DPIP/Rahasia Riwayat hidup Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat dilihat di bagian Data Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memenuhi kriteria independensi dan kriteria lain sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak ada rangkap jabatan dengan Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.

Minutes of the IAC meeting is conveyed by the Chairman of the Committee to the President Director and Audit Committee.

Brief Report on the implementation of IAC

During 2012, IAC discuss the status of audit comments from internal audit, external auditors and regulators. IAC also provides recommendation on every comment from bankwide perspective, especially on systemic audit comments.

For overdue findings, the target date may be extended by the Internal Audit Committee (IAC), however the extension of the target date will not change the status of the findings to outstanding, the findings remain classified as overdue with the aim that the concerned Director can monitor better and make enforcement to the completion of the audit findings by the work unit under its supervision.

The Implementation Of Compliance Function

Compliance Director

As stipulated by Bank Indonesia ("BI") with PBI No.13/2/PBI/2011 dated 12 January 2011 concerning of Implementation of the Compliance Function On Commercial Banks, BII has appointed "Rita Mirasari" as the Director in charge for Compliance Function. The appointment has been approved by BI in accordance with the letter No 11/60/GBI/DPIP/ dated 18 May 2009. The brief profile of the Director in charge for Compliance Function can be viewed at the Company Data section of this Annual Report.

The Compliance Director has met the independency requirement as well as other criteria in accordance to PBI No.13/2/PBI/2011 dated 12 January 2011 on Implementation of the Compliance Function on Commercial Banks, namely:

1. Has no financial, management, ownership relationships and/or family relationships until second degree with members of the Board of Commissioners, Directors and/or controlling shareholders of the Bank, which may affect its independency in performing its duties
2. No concurrent position as President Director or Vice President Director.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak membawahkan fungsi-fungsi:

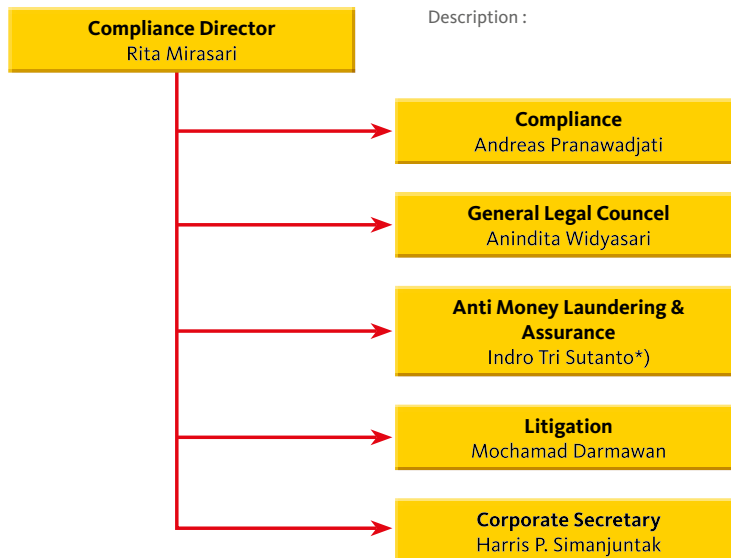
- Bisnis dan operasional;
- Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
- Treasury;
- Keuangan dan Akuntansi;
- Logistik dan pengadaan barang/jasa;
- Teknologi informasi; dan
- Audit intern.

The Compliance Director does not have responsibilities in the following functions:

- Business and Operations;
- Risk Management that is responsible to make decisions on the Bank's business activities;
- Treasury;
- Accounting and Finance;
- Logistics and Goods/Services Procurement;
- Information Technology; and
- Internal Audit.

Struktur Organisasi Unit Kerja dibawah Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Directorates' Organization Structure under the Compliance Director



Keterangan :
Struktur Organisasi PT BII Tbk yang diterbitkan melalui No.SE.2012.007/Presdir tanggal 14 Desember 2012
*) Bergabung sejak 23 April 2012

Organizational Structure of PT BII Tbk refer to No.SE.2012.007/Presdir dated 14 December 2012
*) Joined since 23 April 2012

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan meliputi:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

Duties and Responsibilities of the Compliance Director

Duties and responsibilities of the Compliance Director at least include:

- Formulate a strategy to promote the Bank's Compliance Culture;
- Propose compliance policy or compliance principles to be further enacted by Board of Directors;

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Meminimalikan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi kepatuhan di Bank, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja Anti Money Laundering & Assurance untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap peraturan BI dan perundang-undangan yang berlaku untuk bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan

Bank telah membentuk unit kerja kepatuhan sebagai unit kerja yang independen sebagaimana dimaksud dalam PBI Fungsi Kepatuhan. Unit kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengelola risiko kepatuhan, yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun budaya kepatuhan di seluruh unit organisasi sehingga pengelolaan kepatuhan menjadi disiplin yang dilaksanakan dalam pelaksanaan transaksi dan seluruh aktivitas operasional perbankan.

Dalam menjalankan tugasnya, unit kerja kepatuhan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (pencegahan) untuk memastikan

3. Establish compliance systems and procedures that will be used to compile the Bank's internal rules and guidelines;
4. Ensure that all policies, rules, systems and procedures, as well as business activities are compliant with the provisions of Bank Indonesia and all applicable regulations, including the Sharia Principles for Sharia Bank and Sharia Business Unit;
5. Mitigate the Bank's Compliance Risk;
6. Take preemptive actions to prevent the policy and/or decisions made by the Board of Directors from being non-compliant with the Bank Indonesia regulations and all prevailing regulations;
7. Perform other tasks related to the Compliance Function.

The above duties and responsibilities do not automatically remove the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Board of Directors of the Bank as stipulated in the Law on Limited Companies.

In carrying out its duties and responsibilities in implementing the compliance function in the Bank, the Compliance Director is supported by the Compliance Unit to ensure the compliance level meet the BI regulations and other prevailing regulations legislation related to banking industry and monitoring the fulfillment of commitments made to competent authorities.

Compliance Function

Bank has established the compliance unit as an independent working unit as stipulated on BI Regulation concerning of Implementation of the Compliance Function. Compliance unit responsible for managing compliance risk, which ultimately aims to build compliance culture of throughout the organization units so that the management of compliance will be disciplined in the execution of transactions and all banking operational activities.

In performing its duties, the compliance unit conduct actions or steps that are ex-ante (preventive) to ensure that policies, rules, systems, and procedures, as well

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan sebagai bagian dari kerangka pengelolaan manajemen risiko yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan unit kerja lain, yaitu diantaranya dengan meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan, baik dalam bentuk advisory, pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator maupun dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada unit-unit kerja.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank. Hal tersebut dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui laporan triwulanan dan semesteran dari Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Pengawasan aktif juga dilakukan melalui rapat-rapat yang dilakukan, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite. Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam memastikan pengelolaan risiko kepatuhan telah berjalan efektif dan memastikan terlaksananya budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Hal tersebut dituangkan melalui tatanan Kerangka Kerja Kepatuhan (Compliance Framework), Compliance Charter, Annual Compliance Plan sebagai bagian dari Strategi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang berkesinambungan melalui pengembangan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

Adalah merupakan tugas dan tanggung jawab setiap individu dalam Bank untuk melaksanakan budaya kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Setiap perilaku individu senantiasa berpijak pada core values dan berpedoman pada code of conduct dan code of ethic.

as the Bank's business activities are conducted in accordance with the provisions of BI and applicable laws and regulations, including compliance with the Sharia principles for the Sharia Business Unit, as well as to ensure compliance with the commitments made to BI and/or other competent regulatory authorities.

Compliance function is part of the risk management framework that responsible in managing compliance risk through coordination with other working units, among others by enhancing the compliance culture at all levels, in the form of advisory, compliance monitoring with prevailing regulations, as well as in the form of socialization and training to the working units.

Role of the Board of Commissioners and Directors

The Board of Commissioners actively monitors compliance function implementation at the bank. This is conducted by evaluating the implementation of the compliance function through the quarterly and semi-annual reports from Compliance Director. Active supervision is also carried out through meetings, namely Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings and other committees meetings. Based on the evaluation, Board of Commissioners provides advice to improve the quality of Bank Compliance Function.

Board of Directors and Commissioners play an active role in ensuring the compliance risk are well manage and compliance culture is implemented at all levels of the organization and business activities of the Bank.

This is reflected the establishment of Compliance Framework, Compliance Charter, and Annual Compliance Plan, as part of Compliance Function Implementation Strategy by developing compliance culture in order to manage the compliance risk.

It is the duties and responsibilities of each individual within the Bank to implement compliance culture in the Bank's business activities. Individual behavior is always refer to core values and guided by the code of conduct and code of ethic.

Agar pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan berjalan dengan efektif dan kepastian penanganan transaksi/kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, maka Direktur yang membawahkan Kepatuhan, Kepala Unit Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan merupakan pihak yang independen dari satuan kerja lainnya.

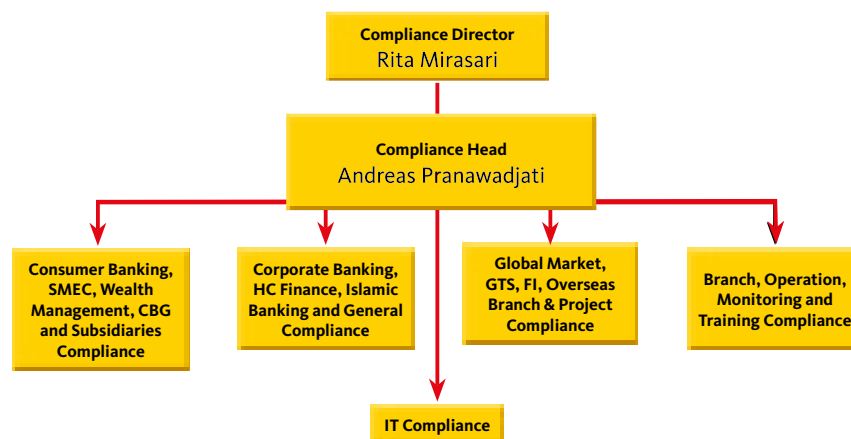
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Strategi Fungsi Kepatuhan diterapkan sesuai 4 (empat) pilar fungsi kepatuhan berikut ini:

1. Membangun dan mewujudkan agar terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua fungsi pada organisasi dan kegiatan usaha bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh sebuah Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan prosedur yang dijalankan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan terhadap komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lainnya.

Secara ringkas pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan diwujudkan melalui program kerja tahunan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Secara lengkap Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan telah disampaikan ke Bank Indonesia melalui Laporan Kepatuhan secara semesteran.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



In order to achieve for effective compliance risk management and certainty on transactions handling /activities with potential conflict of interest, the Compliance Director, Head of Compliance Unit and the Compliance Unit are independent to other unit.

Implementation of the Compliance Function

The compliance function basically includes the following 4 supervisory functions:

1. Developing and realizing the implementation of the Compliance Culture in all functions of the organization and business of bank;
2. Manage the Compliance Risk faced by the Bank;
3. Ensuring that policies, rules of procedure, that are performed by the bank are in accordance with the provisions of Regulator and legislation in force;
4. Ensure compliance with the bank's commitment to Bank Indonesia and/or other regulatory authorities

In brief, the implementation of the compliance function is realized through the Compliance Director's annual working plan. A complete Compliance Function Implementation Report has been submitted to Bank Indonesia through the semi-annual Compliance Reports.

Organizational Structure of the Compliance Unit

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Sesuai ketentuan Bank Indonesia maka Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Memenuhi persyaratan independensi;
- Menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ringkasan Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Andreas Pranawadjati, Compliance Head

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Katholik Atmajaya Jakarta pada tahun 1995.

Berpengalaman di industri perbankan lebih dari 16 tahun. Memulai karir di HSBC dengan jabatan terakhir sebagai Financial Reporting Manager, dilanjutkan dengan berbagai posisi di Standard Chartered Bank dengan jabatan terakhir sebagai Head of Wholesalebank Compliance. Bergabung dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk pada tanggal 2 Januari 2012.

Kerangka Kerja Kepatuhan

Kerangka kerja Compliance menyajikan kebijakan dan pedoman kepatuhan serta pengawasan bagi Bank. Kebijakan dan Pedoman Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan ketaatan pada hukum, peraturan, perundang-undangan, kebijakan internal dan kode etik dan pedoman tingkah laku. Prinsip, kebijakan dan prosedur disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan best practice yang berlaku dalam rangka mengidentifikasi, menilai, memonitor dan mengontrol risiko kepatuhan secara terus menerus di seluruh kegiatan usaha dan aktivitas di Bank.

Bank melaksanakan upaya/initiative strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan mitigasi risiko kepatuhan sejalan dengan perkembangan, tantangan serta risiko usaha bank yang semakin besar dan kompleks. Upaya yang dilakukan dapat bersifat ex-ante maupun ex-post.

Head of Compliance Working Unit

In accordance to Bank Indonesia regulation, the Head of a Compliance Working Unit has met the following criteria:

- Qualified for the independency requirements;
- Familiar with Bank Indonesia regulations and all applicable laws;
- Not in any position to perform other tasks beyond the Compliance Function; and
- Highly committed to implement and develop the compliance culture.

Appointment, dismissal, or replacement of the head of the compliance working unit shall be reported to Bank Indonesia.

Profile Summary of the Head of Compliance Working Unit

Andreas Pranawadjati, Compliance Head

Indonesian citizen, obtained the Economics Management degree from Atma Jaya Catholic University in 1995.

Experienced in the banking industry for 16 years with the last position at HSBC as Financial Reporting Manager, followed by several positions at Standard Chartered Bank with the last position as Head of Wholesalebank Compliance. Joined PT Bank Internasional Indonesia Tbk on 2 January 2012.

Compliance Framework

The Compliance Framework provides policies and guidelines for the Bank's compliance and supervision. Compliance Policy and Guidelines have been formulated to ensure compliance with laws, regulations, legislation, internal policies and codes of conduct and behavior guidelines. Principles, policies and procedures are prepared pursuant to Bank Indonesia provisions particularly Regulation No. 13/2/ PBI/2011 on the Implementation of Commercial Bank Compliance Function and best practice policies in order to identify, assess, monitor and control compliance risks continuously throughout the Bank's business activities.

The Bank has performed various efforts to mitigate bigger risks that may arise along with the emerging challenges. Efforts are made to be both ex-ante and ex-post.

Fungsi Kepatuhan maupun peran satuan kerja kepatuhan ke depannya selain memiliki kemampuan pemantauan yang bersifat ex-ante serta melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan secara berkesinambungan selaras dengan penerapan manajemen risiko di bank secara keseluruhan.

The role of the Compliance Function and compliance unit in the future, not only should have ex-ante monitoring capabilities, but also have to perform Compliance Risk management continuously in line with the risk management implementation in bank-wide.

Cakupan Kerangka Kerja

Kerangka kerja berdasarkan tiga pilar sebagai berikut:

Scope of Framework

The Framework is based on the following three pillars:

Pilar Pillars	Unsur Elements
Struktur Organisasi Organizational Structure	Charter, struktur dan akuntabilitas, cakupan Pengawasan, wewenang, standar, kewenangan dan peranan serta tanggungjawab kepatuhan dan struktur organisasi. Charter, structure and accountability, oversight coverage, authority, standards, roles and responsibilities of compliance and organizational structure.
Kegiatan dan Aktivitas Kepatuhan Compliance activities	Compliance Program, Compliance Operation Manual (Standard Operating Procedure), Retensi Dokumen, Produk & Aktivitas Baru dan Whistle Blowing. Compliance Program, Compliance Operation Manual (Standard Operating Procedure), Document Retention, Product
Sosialisasi, Komunikasi, Komitmen Perbaikan dan Database Peraturan Socialization, Communication, Improvement Commitment and Regulation Database	Komunikasi dan Pelatihan, Regulasi Data base & Pengkinian, Review Berkala & Perbaikan yang berkelanjutan. Communication and Training, Regulation Database, Periodical review & continuous improvement.

Framework Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Framework pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pendekatan yang didasarkan pada tiga lini pertahanan sebagai berikut:

Compliance Risk Implementation Framework

Compliance Risk management Framework uses the following approaches of three lines of defenses:

Risk Taking Units	Risk Control Units	Internal Audit
1st Line of Defense	2nd Line of Defense	3rd Line of Defense
	Manajemen Risiko Kepatuhan	

Risk Taking Unit merupakan pertahanan lini pertama/ first line of defense yang bertanggung jawab untuk pengelolaan Risiko Kepatuhan yang melekat di setiap kegiatan usahanya.

The Risk Taking Unit is the 1st Line of Defense, primarily responsible for managing specific risks assumed by them in their day-to-day activities

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan pertahanan lini kedua/second line of defense, mengawasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan manajemen risiko kepatuhan diseluruh aktivitas dan kegiatan usaha Bank.

The Compliance Working Unit is the 2nd Line of Defense, which oversees implementation of Compliance Function and compliance risk management within Bank's overall activities.

Fungsi pengelolaan kepatuhan Bank yang dilakukan oleh Risk Taking Unit maupun pengelolaan manajemen risiko kepatuhan oleh satuan kerja kepatuhan merupakan objek audit yang direview secara berkala oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yang merupakan pertahanan lini ketiga/third line of defense.

Bank's compliance management function which performed by Risk Taking Unit and by Compliance Unit have already become audit object which periodically reviewed by SKAI, which serves as the third line of defense.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Charter Kepatuhan

Charter Kepatuhan menjelaskan prinsip-prinsip dasar untuk mendukung aktivitas kepatuhan yang sehat di Bank dan entitas anak perusahaan sesuai ketentuan dan *best practices* yang berlaku.

Charter Kepatuhan menunjukkan komitmen BII untuk mendukung kinerja dan standar etika yang tertinggi, serta kepatuhan terhadap standar hukum dan peraturan yang berlaku di dalam standard profesional.

Charter Kepatuhan juga menegaskan kembali Unit Kerja Kepatuhan sebagai suatu unit kerja independen dalam Bank. *Charter* Kepatuhan sebagai standar umum kepatuhan untuk dapat diterapkan oleh seluruh unit kerja Bank. Kepatuhan adalah bagian dari budaya Bank dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab setiap staf Bank.

Compliance Handbook

Compliance Handbook merupakan pedoman/petunjuk bagi compliance officer dalam melakukan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya. *Compliance Handbook* akan direview dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Annual Compliance Plan

Program Kerja Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Membangun dan mewujudkan agar terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua fungsi pada organisasi dan kegiatan usaha bank

Compliance Visit/Review

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman serta mengukur tingkat kepatuhan cabang dan unit kerja terhadap Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, selama tahun 2012 telah dilaksanakan *compliance review* terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur internal. Compliance Review/*Visit* juga dilakukan terhadap Kantor Cabang yang direncanakan untuk dibuka maupun kantor baru, guna melihat kesiapan sarana, prasarana dan perangkat operasional pembukaan kantor cabang sesuai dengan *Compliance Checklist*. Hasil *Compliance review* tersebut telah disampaikan kepada unit kerja terkait, termasuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

Unit kerja Kepatuhan menggunakan pendekatan yang berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dalam melakukan *Compliance review*. Hal ini

Compliance Charter

The Compliance Charter explains the basic principles to support sound compliance activities in BII and its subsidiaries in accordance to with industry best practices.

The Compliance Charter show BII's commitment to achieve good performance and ethical standards, as well as Bank's compliance with all prevailing regulations and professional standards.

The Compliance Charter also reaffirms Compliance Unit as an independent unit within the Bank. Compliance Charter is a compliance standard that can be applied at all working units within BII. Compliance is part of Bank's culture and is therefore the responsibility of all staffs at BII.

Compliance Handbook

Compliance Handbook is a guidelines/instructions for compliance officers to perform any duties in which they are responsible for. The Compliance Handbook will be reviewed and adjusted to the conditions.

Annual Compliance Plan

Work Program of the Compliance Director

1. Developing and realizing the implementation of the Compliance Culture in all functions of the organization and business of the bank

Compliance Visit/Review

In order to improve understanding and to measure compliance level at branches and working units in accordance to Bank Indonesia and prevailing regulations, compliance has conducted a review internal policies and procedures during 2012. Compliance visit was also performed at several branches which will be opened or new branches to assess the readiness of the premises, all requirement in accordance to the compliance checklist. The results of the Compliance review has been submitted to the relevant working units, including the necessary corrective actions.

Compliance Unit use the Risk Based Approach in conducting compliance reviews. This is conducted through the continuous process of identification,

dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pemantauan terhadap Risiko Kepatuhan secara terus menerus. Melalui pendekatan ini, Unit kerja Kepatuhan akan menetapkan *Annual Compliance Review Plan* berdasarkan pada risiko kepatuhan yang signifikan.

measurement, control and monitoring of Compliance Risk. Through this approach, the Compliance Unit will work to prioritize the compliance risks that are significant in determining the Annual Compliance Review Plan.

Pemantauan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Kehati-hatian

Monitoring the Bank's Compliance to the Prudence Principle

Komponen Component	Indikator / Rasio Indicator / Ratio	Persyaratan yang diperkenankan Requirements
	Status Smt-2-2012 2 nd Semester, 2012	
BMPK Pihak Terkait LLL Related party	Tidak ada Pelanggaran No violation	Maksimum 10 % dari modal bank Maximum 10% from bank's
BMPK Bukan Pihak Terkait Individu LLL Non Related Party - Individual	Tidak ada Pelanggaran No violation	Maksimum 20 % dari modal bank Maximum 20% from bank's
BMPK Bukan Pihak Terkait Group LLL Non Related Party - Group	Tidak ada Pelanggaran No violation	Maksimum 25 % dari modal bank Maximum 25% from bank's
Posisi PDN akhir hari Net Open Position – End of Day	Tidak ada Pelanggaran No violation	Maksimum 20% Maximum 20%
GWM - Utama Reserve requirement - Main	Tidak ada Pelanggaran No violation	Minimum 8 %
GWM - Sekunder Reserve requirement - Secondary	Tidak ada Pelanggaran No violation	Minimum 2,5 %

Compliance Plan Self Assessment (CPSA)

CPSA merupakan salah satu media yang digunakan untuk memantau kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan yang berlaku. Rencana Kepatuhan (*Compliance Plan*) disusun setiap tahun dan akan dilakukan *self assessment* untuk setiap cabang dan unit bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas masing-masing;

Compliance Plan Self Assessment (CPSA)

CPSA is one of the tools used to monitor the compliance of working units to the prevailing regulations. Compliance Plan is prepared every year and self-assessment will be performed by each branches or business units that is adjusted to the needs and activities of each branch and business unit;

Perubahan dan Pengkinian CPSA

Pengkinian atas *compliance plan* dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan atau perubahan peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Revisi juga meliputi penyempurnaan format dan tata cara pelaksanaan agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

CPSA Changes and Updates

Update on compliance plan are conducted periodically and adjusted to the developments or changes in Bank Indonesia regulations and prevailing regulations. The revisions also include improvements of the format and implementation procedures to be more effective and efficient.

Laporan CPSA dilakukan pada setiap semester oleh Unit kerja dan Kantor Cabang (periode Januari-Juni dan Juli-Desember). Terhadap penyampaian CPSA tersebut dilakukan validasi oleh Satuan Kerja Kepatuhan guna evaluasi laporan CPSA

CPSA report is carried out every semester by the Working unit and Branch (periods of January-June and July-December). CPSA submission will be validated by in order to evaluate CPSA.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Hasil review CPSA merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh Satuan kerja Kepatuhan untuk mengukur serta mengevaluasi tingkat kepatuhan Cabang/ Unit kerja terhadap ketentuan/peraturan eksternal dan/atau internal yang berlaku.

The CPSA review results is one of tools used by the Compliance Unit to measure and evaluate the level of compliance of Branch/Work Unit towards the external regulations and/or internal regulations.

Untuk selanjutnya, hasil evaluasi tersebut akan dijadikan salah satu pertimbangan Satuan kerja Kepatuhan dalam melakukan compliance review plan.

Subsequently, the results of these evaluations will be used as one of the Compliance Unit's considerations in conducting compliance review plan.

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan

Kegiatan sosialisasi ketentuan dilakukan sebagai salah satu upaya compliance awareness atas ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia dan/ atau regulator lainnya.

Regulation Socialization Activities

The provision socialization activities are performed as one of the efforts for compliance awareness on the provisions issued by Bank Indonesia and/or other regulators.

Sosialisasi Ketentuan | Compliance Socialization

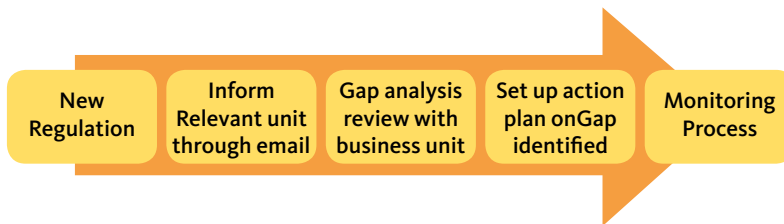
Semester 2/2012 2nd Semester/2012	
18 kali times	16 kali times

Penyampaian Informasi ketentuan Otoritas khususnya Bank Indonesia pada unit kerja terkait

Peraturan otoritas akan berdampak secara langsung/tidak langsung pada kegiatan operasional maupun bisnis Bank. Sejalan dengan hal tersebut, pemantauan atas implementasi ketentuan baru merupakan salah hal yang sangat penting dapat meminimalisasi risiko kepatuhan.

Information to Related Working Units on Bank Indonesia Regulations

Regulations will bring direct/indirect impacts to the operations and business of the Bank. Accordingly, monitoring of the implementation of the new regulations is one of the most important thing to minimize compliance risk.



Guna meningkatkan fungsi pemantauan atas tindak lanjut terbitnya ketentuan baru Bank Indonesia, satuan kerja kepatuhan mengembangkan database pemantauan ketentuan Bank Indonesia agar dapat dimonitor secara lebih efektif dan dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan sesuai target yang ditetapkan.

To improve the follow-up monitoring concerning of new Bank Indonesia regulations, Compliance Unit develop monitoring database to monitor Bank Indonesia regulation effectively and can be implemented appropriately.

Untuk menciptakan Compliance Culture, Unit Kerja Kepatuhan telah membuat sebuah mekanisme yang efektif untuk tracking ketentuan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

To establish Compliance Culture, Compliance Unit create effective mechanism to track new regulations issued by Bank Indonesia.

Tools digunakan sebagai database monitoring ketentuan baru dan langkah awal bagi Unit Kerja Kepatuhan dalam melakukan sharing dan diskusi dengan unit kerja terkait tentang gap dan implementasi ketentuan Bank Indonesia di BII.

Sosialisasi penyampaian peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia kepada seluruh unit kerja dilakukan melalui sarana portal Corporate University Bank yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja.

Selain itu, bilamana terdapat penerbitan ketentuan baru tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap cabang atau adanya pengenaan denda sejenis yang berulang, sosialisasi ketentuan dapat dilakukan dalam bentuk sirkulasi Compliance Brief (CB) dan Compliance Flash (CF) yang merupakan rangkuman dari peraturan Bank Indonesia, maupun dalam bentuk conference call. Compliance Brief dan Compliance Flash diharapkan akan memberikan pemahaman secara umum terhadap regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, khususnya peraturan yang bersifat umum dan berpengaruh secara bank-wide.

Tools are used as new regulation monitoring database and a starting point for Compliance Unit in conducting sharing and discussion with relevant working units regarding to the policy gap and implementation of Bank Indonesia regulations in BII.

Socialization of the regulations issued by Bank Indonesia to all working units is conducted through the Corporate University Bank portal facility that can be accessed by all working units.

In addition, in case of there is a new regulation issued by Bank Indonesia which bring significant impacts to branches or potential imposition of repetitive fine, regulation socialization can be conducted in the form of Compliance Brief (CB) and Compliance Flash (CF) circulation which is the summary of the regulations of Bank Indonesia, as well as by doing conference call. Brief Compliance and Compliance Flash are expected to give a general understanding of the new regulations issued by Bank Indonesia, in particular general rules and affecting bank-wide.

Ketentuan Bank Indonesia 2012 | Provision of Bank Indonesia 2012

Peraturan Bank Indonesia Bank Indonesia Regulation	27 PBI
Surat Edaran Bank Indonesia Bank Indonesia Circular Letter	39 SE BI

2. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan untuk membangun Budaya Kepatuhan di seluruh unit organisasi Bank sehingga pengelolaan Risiko Kepatuhan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan transaksi dan aktivitas operasional Bank.

Hasil *Self Assessment* atas *Compliance Risk Profile*

Hasil dari *Self Assessment* atas *Compliance Risk* yang menjadi bagian dari Laporan Risk Profile Bank 2012 telah disampaikan melalui ke Bank Indonesia sebagaimana berikut:

2. Compliance Risk Management

Compliance Risk management is performed through identification, measurement, monitoring and control on Risk Compliance to promote Compliance Culture in all organizational units to further make it as a common reference for the Bank's transactions and operational activities.

Self Assessment Results on Compliance Risk Profile

The results of the Self Assessment on Compliance Risk as part of the Bank's Risk Profile Report 2012 has been submitted to Bank Indonesia, as follows:

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Compliance Risk Profile

No.	Komponen Component	Indikator/ Parameter Indicator	Risk Level
			2012
1	Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang dilakukan Type and significance of violation	Jumlah saksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dari regulator Amount of fines charged to bank by the regulator	Low to Mod
		Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank Type of violations or non-compliance by banks	
2	Frekwensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan bank Frequency of violation or bank's compliance track record	Jenis dan frekwensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir Type and frequency of similar violations found annually in the last 3 years	
		Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut Significance of action plan to solve violations	
3	Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu Violation to regulations of certain financial transactions	Frekwensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum Frequency of the violations of regulations on certain financial transactions because it does not conform with generally accepted standards	

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Quality of Risk Management Implementation

Faktor Pengendalian Risiko	Risk Control System	Risk Level
		Risk Level 2012
A. Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi	Risk Governance include evaluation of: (i) formulation of the level of risk to be taken (<i>risk appetite</i>) and risk tolerance (ii) adequacy of active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors including exercise authority and responsibilities of the Board	Satisfactory
B. Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko; dan (ii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.	Risk Management Framework include evaluation of: (i) risk management strategies which in line with risk level to be taken and risk tolerance (ii) the adequacy of policies, procedures and limits	Satisfactory
C. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia mencakup evaluasi terhadap: (iii) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (iv) kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko; dan (v) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko	Risk Management Process, Information Systems and Human Resources include evaluation of: (i) process of identification, measurement, monitoring, and controlling risks (ii) adequacy of risk management information systems	Satisfactory

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Quality of Risk Management Implementation

Faktor Pengendalian Risiko	Risk Control System	Risk Level
		Risk Level 2012
D. Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	Risk Control System, includes an evaluation of: (i) adequacy of Internal Control System (ii) adequacy of review by independent party in bank either by Risk Management Unit or Internal Audit	Satisfactory
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Quality of Risk Management Implementation	Satisfactory
Composite Risk	Composite Risk	Low to Mod

Pemantauan Izin Pembukaan, Relokasi, Penutupan Jaringan Kantor

Unit Kerja Kepatuhan secara berkesinambungan melakukan pemantauan atas aktivitas yang berkaitan dengan perijinan pembukaan, relokasi serta penutupan jaringan kantor yaitu melalui:

- Penyusunan *compliance check list* untuk memastikan kesiapan fisik gedung, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan aktiva yang akan digunakan sebelum pengajuan permohonan izin ke Bank Indonesia.
- Koordinasi dengan *project manager* (Unit kerja Branch Channel Management) dan unit kerja terkait lainnya
- Melakukan review dokumen yang akan disampaikan ke Bank Indonesia
- Melakukan kunjungan (*on site*) sekaligus untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana ke lokasi kantor yang diajukan permohonannya ke Bank Indonesia.

Sampai dengan periode Desember 2012 sebanyak 35 (tiga puluh lima) pengajuan pembukaan kantor telah disetujui Bank Indonesia dan telah direalisasikan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Pemantauan Izin Pembukaan, Relokasi, Penutupan dan Peningkatan Status Jaringan Kantor

Monitoring of Opening Permit, Relocation, and Closing of Office Network

The Compliance Unit continuously monitors activities related to branch network licensing through:

- Preparation of compliance check list to ensure physical readiness of the building, human resource readiness and assets preparedness that will be used prior to filing an application for license to Bank Indonesia.
- Coordination with the project manager (Branch Channel Management Unit) and other related units
- Conduct reviews on documents which will be submitted to Bank Indonesia
- Conduct on site visits to monitor the readiness of facilities and infrastructures to the office location that the proposal is being filed to Bank Indonesia.

Up to the December 2012 period, there are 35 (thirty five) network opening proposals have been approved by Bank Indonesia and has been realized with the details as follow:

Monitoring of the Permit for Opening, Relocation, Closing, and Status Improvement of the Office Network

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Keterangan Information	Status s.d Desember 2012 Status until December 2012		
	Disetujui Bank Indonesia Approved by Bank Indonesia		Dalam proses persetujuan On Approval Process
	Business Plan	2012	
Pembukaan Kantor Branch Opening	47	35*	11***
Relokasi Kantor dan Kantor Pusat Branch and Head Office Relocation	12	5**	-
Penutupan Kantor Branch Closure	-	-	-
Peningkatan Status Branch Status Upgrade	5	3	-

Keterangan Explanation:

* Realisasi Pembukaan KCP. Moh Toha dilaksanakan tanggal 04 Januari 2013

Sub-branch Moh. Toha opening held on January 04, 2013

** Relokasi KCP Perawang dilaksanakan tanggal 02 Januari 2013 Sub-branch Perawang relocation held on January, 02 2013

*** Realisasi Pembukaan kantor telah dilaksanakan pada tahun 2013 Branch opening have been carried out in 2013

Sesuai dengan Rencana dan Anggaran Kerja Tahun 2012 mengenai Rencana Pembukaan, Peningkatan, Relokasi dan Penutupan Kantor Bank yang telah disampaikan ke Bank Indonesia, sampai dengan periode Desember 2012 jumlah kantor adalah sebanyak 408 kantor konvensional dan 112 Layanan berbasis Syariah. Perincian jumlah jaringan kantor sebagai berikut:

In accordance with the 2012 Work Plan and Budget on Plans of Opening, Improvement, Relocation and Closing of Office of the Bank that has been submitted to Bank Indonesia, up to the December 2012 period the number was 408 conventional offices and 112 sharia based services. Details of the office network number is as follows:

Jaringan Kantor Konvensional | Conventional Office Network

Jenis Kantor Type Office	Jumlah Total	
	s.d Juni 2012	s.d Des 2012
Kantor Wilayah Regional Office	10	11
Kantor Cabang Branches	76	78
Kantor Cabang Pembantu Branch Offices	288	312
Kantor Kas Cash Office	4	7
Total	378	408

Layanan Berbasis Syariah | Sharia Based Services

Jenis Kantor Type Office	Jumlah Total	
	s.d Juni 2012	s.d Des 2012
Kantor Pusat Head Office	1	1
Kantor Cabang Syariah Sharia Branches	5	5
Kantor Cabang Pembantu Syariah Sharia Branch Offices	-	1
Layanan Syariah Sharia Services	94	105
Total	100	112

Laporan Rencana Kerja Kepatuhan

Laporan Rencana Kerja Kepatuhan dimuat dalam rencana bisnis Bank. Laporan Rencana Kerja Kepatuhan yang disampaikan ke Bank Indonesia meliputi rencana evaluasi pedoman internal dan rencana kegiatan untuk mendorong dan/atau

Compliance Work Plan Report

Compliance Work Plan Report is part of the Bank's business plan. Compliance Work Plan Report that is submitted to Bank Indonesia includes internal guidelines evaluation plan and action plans to

memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan.

Rencana kerja kepatuhan 2012 telah dimuat dalam rencana bisnis Bank 2012 dengan tata cara penyampaian mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank. Untuk Laporan Rencana Kerja Kepatuhan 2012 telah disampaikan melalui S.2011.003/BOC tanggal 29 November 2011 dan Revisi Rencana Bisnis Bank 2012 telah disampaikan melalui S.2012.011/BOC tanggal 22 Juni 2012.

Laporan Kepatuhan

Laporan Kepatuhan merupakan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara semesteran dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur.

Laporan kepatuhan berisi informasi antara lain pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan, Risiko Kepatuhan yang dihadapi, potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan dan mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan. Laporan kepatuhan disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan.

Selama 2012, Laporan Kepatuhan yang telah disampaikan ke Bank Indonesia disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Laporan Fungsi Kepatuhan 2012 | Compliance Function Report 2012

No	Laporan Kepatuhan Compliance Function Report	Nomor Surat Reference Number	Tanggal Surat Letter Dated
1	Semester 1 1 st Semester	No.S.2012.483/Dir-Compliance	31 Juli July 2012
2	Semester 2 2 nd Semester	No.S.2013.052/Dir-Compliance	30 Januari January 2013

Laporan Khusus

Laporan Khusus adalah laporan yang dibuat sebagai bagian dari tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam upaya melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama 2012 tidak ada Laporan Khusus yang diterbitkan.

promote and/or maintain compliance culture, including provisions dissemination plan.

Compliance work plan for 2012 has been stated in the Bank's business plan with the submission procedures in line with Bank Indonesia regulations governing the Bank's Business Plan. Compliance Work Plan for 2012 has been submitted through our letter no S.2011.003/BOC dated 29 November 2011. The Revised Business Plan for 2012 has been submitted through S.2012.011/BOC dated 22 June 2012.

Compliance Report

Compliance Report is a report on the implementation of the tasks of the Compliance Director, signed by the Compliance Director and submitted to Bank Indonesia semi-annually with target date at least 1 (one) month after the reporting period ended copied to the Board of Commissioners and the President Director

Compliance report contains information such as the implementation of the Compliance Function, Compliance Risk, Potential Compliance Risk that is expected to be faced in the future and Compliance Risk mitigations that have been implemented. Compliance reports is submitted in a comparative manner of 2 (two) reporting periods.

During 2012, compliance report that was submitted to Bank Indonesia is presented through the following table:

Special Report

Special Report is a report prepared as part of the task of the Compliance Director in an effort of prevention, therefore the policy and/or decisions taken by the Board of Directors does not deviate from the provisions of Bank Indonesia and the legislation in force.

During 2012 no Special Report was published.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

3. Memastikan Bahwa Semua Kebijakan, Peraturan, Sistem dan Prosedur Internal sesuai Ketentuan yang Berlaku.

Review Kebijakan/Prosedur Internal

Opini Kepatuhan disampaikan dalam bentuk *review* atas Kebijakan Bank maupun dalam bentuk opini kepatuhan lainnya yang merupakan implementasi dari fungsi *advisory* Kepatuhan, yaitu pemberian saran serta tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang baik dalam bentuk surat elektronik (*email*), memorandum maupun dalam bentuk diskusi atau *meeting*.

Review Kebijakan merupakan sarana yang dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa kebijakan internal Bank senantiasa sejalan dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga pemantauan terhadap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bidang Teknologi Informasi.

Review dimaksud terdiri dari review ketentuan internal yang berhubungan dengan produk bank baik consumer dan SME produk/Perbankan Wholesale produk, operasional bank, review Produk/Aktivitas baru, serta review terkait Information Teknologi.

3. Ensure that All Policies, Regulations, Systems and Internal Procedures are in accordance to the Applicable Regulations.

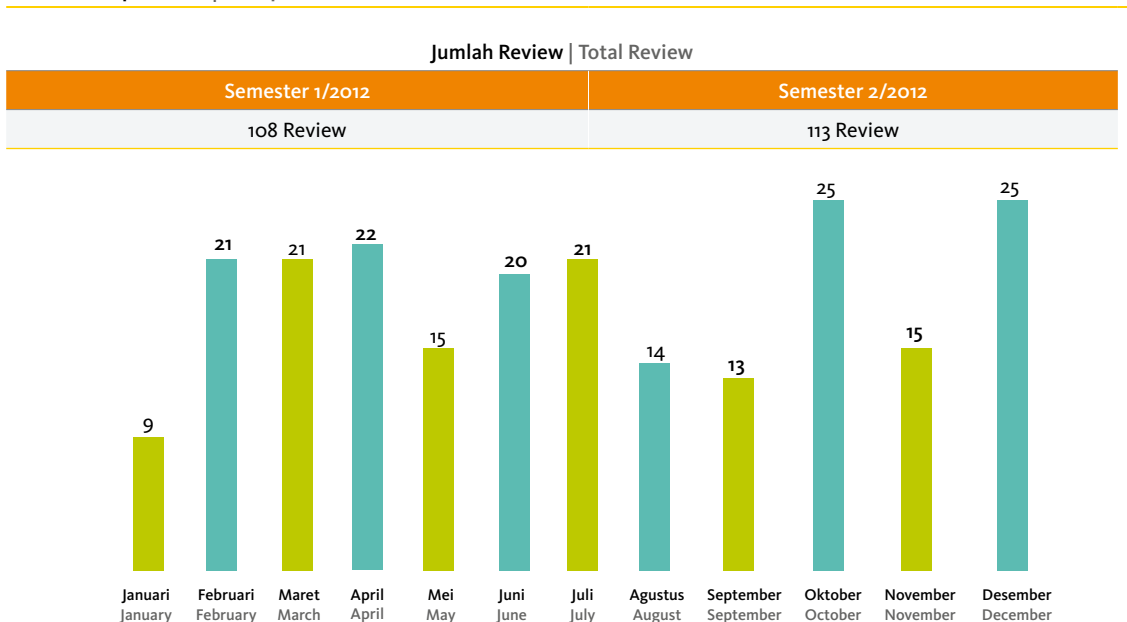
Policy/Internal Procedure Review

Compliance Opinion is provided in the form of a formal review of the Bank's policy or in other form which is part of the implementation of the compliance advisory function i.e. advice and responses to questions from other working unit or branch in the form of electronic mail (*email*), memorandum, or in the form of discussion or meeting.

Policy Review is a powerful instrument to monitor and ensure that the Bank's internal policy is always in line with Indonesian laws and regulations in force, including the monitoring of activities related in the area of Information Technology

The referred review consists of internal policy review relating to the provision of bank's consumer products and SME products/wholesale banking products, the bank's operations, review of products/ new activity, as well as reviews related to Information Technology.

Review Kepatuhan | Compliance Review



Dalam setiap review yang disampaikan, unit kerja kepatuhan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan internal yang berlaku saat ini. Guna memastikan bahwa ketentuan internal dimaksud telah mengakomodir masukan dan hasil review unit kerja Kepatuhan, Unit kerja terkait akan menyampaikan *feed back* kepada unit kerja Kepatuhan atas revisi yang dilakukan sebelum ketentuan internal dimaksud diterbitkan. Secara umum, tidak ada produk/aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Unit Kerja Kepatuhan juga melakukan review atas kebijakan, prosedur maupun surat edaran yang telah diterbitkan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menciptakan budaya kepatuhan.

Sebagaimana disebutkan dalam RBB 2012, Unit Kerja Kepatuhan berencana untuk melakukan evaluasi terhadap 65 (enam puluh lima) ketentuan internal. Pada akhir semester 2-2012, sejumlah 65 (enam puluh lima) ketentuan internal telah dievaluasi oleh unit kerja kepatuhan dan telah disampaikan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan review kebijakan internal tersebut, unit kerja kepatuhan telah menerbitkan ketentuan internal yang mewajibkan adanya proses review ulang secara berkala dari unit kerja terkait untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya ketentuan internal tersebut.

4. Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Komitmen yang Diberikan Kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas Lainnya.

Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia

Bank melakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan komitmen yang dibuat kepada Bank Indonesia dan/atau lembaga otoritas lainnya yang berwenang, serta bertanggung jawab untuk mengirimkan laporan tindak lanjut dan tindakan perbaikan kepada Bank Indonesia.

Guna meningkatkan fungsi pemantauan atas tindak lanjut temuan regulator, unit kerja kepatuhan memperbaiki proses pemantauan komitmen yaitu sebagai berikut:

- a). Mengembangkan *database* temuan Bank Indonesia agar dapat dipantau lebih efektif dan menyajikan informasi yang lebih lengkap.

In each review provided to other business unit, compliance refers to the prevailing Bank Indonesia provisions and the internal regulations. To ensure that the related unit has accommodated the input and review of the Compliance Unit, the related unit must provide feed back to the Compliance unit on revisions made prior to the provision referred to is published internally. In general, there are no products/activities that are not in accordance with the regulations of Bank Indonesia.

Compliance Unit also reviews the policies, procedures and circulars which have been issued as part of the responsibility in creating a compliance culture.

As stated in the business plan 2012, Compliance Unit plans to carry out an evaluation to 65 (sixty-five) internal regulations. At the end of the second semester of 2012, 65 (sixty-five) internal regulations have been evaluated by the compliance unit and have been submitted to the relevant units for further action.

With regard to the internal policy review, the compliance unit has issued internal regulations that require a periodic review process of relevant work units for a period of 3 (three) years from the issuance of these internal regulations.

4. Ensure compliance with regards to the Bank's commitments to Bank Indonesia and/or other competent regulatory authority.

Report on the Findings of Bank Indonesia

Bank conducts supervision (monitoring) to ensure compliance and follow-up agreements and the fulfillment of commitments made to Bank Indonesia and/or other competent authority institutions, and is responsible for sending all progress reports and corrective actions to Bank Indonesia officials as well as acting as an intermediary between the Bank with Bank Indonesia.

To improve the monitoring function of following up findings from the regulators, compliance unit improves its monitoring process commitment as follows:

- a). Develop a database of Bank Indonesia findings that can be monitored more effectively and presents a more complete information.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

b). Guna memastikan pemenuhan komitmen tindak lanjut temuan Bank Indonesia, secara periodik terhadap progress tindak lanjut tersebut dikomunikasikan dengan Direktur terkait serta dibahas pada Pertemuan Komite Internal Audit yang dilakukan setiap bulan.

Dalam rangka memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia serta mematuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 perihal Tata Cara Pemeriksaan Bank khususnya pasal 14, Unit Kerja Kepatuhan secara berkesinambungan melakukan monitoring progress tindak lanjut penyelesaian hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia secara triwulanan sebagai berikut:

b). In order to ensure the fulfillment of the follow up the findings commitments of Bank Indonesia, periodic follow-up on progress is communicated to relevant Directors and discussed at meetings of the Internal Audit Committees that is performed each month.

In order to monitor and maintain compliance of the Bank on all agreements and commitments made by the Bank to Bank Indonesia and to comply with Bank Indonesia Regulation No.2/6/PBI/2000 on Bank Examination Procedures in particular article 14, the Compliance Unit continuously monitors the progress of settlement follow up action on the findings of Bank Indonesia

Follow-Up Report on Findings by Bank Indonesia on a quarterly basis as follows:

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia 2012 Action Plan Report on Bank Indonesia Audit Report 2012

No	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia Action Plan Report on Bank Indonesia Audit Report	Nomor Surat Reference Number	Tanggal Surat Letter Dated
1	Q1	No.S.2012.250/Dir Compliance	30 April 2012
2	Q2	No.S.2012.483/Dir-Compliance	31 Juli July 2012
3	Q3	No.S.2013.052/Dir-Compliance	30 Januari January 2013
4	Q4		

Mitigasi/Tindakan yang dilakukan atas hasil pemeriksaan Bank Indonesia antara lain:

- Melakukan monitoring atas temuan-temuan tim pemeriksa bank Indonesia yang masih memerlukan tindak lanjut perbaikan dan membahas di tingkat BOD setiap bulan.
- Melakukan sharing kepada unit cabang maupun kantor pusat atas temuan-temuan tim pemeriksa bank Indonesia yang berulang sebagai langkah antisipasi untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi pada kantor cabang lain (*repetitive finding*).
- Mulai 2012, Unit Kerja SKAI wajib melakukan validasi terhadap temuan hasil pemeriksaan tim pengawas Bank Indonesia dengan status "Closed".

Pemeriksaan oleh Regulator Pemegang Saham Pengendali (Bank Negara Malaysia/BNM)

Mitigation/action taken as the result on findings by Bank of Indonesia, among others:

- Monitor the findings of Bank Indonesia's inspection team which still require repair follow-ups and discuss at the BOD level every month.
- Conduct sharing to branches and head office units on the findings of the inspection team of Bank Indonesia that are repeated as a precaution to prevent the problem from happening in other branches (*repetitive finding*).
- Starting in 2012, the Internal Audit Unit is required to validate the finding results of the monitoring team of Bank Indonesia with the status "Closed".

Inspection by the Controlling Shareholder Regulator (Bank Negara Malaysia/BNM)

Pada 2012 BNM telah melakukan pemeriksaan pada BII yang dimulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012. Pada tanggal 22 Oktober 2012, BNM telah mengeluarkan hasil pemeriksaan. Unit Kerja Kepatuhan secara berkesinambungan melakukan monitoring atas tindak lanjut yang perlu dilakukan terkait hasil pemeriksaan BNM, menyampaikan secara berkala perkembangan tindak lanjut tersebut kepada Direktur Kepatuhan, Board of Director dan Board of Commissioner, serta menyampaikan progress tindak lanjut dimaksud kepada Bank Negara Malaysia. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah disampaikan pada tanggal 7 Mei 2012 dan tanggal 10 Desember 2012.

Hasil Pemeriksaan Auditor Bapepam-LK

Selama 2012 terdapat pemeriksaan Auditor Bapepam – LK dengan fokus pemeriksaan sebagai berikut:

In 2012, BNM has conducted inspection on BII, which began on 5 July 2012 until 26 July 2012. On 22 October 2012, BNM has issued the results of the examination in the form of matters that need attention (areas for improvement). Compliance Unit continuously monitors the follow-up that needs to be performed in relations to the results of BNM inspection, periodically conveys the follow-up developments to the Compliance Director, Board of Directors, and Board of Commissioners, as well as to submit the follow up progress to Bank Negara Malaysia. Results of the follow-up report was submitted on 7 May 2012 and on 10 December 2012.

Bapepam-LK Auditor Examination Result

During 2012, the Auditor of Bapepam-LK conducted an examination which focuses on the following:

Pemeriksaan Bapepam-LK | Bapepam-LK Examination

No	Pemeriksaan Bapepam-LK Bapepam-LK Examination	Fokus Pemeriksaan Examination Focus
1	Semester 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kepatuhan Agen Penjual Reksadana pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Compliance Examination On Mutual Fund Sales Agent at Branch and Head Offices. b. Pemeriksaan Kepatuhan selaku Bank Kustodian. Compliance Examination On Custodian Bank activities.
2	Semester 2	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kepatuhan Agen Penjual Reksadana pada Kantor Cabang. Compliance Examination On Mutual Fund Sales Agent at Branch Offices. b. Monitoring Hasil Pemeriksaan Kepatuhan selaku Bank Kustodian. Monitoring of Compliance Examination Findings On Custodian Bank activities.

Unit Kerja Anti Money Laundering

Pelaksanaan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Terkait tugas Direktur Kepatuhan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sesuai PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No.11/31/DPNP tanggal 31 November 2009, serta UU PP TPPU No. 8 tahun 2010, Direktur Kepatuhan dibantu oleh unit kerja Anti Money Laundering yang melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

Anti Money Laundering Unit

Implementation of Anti Money Laundering (APU) and Combating the Financing of Terrorism (PPT)

In relations to the Compliance Director duty to supervise the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism program, in accordance to PBI No.11/28/PBI/2009 dated 1 July 2009 and SE BI No.11/31/DPNP dated 31 November 2009 as amended by Bank Indonesia Regulation No.14/27/PBI/2012 dated 28 Desember 2012, and the Law PP TPPU No. 8 of 2010, the Compliance Director assisted by the Anti Money Laundering unit perform he following duties:

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

1. Pengawasan pelaksanaan APU/PPT dibantu oleh Unit Kerja Khusus (UKK) ditingkat Pusat (Divisi AMLA) dan ditunjuk (KYC Officer) beserta tugas dan tanggung jawabnya di tingkat Cabang/Cabang Pembantu/Unit Kerja baik dalam maupun luar negeri dan Anak Perusahaan sebagai pemantau pelaksanaan program APU & PPT di masing-masing cabang/Unit Kerja.
 2. Mengevaluasi dan menetapkan kebijakan dan prosedur pelaksanaan APU & PPT secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Bank Indonesia/PPATK terkini, antara lain:
 3. Selama 2012 telah dilakukan review dan rekomendasi kepada Unit Kerja lain khususnya aspek penerapan APU & PPT sebanyak 30 kebijakan/SOP.
 4. Memastikan pelaksanaan program APU & PPT telah dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ditetapkan yaitu:
 - a. Prosedur Penerimaan Nasabah
 - 1). Proses CDD/EDD pada proses penerimaan nasabah dan Beneficial Owner (termasuk penanganan bagi nasabah tergolong berisiko tinggi);
 - 2). Prosedur penerimaan transaksi bagi Walk in Customer;
 - b. Prosedur Pemantauan Nasabah
 - 1). Pada program pengkinian data nasabah periode tahun 2012, telah dilakukan pengelompokan nasabah existing berdasarkan Risk Base Approach (RBA), menggunakan risk scoring atas perhitungan scoring ini nasabah dikelompokkan dalam 3 (tiga) risiko yaitu: High Risk, Medium Risk dan Low Risk, yang hasilnya akan menjadi dasar dalam penetapan target pada pengkinian data nasabah setiap tahunnya, dengan berdasarkan skala prioritas dengan progress pencapaian pada Semester 2 tahun 2012 sebesar 100.00%.
 - 2). Melakukan pemantauan transaksi nasabah secara berkesinambungan melalui sistem MIS yang dapat diakses oleh seluruh Kantor Cabang/Cabang Pembantu serta UKK Kantor Pusat (unit kerja AMLA), untuk mengidentifikasi transaksi tergolong kurang wajar/mencurigakan;
1. Monitor the implementation of the APU/ PPT, assisted by a Special Working Unit (UKK) at central levels (AMLA) and appointed KYC officer with their duties and responsibilities at the levels of Branch/Sub-Branch/Working Unit, both within and outside the country as an observer of the implementation of APU & PPT programs in each branch/working unit.
 2. Continuously evaluate and setting up policies/ procedures for APU & PPT implementations that are aligned with development changes in the policies of Bank Indonesia/PPATK.
 3. Conducted review and providing recommendation to other Units particularly on aspects of the application of APU and PPT (30 policies) within 2012.
 4. Ensure that the implementations of APU & PPT programs have been implemented in accordance to policy and procedures, namely
 - a. Handling New Customer Procedure
 - 1). CDD/EDD process in the new customer and Beneficial Owner handling process (including the handling of customers classified as high risk);
 - 2). Walk in Customer transaction handling procedures;
 - b. Customer Monitoring Procedure
 - 1). In the customer data updating program for 2012, grouping of existing customers have been performed based on the Risk Base Approach (RBA), using risk scoring on this scoring calculation, customers are grouped into 3 (three) risks, namely: High Risk, Medium Risk and Low Risk. The review result will be used as the basis in setting up customer update target yearly, based on the priority scale with the achievement progress in the second semester of 2012 at 100.00%;
 - 2). Continuously monitor customer transactions through a system that can be accessed by all Branch Office/Sub-Branch Office and head office, in order to be able to identify transactions that are suspicious or deemed less reasonable;

- 3). Mengembangkan parameter di dalam sistem FAML dan laporan transaksi nasabah-nasabah tertentu yang dianggap berisiko tinggi agar proses pemantauan transaksi dapat dilakukan secara efektif berdasarkan trend modus terkini.
- 4). Melakukan pengkinian data nasabah secara berkesinambungan dan berdasarkan risiko, termasuk Bank Koresponden serta penyampaian kewajiban pelaporannya ke BI;
- 5). Melakukan pemantauan pelaksanaan program APU & PPT dengan melakukan assessment (onsite visit) ke beberapa kantor cabang (KCI dan KCP) serta melaporkan hasil assessment kepada Direktur Kepatuhan dan pihak relevan lainnya.

c. Kewajiban Pelaporan Bank

- 1). Melaporkan hasil pemantauan terhadap transaksi keuangan yang tergolong mencurigakan (LTKM/STR).
- 2). Melaporkan transaksi tunai dengan jumlah tertentu (LTKT/CTR) sebagai pemenuhan kewajiban kepada pihak regulator (PPATK)

Pada 2012 BII terpilih oleh PPATK untuk berpartisipasi dalam Pilot Project GRIPS untuk pelaporan CTR dan saat ini sudah dapat melaporkan CTR dengan baik.

d. Pelatihan Karyawan

Dalam upaya peningkatan pemahaman terhadap kebijakan APU & PPT dan ketentuan terkait lainnya, maka pada Semester 2/2012 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Program E-Learning
Dari 5.459 personil karyawan di cabang yang diwajibkan mengikuti Modul E_Learning APU & PPT, sebanyak 5.382 personil karyawan cabang telah lulus (98.59 %).
- 2). Regular Class (Internal training).

e. Pengendalian Internal

Adanya Satuan Pengendalian Intern (SKAI) yang mengawasi pelaksanaan program APU/ PPT secara berkala dan fungsi pengawasannya terpisah atau independen dengan unit kerja yang melaksanakan program APU & PPT .

- 3). Developing the parameters in the FAML system and report transactions of certain clients that are considered high risk therefore transaction monitoring process can be done effectively, based on the latest trend mode;
- 4). Perform customer data updating that is continuous and based on risk, including the Bank's correspondent as well as the submission of reporting obligations to BI;
- 5). Monitor the implementation of APU and PPT program by performing assessments (onsite visit) to several branch offices (main branch and sub branch) as well as reporting the assessment results to the Compliance Director and other relevant parties.

c. Bank Reporting Obligation

- 1). Report the monitoring results on financial transactions that are considered suspicious (LTKM / STR).
- 2). Report cash transactions to a certain amount (LTKT/ CTR) as the fulfillment of obligations to the regulators (PPATK);

BII was elected by PPATK to participate in the GRIPS Pilot Project for CTR reporting and is currently able to report the CTR well.

d. Training for employee

As an effort to increase the understanding of the APU and PPT policy and other relevant provisions, we have performed the following activities :

- 1). E-Learning Program
Of the 5,459 branch employees who are required to attend the E_Learning APU & PPT Module, as many as 5,382 branch employees have passed (98.59%).
- 2). Regular Class (Internal training).

e. Internal Control

Internal Audit (SKAI) monitors the implementation of the APU/ PPT program regularly and independent from the working unit that implement APU & PPT program.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Penerapan Strategi Anti Fraud

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, Bank juga telah membuat Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud sesuai No.SE.2012.002/DIR COMPLIANCE tanggal 05 Juni 2012 dan telah disampaikan kepada bank Indonesia pada tanggal 06 Juni 2012. Bank juga telah membuat Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud sesuai No.SE.2013.002/DIR COMPLIANCE tanggal 28 Februari 2013. Berdasarkan kebijakan dan prosedur tersebut, Direksi telah menunjuk unit kerja AMLA (Anti Money Laundering & Assurance) yang menjalankan fungsi penerapan Strategi anti Fraud yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Unit kerja Anti Fraud melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dalam melakukan identifikasi *fraud* dan tindak lanjut penanganan serta pemantauannya.

Selama 2012 implementasi strategi anti *fraud* telah dilaksanakan sesuai pilar-pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan
Perangkat ini ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya fraud, antara lain mencakup:
 - a. Anti fraud statement & awareness
 - 1). Telah dikomunikasikan melalui PCEO message mengenai budaya integritas dan whistleblowing.
 - 2). Prinsip Zero Tolerance yang disampaikan melalui PC wallpaper ke seluruh Karyawan sejak tanggal 17 Mei 2011.
 - 3). Employee awareness telah dikomunikasikan melalui media BII News
 - 4). Anti *fraud* awareness yang telah dikomunikasikan melalui pendistribusian poster "Anti Fraud" kepada seluruh Karyawan BII.
 - 5). Pelatihan anti *fraud* yang menjadi bagian di dalam program pelatihan regular BII.
 - 6). Melakukan program awareness yaitu memberikan informasi kepada nasabah, tentang menjaga keamanan PIN dan informasi penting lainnya melalui statement rekening Koran/billing kartu kredit.
 - b. Identifikasi kerawanan
Telah dilakukan beberapa identifikasi kerawanan untuk mengantisipasi risiko kepatuhan dan operasional

Implementation of Anti Fraud Strategy

In accordance to the Circular Letter of Bank Indonesia No.13/28/DPNP dated 9 December 2011 on the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, the Bank has established Policies and Procedures for the Implementation of Anti-Fraud Strategy No.SE.2012.002/DIR COMPLIANCE dated 5 June 2012 and was submitted to Bank Indonesia on 6 June 2012. Bank has established Policies and Procedures for the Implementation of Anti-Fraud Strategy No.SE.2013.002/DIR COMPLIANCE dated 28 February 2013. Based on the policies and procedures, the Board of Directors has appointed the AMLA (Anti Money Laundering & Assurance) unit that performs the anti Fraud implementation Strategy.

The AMLA unit coordinates with other relevant units in identifying fraud and the follow-up handling as well as its monitoring.

During 2012 the implementation of anti-fraud strategy has been implemented according the following pillars:

1. Prevention
This device is intended to reduce the potential for fraud, among others, include:
 - a. Anti fraud statement & awareness
 - 1). Has been communicated through PCEO message regarding integrity culture and whistleblowing.
 - 2). Zero Tolerance Principle which was conveyed through PC wallpapers to all employees since 17 May 2011.
 - 3). Employee awareness has been communicated through BII news.
 - 4). Anti fraud awareness which was communicated through the distribution of "Anti Fraud" posters to all BII Employees.
 - 5). Anti fraud trainings which become a part in the BII regular training program.
 - 6). Conducting awareness program by providing information to the customers, on keeping the PIN and other information safe through the Demand Deposits statement/ credit card billing.
 - b. Vulnerability Identification
The bank has conducted vulnerability identifications to anticipate compliance and operational risks.

- | | |
|---|---|
| <p>c. Know Your Employee (KYE)
Dalam kaitannya dengan program KYE, sudah terdapat kebijakan dan prosedur yang mendukung</p> | <p>c. Know Your Employee (KYE)
In relation to the KYE program, it is govern under specific policies and procedures</p> |
| <p>2. Deteksi
Perangkat ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian <i>fraud</i>, antara lain mencakup:</p> <p>a. Kebijakan dan mekanisme whistleblowing
Saat ini sudah ada prosedur pelaporan mengenai Whistleblowing tentang Kewajiban Menyampaikan Informasi Adanya Indikasi Pelanggaran (Whistleblowing) tanggal 3 Juni 2010.</p> <p>Jumlah pelaporan Whistleblowing selama tahun 2012 meningkat menjadi 7 laporan dibandingkan tahun 2011 yaitu sebanyak 1 laporan.</p> <p>b. Dalam pengelolaan database dan identifikasi <i>fraud</i> berdasarkan sumber laporan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Laporan Event Risk Report (ERR) – ORM 2). Laporan Hasil Investigasi Audit – SKAI 3). Laporan STR– AMLA 4). Laporan Customer Complaint – Centralized Customer Care 5). Laporan <i>Fraud</i> Kartu Kredit – Fraud & QA 6). Laporan KYE – Human Capital <p>c. Surprise audit
Di tahun 2012 SKAI telah melakukan surprise audit sebanyak 2 kali di tahun 2012 dengan jumlah sampel cabang sebanyak 104 kantor, terdiri dari 27 Kantor Cabang Induk (KCI), 54 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 10 Kantor Kas (KK) dan 13 <i>Platinum Access Room</i>.</p> | <p>2. Detection Tool
This device is intended to identify and locate the occurrence of fraud, among others, include:</p> <p>a. Whistleblowing policy and mechanism
Currently there is a reporting procedure concerning whistleblowing, on the Obligations to Deliver Information In the Event of Fraud Indication (Whistleblowing) dated 3 June 2010.</p> <p>Number of whistleblowing reporting during 2012 increased to 7 reports compared to 1 report in 2011</p> <p>b. In the management of fraud database and identification based on information sources from:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Event Risk Report (ERR) – ORM 2). Audit Investigation Results Report – SKAI 3). STR Reports – AMLA 4). Customer Complaint Reports – Centralized Customer Care 5). Credit Card Fraud Reports – Fraud & QA 6). KYE Reports – Human Capital <p>c. Surprise audit
In 2012 SKAI has conducted surprise audits with the total sample of 104 office branches, consisting of 27 main branch, 54 sub branch 10 cash office and 13 <i>Platinum Access Room</i>.</p> |
| <p>3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
Perangkat ini ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk penenaan sanksi atas kejadian <i>fraud</i>.</p> <p>Menyampaikan laporan strategi anti <i>fraud</i> secara berkala ke BOD (Presiden Direktur).</p> <p>Berdasarkan laporan ERR dan laporan hasil pemeriksaan khusus SKAI, selama periode 2012 terdapat kejadian dengan indikasi <i>fraud</i> sebanyak 10 kejadian. Tindak lanjut seluruh kejadian <i>fraud</i> di atas telah diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan status di akhir tahun 2012 adalah <i>closed</i>.</p> | <p>3. Investigation, Report and Sanction
This tool is intended to collect information, the reporting system including the imposition of sanctions on the occurrence of fraud.</p> <p>Delivering anti-fraud strategy report regularly to the BOD (President Director).</p> <p>Based on ERR reports and SKAI special examination report, during 2012 there were 10 cases which can be indicated of fraud. Follow up on fraud event has been settled in accordance to the prevailing regulation. As of 2012 the status is closed.</p> |

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut

Tindak lanjut penerapan strategi anti *fraud* semester I dan II tahun 2012 telah disampaikan di dalam Forum IAC (Internal Audit Committee)

4. Monitoring, Evaluation, and Follow-up

The follow up of the implementation of anti-fraud strategy for the first and second semester of 2012 have been conveyed in the IAC (Internal Audit Committee)

Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern perusahaan merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*).

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah memberikan keyakinan dan konsultasi secara independen, objektif, dan profesional yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan membantu Bank dalam pencapaian tujuan dan sasarannya dengan melakukan evaluasi kecukupan pengendalian intern dan meningkatkan pengelolaan risiko dan proses tata kelola Bank melalui pendekatan secara sistematis dan disiplin. Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Intern Bank Umum.

SKAI merupakan fungsi independen yang melapor langsung kepada Presiden Direktur dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Independensi, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab SKAI dijamin oleh *Internal Audit Charter* yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan Presiden Direktur Perseroan, sesuai dengan standar Internasional yang bersumber pada *International Practice Framework* dari *the Institute of Internal Auditors*.

Dalam menjalankan kegiatan audit, SKAI telah menerapkan *Risk Based Audit* dimana kegiatan audit di arahkan pada area yang berisiko tinggi sehingga dapat membantu manajemen untuk menerapkan pengendalian intern yang efektif atas risiko yang ada. Hal ini memberikan nilai tambah pada peningkatan lingkungan pengendalian perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu SKAI juga telah menerapkan tehnik terkini dalam melakukan *continuous monitoring* melalui analisa *Management Information System* (MIS) dan penerapan *Computer Assisted Audit Techniques* (CAATS) yang berkesinambungan dan terintegrasi. Dengan penerapan CAATS, SKAI mampu menganalisa data secara lebih

Internal Audit Function

The Company's internal audit function serves as key component of good corporate governance that shapes and improves the corporate control environment

The function of the Internal Audit Unit (SKAI) is to provide assurance and consulting independently, objectively, and professionally designed to add value and assist the Bank in achieving its goals and objectives by evaluating the adequacy of internal controls and improve risk management and governance processes of the Bank through discipline and systematic approach. In performing its function, the Internal Audit Unit (SKAI) refers to Commercial Bank's Internal Audit Function (SPFAIB) as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 dated 20 September 1999 on the Assignment of Compliance Director and Internal Function Implementation Standards of Commercial Banks.

SKAI is an independent function that reports to the President Director and to the Board of Commissioners through the Audit Committee. Having been adapted from International Practice Framework of the Institute of Internal Auditors, the independency, functions, authorities, duties and responsibilities of Internal Audit are outlined in the Internal Audit Charter in line with world-class standards, International Practice Framework of the Institute of Internal Auditors.

In performing audit assignments, SKAI has implemented Risk Based Audit approached which focusing on high risk areas to support management to implement effective internal control over risks. This gives added value to improve the Company's overall control environment.

In addition, SKAI has also implemented the latest audit techniques to perform continuous monitoring through integrated analysis on Management Information System (MIS) and the implementation of Computer Assisted Audit Techniques (CAATS). The implementation of CAATS will enable SKAI to perform

menyeluruh sekaligus mampu terfokus pada kondisi yang tidak biasa (*unusual conditions*) sehingga bisa melaksanakan kegiatan audit secara lebih komprehensif.

Di tahun 2012 SKAI telah melakukan 120 penugasan audit yang mencakup 313 kunjungan audit baik dalam bentuk regular audit, *thematic audit*, *surprise audit* serta *review di area perkreditan melalui penugasan Post Approval Review* dan *Post Mortem Review* di area perkreditan. Cakupan audit meliputi audit pada kantor cabang dalam negeri, unit kerja kantor pusat (bisnis dan fungsi support), teknologi dan sistem informasi, audit pada area perkreditan serta melakukan penugasan khusus bila diperlukan dengan komposisi pencapaian sebagai berikut:

comprehensive data analysis and focus on the unusual condition which lead to comprehensive audit works.

In 2012 Internal Audit Unit has conducted 120 audit assignments covering 313 audit visits in the form of regular audit, thematic audits, surprise audit and reviews in the area of credit through Post Approval Review and Post Mortem Review assignments. The audit coverage are branch audit, head office audit (business and support functions), technology and information systems, credit audit and special audit if required, audit works composition are as follows:

Komposisi Pencapaian Cakupan Audit | Achievement Composition of Audit Coverage

No.	Obyek Audit Audit Object	2012	2011
		Realisasi Audit Audit Realization	Realisasi Audit Audit Realization
1	Thematic Audit	4	8
2	Surprise Audit	2	2
3	Cabang Dalam Negeri Onshore branches	37	37
4	Cabang Luar Negeri dan Anak Perusahaan Offshore branches and subsidiaries	3	2
5	Unit Kerja Kantor Pusat Working unit in Head Office	34	25
6	Unit Kerja Syariah Sharia Working Unit	1	-
7	Teknologi dan Sistem Informasi Information Technology and System	14	11
8	PAR & PMR	12	10
9	Penugasan Khusus special assignment	13	21
Jumlah Total		120	116

Inisiatif baru SKAI selama tahun 2012 meliputi: pengawasan SKAI atas fungsi audit intern anak perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi audit intern pada anak perusahaan; pembentukan Internal Audit Committee (IAC) untuk memastikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti hasil audit secara efektif dan tepat waktu; pelaksanaan *guest auditor* untuk memberikan pembelajaran kepada *risk owner* dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal, kepekaan risiko (*risk awareness*) dan budaya risiko (*risk culture*) Bank; dan validasi atas temuan regulator untuk memastikan kecukupan tindak lanjut temuan regulator.

SKAI terus meningkatkan kompetensi auditor secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional. Pada saat ini

SKAI new initiatives in 2012 comprised of SKAI oversight on the subsidiaries' internal audit function to enhance the implementation of the internal audit function in subsidiaries; the establishment of the Internal Audit Committee (IAC) to ensure that the management has followed up the audit findings effectively and timely manner; implementation of guest auditors to provide knowledge to the risk owner in improving the quality of internal control systems, risk awareness and risk culture of the Bank; and validation of the regulatory audit findings to ensure the adequacy of follow-up action on the regulatory findings.

SKAI continuously improve the auditor's competency to enable them to perform professional internal audit functions. Currently, SKAI auditors have obtained

Laporan Tata Kelola Perusahaan

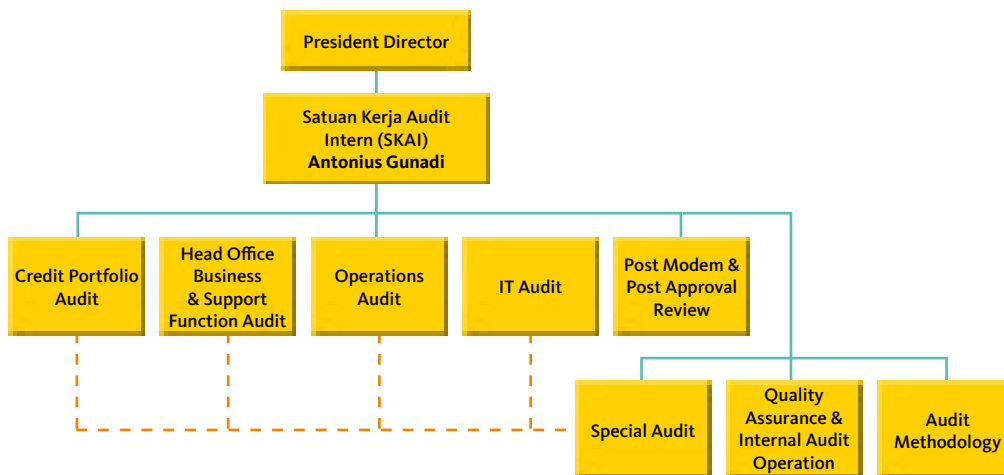
Corporate Governance Report

auditor SKAI telah memperoleh berbagai sertifikasi kompetensi standard Internasional seperti:

- *Certified Internal Auditor* (CIA – 1 Auditor);
- *Certified Information Systems Auditor* (CISA – 3 Auditor);
- *Certified Information Security Manager* (CISM – 1 Auditor);
- *Certified Fraud Examiner* (CFE – 1 Auditor);
- *Certified in Risk and Information Systems Control* (CRISC- 1 Auditor);
- *Certified Ethical Hacker* (CEH – 1 Auditor);
- Sertifikasi lokal seperti BSMR (53 Auditor);
- LSPP (18 Auditor);
- *Certified Bank Internal Auditor* (CBIA – 20 Auditor);
- *Qualified Internal Auditor* (QIA – 38 Auditor).

Seiring dengan dinamika perusahaan, SKAI dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu SKAI terus meningkatkan kualitas fungsi audit intern dengan memberikan pelatihan baik secara internal dan external serta pelatihan berbasis *e learning* (situs *Audit Director Roundtable*) dan melakukan review kualitas pelaksanaan audit secara reguler yang dilakukan oleh unit Quality Assurance SKAI dan setiap tiga tahun sekali dilakukan evaluasi oleh auditor eksternal dengan reputasi internasional. Kaji ulang oleh pihak eksternal terakhir dilakukan pada bulan Februari tahun 2011 untuk periode audit 2008 hingga 2010 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)



* Jumlah Karyawan Audit Intern per Desember 2012 sejumlah 102 orang
As of December 2012 Total Internal Audit Employee 102 person

various world class certifications such as:

- *Certified Internal Auditor* (CIA – 1 Auditor);
- *Certified Information Systems Auditor* (CISA – 3 Auditor);
- *Certified Information Security Manager* (CISM – 1 Auditor);
- *Certified Fraud Examiner* (CFE – 1 Auditor);
- *Certified in Risk and Information Systems Control* (CRISC- 1 Auditor);
- *Certified Ethical Hacker* (CEH – 1 Auditor);
- Local certification, such as BSMR (53 Auditors);
- LSPP (18 Auditors);
- *Certified Bank Internal Auditor* (CBIA – 20 Auditors);
- *Qualified Internal Auditor* (QIA – 38 Auditors).

In line with the dynamics of the company, SKAI is required to make ongoing adjustments to be able to maintain the performance standards. Therefore SKAI continuously improves the quality of the internal audit function by providing trainings internally and externally as well as e-learning based trainings (Audit Director Roundtable website) and review regularly on the quality of the audit works by SKAI Quality Assurance unit and to conduct evaluation performed by external auditors with international reputation every three years. The last external review was conducted in February 2011 for the 2008-2010 audit period and stated that SKAI has complied with SPFAIB requirement.

Organization Structure of the Internal Audit Unit (SKAI)

Fungsi Audit Eksternal

Sebagai perusahaan publik, BII menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya Bapepam-LK).

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan Pemeriksaan Umum tahun 2012

Dalam RUPS 2012, salah satu agenda rapat adalah persetujuan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP sebagai auditor ekstern yang independen dalam memeriksa laporan keuangan BII tahun 2012.

Guna menjalankan mandat yang diberikan oleh RUPS tersebut, Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit telah menunjuk KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), *member of Ernst & Young (EY)* sebagai auditor ekstern.

Tahun 2012 merupakan penugasan tahun ketiga bagi KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), *member of Ernst & Young (EY)*.

Izin usaha dari KAP Purwanto, Suherman & Surja telah mendapatkan persetujuan izin usaha dari Menteri Keuangan RI berdasarkan keputusan No.381/KM.1/2010 tertanggal 24 Mei 2010.

Akuntan yang menandatangani Laporan Keuangan (LK)

Benyanto Suherman, sebagai salah satu partner dari KAP PSS, yang memperoleh Izin Akuntan Publik No. AP.0685, menandatangani Laporan Keuangan (LK) pada tahun 2012.

Drs. Hari Purwanto, sebagai salah satu partner dari KAP PSS, yang memperoleh Izin Akuntan Publik No. 98.1.0065, menandatangani Laporan Keuangan (LK) pada tahun 2011 dan 2010.

Biaya Pemeriksaan Umum

Besarnya biaya pemeriksaan Umum (*General Audit Fee*) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2012 adalah USD275,000 (Dollar Amerika Serikat : Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu).

Jasa – jasa lainnya

Selain melakukan pemeriksaan umum (General Audit), jasa lainnya yang diberikan KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), *member of Ernst & Young (EY)* adalah jasa review untuk melakukan review atas *reporting package* konsolidasian yang tidak diaudit untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2012 dengan biaya sebesar USD85,000.

External Audit Function

As a public listed company, BII appoints a Public Accountant and Public Accountant Firm (KAP) which is listed at Bank Indonesia and Financial Services Authority (formerly Bapepam-LK).

Public Accounting Firm (KAP) that Performed the General Audit Work in 2012

One of the 2012 GMS (General Meeting Shareholder) resolutions, among others, was to authorize the Board of Commissioners to appoint a KAP as the independent external auditor to audit BII's financial statements for 2012.

Based on such authorization and recommendations from the Audit Committee, the Board of Director has appointed KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), a member of Ernst & Young (EY).

This is the third assignment for KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS) in the last three years.

KAP Purwanto, Suherman & Surja gained business license approval from the Minister of Finance based in its decision No.381/KM.1/2010 dated 24 May 2010.

Accountants Who Signed the Financial Statements (LK)

Benyanto Suherman, as one partner of KAP PSS, who received the License of Certified Public Accountants No. AP.0685, signed the Independent Auditor's Report on the Financial Statements (LK) for the year of 2012.

Drs. Hari Purwanto, as one partner of KAP PSS, who received the License of Certified Public Accountants No. 98.1.0065, signed the Independent Auditor's Report on the Financial Statements (LK) for the years of 2011 and 2010.

General Audit Fee

The General audit fee for the Financial Statement ended 31 December 2011 was USD 275,000.

Other Audit Services

Besides conducting General Audit Services, audit services provided by KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS), member of Ernst & Young (EY) is service to undertake the reporting package review of unaudited consolidated for the six months for the year ended 30 June 2012 amounting USD85,000.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Independensi

Untuk senantiasa menjaga independensi selama pemeriksaan umum di tahun 2012, maka Akuntan yang bertindak sebagai *Partner-in-Charge (PIC)* telah menandatangani "Surat Pernyataan Independen" dengan surat No. 03422/PSS-AS/2012 tanggal 8 Juni 2012.

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa KAP Purwantono, Suherman & Surja (anggota dari Ernst & Young), baik Partner maupun anggota tim yang melakukan audit atas laporan keuangan BII adalah merupakan pihak independen sesuai dengan Keputusan Bapepam No.Kep-86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Independensi Akuntan Publik yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan fungsi yang sangat penting bagi Bank untuk membantu menjalankan bisnis secara berkesinambungan untuk mencapai hasil (*return*) yang maksimal, dengan tetap memperhatikan serta mengelola risiko yang terkandung di dalamnya.

Untuk menanamkan tingkat kesadaran risiko yang tinggi kepada seluruh karyawan, Bank senantiasa mensosialisasikan prinsip-prinsip manajemen risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster, dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan-pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat, seluruh cabang dan anak perusahaan.

Bank mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengelola berbagai risiko yang timbul dari perkembangan bisnis bank dan perubahan lingkungan bisnis. Seluruh risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko reputasi, risiko bisnis/strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko operasional dinilai melalui pendekatan manajemen risiko secara menyeluruh yang didukung oleh tata kelola risiko yang baik, infrastruktur dan perangkat yang tepat, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan unit independen yang berfungsi untuk membuat kebijakan dan memantau risiko-risiko yang ada di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Independency

In order to maintain impartiality during the 2012 general audit, the Accountant that serves as the Partner-in-Charge (PIC) signed a 'Statement of Impartiality' through its letter No. 03422/PSS-AS/2012 dated 8 June 2012.

The letter stated that the Public Accountant Firm (KAP) of Purwantono, Suherman & Surja (member of Ernst & Young), whether the Partner or team members who conducted the audit on the Financial Statements of BII, are independent as defined under Head of Bapepam Decision Letter No. Kep-86/BL/2011 dated 28 February 2011 on Impartiality of Public Accountants that Provide Services to the Capital Markets.

Risk Management Function

Risk management is crucial function for the Bank to manage an effective business process in achieving the maximum result (return), while maintaining and managing the inherent risks.

To instill a high level of risk awareness to all employees, the Bank continually publicize the principles of risk management through risk awareness campaigns, posters, and other media publications, as well as related trainings conducted at the head office, all branches and subsidiaries.

Banks take proactive measures to manage the risks arising from the bank's business development and business environment changes. All risks, such as credit risk, liquidity risk, market risk, reputation risk, business /strategic risk, legal risk, compliance, and operational risk are assessed through the overall risk management approach that is supported by good risk governance, adequate infrastructures and instruments as well as adequate monitoring mechanisms.

Risk Management Unit is an independent unit which responsible in establishing policies and monitor risks in the business activities and processes.

Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko:

Risk Management Structure



Pembahasan mengenai Fungsi Manajemen Risiko secara mendalam terdapat pada laporan manajemen risiko dalam bagian laporan pendukung bisnis pada buku laporan tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dengan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Below is the structure of the Risk Management Unit: Disclosure of Risk Management Function in depth is available in the reports section of this annual report

Provision of Funds to Related Parties with Large Exposure

Provision of funds to related parties and core debtors/ group as at 31 December 2012 we as follows:

No.	Provision of Funds Penyediaan Dana	Total Jumlah	
		Debitur Debts	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Rp Million)
1	Kepada Pihak Terkait To Related Parties*)	169	666,086
2	Kepada Debitur Inti To Core Debts		
	- Perorangan Individu	8	5,246,982
	- Group	17	12,128,762

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur/group inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Di tahun 2012, tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK.

Bank memiliki dan menyampaikan daftar Pihak Terkait secara periodic ke Bank Indonesia. Daftar Pihak Terkait dipantau oleh BI.

Provision of funds to related parties and debtors/core groups has been conducted in accordance with Bank Indonesia regulations on Legal Lending Limit (LLL).

There is no violation or exceed of LLL throughout 2012.

The bank already has list of related party. The report is submitted to BI on a regular basis. The list of related party is monitored by BI.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Daftar Pihak Terkait terkait dengan Bank dapat dilihat pada tabel berikut:

List of Related Parties associated with the Bank are as follows:

No	Company name Nama Perusahaan	Total Saldo/Pihak Terkait (Jutaan Rupiah) Total Balance / Related Parties (IDR Million)	Keterangan Description
1	PT Adaro Indonesia.	-	Salah satu Direksi adalah Komisaris perusahaan/ badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali One of directors is the commissioner in company which Bank act as controlling party
2	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	-	Mempunyai induk perusahaan yang sama dengan Bank Owned by the same shareholder
3	Komisaris, Direksi, DPS, Pejabat Eksekutif & hubungan karena keluarga	22,273	Komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah dan hubungan kekeluargaan Commissioners, Directors, Syariah Board members and executive officers of the bank
4	PT BII Finance Center	71,998	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank act as controlling party
5	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	108,669	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank act as controlling party
6	PT Jasa Angkasa Semesta	-	Salah satu Dewan Komisaris PT Jasa Angkasa Semesta adalah Komisaris BII One of BII commissioners is the commissioner of PT Jasa Angkasa Semesta
7	Kim Eng Securities	-	Mempunyai induk perusahaan yang sama dengan Bank Owned by the same shareholder
8	Malayan Banking Berhad	33,797	Pemegang saham akhir Ultimate Shareholder
9	Mayban Offshore Corporate Services (Labuan) Sd. Bhd.	-	Pengendali Bank Bank's controlling party
10	Sorak Financial Holding, Pte, Ltd.	-	Pengendali Bank Bank's controlling party
11	BCA Sekuritas	-	Terkait karena hubungan keluarga pengurus Bank Related party due to family relationship with the bank's management
12	PT. Wahana Artha	-	Pemegang saham perusahaan/pengurus adalah Komisaris salah satu perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Company's shareholder is commissioner of a company, in which the Bank act as controlling party
13	PT. Wahana Makmur Sejati	-	Merupakan pengendali dari salah satu anak perusahaan Bank Controlling party in one of the Bank's subsidiaries
14	Penyertaan Pada Perusahaan Anak		
	- PT Bii Finance Center	32,370	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank act as controlling party
	- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	396,979	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali Bank act as controlling party
TOTAL		666,086	

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti diantaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana besar untuk debitur dan obligor.

Penyediaan dana besar (Large Exposure) yang diberikan kepada 10 (sepuluh) debitur terbesar per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Bank has an internal policy regarding the provision of monitoring mechanism with respect to the deployment of funds/portfolio diversification and the provision of funds the Bank has established internal policies limit the provision of funds, such as the establishment of internal limit of large exposure for debtors and obligors.

Provision of Large Exposure given to 10 (ten) largest debtors as of 31 December 2012 can be seen in the following table:

No	Nama Debitur Debtor Name	Kolektibilitas Collectibility	Saldo (dalam Rp) Outstanding (in IDR)
1	A	1	1,355,015
2	B	1	1,183,982
3	C	1	Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap There are court decisions that have permanent legal force
4	D	1	994,211
5	E	1	702,119
6	F	1	810,614
7	G	1	769,359
8	H	1	767,593
9	I	1	764,653
10	J	1	694,556
Total			9,094,467

Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank disusun dengan mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan jangka panjang bisnis Bank. Bank memformulasikan inisiatif-inisiatif strategis sebagaimana disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2012 – 2014 dan revisinya. Implementasi dan pencapaian dari inisiatif-inisiatif strategis tersebut dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan oleh manajemen Bank agar tetap selaras dengan visi dan misi Bank.

Pada 2012 Bank telah melakukan penyegaran strategi dengan penekanan untuk menjadi relationship bank yang terkemuka di Indonesia yang hadir di tengah-tengah komunitas, memberikan layanan melalui produk dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan

The Bank's Strategic Planning

The Bank's strategic plans are prepared based on the Bank's vision, mission and long-term Bank's business policy. The bank formulates strategic initiatives as stated in the 2012 - 2014 Bank's Business Plan (RBB) and its revision. Implementation and achievement of these strategic initiatives is evaluated regularly and continuously by management to be in line with the vision and mission of the Bank.

In 2012 the Bank has refreshed its strategic intent updates with an emphasis of being the leading relationship bank in Indonesia by truly being in the community, serving through customized products & solutions and delivering high quality of service. The

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

nasabah serta layanan yang berkualitas tinggi. Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah diselaraskan dengan strategi dan misi Bank yang baru.

Rencana Strategis Bank 2012 – 2014 dan Revisinya telah disusun sesuai dengan PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/27/DPNP tanggal 25 November 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum serta arahan dari Bank Indonesia yang disampaikan melalui surat No.13/44/DPB2/TPB2-5/Rahasia tanggal 22 November 2011. Penyusunan Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terkini.

Bank senantiasa melakukan review kinerja keuangan secara rutin. Pengukuran kinerja setiap unit bisnis *direview* setiap bulan sehingga Bank dapat segera melakukan *action plan* untuk mencapai target tahunan yang ditetapkan. Bank telah menyampaikan laporan kinerja keuangan Bank secara tepat waktu ke Bank Indonesia, dimana Bank menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan dan mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan telah dipresentasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 November 2011 dan tanggal 22 Juni 2012.

Dalam mengkomunikasikan dan melaksanakan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank, maka Bank telah:

- Menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengkomunikasikan kepada pemegang saham pengendali.
- Mengadakan *townhall meeting* sebagai sarana komunikasi internal untuk menyampaikan kebijakan dan strategi manajemen. *Townhall meeting* merupakan forum komunikasi yang dihadiri oleh top manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Melakukan *roadshow* ke kantor wilayah dan cabang untuk mengkomunikasikan strategi, visi dan misi Bank yang terkini.

Bank's Business Plan has been aligned with the new strategic intent and mission of the Bank.

The 2012 – 2014 Bank's Strategic Plan and its Revision has been prepared in accordance with PBI No.12/21/PBI/2010 dated 29 October 2012 on Commercial Bank Business Plan and Circular Letter of Bank Indonesia No.12/27/DPNP dated 25 November 2010 on Commercial Bank Business Plan as well as directives of Bank Indonesia through the letter No.13/44/DPB2/TPB2-5/Rahasia dated 22 November 2011. Preparation of Bank's Business Plan and Bank's Business Plan Revision are based on the prudence principle with respect to the latest internal and external conditions.

Bank conducts review of financial performance on a regular basis. Measurement of the performance of each business unit are reviewed every month so the Bank can immediately take action plans to achieve the annual target. The Bank has reported the financial performance of the Bank in a timely manner to Bank of Indonesia, in which the Bank shows significant performance improvements and achieve the set budget targets.

Corporate and Business Plan are prepared and presented by BOD and approved by the Commissioner through the Board of Commissioners Meeting on 29 November 2011 and on 22 June 2012.

In communicating and implementing the Bank's Corporate and Business Plan, the Bank has:

- Prepare Bank's Strategic Plan by communicate to the controlling shareholder.
- Held a townhall meeting as a means of internal communication to convey management policies and strategies. Townhall meeting is a communication forum attended by top management, senior management, regional leaders and branch leaders to inform the company's performance and initiatives that are being and will be implemented.
- Conducted roadshows to regional and branch offices to communicate the latest strategy, vision and mission of the Bank.

- Menetapkan sasaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank menjadi KPI (*Key Performance Indicator*) masing-masing unit kerja. Pencapaian realisasi RBB 2012 – 2014 dievaluasi dari waktu ke waktu untuk memastikan agar target tahunan dapat tercapai.
- Sehubungan dengan rencana Bank yang tercantum pada Revisi RBB 2012 – 2014 untuk menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi, Bank telah merealisasikan rencana tersebut pada Q4 2012. Laporan realisasi penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi telah disampaikan kepada Bank Indonesia, dan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia untuk dimasukkan sebagai modal pelengkap pada tanggal 4 Desember 2012 (surat BI No. 14/119/DPB2/PB2-5 tanggal 4 Desember 2012).
- Kantor cabang Bank yang baru telah dibuka sesuai dengan rencana yang disampaikan dalam RBB 2012 – 2014.
- Determined the targets that are listed in the Bank's Business Plan to become KPI (*Key Performance Indicator*) of each work unit. The 2012 – 2014 RBB achievement realization are evaluated from time to time to ensure that the annual targets can be achieved.
- In relation to the Bank's plan that are listed on the 2012 – 2014 RBB Revision to issue bonds and subordinated bonds, the Bank has realized the plan in Q4 of 2012. Reports of the bonds and subordinated bonds realization has been submitted to Bank Indonesia, and have received approval from Bank Indonesia for the inclusion as supplementary capital on 4 December 2012 (letter No. BI letter. 14/119/DPB2/PB2-5 dated 4 December 2012).
- Bank's new branch office has been opened in accordance with the plan presented in the 2012 – 2014 RBB.

Manajemen Bank secara berkala mengevaluasi kinerja Bank dan membandingkannya dengan kinerja peers dan industri sehingga dapat dilihat perbaikan-perbaikan yang diperlukan dan potensi usaha yang akan dikembangkan di masa yang akan datang. Sampai dengan Desember 2012 realisasi kinerja keuangan Bank menunjukkan perbaikan yang signifikan dan melampaui target anggaran yang ditetapkan, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan aset yang lebih berkualitas, melalui pertumbuhan kredit dan dana nasabah, peningkatan laba bersih, membaiknya rasio efisiensi dan peningkatan rasio-rasio keuangan lainnya.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan), dengan melakukan evaluasi kinerja Bank secara rutin setiap bulannya.

Dewan Komisaris memberikan arahan dan masukan atas kinerja yang berhasil dicapai Bank untuk memastikan kesinambungan peningkatan usaha Bank di masa mendatang.

Rencana strategis Bank selengkapnya dapat dilihat pada bagian Rencana & Strategi Annual Report.

The Bank's management periodically evaluates the Bank's performance and compare with the performance of peers and industry, to assess improvement required and business prospect for future reference. As of December 2012 the Bank's financial performance showed significant improvement and exceed the set budget targets, shown among others through an increase in higher quality assets, through credit growth and customer funds, an increase in net income, improvements in the efficiency ratio and increase in other financial ratios.

Board of Commissioners has conducted monitoring on the implementation of the Bank's Business Plan (corporate plan), by evaluating the performance on a regular basis each month.

The BOC provides directives and input on the achieved performance to ensure the improved sustainability of the Bank's business in the future.

The Bank's Strategic Planning can be found at Plan and Strategic Section in this Annual Report.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

The Ratio of The Highest Salary to Lowest

The ratio of the highest salary to lowest at Bank in 2012 are:

No.	Jenis Rasio Types of Ratios	Besarnya Rasio The Magnitude Ratio
a	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest salary to lowest	110,6 x
b	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest Director salary to lowest	1,7 x
c	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah The ratio of the highest Commissioner salary to lowest	1,3 x
d	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi The ratio of the highest Director salary to the highest top official's	1,7 x

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan telah dilakukan sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan menurut ketentuan yang berlaku dari Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank kepada *stakeholders*, termasuk mempublikasikan laporan keuangan Bank dalam surat kabar berbahasa Indonesia yaitu surat kabar Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Media Indonesia dan Investor Daily serta melaporkan kepada Bank Indonesia dan *stakeholders* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Bank juga mengirimkan laporan keuangan setiap bulan untuk dipublikasikan dalam website Bank Indonesia. Laporan keuangan publikasi triwulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan juga kepada Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Dalam hal Informasi produk Bank telah ditransparasikan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Laporan Tahunan Bank disampaikan ke pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, yaitu paling tidak kepada Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan serta 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Transparency of Financial and Non Financial Conditions

The Bank's financial and non-financial reports have been prepared and presented in accordance with the provisions of Bank Indonesia and applicable regulations.

Bank has implemented the transparency of financial and non-financial services to the Bank's stakeholders and the public, including publication of financial statements in Indonesian language newspaper namely Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Media Indonesia and Investor Daily including reporting to Bank Indonesia and stakeholders in accordance with applicable regulations. In addition, the Bank also submit financial statements each month for publication in the website of Bank Indonesia. Publication of quarterly financial reports and the Consolidated Financial Statements have also been conveyed to Bank Indonesia, Indonesia Stock Exchange, Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK).

In terms of product information, the Bank has applied the provisions of Bank Indonesia on the transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data.

Annual Report of the Bank is submitted to the parties as stipulated in Bank Indonesia provisions, namely Bank Indonesia, YLKI, Rating Agency of Indonesia, the Association of Banks in Indonesia, LPPI, 2 (two) Research Institute of Economics and Finance, as well as 2 (two) Economics and Finance Magazine.

Pengaduan Nasabah

Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan, Bank telah melakukan pemantauan atas pengaduan nasabah melalui media massa dan media online ataupun media lainnya, sehingga setiap keluhan nasabah yang disampaikan melalui media apapun dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah. Transparansi tata cara pengaduan nasabah disampaikan dalam setiap penanganan dari keluhan nasabah yang diterima. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank. Jika pengaduan nasabah tidak segera ditindaklanjuti, akan berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi Bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Bank telah menyampaikan Laporan Penanganan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia, yang disampaikan secara triwulan kepada Bank Indonesia.

Selama 2012, Laporan Pengaduan Nasabah yang dikirimkan ke Bank Indonesia melalui LKPBU sebagai berikut:

	Periode Pelaporan 2012 Reporting Period	Dilaporkan Reported	Jumlah Pengaduan Nasabah Total Customer Complaint
Q1	Jan – Mar	April 2012	6740
Q2	Apr – Jun	Juli 2012	1918
Q3	Jul – Sep	Oktober 2012	2068
Q4	Okt – Des	Januari 2013	1391

Mediasi Perbankan

Mediasi perbankan dilakukan dalam hal apabila terjadi ketidaksepakatan dalam proses penyelesaian pengaduan nasabah. Transparansi atas proses mediasi Perbankan disampaikan secara langsung kepada nasabah apabila terjadi ketidaksepakatan dalam proses penyelesaian pengaduan nasabah dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Mediasi dan diatur juga secara internal melalui SOP Penanganan Keluhan Nasabah dan SOP Mediasi Perbankan.

Customer Complaint

In order to improve corporate governance, the Bank conducts monitoring of customer complaints through the media and online media or other media, thus any complaints can be addressed quickly. Transparency of procedures for customer complaints have been submitted in all handling of customer complaints received particularly related to financial complaints.

Bank has informed the customer complaints procedure for customers according to Bank Indonesia's provisions on Customer Complaints. Transparency of procedures for customer complaints are submitted in all handling of customer complaints received. As stipulated in Bank Indonesia, the settlement of customer complaints is one form of improved customer protection in order to guarantee the rights of clients in their dealings with the Bank. In the event customer complaints are not immediately acted upon, it would potentially increase the reputation risk of the Bank and in the long run will reduce public confidence in the banking institutions.

Bank has submitted reports of Complaints Handling and complaint resolution in accordance with the format and reporting period stipulated by Bank Indonesia.

During 2012, the Customer Complaint Report submitted to Bank Indonesia through LKPBU is as follows:

Banking Mediation

Banking mediation is conducted in the event of disagreement in the process of settlement of customer complaints. Transparency of the process of Banking mediation is delivered directly to the customer in case of disagreement in the process of resolving customer complaints with reference to the provisions of Bank Indonesia on Mediation and organized internally through the Handling of Customer Complaint SOP and Banking Mediation SOP.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Selama 2012, terdapat 4 (empat) kali Mediasi yang diselesaikan melalui Bank Indonesia.

During 2012, there were 4 (four) Banking Mediations conducted by BII which were resolved through Bank Indonesia.

Kode Etik & Pedoman Tingkah Laku

Code of Ethics & Conduct

Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan

Bank telah memiliki kode etik dan pedoman tingkah laku yang mengatur standar dan perilaku bisnis serta tingkah laku Pribadi yang etis yang merupakan bagian dari budaya Bank dalam pengelolaan tata perusahaan yang baik.

The Bank's Code of Ethics and Code of Conduct which govern ethical standards, business conduct, and ethical personal behavior which is part of BII culture in the management of good corporate governance.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh karyawan dan pengurus tanpa terkecuali, termasuk karyawan kontrak serta para pihak yang bekerjasama dengan Bank atau para pihak yang mewakili Bank secara langsung atau tidak langsung.

This rule applies to all employees and managers, without exception, including contract employees, and parties who cooperate with the Company or parties that represent the Company directly or indirectly.

Bank mengharapkan semua pihak yang mewakili Bank bertindak sesuai dengan standar integritas pribadi dan profesional yang tinggi dalam setiap segi kegiatan mereka dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan Perusahaan serta wajib untuk menolak segala bentuk kompromi baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan Perusahaan yang dapat merusak integritas tersebut.

The Bank expects all parties who represent the Bank to behave accordingly, with the highest standards of personal and professional integrity in every aspect of their activities to comply with all prevailing legislation and Company policies and are obliged to reject all forms of compromise, either for personal benefit or for the interest of the Company that might damage the integrity.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah-Laku menguraikan secara ringkas prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan dan peraturan yang mengatur kegiatan perusahaan yang harus ditaati oleh para karyawan dan pihak lain yang bekerja dengan BII, atau yang mewakili BII secara langsung atau secara tidak langsung atau setiap orang yang berdasarkan kedudukannya memiliki atau dapat memiliki akses terhadap Informasi Perusahaan, baik secara regular maupun tidak atau dapat diasumsikan mengetahui Informasi Perusahaan.

The Code of Ethics and Code of Conduct explain briefly the principles, policies and regulations that govern the activities of the Company that must be adhered to by all employees and other parties working with Company, or representing Company directly or indirectly, or any person that, based on her position, has or might have access to corporate information, either regular or not, or can be assumed to know the Company's Information.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah-Laku dibagikan kepada semua karyawan dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan untuk perusahaan dan pada dasarnya memberikan pedoman untuk tingkah laku professional.

Code of Ethics and Code of Conduct are distributed to all employees and others who carry out work for the company and basically provide guidelines for professional behavior.

Komitmen Pribadi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Personal Commitment to Code of Ethics and Code of Conduct

Penerapan Kode Etik dan Pedoman Tingkah-Laku diperkuat dengan adanya Pembaharuan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku secara online melalui Portal BII Corporate University setiap setahun sekali.

The implementation of Code of Ethics and Code of Conduct is reinforced by the Renewal of Personal Commitment to Code of Ethics and Code of Conduct online through the portal BII Corporate University once a year.

Pengecualian pelaksanaan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku secara online melalui Portal BII Corporate University yaitu untuk:

1. Karyawan Baru, yang wajib menyampaikannya secara tertulis dan ditandatangani.
2. Konsultan dan Pihak Lain yang berhubungan dengan BII (Bekerja untuk/mewakili), dan lain-lain.

Pemantauan atas pemenuhan pembaharuan Komitmen Pribadi atas Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku tersebut dilakukan oleh Human Capital.

Pelaksanaan Kode Etik dan Meningkatkan Pengawasan internal

Sebagai salah satu wujud komitmen pelaksanaan GCG maka seluruh karyawan menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan transaksi/kegiatan usaha perbankan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaannya maka melalui memorandum No.M.2011.003/DIR OPS tanggal 6 April 2011, BII mengeluarkan aturan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik dan meningkatkan pengawasan internal. Peningkatan pengawasan internal dilakukan secara berkala baik melalui pengarahan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja maupun cabang.

Segala keputusan ataupun tindakan harus senantiasa sesuai dengan kode etik. Selain itu seluruh karyawan agar segera melaporkan melalui mekanisme whistleblowing jika mencurigai atau kemungkinan timbulnya suatu pelanggaran terhadap suatu undang-undang, peraturan ataupun standar etika, pedoman tingkah laku atau kebijakan BII tanpa adanya persetujuan yang benar. Keadaan dimana kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan bank atau nasabah (conflict of interest), harus dihindari. Tetap menjaga dan mempertahankan integritas pribadi dan profesional yang luhur serta etika termasuk kepercayaan, kejujuran, moralitas dan integritas.

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dapat mengakibatkan penerapan sanksi yang berat, termasuk pemutusan hubungan kerja serta hukuman pidana dan hukuman perdata bagi pribadi yang melakukannya.

Melalui memorandum No.M.2012.063/DIR OPS-BOCS & Process Improvement tanggal 16 April 2012, sehubungan dengan core value BII untuk tetap menjaga dan mempertahankan integritas dan

Exceptions on the implementation of Personal Commitment on the Code of Ethics and Code of Conduct online through the portal BII Corporate University are to:

1. New employees, who shall convey it in writing and signed.
2. Consultants and other parties related to BII (Work for/represent), and others.

Monitoring for compliance with the renewal of Personal Commitment to Code of Ethics and Code of Conduct is performed by Human Capital.

Implementation of the Code of Ethics and Improving Internal Control

As one of the GCG implementation commitment, all employees uphold the implementation of the Code of Ethics and Code of Conduct and observe the prudence principle in carrying out transactions/banking operations.

In order to support the implementation, through the memorandum No.M.2011.003/DIR OPS dated 6 April 2011, BII issued internal rules relating to the implementation of the code of conduct and improving internal controls. Improved internal controls are performed regularly through guidance or socialization by unit or branch leaders.

Any decisions or actions must always be in accordance with the code of conduct. In addition, all employees are to immediately report through the whistleblowing mechanism in the event of the suspect or the possibility of a violation of any laws, regulations or ethical standards, BII's behavior guidelines or policy without proper consent. Circumstances where the personal interests conflict with the interests of the bank or the client (conflicts of interest), should be avoided. Keeping and maintaining a noble personal and professional integrity and ethics, as well as ethics including trust, honesty, morality and integrity.

Violation of the Code of Ethics and Code of Conduct may result in the imposition of severe sanctions, including employment termination and criminal prosecution and civil penalties for the individuals committing it.

Through the memorandum No.M.2012.063/DIR OPS-BOCs & Process Improvement dated 16 April 2012, in connection with the BII core value to keep and maintain the integrity and professionalism and ethics, each

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

professional serta etika, maka setiap kantor cabang perlu melakukan sosialisasi atas pelaksanaan kode etik dan meningkatkan pengawasan internal secara konsisten minimal 6 bulan sekali. Selain itu melakukan pengaturan dan pemantauan pelaksanaan cuti (block leave) dan melakukan mutasi-rotasi karyawan minimal 3 tahun sekali.

Permasalahan Hukum/Litigasi

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, BII menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2012 di seluruh tingkatan pengadilan.

BII melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan riisiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Di sepanjang tahun 2012, perkara yang dihadapi BII tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang BII selaku kreditur preferen. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi BII ada yang diputuskan kalah oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negative dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha BII.

Database perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigation. Unit Kerja Litigation merupakan direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

A. BII sebagai Tergugat/Terlapor

branch needs to socialize the implementation of codes of conduct and improved internal control consistently at least once every 6 months. Also configuring and monitoring the implementation of block leave and perform mutation-rotation of employees at least once every 3 years.

Legal Issues/Litigation

In order to carry out its business activities, the Company encounter several claims or cases that occurred before the court.

BII performs legal risk analysis based on several parameter. The result of monthly legal risk analysis will be used to measure legal risk which is part of risk management process.

In the year 2012, the cases faced by BII generally due to the resistance to the execution of collateral held by BII as preferred creditors. If BII from matters facing BII lost was decided by the Court, the judgment does not provide negative and material effect on the financial condition or business continuity BII.

Database containing all case docket faced by the Company are monitored and evaluated by the Litigation Unit. Litigation Unit is a directorate within the organizational structure of the director in charge of compliance functions.

A. BII as Defendants

Status Gugatan Hukum Lawsuit Status	Gugatan Hukum Lawsuit	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah selesai atau terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Have been settled or already have permanent legal force decision	15	2
Tahap proses penyelesaian di masing-masing tingkatan pengadilan on progress at all court level	78	1
Jumlah Total	93	3

Keterangan | Description:

- Untuk Perkara Perdata | For Civil Cases:
 - 27 perkara baru selama tahun 2012 | 27 new cases during 2012;
 - 66 perkara merupakan perkara yang belum selesai di tahun 2011 | 66 cases have not been settled in 2011;
- Untuk Perkara Pidana | For Criminal Cases:
 - no new case during 2012 | tidak ada gugatan baru selama tahun 2012
 - 3 perkara merupakan perkara yang belum selesai di tahun 2011 | 3 cases have not been settled in 2011

B. BII sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor**B. BII as plaintiff**

No	Permasalahan Gugatan Hukum Lawsuit status	Gugatan Hukum Lawsuit	
		Perdata Civil	Pidana Criminal
1.	Perkara berkaitan dengan pelaksanaan hak BII sebagai kreditur preferen atas pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Cases relate to BII's right as a preferred creditor on the mortgage loan		
	Telah selesai atau terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Have been settled or already have permanent legal force decision	24	-
	Tahap penyelesaian di seluruh tingkatan Pengadilan On progress at all court level	10	-
	Total	34	-
2.	Perkara berkaitan dengan pelaksanaan hak BII sebagai kreditur preferen atas pemberian Kredit selain KPR Cases relate to BII's right as a preferred creditor on the non-mortgage loan		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Have been settled or already have permanent legal force decision	16	1
	Dalam proses penyelesaian On progress at all court level	60	2
	Total	76	3
3.	Perkara Kepailitan yang diajukan oleh BII berkaitan kreditur Bankruptcy Cases related to debtors filed by BII		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Have been settled or already have permanent legal force decision	5	-
	Dalam proses penyelesaian On progress at all court level	2	-
	Total	7	-
4.	Perkara lainnya Other Cases		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Have been settled or already have permanent legal force decision	-	2
	Dalam proses penyelesaian On progress at all court level	-	8
	Total	-	10

INTERNAL FRAUD

Internal fraud adalah tindakan penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai kontrak (honorar dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank. untuk keperluan presentasi laporan tahunan, informasi yang di sampaikan hanya internal *fraud* yang berdampak finansial sebesar Rp.100,000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.

Secara umum tindakan penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal Bank merupakan pelanggaran terhadap integritas serta penyelewengan kewenangan.

Dengan mengacu pada core values Bank yaitu "Integrity" Dewan Komisaris dan Direksi menerapkan prinsip *zero tolerance to fraud*. Berbagai penyempurnaan dilakukan dalam mendukung penegakan prinsip tersebut antara lain tersedia internal prosedur yang memadai, memastikan terdapat dual control di setiap kegiatan perbankan, media whistleblowing, review kejadian *internal fraud*, Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

INTERNAL FRAUD

Internal fraud is a distortion/fraud committed by the management, permanent and outsourcing staff within BII operational activities. For the purpose of presentation on the annual report, the information stated below is only for internal fraud with financial amounting Rp.100,000,000 (One Hundred Million Rupiah) and above.

In general, actions on irregularities/fraud by internal party Bank is a violation of the integrity and abuses of authority.

With reference to the Bank's core values of "Integrity" Board to apply the principle of zero tolerance to fraud. Improvements made in support of the enforcement of this principle include available adequate internal procedures, ensuring there is dual control every banking, media whistleblowing, review internal fraud events, There are court decisions that have permanent legal force.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Status Internal Fraud selama Tahun 2012 Internal Fraud Status On 2012	Pelaku Internal Fraud Perpetrators of Internal Fraud								
	Pengurus Management			Pegawai Tetap Permanent Staff			Pegawai Tidak Tetap Non Permanent Staff		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Jumlah Penyimpangan Internal Fraud Total Internal Fraud Incidents	-	-	-	-	2	1	-	1	-
• Kesepakatan penyelesaian bersama para pihak Settlement Agreement	-	-	-	-	-	1	-	1	-
• Tindak lanjut melalui proses hukum follow-up through the legal process	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap already have permanent legal force decision	-	-	-	-	2	1	-	-	-

Whistleblowing

Whistleblowing merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif dalam mendeteksi kejadian *fraud* maupun yang berpotensi *fraud* serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Melalui whistleblowing setiap karyawan didorong dan difasilitasi untuk melaporkan setiap dugaan tindakan *fraud*, penyimpangan atau pelanggaran yang mereka jumpai dengan itikad baik, tanpa harus khawatir bahwa tindakan melaporkan tersebut mungkin memiliki konsekuensi yang merugikan.

Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap anti-*fraud* pada seluruh jenjang organisasi diantaranya dilakukan melalui kebijakan whistleblowing yang merupakan salah satu elemen kunci untuk menjaga integritas serta bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan yang mendukung sistem BII untuk memerangi praktek-praktek yang dapat merusak kegiatan dan reputasi BII.

Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing

Kebijakan *whistleblowing* ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

Kebijakan *whistleblowing* dirumuskan dengan jelas, mudah dimengerti dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan dan seluruh pejabat untuk melaporkan *fraud* yang terjadi.

Hal yang disediakan melalui kebijakan ini mencakup proses pelaporan, investigasi atas kejadian *fraud* dan berikut tindakan perbaikannya, proses komunikasi dan program perlindungan bagi *whistleblower*.

Manajemen mengawal agar implementasi sistem whistleblowing berjalan baik sehingga dapat menjadi kontrol lingkungan yang efektif, sekaligus memberikan

Whistleblowing

Whistleblowing is one of communication channels that is effective in detecting the occurrence of fraud and potential fraud and other forms of irregularities. Through whistleblowing, every employee are encouraged and facilitated to report any suspected acts of fraud, irregularities or violations they meet in good faith, without having to worry that the act of reporting may have adverse consequences.

The development of anti-fraud culture and awareness at all levels of the organization. One of the initiatives is performed through the whistleblowing policy as one of the key elements in maintaining integrity, improve the transparency and support the bank in the fight against practices that could damage the reputation of BII.

Whistleblowing Policy and Mechanism

Whistleblowing policy is intended to enhance the effectiveness of the implementation of fraud control systems with emphasis on the disclosure of the complaint.

Whistleblowing policy was formulated clearly, easy to understand and can be performed effectively in order to provide encouragement as well as awareness to employees and officer to report all fraud that occurred.

Materials provided through this policy covers the process of reporting, investigation of the fraud occurrence and the improvement measurement, communication processes and programs for the protection of the whistleblowers.

The management oversees the implementation of the whistleblowing system which serves as an effective control environment, as well as providing

dorongan dan kesadaran kepada karyawan untuk melaporkan *fraud* yang terjadi.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Cara Penyampaian Whistle Blowing adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Whistleblowing melalui surat dapat dialamatkan ke:
"Compliance PO Box"
Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 25
Jl. Asia Afrika No.8
Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
- b. Apabila melalui e-mail, maka dapat dikirim ke alamat: whistleblowing@bankbii.com.
- c. Media Lainnya

Laporan Whistleblowing harus mencakup beberapa hal berikut:

- a. Fakta kejadian
- b. Nama pihak yang terkait
- c. Modus Operandi
- d. Waktu dan tempat kejadian
- e. Bukti-bukti yang terkait

Mekanisme laporan dugaan pelanggaran dilakukan sebagai berikut:

1. Menerima pelaporan dugaan pelanggaran.
2. Menilai dan menyeleksi laporan dugaan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Menangani keluhan ataupun pengaduan dari pelapor yang mendapat tekanan atau perlakuan ancaman dari terlapor.
5. Melakukan komunikasi dengan pelapor
6. Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.

BII menyusun sistem pelaporan *fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan.

Sistem pelaporan didukung dengan adanya kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *fraud* yang dilaporkan. Kebijakan tersebut dilakukan secara transparan dan diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh karyawan terhadap kehandalan dan kerahasiaan mekanisme whistleblowing.

Perlindungan Kepada Whistleblower

BII berkomitmen untuk memberikan dukungan dan melindungi pelapor yang beriktikad baik dan akan

encouragement and awareness for employees to report fraud occurrences.

Whistleblowing procedure

How to Submit Whistleblowing is as follows:

- a. Whistleblowing report though formal letter can be addressed to:
"Compliance PO Box"
Gedung Sentral Senayan 3 Lantai 25
Jl. Asia Afrika No.8
Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
- b. Email : addressed to whistleblowing@bankbii.com
- c. Other Media

Whistleblowing report shall include the following:

- a. Fact of the incident
- b. The name of related parties
- c. Modus Operandi
- d. Time and place of occurrence
- e. Related evidence

The reporting mechanism of alleged violation committed is as follows:

1. Accepting the alleged violation report.
2. Assess and select alleged violation report which needs further processing.
3. Maintain the confidentiality of complainant identity.
4. Handle the complaint or claims from complainant who receives pressure or threat from reported party.
5. Conduct communication with the complainant
6. Documents all received alleged violation report.

BII construct an effective fraud reporting system that includes clarity of the reporting process, including the reporting procedures, facilities, and the parties responsible for handling the reporting.

The reporting system is supported by a clear follow-up mechanism on the incidence of fraud reported. These policies are transparent and consistently applied to raise the confidence of all employees in the reliability and confidentiality of the whistleblowing mechanisms.

Protection to Whistleblower

BII is committed to provide support and protect the whistleblowers with well intentions and will adhere

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan pelapor.

Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan pelapor. Bagi BII, perlindungan pelapor akan menumbuhkan rasa aman bagi karyawan dan pelapor lainnya.

Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh manajemen dan pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.

Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar perusahaan, seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Bank.

BII memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap perlakuan yang merugikan seperti sebagai berikut:

1. Pemecatan yang tidak adil.
2. Penurunan jabatan atau pangkat.
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).
5. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beriktikad baik, Bank juga akan menyediakan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. BII akan memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini; misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan melalui Sistem Whistleblowing dilakukan oleh Tim Komite Evaluasi Whistleblowing.

Laporan Whistleblowing akan dibahas di dalam Komite Evaluasi yang beranggotakan antara lain Kepala Unit Kerja Kepatuhan, Kepala SKAI dan Kepala Unit Kerja Operation Risk Management.

Komite Evaluasi akan melakukan analisa apakah bukti-bukti yang disampaikan dapat dilanjutkan ke tahap investigasi atau tidak.

to all relevant legislation and best practices prevailing in the organization of systems of protection of whistleblowers.

Protection of the complainant is intended to assure the confidentiality of the complainant and the protection of adverse action reporting. The protection of the complainant will foster a sense of security for employees.

The confidentiality and security of all violation reports will be guaranteed by the management and complainant is guaranteed the right to obtain information on the follow-up of the report.

Complainant may complain when getting a reply in the form of pressure or threats or other retaliation that is experienced. In the event the problem can not be solved internally, the complainant has the right to escalate the issue to an independent agency outside the company, such as a mediator, witness and victim protection agencies at the expense of the Bank.

BII provides protection to the complainant against detrimental treatment such as the following:

1. Unfair termination of employment.
2. Demotion of position or rank.
3. Harassment or discrimination in all forms.
4. Notes that are detrimental in the personal file record.
5. In addition to the above stated protections, for complainant with good intents, the Bank will also provide protection in accordance to the applicable regulations.
6. There is sanction from the bank in the case that the report does in line with the spirit of this procedure; such as defamation or false reporting.

Complaint Handling

Handling of complaints through the Whistleblowing System conducted by the Whistleblowing Evaluation Committee Team.

Whistleblowing report will be discussed at the Evaluation Committee whose members include the Compliance Unit Head, Head of SKAI and Operation Risk Management Unit Head.

Evaluation Committee will analyze whether the evidence presented can proceed to the stage of the investigation.

Komite Evaluasi tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi. Hasil analisa dan rekomendasi akan diserahkan kepada Direktur yang terkait.

Pihak Pengelola Pengaduan

Untuk memastikan bawa setiap pelaporan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan pengaduan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait antara lain atasan dari pelapor, Satuan Kerja audit Intern (SKAI), unit kerja Human Capital, Personnel Committee, unit kerja Anti Fraud.

- Semua laporan mengenai pelanggaran yang masuk akan dilakukan verifikasi, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang cukup memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya ditemukan tidak cukup bukti untuk diteruskan pada tahap investigasi.

Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan/non karyawan, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Investigasi dilakukan oleh SKAI.

Proses investigasi atas suatu laporan tetap memegang azas praduga tidak bersalah dan objektifitas. Hasil dari proses investigasi berupa laporan hasil investigasi yang disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik serta bukti non fisik. Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari siapa yang melaporkan ataupun siapa yang terlapor. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui.

- Laporan hasil dari proses investigasi yang terkait dengan *fraud* Karyawan/non karyawan disampaikan kepada Personnel Committee untuk bisa mendapatkan hasil rekomendasi tindak lanjut atas *fraud* yang dilakukan oleh Karyawan/non karyawan kepada unit kerja dimana pelaku *fraud* bertugas. Misalnya: pemberian sanksi, penurunan jabatan atau pangkat, pemutusan hubungan

Evaluation Committee does not have the authority to impose sanctions. The results of the analysis and recommendations will be submitted to the Director concerned.

Complaint Management Party

To ensure that all reporting is handled in accordance with the applicable regulations, the management of complaints will involve various stakeholders such as employer of the complainant, the Internal Audit Unit (SKAI), Human Capital unit, Personnel Committee, the Anti-Fraud unit.

- All reports will be verified, to gather sufficient preliminary evidence, so a conclusion can be drawn whether the violation reports are true or otherwise not enough evidence was found to continue to the investigation stage.

Investigation is an activity to find evidence related to violations committed by employees/non-employees, who have been reported through the whistleblowing system. Investigation is an essential part in the fraud control system that delivers a message to all parties that any indication of detected fraud measures will always be processed in accordance with the applicable standards of investigation and the perpetrators will be processed in accordance with applicable regulations. Investigations are carried out by the SKAI.

The investigation process of a report retains the presumption of innocence and objectivity. The results of the investigation of the consolidated results of their investigations along with supporting evidence, physical and non-physical evidence. The investigative process shall be free of bias and do not depend on who is reporting or who is reported. The reported shall be given full opportunity to provide an explanation for the evidence found.

- Results report of the investigation related to employees/non-employees fraud is submitted to the Personnel Committee to get results of the follow-up to the fraud committed by employees/non-employees of the unit of work in which the perpetrators of fraud charge. For example: imposing sanctions, demotion of position or rank, termination, etc. Personnel Committee

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

kerja, dan lain-lain. Personnel Committee juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi yang telah disampaikan.

- Unit kerja Anti *Fraud* akan menyampaikan laporan pelaksanaan investigasi dan kejadian *fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen BII maupun kepada Bank Indonesia.

Pengenaan Sanksi

Pengenaan Sanksi. Bank juga akan memberikan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*. Pengenaan sanksi memuat hal-hal sbb :

- a. Mekanisme pengenaan sanksi disesuaikan dengan kebijakan internal yang telah dibuat. Tindakan kepada pelaku *fraud* antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi.
- b. Laporan kepada pihak yang berwenang atau penegak hukum. Pengenaan sanksi diterapkan secara transparan dan konsisten, serta tindakan kepada pihak yang dirugikan antara lain berupa penggantian kerugian dan/atau upaya pemulihan nama baik.

Dalam hal pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik atau *Fraud* berdasarkan hasil special audit yang dilakukan oleh SKAI kepada Karyawan BII telah membentuk Personnel Committee yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan *review* dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi.

Manfaat Penyelenggaraan whistleblowing System

Manfaat dari penyelenggaraan Whistleblowing System yang baik antara lain:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi BII kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
4. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.

also conducts monitoring and evaluation of the recommendations that have been submitted.

- Anti Fraud Unit will submit the work report of the investigation and fraud occurrence found. Reporting mechanism includes reporting internally to the management of BII and Bank Indonesia.

Imposition of Sanction

Imposition of Sanctions. The Bank will also provide effective internal sanctions in order to follow up the results of the investigation to be deterrent for perpetrators of fraud. The imposition of sanctions shall contain the following:

- a. Sanctioning mechanism is adjusted to internal policies that have been made. Measures to perpetrators of fraud which include staffing administrative sanctions and/or indemnification obligations.
- b. Reporting to the local authorities or law enforcement. Imposition of sanctions is applied in a transparent and consistent manner, and action to the injured party includes among others restitution and/or vindication efforts.

In terms of sanctions related to violations of the Code of Conduct or fraud based on the special audit conducted by SKAI to all BII Employees has established the Personnel Committee which has the duty and responsibility to review and make sanction recommendations.

Benefit of the Implementation of the Whistleblowing System

The benefit of the implementation of a good Whistleblowing System among others:

1. Availability of crucial and critical information delivery system to the party that must handle it safely.
2. The emergence of a reluctance to commit offenses, with the increasing willingness to report violations, due confidence in the effective reporting system.
3. Facilitates the management to handle violation reports effectively and simultaneously protects the confidentiality of the identity of the complainant and maintain this information in a special file which the safety is guaranteed.
4. Availability of early warning system mechanism on possible problems resulting from a violation.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik. 6. Mengurangi risiko yang dihadapi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi. 7. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran. 8. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat umum; dan 9. Memberikan masukan kepada manajemen untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. | <ol style="list-style-type: none"> 5. Availability of the opportunity to address violations internally first, before escalating into a public issue of infringement. 6. Reduce the risks faced, consequences of violations in terms of finance, operations, legal, safety, and reputation. 7. Reduce the costs of handling resulting from the breach. 8. Improve the company's reputation in the eyes of stakeholders, regulators, and the general public; and 9. Provide input to the management to look further to the critical areas and work processes with internal control weaknesses, and to design the necessary corrective actions. |
|--|---|

Laporan Whistleblowing 2012 | Whistleblowing 2012 Report

Perihal Type	Media Penyampaian Delivery Channels			Keterangan/Status Explanation/status
	Surat Tertutup Sealed Letter (Compliance PO Box)	Email	Media Lainnya delivery channels	
Jenis Pengaduan Tipe of Case (Whistleblowing) :				
a. Gratifikasi Bribery	1	-	-	closed
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi Violations of Regulations	1	1	1	2 closed 1 open (media lainnya)
c. <i>Fraud</i>	-	-	-	-
d. Lainnya Others	-	-	3	closed
Jumlah Pengaduan Total Case (Whistleblowing)	2	1	4	

Penanganan Benturan Kepentingan

Management of Transactions with Conflict of Interest Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai penanganan benturan kepentingan, baik yang diatur dalam anggaran dasar, ketentuan kode etik dan pedoman tingkah laku yang telah diedarkan dan wajib dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dimana setiap pengurus dan seluruh karyawan tanpa terkecuali telah memberikan komitmen pribadi atas kode etik dan pedoman tingkah laku BII yang diperbaharui setahun sekali.

Anggaran Dasar mengatur mengenai kewenangan mewakili perusahaan dilaksanakan oleh minimal 2 direktur. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa dalam hal terdapat anggota Direksi/Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu yang sedang diusulkan maka anggota Direksi/

Penanganan Benturan Kepentingan

Management of Transactions with Conflict of Interest The Bank has an internal policy regarding the handling of conflicts of interest, both set in the articles of association, the provisions of the code of ethics and code of conduct that has been circulated and must be complied with by all officers and employees of the bank where every management and all employees without exception have given a personal commitment to the code of ethics and code of conduct of BII that are updated annually.

The Articles of Association governs on the authority to represent the company by at least 2 directors. The Articles of Association also regulates that in the event the Board of Directors/Board of Commissioners who have a conflict on a particular transaction being proposed, the members of the Board of Directors/

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berhak memimpin atau ikut dalam pengambilan suara/keputusan dalam rapat-rapat yang diadakan untuk itu, seperti RUPS, Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris.

Selain itu dalam mengatasi penanganan benturan kepentingan terkait pengeluaran biaya maka Bank telah mengaturnya dalam ketentuan internal perihal kebijakan persetujuan pengeluaran biaya.

Dalam hal penanganan benturan kepentingan terkait limit transaksi maka Bank telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai limit transaksi

Dalam pelaksanaan operasional dan pemberian persetujuan kredit Bank menerapkan adanya prinsip adanya dual control.

Selama Desember 2012, tidak terdapat pengungkapan transaksi benturan kepentingan.

Selama 2012, Bank telah melakukan revisi ketentuan maupun penerbitan ketentuan baru terkait pengelolaan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) antara lain:

- Penanganan transaksi dengan pihak terafiliasi sejalan dengan ketentuan Bapepam dan Bank Indonesia.
- Penunjukan pihak ketiga (vendor, kantor hukum, notaris).
- Persetujuan pengeluaran biaya.
- Ketentuan pemberian hadiah & hiburan (Gift & entertainment policy)
- Whistleblowing

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan wajib memenuhi kebijakan internal dalam rangka prinsip kehati-hatian.

Transaksi Afiliasi

Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.E.1., lampiran Keputusan Ketua (d/h) Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan tersebut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Bank telah menerbitkan

Board of Commissioners concerned are not entitled to lead or participate in the voting/decisions in the meetings held to it, such as the GMS, Board of Directors Meeting, the Board of Commissioners Meeting.

In addition, to address the handling of conflicts of interest related to expenses, the Bank has set it in the internal policy regarding the approval of expenditures.

In the case of a conflict of interest related to the handling of transaction limit, the Bank has had internal regulations governing the transaction limit.

In the operational execution and delivery of credit approval the Bank implement the principle of dual control.

During December 2012, there was no disclosure of conflict of interest transactions.

During 2012, the Bank has revised the terms and issuance of new provisions related to the management of potential conflicts of interest (conflict of interest), among others:

- Handling transactions with affiliated parties in line with the provisions of Bank Indonesia and Bapepam.
- Appointment of third party (vendor, legal office, notary).
- Expenditure approval.
- Gift & entertainment policy
- Whistleblowing

The Board of Commissioners, Directors and employees shall comply with internal policies in the context of the prudence principle.

Affiliated Transaction

Affiliated Transaction is transactions undertaken by the Company or the Company Controlled by Affiliates of the Company or Affiliates of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the Company's major shareholder, it is in line with the Regulation of OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.E.1., Annex the Chairman Decision (d/h) Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009 on Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions.

In order to ensure Bank's compliance with the provisions as well as the prevailing laws and regulations, the Bank has issued internal procedures governing transactions

prosedur internal yang mengatur atas transaksi dengan pihak terafiliasi melalui No.SE.2012.009/DIR COMPLIANCE tanggal 30 November 2012 perihal Transaksi Afiliasi.

Rincian mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi selama 2012, dapat dilihat dalam Laporan Tahunan ini sesuai dengan Laporan Keuangan Perusahaan

Pedoman Penanganan Pelanggaran dan Sanksi

Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan hubungan industrial yang harmonis diperlukan upaya preventif dan represif atas kemungkinan terjadinya pelanggaran baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Dalam rangka menyamakan pemahaman teknis pembinaan terhadap Pekerja di Perusahaan, Bank memiliki tata cara pelaksanaan penanganan pelanggaran dan sanksi dalam bentuk Standard Operating Procedure sebagai pedoman atau panduan bagi setiap kantor cabang/unit kerja dalam penyelesaian permasalahan secara cepat, tepat dan adil.

Pedoman tersebut mencakup ketentuan pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial bagi Direksi dan Kepala unit kerja apabila terjadi Pelanggaran/Kesalahan, serta pemberian sanksi terhadap pihak terkait/terlibat oleh pejabat yang bertanggung jawab.

Selama 2012, Bank telah mengeluarkan Sanksi dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai yang mendapat Surat Teguran (ST), Surat Peringatan (SP) dan Terminated Tahun 2012

with affiliated parties through No.SE.2012.009/DIR COMPLIANCE dated 30 November 2012 on Affiliated Transactions.

Details of the transactions with affiliated parties during 2012, can be seen in this Annual Report in accordance with the Company's Financial Statements.

Guidelines On Handling Violations and Sanctions

In order to promote harmonious industrial relationship, preventive and efforts are needed to overcome potential violations both due to deliberateness or negligence.

In order to have same technical understanding on employee development in the Company, Bank has procedures of handling violations and sanctions in the form Standard Operating Procedure as guidelines for every branch/working units in solving the problems quickly, accurately and fairly.

These guidelines are include prevention and industrial relation problem solving procedures for Directors and Head of working units in case of there are any violations, as well as sanctions procedures to involved party by responsible officials.

During 2012, the Bank has issued sanctions with details as follows:

Employees that got Letter of Reprimand, Warning Letter and Terminated in 2012

No	Jenis Sanksi Type of Sanctions	Jumlah Total
1	Surat Teguran Letter of reprimand	60
2	Surat Peringatan 1 Letter of 1 st warning	70
3	Surat Peringatan 2 Letter of 2 nd warning	20
4	Surat Peringatan 3 Letter of 3 rd warning	2
5	Mengundurkan Diri Resignation	1005

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Kebijakan

Bank melaksanakan standar kinerja yang tinggi dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di semua lokasi kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan, memberikan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan, pelanggan, pemasok, tamu dan mitra kerja.

Untuk mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata, Bank memfokuskan aktivitasnya dalam bentuk training, persiapan dan kewaspadaan di berbagai area. Aktivitas ini akan meningkatkan kesiapan para karyawan menjadi lebih efektif di seluruh organisasi.

Kebijakan-kebijakan K3 ditetapkan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan telah memenuhi semua Perundang-undangan, peraturan dan kewajiban hukum yang berlaku mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Memastikan bahwa seluruh karyawan, tamu dan mitra kerja terhindar dari kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja.
3. Senantiasa berupaya untuk meniadakan kondisi dan tindakan tidak aman agar tercapainya "Zero Incident" atau Nihil Kecelakaan.
4. Melakukan identifikasi seluruh bahaya dan penilaian risiko terhadap seluruh aktivitas, bahan, alat dan tempat kerja serta melakukan pengendaliannya.
5. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.
6. Memberikan pelatihan dan penyuluhan yang memadai kepada seluruh karyawan untuk memastikan tujuan perusahaan di bidang K3 tercapai.
7. Memastikan bahwa kebijakan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan, tamu dan mitra kerja serta pihak lain yang terkait.

Kegiatan-Kegiatan Terkait K3

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang kebijakan K3 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Training Implementasi K3 di Perbankan
Tujuan Training :
 - Penyelenggaraan training dalam rangka mengenali dan memahami apa yang dimaksud dengan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di lingkup Perbankan.

Health and Safety (K3)

Policy

The Bank is implementing high standards in the area of Health and Safety in the working environment. This policy aims to create, provide and maintain a safe and healthy working environment for all employees, customers, suppliers, guests and partners.

On the implementation of this policy, the bank focuses on its activities of training, preparation and vigilance in various areas. This activity will enhance the readiness of employees to be more effective throughout the organization.

K3 Policy is determined as follows:

1. Ensuring that all activities comply with the laws and regulations regarding the Health and Safety.
2. Ensuring that all employees, guests and partners are not impacted from any accidents and occupational disease.
3. Striving to eliminate unsafe conditions and actions to achieve Zero Incident.
4. Conducting hazard identification and assessment of risks in all activities, materials, tools and workplaces as well as performing risk control.
5. Providing appropriate Personal Protective Equipments (PPE).
6. Providing adequate training and counseling to all employees to ensure Company goals are achieved in the field of K3.
7. Ensuring that the policy is disseminated to all employees, guests and business partners as well as other related parties

K3 activities

Activities that have been implemented to support the K3 policy is as follows:

1. The application of K3 Training Implementation in Banking
Training Objectives :
 - Implementation of training in order to recognize and understand definition of Occupational Health and Safety (K3) in the scope of banking

- Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja dan mampu menganalisa kecelakaan kerja yang terjadi.
 - Mengetahui dengan baik manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta meningkatkan kemampuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur K3.
 - Mengetahui dan mengenali hambatan dalam penerapan Manajemen K3 serta mampu mengaplikasikan Keselamatan & Kesehatan Kerja di lingkup tugasnya.
2. Penunjukan Petugas Floor Marshall di setiap Unit Kerja KPNO/KC/KCP/KK.
 3. Menyusun Tugas dan Tanggung Jawab Floor Marshall.
 4. *Fire Evacuation Drill* untuk BII Kantor Pusat di Gedung SS3.
 5. *Enterprise Crisis Simulation Exercise* (ECSE)
 6. Pelaksanaan Training untuk Floor Marshall BII seluruh Indonesia.

Manajemen Keberlanjutan

Pelaksanaan Training untuk Floor Marshall BII seluruh Indonesia dilakukan dengan latar belakang sebagai berikut:

- Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.09/30/DPNP, tanggal 12 Desember 2007, khususnya pada bab BII Business Continuity Plan.
- Surat Edaran No. SE. 2010/022 Dir Ops-Corporate Business Continuity Management Framework Bank Internasional Indonesia tanggal 28 Desember 2010.

Sasaran Program Fire Fighting Exercise:

1. Mampu memahami sumber-sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran
2. Mengenali jenis-jenis peralatan yang di gunakan untuk memadamkan api sesuai dengan karakteristik api atau kebakaran yang terjadi
3. Mampu melakukan tindakan pencegahan pada kebakaran
4. Mampu untuk menghadapi situasi darurat karena kebakaran
5. Memiliki ketrampilan dalam menggunakan peralatan untuk penanggulangan kebakaran

- Improve the ability to identify hazards in the working environment and to analyze accidents.
 - Good understanding of Occupational Health and Safety management as well as improvement in the ability to develop K3 Standard Operating Procedures.
 - Understand and identify barriers in implementing K3 while able to apply K3 Management in the scope of duties.
2. Appointment of Floor Marshalls in each Work Units of Head Offices, Main Branches, Sub Branches, and Cash Offices.
 3. Develop Duties and Responsibilities for Floor Marshalls
 4. Fire Evacuation Drill for BII Head Office at the SS3 Building.
 5. Enterprise Crisis Simulation Exercise (ECSE).
 6. The implementation of Training for BII Floor Marshall of Indonesia.

Continuity Management

Implementation of Training for BII Floor Marshall throughout Indonesia was conducted with the following background:

- Based on the Attachment of the Circular Letter of Bank Indonesia No.09/30/DPNP, dated 12 December 2007, particularly in the chapter BII Business Continuity Plan.
- Circular Letter No. SE. 2010/022 Dir Ops-Corporate Business Continuity Management Framework Bank Internasional Indonesia dated 28 December 2010.

Fire Fighting Exercise Program Target:

1. Able to understand the sources and causes of fires
2. Identify types of equipments used to extinguish fires in accordance with the fire characteristics
3. Able to take actions to prevent fires
4. Able to deal with emergency situations due to fires
5. Have the skills to use fire-fighting equipments

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Sasaran Program First Aid (P3K):

1. Menyebutkan penyebab keadaan henti napas dan henti jantung.
2. Mendemonstrasikan teknik pemeriksaan pada korban yang mengalami kecelakaan atau sakit mendadak.
3. Mendemonstrasikan teknik melakukan resusitasi.
4. Mendemonstrasikan cara memberikan pertolongan pada korban yang mengalami sumbatan jalan nafas akibat benda asing.
5. Mendemonstrasikan cara melakukan pembalutan dan lain-lain.

Sasaran Program Teknik Rescue :

1. Memahami manajemen kedaruratan
2. Melakukan teknik evakuasi di gedung bertingkat
3. Melakukan penanganan kedaruratan/Emergency

Kegiatan yang sedang berjalan:

1. Menyusun penggabungan SOP Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency Response Plan/ERP) dengan SOP Pengamanan Gedung.
2. Menyusun Pedoman K3.

Dalam upayanya untuk selalu mengingatkan karyawan lama dan memberikan informasi terhadap karyawan baru mengenai K3, BII terus melanjutkan program kewaspadaan dan pelatihan sesuai kebutuhan.

Rencana Kegiatan K3 yang akan berjalan adalah sebagai berikut:

1. Ren-giat Implementasi K3
 - Penerapan K3 di salah satu KC BII di Jakarta
 - Sosialisasi K3 dan 5 R (Resik, Rapih, Ringkas, Rawat dan Rajin) kepada Manajemen
 - Sosialisasi K3 dan 5 R (Resik, Rapih, Ringkas, Rawat dan Rajin) kepada seluruh Unit Kerja KPNO dan KC/KCP/KK
 - Penganjangan Komitmen Gerakan 5 R (Resik, Rapih, Ringkas, Rawat dan Rajin) oleh Manajemen dan seluruh Karyawan
 - Regional Branch Competition 5-R secara bertahap (Resik, Rapih , Ringkas, Rawat, Rajin)
 - Evaluasi & Reward/Punishment
 - Sukses 5-S/5-R (Tahap I : Resik)
2. Implementasi Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency Response Plan/ERP)

First Aid (P3K) Program Target:

1. Identify the cause of cardiac arrest or stop breathing.
2. Demonstrate technical examinations of victims who suffer due to accident or sudden illness.
3. Demonstrate resuscitation techniques.
4. Demonstrate how to provide relief to victims who suffer airway obstruction caused by strange objects.
5. Demonstrate how to do bandaging , and basic first aid.

Technical Rescue Program Target :

1. Understand emergency management
2. Perform building evacuation techniques
3. Perform emergency management

Ongoing Activities:

1. Preparing the incorporation of Emergency Response Guidelines (Emergency Response Plan/ ERP) with Building Security guideline.
2. Preparing K3 Guidelines.

In the effort to remind employees on K3, BII continued vigilance and conducts training programs as required.

K3 Activities Plan that will be performed are as follows:

1. Action plan on the implementation of K3
 - Implementation of K3 in one of BII's Branch Office in Jakarta
 - Socialization of K3 and 5R campaign (Clean, Neat, Compact, Diligent, Medically Aware) to the Management
 - Socialization K3 and 5 R campaign (Clean, Neat, Compact, Diligent, Medically Aware) to each Work Units of Head Offices, Main Branches, Sub Branches, and Cash Offices.
 - Declaration of commitment to 5 R (Clean, Neat, Compact, Diligent, Medically Aware) by all management and employees
 - Regional Branch Competition 5-R in stages (Clean, Neat, Compact, Diligent, Medically Aware)
 - Evaluation of Reward & Punishment
 - Success of 5-S/5-R (Phase I : Clean)
2. Implementation Guidelines for Emergency Condition (Emergency Response Plan/ ERP).

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Politik

Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan salah satu bentuk penerapan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Bank menjalankan CSR melalui program yang dinamakan "BII Berbagi".

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, BII fokus pada beberapa hal berikut ini:

1. Secara konsisten mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi pemanasan global dengan program penanaman pohon yang secara langsung berdampak dalam mereduksi karbon.
2. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang bertumpu pada prinsip-prinsip CSR yang berlaku secara universal seperti program bantuan untuk daerah yang terkena bencana alam dan pembangunan hunian bagi pemulung
3. Fokus di bidang pendidikan, kegiatan yang mendukung hidup sehat (promote healthy life), serta lingkungan hidup/kemasyarakatan dengan tetap memiliki kepekaan terhadap ketenagakerjaan seperti kesetaraan gender, kesempatan kerja, keselamatan kerja serta program health and safety.

Kebijakan

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut diatur dalam kebijakan internal Bank melalui Surat Edaran No.SE.2011.002/DIR HC & CORP COMM tanggal 4 Maret 2011 tentang "Standard Operating Procedure Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility".

Kegiatan Politik

Bank memegang teguh kode etik dalam menjalankan kegiatan usahanya, diantaranya tidak diperbolehkan untuk:

1. Mendukung kegiatan partai politik.
2. Melakukan penyuapan/korupsi.
3. Mendukung segala sesuatu yang terkait dengan isu politik.
4. Melaksanakan program CSR secara diskriminatif.
5. Terlibat dalam perjanjian yang meragukan.
6. Mendukung pihak-pihak tertentu dengan maksud menghindari pajak.
7. Mendukung terorisme.
8. Terlibat dalam situasi sengketa/konflik (politik/ras/agama/hukum).

Funding For Social And Political Activities

Social Work

Provision of funds for social activities is one form of implementation of Corporate Social Responsibility Program (Corporate Social Responsibility/CSR). Bank of CSR through a program called "BII Berbagi".

In performing its social responsibility, BII focus on the following points:

1. Consistently support efforts to conserve the environment and reduce global warming by planting a tree program that directly impact in reducing carbon.
2. Social and community development, which is based on CSR principles are universally applicable as program assistance to the affected areas of reforestation and the construction of housing for scavengers
3. Focus on education, activities that promote healthy living (promotes healthy life), and the environment/society to remain sensitive to employment such as gender equality, employment, occupational safety and health and safety program.

Policy

Corporate Social Responsibility program is governed in the internal policy of the Bank through a Circular Letter No.SE.2011.002/DIR HC & CORP COMM dated March 4, 2011 on "Standard Operating Procedure (SOP) Implementation of Corporate Social Responsibility Program".

Political Activities

The Bank holds the code of conduct in carrying out its business activities, by keeping itself from:

1. Getting involved in any political activity.
2. Conducting bribery/corruption.
3. Supporting any position related to political issues.
4. Implementing CSR programs in a discriminatory fashion.
5. Getting involved in dubious agreements.
6. Supporting certain parties in order to avoid paying taxes.
7. Supporting any form of terrorism;
8. Getting involved in any situation of dispute/conflict (political/racial/religious/legal).

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Selama 2012 Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

Informasi tentang kegiatan CSR BII disajikan secara terpisah pada Laporan Tahunan ini.

Corporate Secretary

Perusahaan telah menunjuk Rita Mirasari sebagai *Corporate Secretary* yang bertugas sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Bapepam dan LK, BEI dan institusi terkait lainnya serta masyarakat. Penunjukan ini telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK berdasarkan surat No.2009.294/Deputi PresDir- Communication tanggal 1 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 1 Juni 2009. Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di bagian Data Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Pembentukan Corporate Secretary tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan BII No.SK.2009.001/Deputy Presdir-Communication tanggal 28 Mei 2009.

Sekretaris Perusahaan juga memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal serta memastikan bahwa Direksi mengetahui perubahan peraturan yang terjadi serta implikasinya.

Secara garis besar Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bertugas antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik dengan BAPEPAM-LK dan masyarakat.

Corporate Secretary dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh unit kerja Corporate Secretary yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang ditunjuk sebagai Corporate Secretary. Unit Kerja

Thus, during 2012 the Bank did not give any kind of funds for political activities.

BII CSR information was presented separately in this Annual Report.

Corporate Secretary

The Company has appointed Rita Mirasari as the Corporate Secretary of the Company, which functioned as a liaison officer between the Company and Bapepam and LK, IDX and other relevant institutions and public. The appointment has been reported to Bapepam and LK based on the letter No.2009.294/Deputi Presdir-Communication dated 1 June 2009 and was published in a daily newspaper Investor Daily on 1 June 2009. The profile of the Corporate Secretary can be viewed at the Company Data section of this Annual Report.

The establishment of Corporate Secretary was referred to Bapepam Regulations No. IX.I.4 on the Establishment of Corporate Secretary and by virtue of Decree of BII No.SK.2009.001/Deputy Presdir-Communication dated 28 May 2009.

The Corporate Secretary also monitors compliance to capital market laws and regulations and ensures that the Board of Directors is aware on any changes in laws, regulations and its implications.

In general, the duty of Corporate Secretary are as follow :

1. Close monitoring on the developments in capital markets, especially changes in Capital Market regulations.
2. Providing necessary information to the public and investors in relation to the condition of the Publicly Listed Company.
3. Providing input to the Board of Directors to comply with the provisions of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and the regulation's implementation.
4. Serving as liaison officer or contact person between the Company as a Public Company and Bapepam-LK and the public.

In carrying out its duties, Corporate Secretary is assisted by the Corporate Secretary Unit that is directly responsible to the Director appointed as Corporate Secretary. The Corporate Secretary Unit is chaired by

Corporate Secretary dipimpin oleh Corporate Secretary Head, Harris P. Simanjuntak yang profil lengkapnya dapat dilihat di bagian Data Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

the Corporate Secretary Head, Harris P. Simanjuntak, whose full profile can be viewed at the Company Data section in this Annual Report.



Unit Kerja Corporate Secretary memiliki sasaran kerja:

1. Bertindak sebagai *contact person* dalam menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehubungan dengan status Bank sebagai Perusahaan Publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Bank sebagai Perusahaan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Perseroan serta pemberian akses kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Perseroan kepada pemegang saham melalui kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai serta kepastian kehadiran peserta rapat untuk pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terselenggaranya dengan baik Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) BII, rapat-rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris serta event-event kegiatan lainnya yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

The Corporate Secretary Unit has the following work objectives:

1. Acting as a contact person in submitting information to the stakeholders in line with the Bank's status as a public company.
2. Carry out efforts to ensure that the policies, rules, systems and procedures, as well as business activities are in accordance with the prevailing legislation in force in connection with the Bank's status as a Public Company.
3. The achievement of orderly administration and the completeness and security of important documents of the Company and providing access to the parties concerned.
4. Fulfillment of the shareholders rights and obligations of the Company to the shareholders by ensuring compliance to laws and regulations applicable to public banking companies.
5. Availability of adequate information as well as meeting attendance certainty for decision making by the Board of Directors and/or Board of Commissioners therefore the resulting decisions shall be legal and accountable.
6. The implementation of the General Meeting of holders of Shares (GMS) of BII, meetings of the Board of Directors and or the Board of Commissioners as well as other event activities involving the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Sepanjang 2012, BII menyampaikan Laporan ke Bursa Efek Indonesia atas informasi perusahaan baik secara rutin maupun non-rutin dengan perincian pada tabel berikut ini :

Throughout 2012, BII submit reports to the Indonesia Stock Exchange on corporate information in routine and non routine manner with the details in the following table:

Tanggal Date	Nomor Surat Reference Number	Perihal	Concerning of	R (Rutin) / NR (Non-Rutin) R (Routine) / NR (Non Routine)
28-11-2012	S.2012.084/PRESDIR	Laporan Hasil Public Expose	Report on Results of Public Expose	NR
22-11-2012	S.2012.687/DIR COMPLIANCE	Koreksi Penyampaian Materi Public Expose	Correction on Submitted Materials for Public Expose	NR
20-11-2012	S.2012.686/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Materi Public Expose	Submission of Materials for Public Expose	NR
14-11-2012	S.2012.471/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Bukti Iklan Rating	Submission of Proof of Advertisement of Bond Rating	NR
07-11-2012	S.2012.658/DIR COMPLIANCE	Rencana Penyelenggaraan Public Expose	Plans for Public Expose	NR
30-10-2012	S.2012.192/DIR FIN	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit	Submission of Non-Audited Interim Financial Statements	R
30-10-2012	S.2012.192 / DIR FIN	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan per September 2012	Submission of Proof of Advertisement of Financial Statements as at September 2012	R
05-09-2012	S.2012.549/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Bukti Iklan Rating Obligasi	Submission of Proof of Advertisement of Bond Rating	NR
31-07-2012	S.2012.129/DIR FIN*)	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan per Juni 2012	Submission of Proof of Advertisement of Financial Statements as at June 2012	R
30-07-2012	S.2012.129/DIR FIN*)	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit	Submission of Non-Audited Interim Financial Statements	R
15-06-2012	S.2012.368/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Bukti Iklan Lokasi Baru BII	Submission of Proof of Advertisement for BII New Locations	NR
07-06-2012	S.2012.067/DIR FIN & IT**)	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan per Maret 2012	Submission of Proof of Advertisement of Financial Statements as at March 2012	R
30-04-2012	S.2012.067/DIR FIN & IT**)	Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit	Submission of Non-Audited Interim Financial Statements	R

Tanggal Date	Nomor Surat Reference Number	Perihal	Concerning of	R (Rutin) / NR (Non-Rutin) R (Routine) / NR (Non Routine)
23-04-2012	S.2012.229/DIR COMPLIANCE	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham 19 April 2012	Results of the General Meeting of Shareholders on 19 April 2012	R
23-04-2012	S.2012.235/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Bukti Iklan Keputusan RUPS 19 April 2012	Submission of Proof of Advertisement of Results of GMS 19 April 2012	R
10-04-2012	S.2012.196/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I & Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 PT Bank BII Tbk	Submission of Report of Realized Utilization of Proceeds from the Public Offering of PT Bank BII Tbk Sustainable Bond I & Sustainable Bond I Phase I Year 2011	NR
05-04-2012	S.2012.182/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS 19 April 2012	Submission of Proof of Advertisement of Notice for GMS 19 April 2012	R
04-04-2012	S.2012.030./DIR FIN & IT	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan per Desember 2011	Submission of Proof of Advertisement of Financial Statements as at December 2011	R
04-04-2012	S.2012.182./DIR COMPLIANCE	Panggilan RUPS 19 April 2012	Notice for GMS 19 April 2012	R
20-03-2012	S.2012.142/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS 19 April 2012	Submission of Proof of Advertisement of Notice for GMS 19 April 2012	R
13-03-2012	S.2012.128/DIR COMPLIANCE	Pemberitahuan RUPS 19 April 2012	Announcement for GMS 19 April 2012	R
22-02-2012	S.2012.030/DIR FIN & IT	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan per Desember 2011	Submission of Annual Financial Statements as of December 2011	R
18-01-2012	S.2012.038/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS 16 Januari 2012	Submission of Proof of Advertisement of Results of GMS 16 January 2012	R
18-01-2012	S.2012.032/DIR COMPLIANCE	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham RUPS 16 Januari 2012	Results of General Meeting of Shareholders 16 January 2012	R
09-01-2012	S.2012.012/DIR COMPLIANCE	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I & Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 PT Bank BII Tbk	Submission of Report of Realized Utilization of Proceeds from the Public Offering of PT Bank BII Tbk Sustainable Bond I & Sustainable Bond I Phase I Year 2011	NR

Keterangan :

*) dan **) merupakan 1 kesatuan (oleh karena itu nomor suratnya sama), namun disampaikan secara terpisah ke BEI melalui Form Laporan Keuangan dan Form Bukti Iklan

*) and **) is 1 unit (hence the same letter number), but separately submitted to the BEI through Form Proof of Financial Statements and Advertisement Evidence Form

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Komunikasi Intern dan Ekstern bertujuan meningkatkan *corporate image* kepada *stakeholders* serta mempunyai peranan mengkomunikasikan hal-hal yang telah dilakukan BII serta peningkatan *brand awareness* BII di mata publik.

Komunikasi Eksternal

Bank senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi yang terkait dengan financial, perusahaan dan publikasi (*press release*). Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ini ke media cetak, elektronik dalam cakupan nasional maupun internasional, serta produk dan aksi korporasi melalui website BII <http://www.bii.co.id>.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi layanan BII Customer Care 69811 atau (62-21) 788 69811 (daftar lengkap nomor telephone customer care dapat dilihat pada bagian produk dan layanan pada Laporan Tahunan ini). Selain itu nasabah dapat pula menghubungi melalui email ke cs@bii.co.id dari Senin sampai Jum'at (08.30 WIB - 16.30 WIB) atau menghubungi cabang terdekat BII. Bagi investor dapat langsung menghubungi Investor Relations Perusahaan melalui e-mail InvestorRelations@bankbii.com atau menghubungi via telepon ke nomor (62-21) 29228888

Jalur komunikasi lainnya yang bisa diakses adalah melalui BII Friends <https://www.biifriends.com/> atau akun jejaring sosial Twitter yakni [@Biifriends](https://www.twitter.com/BiiFriends) atau <https://www.facebook.com/BiiFriends> dan Facebook dengan nama akun BII Friends <https://www.facebook.com/BiiFriends>. BII juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada Bapepam-LK dan Electronic Reporting kepada Bursa Efek Indonesia (www.idxnet.co.id).

Kemudahan akses informasi dan data perusahaan sebagai wujud Komunikasi Eksternal dan bertujuan meningkatkan *corporate image* kepada *stakeholders* serta mempunyai peranan mengkomunikasikan hal-hal yang telah dilakukan BII serta peningkatan *brand awareness* BII di mata publik.

Company Information and Data Access

Internal and external communication aims improve corporate image to stakeholders and play an important role in communicating internal activities to enhance BII's brand awareness in public.

External Communication

BII always facilitates its stakeholders to access information on financial and corporate information, publications (*press release*) that are distributed to national and international print and electronic media, as well as product and corporate actions through the BII website <http://www.bii.co.id>.

For more information, customers can call BII service Customer Care 69811 or (62-21) 788 69811 (a complete list of telephone numbers of customer care can be seen in the products and services section of this Annual Report). In addition, customers can also contact by e-mail to cs@bii.co.id from Monday to Friday (08:30 - 16:30) or contact the nearest BII branch. Investors can directly contact the Company's Investor Relations by e-mail InvestorRelations@bankbii.com or contact via telephone to the number (62-21) 29228888

Other communication lines that can be accessed is through BII Friends <http://www.biifriends.com/> or Twitter social networking account, namely [@Biifriends](https://www.twitter.com/BiiFriends) or <https://www.facebook.com/BiiFriends> and Facebook with account name BII Friends <https://www.facebook.com/BiiFriends>. BII also continues to report the information and material facts in the letter to Bapepam-LK and Electronic Reporting to the Indonesia Stock Exchange (www.idxnet.co.id).

The Ease of access to corporate information and data as a form of External Communication and aims to enhance the corporate image to its stakeholders as well as having a role to communicate the things that have been performed by BII and increase BII brand awareness in the public eye.

A. Hubungan Investor dan Media

Bank senantiasa membangun citra yang baik dengan menjaga hubungan dengan investor/ analis baik secara interaktif maupun penyampaian informasi secara berkala, terutama terkait kinerja dan prospek Perusahaan. Penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan *analyst meeting*, *road show*, partisipasi dalam *investor conference*, *conference call*, dan media komunikasi lainnya.

A. Investor and Media Relation

BII always establish a good image through the development of relationships with investors/ analysts either interactively or conveying information periodically, especially related to the performance and prospects of the Company. Submission of information is carried out through analyst meetings, road shows, participation in investor conferences, conference calls, and other communications media.

Kegiatan Hubungan Media | Media Relations Activities

No	Activity Kegiatan	2012
1	Siaran Pers Press Release	59
2	Konferensi Pers Press Conference	21
3	Ulasan Media Media Coverage	1775 ^{*)}
4	Pelatihan untuk Media Journalist Training	1
5	Pertemuan dengan Media Media Gathering/Meeting	2
6	Kunjungan Media Media Visit	1
7	Lomba untuk Media Journalists Contest	2

Keterangan | Note:

*) Ulasan di media cetak saja

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik, BII senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan akses informasi kepada para analis dan investor.

In order to improve the quality of good governance, BII is constantly trying to improve the quality and access of information to analysts and investors.

Siaran Pers 2012 | 2012 Press Release

No	Perihal	Tanggal Date	Subject
	Januari		January
1	RUPS-LB BII Menyetujui Pengangkatan Presiden Direktur Baru dan Perubahan Nama Perusahaan	16	BII's EGM Approves The Appointment of The New President Director and The Change of The Corporate's Name
2	Bank Internasional Indonesia Berkolaborasi dengan IBM untuk Memperluas Jangkauan Cash Recycling Management Systems	18	Bank Internasional Indonesia Partnering with IBM to Expand Cash Recycling Management Systems
3	BII Jalin Kerja Sama dengan Unika Soegijapranata	20	BII Sets Partnership with Unika Soegijapranata
4	BII Selenggarakan BII Chinese New Year 2012	27	BII Carries Out BII Chinese New Year 2012
5	Grup Maybank Berikan Fasilitas Pinjaman Sindikasi USD 287,5 juta dan Rp400 miliar kepada PT Bajradaya Sentranusa	27	Maybank Group Arranges USD 287.5 million and IDR 400 billion Syndicated Term Facility for PT Bajradaya Sentranusa
6	Bank of Yokohama Tandatangani Perjanjian Bisnis dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan Standard Chartered Bank	29	Bank of Yokohama Signs Business Agreements with PT Bank Internasional Indonesia Tbk and Standard Chartered Bank

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Siaran Pers 2012 | 2012 Press Release

No	Perihal	Tanggal Date	Subject
	Februari		February
7	BII Jalin Kerja Sama dengan 21 Cineplex *Sediakan Layanan Top Up Saldo M-Tix melalui BII E-Channels	8	BII Sets Partnership with 21 Cineplex, Providing Top Up M-Tix Card Balance Service through BII E-Channels
8	BII Buka Kantor di Jepun, Surabaya	9	BII Opens an Office in Jepun, Surabaya
9	Kemnakertrans dan BII Tandatangani MoU Penggunaan Jasa Perbankan bagi TKI dan Pengguna TKI di Negara Penempatan	16	Manpower and Transmigration Ministry and BII sign MOU on Utilization of Banking Services for Migrant Workers (TKI) in Overseas.
10	BII Catat Kenaikan Laba Bersih 45% pada 2011	22	BII Records 45% Increase in Net Profit for FY 2011
11	BII Buka Kantor di Pati	28	BII Opens an Office in Pati
	Maret		March
12	BII Luncurkan BII Diamante Visa Infinite Card untuk Individu High Net-Worth Individuals Terpilih	5	BII Launches BII Diamanté Visa Infinite Card for Selected High Net-Worth Individuals
13	BII Buka KCP Madiun	16	BII Opens A Sub Branch Office in Madiun
14	BII Sampaikan Persiapan BII Maybank Bali Marathon *Selenggarakan Mini Marathon di Jakarta, 25 Maret 2012	22	BII Updates on Gearing Up to BII Maybank Bali Marathon-Mini Marathon to be Held in Jakarta, March 25, 2012
15	BII Dukung Pedagang Pasar Tanah Abang melalui Fasilitas BII SPEKTRA	26	BII Supports Businessmen in Tanah Abang Market through BII SPEKTRA Facility
16	BII Undi Grand Prize 'Biingkisan Beruntun'	28	BII Draws Grand Prize of 'Biingkisan Beruntun'
17	BII Luncurkan BII Kartu Kredit MC2 dengan Karakter Angry Birds	31	BII Launches Angry Birds BII MC2 Credit Card
	April		April
18	BII Buka KCP Pangkalan Bun	5	BII Opens a Sub Branch in Pangkalan Bun
19	Persiapan Akhir Menjelang BII Maybank Bali Marathon 2012	18	BII Ready to Hold The BII Maybank Bali Marathon-Preparations for a Weekend of Charity Visits, Sports, and Fun
20	BII Umumkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham	19	BII Announces AGM & EGM Results
21	CSR BII dalam Rangka BII Maybank Bali Marathon 2012	21	BII Corporate Social Responsibility during The BII Maybank Bali Marathon 2012
22	CSR BII ke Yayasan Bumi Sehat dalam Rangkaian BII Maybank Bali Marathon 2012	21	BII Maybank Bali Marathon Holds The CSR Program at Yayasan Bumi Sehat
23	Juara BII Maybank Bali Marathon 2012	22	Winners of the BII Maybank Bali Marathon 2012
24	Komentar Pelari Juara BII Maybank Bali Marathon 2012	24	Quotes from Runners Winners of The BII Maybank Bali Marathon 2012
25	BII Mencatat Kinerja Terbaiknya Sejak Bergabung dengan Grup Maybank dengan Laba Bersih Tumbuh 78% di Kuartal Pertama 2012	30	BII Records Its Best Ever Quarter Since Becoming a Member of Maybank Group-78% Increase in Net Profit for The First Quarter 2012
	Mei		May
26	BII dan JCB International Luncurkan 'BII JCB PLATINUM CARD'	8	BII and JCB International Launches 'BII JCB Platinum Card'
27	BII Luncurkan 'BII KPR Bebas Bunga'	10	BII Launches 'BII KPR Bebas Bunga'
28	BII Laksanakan Program CR Pemberdayaan Perempuan melalui Micro Financing	26	BII Holds Women Empowerment CR Program through Micro Financing
	Juni		June
29	BII dan RBS Indonesia Jalin Kerja Sama Strategis di Bidang Transaction Services	4	BII and RBS Indonesia Sign Strategic Partnership to Cooperate on Transaction Services
30	BII Jalin Kerja Sama Strategis dengan I-Remit Inc dalam Penyediaan Layanan Remittance	14	BII Sets Strategic Partnership with I-Remit Inc in Providing Remittance Services
31	BII dan JCB International Bersama Luncurkan 'BII Kartu Kredit JCB Platinum'	27	BII Together with JCB International launch 'BII JCB Platinum Card'

Siaran Pers 2012 | 2012 Press Release

No	Perihal	Tanggal Date	Subject
	Juli		July
32	BII dan Shinkin Central Bank Jalin Kerja Sama Bisnis Strategis	2	BII and Shinkin Central Bank Set Business Strategic Partnership
33	BII Buka Kantor Kas Unika Soegijapranata, Semarang	9	BII Opens Cash Office at Unika Soegijapranata, Semarang
34	BII Jalin Kemitraan Strategis dengan Seto Shinkin Bank	10	BII Sets Strategic Alliance with Seto Shinkin Bank
35	Promo BII XPay di Apollo, Hi Tech Mall Surabaya	19	BII Xpay Promo at Apollo, Hi Tech Mall Surabaya
36	BII Buka KCP Batu – Jawa Timur	27	BII Opens a Sub Branch Office in Batu-East Java
37	BII Mencatat Pertumbuhan Laba Bersih 61% pada Semester Pertama 2012, Semester Terbaik Sejak 1997	30	BII Records 61% Increase in Net Profit for The First Semester 2012, The Best Semester Since 1997
	Agustus		August
38	BII Jalin Kemitraan dengan BNP dalam Layanan Western Union	2	BII Partners with BNP on Western Union Service
39	BII Kembali Luncurkan Program 'Biingkisan Beruntun'	6	BII Again Launches the Biingkisan Beruntun
40	BII dan Berlari untuk Berbagi Dukung Penyembuhan Anak dengan Retinoblastoma	10	BII and Berlari untuk Berbagi Supports The Therapy of Children with Retinoblastoma
	September		September
41	BII Luncurkan Paperless Account Opening System untuk Layanan yang Cepat dan Nyaman bagi Nasabah	6	BII Launches Paperless Account Opening System for Fast and Convenience Services to Customers
42	BII Luncurkan Program BII KPR Floating Rate	7	BII Launches BII KPR Floating Rate Program
43	BII Dukung Penerbitan Indonesia's Best Restaurant Guide Book	13	BII Supports The Issuance of Indonesia's Best Restaurant Guide Book
44	BII Buka Kantor di Gianyar, Bali	18	BII Opens an Office in Gianyar, Bali
45	BII Buka KCP Pemalang, Jawa Tengah	19	BII Opens a Sub Branch in Pemalang, Central Java
46	Grup Maybank Laksanakan Global CR Day Secara Serentak * BII Lakukan Inisiatif di Bidang Pendidikan	22	Maybank Group Carries Out Global CR Day Simultaneously *BII Focuses on Education
47	BII Buka Kantor di Tuban, Jawa Timur	28	BII Opens Sub Branch In Tuban
48	BII Selesaikan Program Rehabilitasi Merapi	29	BII Completes Merapi Rehabilitation Program
	Oktober		October
49	BII Dukung Lomba Menyanyi "Superkidz You To Be Singing Competition"	23	BII Supports "Superkidz You To Be Singing Competition"
50	Lab Bersih Sembilan Bulan Pertama 2012 BII Naik 66% Mencapai Rekor Rp922 Miliar	30	BII Nine Months' Net Profit for 2012 Surges 66% To A Record Rp922 billion -Another Milestone with Profit Before Tax Reaching Rp1.3 trillion
	November		November
51	BII Selesaikan Penerbitan Obligasi Rp3 triliun	2	BII Successfully Completed Rp3 trillion Bond Issuances
52	Program "BII-Maybank Scholarship" Dukung Putera-Puteri Terbaik Indonesia Raih Pendidikan Tinggi yang Lebih Baik	7	BII-Maybank Scholarship Program Supports Indonesian Best Students from Underprivileged Families to Reach Better High Education
53	BII Buka KCP Kisaran	23	BII Opens a Sub Branch in Kisaran
54	BII Umumkan Pemenang Lomba Menulis & Foto Wartawan 2012	27	BII Announces Winners of BII Journalists Writing & Photo Contest 2012
	Desember		December
55	BII dan Maybank Foundation Dukung Konservasi Harimau Sumatera	5	BII and Maybank Foundation Support Conservation of Sumatran Tigers

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Siaran Pers 2012 | 2012 Press Release

No	Perihal	Tanggal Date	Subject
56	BII Sediakan Fasilitas Kredit kepada Sintesa Group untuk Pengembangan Proyek Listrik Ramah Lingkungan	12	BII Provides Loan Facility to Sintesa Group for The Development of Eco Friendly Power Plant Project
57	BII MAYBANK BALI MARATHON 2013 BII Maybank Kembali Selenggarakan Marathon Berskala Internasional di Bali pada 16 Juni 2013	13	Soft Launching of BII Maybank Bali Marathon 2013: BII Maybank Again to Carry Out International Marathon in Bali on 16 June 2013
58	BII Dukung Pengembangan Wirausaha Perempuan *Selenggarakan BII Sukma Awards melalui www.sukmainspirasi.com	18	BII Supports the Development of Women Entrepreneurship Carrying out BII Sukma Awards through www.sukmainspirasi.com
59	BII Buka Kantor Lubuk Pakam, Deli Serdang-Sumatera Utara	26	BII Opens an Office in Lubuk Pakam, Deli Serdang-North Sumatera

B. Promosi di Media Massa

BII melakukan kegiatan periklanan melalui media cetak, radio dan media lainnya, baik untuk komunikasi korporasi maupun produk. Selama 2012 terdapat 85 iklan melalui media cetak, 15 melalui radio advertising, 9 billboard off branch dan 10 billboard on branch.

B. Mass Media Promotion

BII conducts advertising through television, print, radio and online media for both corporate and product communications.

Komunikasi Internal

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Majalah Internal (BII News)

Terbit setiap bulan (12 edisi) sebanyak 36 halaman, dengan rubrikasi diantaranya:

- Pesan Manajemen: Rubrik yang berisi pesan kepada seluruh karyawan terkait dengan informasi perkembangan BII, budaya kerja, dan sebagainya yang disampaikan langsung oleh Manajemen.
- Fokus: Rubrik yang berisi berita-berita yang mencerminkan tema/topik utama BII News pada setiap edisi.
- Peristiwa: Rubrik yang berisi berita tentang aksi korporasi/kegiatan yang dilakukan BII secara *bank-wide* atau BII bersama dengan institusi/perusahaan lain.
- Aktivitas: Rubrik yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan oleh grup dan unit kerja.
- Apresiasi: Rubrik yang berisi tentang penghargaan yang diberikan BII kepada individu dan unit kerja yang memberikan pencapaian terbaik kepada BII.
- Info: Rubrik yang berisi tentang informasi ringkas tentang hal-hal yang terkait dengan operasional BII dan pengembangan budaya kerja.

Internal Communication

Internal communication to all employees through the following media:

1. Internal Magazine (BII News)

Published monthly (12 editions), each totalling 36 pages, with the following columns:

- Management Message: Column that contains the message to all employees associated with BII development information, work culture, and others that are delivered directly by the Management.
- Focus: Column that contains news that reflects the theme/ topic of BII news in each edition.
- Event: Column which contains news on corporate actions/activities undertaken by BII (bank-wide) or BII with other institutions/companies.
- Activity: Column that contains the activities undertaken by the group and work units.
- Appreciation: Column that contains BII award given to individuals and work units that provide the best achievement to BII.
- Info: Column that contains brief information on matters related to BII operations and development of the work culture.

- g. Inspirasi: Rubrik yang berisi tentang informasi berwawasan untuk peningkatan pemahaman dan pengembangan budaya kerja.
- h. Transformasi: Rubrik yang berisi tentang *update* informasi proses transformasi yang sedang berjalan di perusahaan.
- i. Kabar Unit Kerja: Rubrik yang berisi tentang kegiatan yang dilakukan oleh cabang dan anak perusahaan.
- j. Pojok BII Berbagi: Rubrik yang berisi berita tentang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) 'BII Berbagi'.

2. Internal Event

Mempersiapkan dan mengelola pelaksanaan kegiatan yang ditujukan bagi Karyawan sebagai media untuk menyampaikan Pesan Manajemen. Kegiatan internal yang telah ditangani selama 2012 antara lain:

- a. BII Anniversary
Acara puncak HUT ke-53 BII dilakukan bersama Komisaris dan Direksi BII dengan sekitar 3000 Karyawan BII se-Jabodetabek pada 27 Mei 2012, serta memberikan *guidance* pelaksanaan kegiatan perayaan HUT kepada seluruh Region BII.
- b. Townhall Meeting
Forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan. Selama 2012, *townhall meeting* telah diselenggarakan 3 (tiga) kali pada 22 Maret 2012, 12 Juli 2012 dan 30 Oktober 2012.
- c. Open House BII - Maybank
Menangani pelaksanaan *corporate event* dalam rangka memberikan apresiasi serta memperkuat hubungan kerja sama Perusahaan dengan seluruh *stakeholders*. Acara ini dihadiri oleh sekitar 1000 tamu undangan.
- d. Employee Training
Diselenggarakan guna membantu memberikan tambahan *skill* kepada Karyawan. Dengan mengundang para praktisi berpengalaman, pelatihan yang diselenggarakan tahun lalu yaitu "Writing Skill Training" pada 28 April 2012 dan "Public Speaking Course" pada 3 November 2012.

- g. Inspiration: Column that contains insightful information for improved understanding and development of work culture.
- h. Transformation: Column that contains updated information about the ongoing transformation process in the company.
- i. Kabar Unit Kerja: Column that contains activities undertaken by the branches and subsidiaries.
- j. Pojok BII Berbagi: Column that contains news on Corporate Social Responsibility activities of 'BII Berbagi'.

2. Internal Event

Prepare and manage implementation of activities for staff as a media to deliver management message. Internal activities in 2012 are as follows

- a. BII Anniversary
The top event on the celebration of 53th year BII's anniversary is attended by BOC and BOD of BII as well as 3000 BII staff at Jabodetabek area on 27 May 2012. In addition, Internal Communication also issue guidance on the implementation of celebration event at all BII region.
- b. Townhall Meeting
Townhall meeting is a communication forum which attended by management, senior management, regional head and branch leader to inform the bank's performance at certain period and information initiatives which is still ongoing or to be executed. There are 3 townhall meeting held in 2012 i.e. on 22 March, 12 July and 30 October.
- c. Open House BII – Maybank
Handling corporate event held by BII which serves as an appreciation to client and strengthening relationship with all stakeholders. The event is attended by 1000 guests.
- d. Employee Training
The training is held by BII to enhance staff's skills. Expert practitioner is invited to share their knowledge. There are several training held i.e. on 28 April on Writing Skill Training, on 3 November on Public Speaking Course

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

e. Mendukung Penuh Kegiatan CSR Program Mengkomunikasikan kegiatan Maybank Group Global CR Day, dimana Karyawan BII melaksanakan program sosial di bidang pendidikan berupa edukasi perbankan melalui *story telling*, aksi bersih sekolah, penghijauan dan peresmian pondok baca di SDN Duri Pulo, Roxy Jakarta pada 22 September 2012. Kegiatan Global CR Day ini melibatkan sekitar 3000 Karyawan BII.

3. Email Blast

Penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui *email* Presiden Direktur BII dan Corporate Communication diantaranya berupa:

- Pesan Manajemen: 21 pesan
- Ucapan Selamat Hari Raya: 5 ucapan
- Sosialisasi Produk dan Layanan terbaru: 101 informasi
- Sosialisasi aktivitas/kegiatan perusahaan: 122 informasi
- Sharing Session*: 28 informasi

4. BII Corporate University

Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dll melalui portal BII Corporate University <http://biportal/>

- Pesan Manajemen: 17 pesan
- Ucapan Selamat Hari Raya: 5 ucapan
- Sosialisasi aktivitas/kegiatan perusahaan: 54 berita

5. Key Message dan FAQ Guideline

Key Message dan *FAQ Guideline* untuk *spokespersons* atau *frontliners* pada saat terjadi *issue* nasional atau kejadian penting yang bersifat *bank-wide*, agar *stakeholders* memperoleh informasi yang akurat dan konsisten.

BII Club

BII Club merupakan organisasi informal BII yang merupakan wadah perkumpulan aktivitas karyawan dalam menyalurkan hobi, aspirasi dan kreativitas, dalam bidang olah raga, kesenian, sosial, dan kerohanian. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan aktivitas di luar pekerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan semangat kerja karyawan.

e. CSR (Corporate Social Responsibility Program)

As part of Maybank Group Global CR Day, BII staff also conduct social program in the area of education such as banking education through *story telling*, clean up school premises, planting and opening "Pondok Baca" at SDN Duri Pulo, Roxy Jakarta on 22 September 2012. Around 3000 BII staff participate in the Global CR Day

3. Email Blast

The conveyance of information to all employees by emails from the President Director and Corporate Communication, in the form of:

- Message from Management: 21
- Season's Greeting: 5
- New product and service info: 101
- Company activity news: 122
- Sharing Session: 28

4. BII Corporate University

Communicate to all employees about the message from management, corporate activities, etc. through the BII Corporate University portal: <http://biportal/>

- Message from the Management: 17 messages
- Eid Greetings: 5 greetings
- Socialization of activities/ events of the company: 54 news

5. Key Message and FAQ Guideline

Key messages and FAQ guidelines for *spokespersons* or *frontliners* in the event of national issue or bankwide important events, so the stakeholders can get accurate and consistent information.

BII Club

BII Club is an informal organization of BII that is a association container of employee activity in channeling hobbies, aspirations and creativity, in the field of sports, arts, social, and spiritual. All activities are carried out aiming to maintain a balance between work and activities outside of work, which is expected to improve the employees' productivity and morale.

Aktivitas BII Club meliputi kegiatan :

1. Olahraga yang terdiri dari Basket, Bulu Tangkis, Sepak Bola, Futsal, Volley dan Tenis Meja.
2. Kesenian mencakup bagi karyawan yang mempunyai hobi fotografi dan music.

Kegiatan BII Club selama tahun 2012 :

1. Bidang olahraga mengadakan latihan rutin tiap cabang olah raga dan mengikuti beberapa kegiatan kebersamaan dan kejuaraan.
2. Fotografi club dalam kegiatannya melakukan workshop pengetahuan tentang teknik-teknik berfotografi.

BII Club activities include the activities of :

1. Sport consisting of Basketball, Badminton, Football, Futsal, Volley Ball, and Table Tennis.
2. Arts for employees with hobbies of photography and music.

BII Club activities during 2012 :

1. In the field of sports conducting regular practices for every sport and participate in common activities as well as championships.
2. During their activities, photography club carries out knowledge workshop on photography techniques.

Kegiatan dan Penghargaan yang di raih selama 2012 | 2012 Activities and Rewards

No	Kegiatan Activities	Nama Kejuaraan Championship	Prestasi Achievements	Penyelenggara Organizer	Waktu pelaksanaan Event Date
1	Bola Basket Basket Ball	Gemilang Pro	1 st Winner	Gemilang	February 2012
		Bara Tournament	1 st Winner	Bara	March 2012
		Gemilang Pro	1 st Winner	Gemilang	June 2012
		Pesta Sukan Maybank 2012	1 st Winner	Maybank	July 2012
		Hut Bank Mandiri	3 rd Winner	Mandiri	October 2012
		Gemilang Pro	Juara 2	Gemilang	December 2012
2	Bulu Tangkis Badminton	Multipolar Mini Olympics	1 st Winner	Multipolar	December 2012
		Pesta Sukan Maybank 2012	1 st Winner	Maybank	July 2012
3	Futsal	Multipolar Mini Olympics	Group elimination phase	Multipolar	December 2012
		Indonesia Banking Union Futsal Cup Competition 2012	1 st Winner	SBSI	June 2012
		Gatra Futsal Championship 2012	Group elimination phase	GATRA	June 2012
		Pesta Sukan Maybank 2012	Semi Final	Maybank	July 2012
		Turnamen Futsal Properti 2012	Semi Final	Forwapera	November 2012
4	Sepak Bola Football	Partner Futsal Competition V 2012	Group elimination phase	Partner	November 2012
		Multipolar Mini Olympics 2012	3 rd Winner	Multipolar	December 2012
		Piala Bergilir Ketua KNPI	Semi Final	KNPI	February 2012
5	Tenis Meja Table Tennis	Pesta Sukan Maybank 2012	3 rd Winner	Maybank	July 2012
		Friendly Soccer Champion Event (BII VS Maybank KL)	1 st Winner	BII	December 2012
6	Fotografi Club Photography Club	Pesta Sukan Maybank 2012	Semi Final	Maybank	July 2012

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Hasil Self Assessment GCG

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, BII melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan GCG.

Hasil penilaian self assessment atas pelaksanaan GCG BII sebagai berikut:

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Good Corporate Governance Desember 2012

GCG Self Assessment Result

Based on Bank Indonesia Regulation, BII has conducted self assessment of GCG to assess the sufficiency of GCG implementation.

The result of the self assessment of BII GCG implementation are as follow:

Summary of the Self Assessment of Good Corporate Governance Composite Rate in December 2012.

No	ASPEK YANG DINILAI Aspect for Assessment	BOBOT Weight (a)	PERINGKAT Rating (b) ^o	NILAI Score (a) x (b)	CATATAN	Note
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Performance of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	10.00%	1	0.1	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara independen dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG serta prinsip perbankan yang sehat.</p> <p>Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan baik secara langsung maupun melalui rapat-rapat yang dilaksanakan.</p> <p>Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan transparan.</p>	<p>BOC duties and responsibilities was performed in accordance with applicable rules, governance principles and prudential banking principles.</p> <p>BOC is actively carried out their supervisory responsibility function directly and or through meetings.</p> <p>BOC also has been able to act and make decisions independently and transparently.</p>
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Performance of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	20.00%	1	0.2	<p>Struktur dan kapabilitas Direksi memenuhi ketentuan GCG yang berlaku.</p> <p>Pada tahun 2013, BOD akan meningkatkan kinerja Perusahaan serta fokus untuk memperbaiki aspek governance dalam proses bisnis.</p>	<p>BOD structure and capability are in line with GCG principles.</p> <p>For 2013, BOD will improve its business performance and improving governance aspect in the business process.</p>
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Adequacy and Performance of Duties by the Committees	10.00%	1	0.1	<p>Komposisi dan kelengkapan komite telah dibentuk dan dilaksanakan mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <p>Komite-komite tersebut secara aktif melakukan pertemuan yang diperlukan sekaligus memberi masukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>Committee's members composition, the adequacy of the committees has been formed and implemented in accordance with prevailing regulations.</p> <p>The committees are actively conducting the necessary meetings and giving input to support the performance of the Boards of Commissioners and Directors duties and responsibilities.</p>

No	ASPEK YANG DINILAI Aspect for Assessment	BOBOT Weight (a)	PERINGKAT Rating (b) ^o	NILAI Score (a) x (b)	CATATAN	Note
4	Penanganan Benturan Kepentingan Management of Transactions with Conflict of Interest	10.00%	1	0.1	<p>Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Selain itu, beberapa kebijakan internal diterbitkan untuk memastikan adanya dual control untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan. Sebagai contoh penunjukan vendor sebagai pihak ketiga, gift & entertainment policy, whistleblowing, transaksi dengan pihak afiliasi serta limit biaya.</p> <p>Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan wajib memenuhi kebijakan internal dalam rangka prinsip kehati-hatian.</p>	<p>Codes Ethics and Conduct are available as the basic guideline on identification and handling potential conflict of interest.</p> <p>In addition to that, several internal policies are issued to ensure dual control in place and handling conflict of interest i.e: appointment of third party vendor, gift & entertainment policy, whistleblowing, transaction with affiliated transaction, expenses limit.</p> <p>BOC, BOD and staff are required perform its role in line with the prudential banking.</p>
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of Bank Compliance Function	5.00%	2	0.1	<p>Struktur, kapabilitas dari anggota karyawan yang menangani compliance matters sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance.</p> <p>Terdapat pengenaan denda pada beberapa pelaporan ke regulator. Unit kerja kepatuhan bersama-sama dengan unit kerja bekerjasama untuk menentukan root cause permasalahan serta memperbaiki proses untuk menghindari terjadinya kejadian yang sama di masa mendatang.</p>	<p>The structure, capability of members of staff handling compliance matters are in line with the prudential banking principle and good corporate governance.</p> <p>There are several regulatory penalty penalties due to incorrect report of regulatory reporting. Compliance unit, together with business unit investigating root cause of the issue and improve the process to avoid similar incident happening in the future.</p>
6	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of Internal Audit Function	5.00%	2	0.1	<p>Secara keseluruhan fungsi audit intern Bank telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif, independen dan objektif. Namun demikian masih terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin dan berkesinambungan.</p>	<p>The Bank's internal audit function has been implemented and effectively carried out, independently and objectively. However it was noted weakness but there are minor weaknesses that could be overcome with regular and continuous action.</p>
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of External Audit Function	5.00%	1	0.05	<p>Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dilakukan secara efektif, independen dan sesuai dengan persyaratan minimum dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan serta kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.</p>	<p>An audit review by certified Public Accountants was conducted effectively, independently and in compliance with standards requirements with satisfactory quality and audit coverage.</p>

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

No	ASPEK YANG DINILAI Aspect for Assessment	BOBOT Weight (a)	PERINGKAT Rating (b) ^o	NILAI Score (a) x (b)	CATATAN	Note
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Implementation of Risk Management and Internal Control Function	7,50%	1	0.075	<p>Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank, menerapkan manajemen yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko/kelemahan Bank yang timbul.</p> <p>Manajemen terus melakukan pemantauan kesesuaian Bank dengan prinsip kehati-hatian, penerapan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan ketentuan internal dan prosedur-prosedur untuk memonitor kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul melalui tindakan bersifat konstruktif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank.</p>	<p>Commissioners and Directors are actively involved in identifying and controlling all Bank risks which include monitoring, policies, procedures, and limit setting, a comprehensive management information system and maintaining a prudential banking condition.</p> <p>Management constantly monitors the suitability of the Bank with prudent banking principles, applicable regulations and in accordance with the Bank's internal policies and procedures to control the weaknesses that arise, with constructive action that posed no significant effect on the condition of the bank.</p>
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures) Provision of Funds to Related Party and Large Exposures	7,50%	1	0.075	<p>Prosedur internal dalam rangka mekanisme pemantauan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang diberikan, dan Bank telah menerbitkan ketentuan internal terkait limit, seperti limit industri dan in-house limit.</p> <p>Selama 2012, tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.</p>	<p>Internal procedure monitoring mechanism of provision of funds of the diversification portfolio of loans given, and the Bank has established internal policies regarding the limits, such as industry limit and in-house limit.</p> <p>There were no breaches or violations of the Legal Lending Limit (LLL) in 2012.</p>
10	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan laporan Internal Transparency of Bank's Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Report and Internal Report	15,00%	1	0.15	<p>Penyusunan, penyajian dan penyampaian informasi laporan keuangan dan non-keuangan serta laporan pelaksanaan GCG kepada publik telah dilakukan secara transparan sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan menurut ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, lengkap dan akurat.</p>	<p>The preparation, presentation and information disclosure of financial and non financial reports, including the report of GCG implementation has been delivered transparently in timely and accurate manner with coverage according to the applicable regulations.</p>

No	ASPEK YANG DINILAI Aspect for Assessment	BOBOT Weight (a)	PERINGKAT Rating (b) ^o	NILAI Score (a) x (b)	CATATAN	Note
11	Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan	5.00%	1	0.05	Rencana Bisnis Bank 2012 telah disesuaikan dengan rencana strategis Bank, berdasarkan asumsi yang jelas dan disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian dan tingkat kesehatan Bank.	Bank's Business Plan 2012 has been adjusted to the Bank's Strategic Plan, established based on realistic assumption and prepared by taking into consideration all external and internal factors, prudential and sound banking principles.
Nilai Komposit Composit Score		100.00%		1.1		

Keterangan Predikat Komposit | Composite Score

Nilai Komposit Composit Score	Predikat Komposit Composit Rating
Nilai Komposit Composite Score < 1,5	Sangat Baik Excellent
1,5 ≤ Nilai komposit Composite Score < 2,5	Baik Good
2,5 ≤ Nilai Komposit Composite Score < 3,5	Cukup Baik Fairly Good
3,5 ≤ Nilai Komposit Composite Score < 4,5	Kurang Baik Sub Standard
4,5 ≤ Nilai Komposit Composite Score ≤ 5	Tidak Baik Poor

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

Nilai Komposit dan Predikat

Hasil self assessment pelaksanaan GCG BII 2012 menunjukkan Predikat Komposit “Sangat Baik” dengan Nilai Komposit “1,1”.

Kelemahan dan Penyebab

Hasil self assessment GCG 2012 menunjukkan bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan dalam penerapan GCG di BII. Namun demikian apabila terdapat kelemahan minor telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin dan berkesinambungan.

Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance

Peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam memastikan pemenuhan ketentuan serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya serta komitmen seluruh pihak dalam organisasi BII dan unit terkait, maka pelaksanaan GCG di BII dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut

BII melanjutkan komitmen untuk senantiasa menyempurnakan pelaksanaan GCG dengan mengembangkan bisnis perbankan yang sehat, terpercaya dan bertujuan untuk melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Rating and Predicate

Based on the GCG self-assessment results in 2012, a composite score of “1.1” with “Very Good” on the Composite Predicate was obtained.

Weakness and Cause

GCG self-assessment 2012 shows that there is no significant weakness on GCG implementation in BII. However, in case of there is any minor flaw, it can be overcome with the routine and continuous corrective action.

Strength on GCG Implementation

Active role of the Board of Commissioners and Board of Directors in ensuring compliance to regulations and implementation of prudential banking principles on bank business activities, as well as commitment from all related parties in BII and working units, led the GCG implementation in BII can align with the prevailing regulations.

Action Plan

BII will continue its commitment to constantly improving the GCG implementation in order to enhance banking business which prudent, reliable, and protect the stakeholder's interest, as well as comply to prevailing regulations and ethical values that generally applied on the banking industry.

APPROVAL SHEET | LEMBAR PERSETUJUAN
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK.

Dewan Komisaris | Board of Commissioners



Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor
Presiden Komisaris | President Commissioners

Direksi | Board of Directors



Dato' Khairussaleh Ramli
Presiden Direktur | President Director



Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of
Sharia Business Unit

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Untuk menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BII UUS senantiasa mengembangkan bisnis perbankan yang sehat dan terpercaya.

To ensure the implementation of Good Corporate Governance, BII UUS continuously develop sound and reliable business practices.

Dalam upaya melanjutkan komitmen PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. ("BII") untuk senantiasa menyempurnakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* ("GCG") pada BII Unit Usaha Syariah ("BII UUS"), BII senantiasa mengembangkan bisnis perbankan yang sehat, terpercaya dan bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memenuhi prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan Syariah.

Dengan berkembangnya industri perbankan Syariah yang memiliki beragam produk dan jasa yang ditawarkan, maka GCG pada perbankan Syariah dinilai semakin penting untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan GCG BII UUS mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan GCG harus memenuhi prinsip Syariah dan berlandaskan pada lima prinsip dasar, yaitu:

- **Transparansi**
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

In an effort to continue the commitment of PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. ("BII") to continuously refine the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") at BII Sharia Business Unit ("BII UUS"), BII continues to develop a banking business that is sound, reliable and aims to protect the interests of stakeholders as well as improve compliance with regulations laws and regulations that meet Sharia principles (*Sharia Compliance*) by the Fatwas from the National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama (DSN-MUI) as well as the ethical values that apply generally to the Sharia banking industry.

With the development of Sharia banking industry which offers a variety of products and services, implementation of GCG in Sharia banking is considered to be increasingly important.

The implementation of GCG BII UUS refers to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Commercial Banks and Islamic Business Unit.

GCG implementation must comply with the Sharia principles and is based on five basic principles, namely:

- **Transparency**
Disclosure on presenting material and relevant information and transparency in the decision-making process.

- **Akuntabilitas**
Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- **Pertanggungjawaban**
Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- **Profesional**
Memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank Syariah.
- **Kewajaran**
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan perbaikan penerapan GCG, BII UUS secara berkala telah melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan GCG.

Hingga 2012, BII UUS telah melakukan *Self Assessment* dan pelaporan Pelaksanaan GCG untuk yang ketiga kalinya. Laporan pelaksanaan GCG BII UUS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan GCG BII.

Laporan Pelaksanaan GCG dan ruang lingkup *Self Assessment* GCG pada BII UUS meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
- d. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti. Penyimpanan dana oleh deposan inti, dan
- e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 14/1005/DPbS tanggal 5 Juni 2012 perihal Laporan Pelaksanaan dan Hasil Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2011, BII UUS telah melakukan perbaikan serta tindak lanjut yang diperlukan sesuai penilaian dan evaluasi dari Bank Indonesia.

Hasil *self assessment* pelaksanaan GCG UUS 2012 menunjukkan Predikat Komposit "Sangat Baik" dengan Nilai Komposit "1,36".

- **Accountability**
Clarity of functions and responsibility of the bank structure to enable effective management.
- **Responsibility**
Compliance of the bank management with the legislation in force and the principles of healthy bank management.
- **Professional**
Competence as the ability to act objectively and be free from the influence/pressure from any party (independence) as well as having a strong commitment in developing Sharia banks.
- **Fairness**
Fairness and equality in meeting the stakeholders' rights based on agreements and the legislation in force.

To improve the quality of the implementation and improvement of the application of GCG, BII UUS has periodically performed self assessments on the adequacy of GCG.

Up to 2012, BII UUS has done three self assessments and Implementation of GCG reporting. Reports of the GCG BII UUS implementation is an integral part of the BII GCG report.

GCG Implementation Reports and scope of GCG Self Assessment on BII UUS include:

- a. The implementation of the roles and responsibilities of the Director in charge of UUS.
- b. The implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (SSB).
- c. The implementation of Sharia principles in the activities of funds collection and disbursement of funds and services.
- d. The disbursement of funds to finance main customers. Deposit taking by depositors, and
- e. Transparency of financial and non financial conditions, reports on the implementation of GCG and internal reporting.

Based on the letter from Bank Indonesia No. 14/1005/DPbS dated 5 June 2012 on the Implementation and Assessment Results Report of Good Corporate Governance (GCG) in 2011, BII UUS made improvements as well as appropriate follow ups in accordance to the assessment and evaluation of Bank Indonesia.

The result of the implementation of GCG UUS 2012 self assessment recorded a "Very Good" Composite Predicate with a Composite Score of "1.36".

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Direktur UUS

Kriteria dan Independensi

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("Perseroan") tanggal 19 April 2012 dan Struktur Organisasi Perseroan melalui Surat Edaran BII No.SE.2012.007/PRES DIR tentang Struktur Organisasi PT Bank Internasional Indonesia, Tbk tanggal 14 Desember 2012 telah ditunjuk Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah (UUS) menggantikan Ghazali bin Mohd Rasad.

Dato' Khairussaleh Ramli adalah Presiden Direktur BII yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 17 April 2012 melalui surat No.14/31/DPB2/PB2-5 tanggal 04 Mei 2012 perihal Pengangkatan Presiden Direktur Bank Saudara, serta surat No.14/35/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 11 April 2012 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Terhadap Pengangkatan Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

Penunjukan Dato' Khairussaleh Ramli sebagai Direktur UUS telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No.14/2737/DPbS tanggal 18 Desember 2012 perihal Keputusan atas Penunjukan Calon Direktur Unit Usaha Syariah Bank Saudara.

Profil Direktur UUS



Dato' Khairussaleh Ramli adalah Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 45 tahun. Lulus dari program Pasca Sarjana Advanced Management Programme dari Harvard Business School, Harvard University, Boston pada 2011.

Director in Charge of UUS

Criteria and Independency

Based on the decision of the General Meeting of Shareholders of PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("Company") dated 19 April 2012 and the Company's Organisational Structure through Circular Letter of BII No.SE.2012.007/PRES DIR on Organisational Structure of PT Bank Internasional Indonesia, Tbk dated 14 December 2012, Dato' Khairussaleh Ramli has been appointed as Director in charge of Sharia Business Unit (UUS) replacing Ghazali bin Mohd Rasad.

Dato' Khairussaleh Ramli is the President Director of BII who has received approval from Bank Indonesia effective from 17 April 2012 by the letter No.14/31/DPB2/PB2-5 dated 4 May 2012 on the Appointment of the President Director of Bank Saudara, as well as the letter No.14/35/GBI/DPIP/Rahasia dated 11 April 2012 on the Fit and Proper Test Decision on the Appointment of the President Director of PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

The appointment of Dato' Khairussaleh Ramli as the Director in charge of UUS has obtained approval from Bank Indonesia through the letter No.14/2737/DPbS dated 18 December 2012 on the Decision on the Appointment of the Candidates of Director in charge of UUS of Bank Saudara.

Dato' Khairussaleh Ramli is a Malaysian citizen. Currently 45 years old. Graduated from the Post Graduate Advanced Management Programme from Harvard Business School, Harvard University, Boston in 2011.

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di berbagai bidang, khususnya perbankan, perusahaan sekuritas, Bursa Malaysia dan telekomunikasi, Perseroan menunjuk Dato' Khairussaleh Ramli menjadi Presiden Direktur Perseroan sekaligus Direktur yang membawahi UUS.

With more than 20 years of experience in various fields, particularly banking, securities, Malaysian Stock Market, and telecommunications, the Company appointed Dato' Khairussaleh Ramli as the President Director of the Company as well as the Director in charge of UUS.

Ringkasan Pengalaman Kerja | Work Experience Summary

Waktu Time	Perusahaan Company	Jabatan Position
April 2012 – sekarang now	PT Bank Internasional Indonesia Tbk	Presiden Direktur President Director
November 2008 – April 2012	Maybank, Malaysia	Deputy President & Group Chief Financial Officer (Director)
April 2008 – October 2008	Telekom Malaysia Bhd, Malaysia	Group Chief Strategy Officer (Director)
September 2006 – April 2008	TM Ventures, Telekom Malaysia Bhd, Malaysia	Chief Executive Officer (Director)
June 2004 – August 2006	Bursa Malaysia Berhad, Malaysia	Chief Financial Officer (Director)
September 2003 – May 2004	Bursa Malaysia Berhad, Malaysia	Head, Strategy & Finance (Executive Officer)
March 2002 – August 2003	Bursa Malaysia Berhad, Malaysia	Senior Vice President, Policy & Development (Executive Officer)
November 2001 – February 2002	Bursa Malaysia Berhad, Malaysia	Vice President, Planning & Business Development (Executive Officer)
January 2001 – October 2001	Bursa Malaysia Berhad, Malaysia	Vice President, International Affairs (Executive Officer)
July 1998 – December 2000	Bursa Malaysia Berhad, Malaysia	Senior Manager, International Affairs (Executive Officer)
October 1997 – May 1998	PiGas Engineering Sdn Bhd	Director, Corporate Services (Director)
November 1995 – September 1997	PB Futures Sdn Bhd, Malaysia	Executive Director (Commissioner)
July 1994 – October 1995	PB Securities Sdn Bhd, Malaysia	Research Analyst (Executive Officer)
April 1990 – May 1994	Public Bank Berhad, Malaysia	Senior Operating Officer, Corporate Banking (Executive Officer)

Sebagai Direktur UUS, Dato' Khairussaleh Ramli juga berupaya meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Syariah. Beberapa pelatihan yang diikuti antara lain adalah sebagai berikut:

As the Director in charge of UUS, Dato' Khairussaleh Ramli also engages in the effort to increase the knowledge of Sharia banking. Several trainings that he participated include the following:

Daftar Pelatihan | List of Training

Nama Pelatihan Training	Tahun Year	Penyelenggara Organiser	Lokasi Location
Advanced Management Programme	2011	Harvard Business School, Harvard University, Boston	Boston, USA
Risk Management Competency for Banking Profession – Level 5 English Director	2012	Banker Association for Risk Management (BARa)	Jakarta, Indonesia
Executive Distance Learning on Islamic Banking Training	2012	KARIM – Business Consulting	Jakarta, Indonesia

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BII UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah meliputi:

Roles and Responsibilities of the Director in charge of UUS

The Director in charge of UUS is fully responsible for the implementation and management of BII UUS based on the prudent and Sharia principles that include:

Akuntabilitas Utama Key Accountabilities	Aktivitas Utama Key Activities	Hasil Output
Bertanggung jawab terhadap strategi pengembangan UUS Responsible for the strategic development of UUS	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun strategi bisnis UUS 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UUS. 	Rencana Kerja Anggaran Tahunan Annual Business and Budget Plan
Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah Fully responsible for implementation management of UUS based on prudent and Sharia principles	<ol style="list-style-type: none"> Bersama DPS mengawasi kegiatan perbankan UUS, baik produk maupun jasa Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah serta melakukan analisa terhadap temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern dan/atau auditor ekstern. Menerima dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap semesteran yang berisi laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa DSN dan opini Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern dan/atau auditor ekstern. 	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Audit. Laporan GCG Unit Usaha Syariah. Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur UUS juga menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.

In performing his duties, the Director in charge of UUS also provides data and information to Sharia Supervisory Board related to the compliance of Sharia Principles that is accurate, relevant and timely.

Pengembangan Bisnis dan Layanan BII UUS

Sejalan dengan upaya transformasi yang tengah dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi perkembangan dan persaingan di industri perbankan yang semakin ketat dan semakin tingginya tuntutan konsumen, serta penetapan target bisnis sampai dengan tahun 2015 yang dirumuskan dalam *Project IMPACT (Implement with Acceleration through Collaboration and Teamwork) programme* yang telah dilaksanakan sejak triwulan 3 tahun 2012, telah ditetapkan 28 inisiatif yang salah satunya adalah **menata kembali Syariah sebagai penyedia produk Perbankan Syariah (Sharia as a product provider)**. Hal ini didasarkan kepada potensi bisnis Syariah yang

Development of BII UUS Business and Services

In line with the transformation programme that is currently conducted by the Company to face the increasingly stringent competition and developments in the banking industry and the increasing demands of consumers, as well as the establishment of business targets up to 2015 that are formulated in the *IMPACT Project (Implement with Acceleration through Collaboration and Teamwork) programme* which have been implemented since the third quarter of 2012, 28 initiatives have been established, one of which is to re-arrange Sharia as a product provider of Sharia Banking. This is based on the promising of potential Sharia business in Indonesia. Based on data from Bank

menjanjikan di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, *market share asset* perbankan Syariah sebesar 4,5% pada 2012 dibandingkan total industri perbankan serta memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun dua kali lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional, baik dari segi *lending* maupun *funding*.

Dengan potensi bisnis Syariah di Indonesia yang menjanjikan serta memperhatikan tantangan yang dihadapi BII UUS dalam melakukan pengembangan bisnis akibat keterbatasan jaringan kantor, tenaga pemasaran, serta beberapa fungsi operasional yang dijalankan sendiri, maka dilakukan penataan kembali model bisnis yang ada dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi serta infrastruktur dari unit konvensional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Syariah dan regulasi yang ada.

Beberapa inisiatif dan produk program serta proyek yang telah dijalankan BII UUS pada 2012 antara lain:

Sosialisasi, edukasi dan *awareness* perbankan Syariah

1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi produk dan jasa perbankan Syariah kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo).

Selama 2012, kegiatan sosialisasi, edukasi dan *awareness* perbankan Syariah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Sarasehan Perbankan Syariah di Wilayah KBI Semarang yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal pada tanggal 3-8 Mei 2012.
- Seminar Internasional “*Islamic Finance 2012*” di Bandung pada tanggal 7-8 Mei 2012.
- Pameran Multi Produk & Jasa Syariah “1st Industri & Ekonomi Syariah Expo” yang diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 4-12 Agustus 2012.
- Forum Silaturahmi & Evaluasi Kinerja Perbankan Syariah Jatim serta Diskusi Permasalahan Akad Produk Syariah Perbankan Syariah yang diselenggarakan di Gedung Bank Indonesia Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2012.
- Event Pekan Menabung Syariah – iB Goes to School 2012 dengan tema “iB is my choice” yang diselenggarakan di seluruh SMA/SMK/ MAN dan swasta di kota Surabaya pada tanggal 18 Oktober–9 November 2012.

Indonesia, Sharia banking asset market share is 4.5% in 2012 compared to the total banking industry and has a growth average two times higher per year compared to conventional banks, both in terms of lending and funding.

With the promising Sharia business potential in Indonesia and by taking into account the challenges facing BII UUS in business development due to the constraints of the office network, sales force, and some operational functions, realignment of the existing business models has been conducted through the optimisation of functions and infrastructure of the conventional unit with due regard to the principles of Sharia and the regulations in force.

Several initiatives and product programs as well as projects which were implemented by BII UUS in 2012 include:

Socialisation, education and awareness of Sharia banking

1. Actively participate in product and service socialisation of Sharia banking to communities organised by Bank Indonesia in cooperation with Association of Indonesia Sharia Banking (Asbisindo).

The socialisation, education, and awareness of Sharia banking activities carried out in 2012 are as follow:

- Sharia Banking Gathering in the KBI Semarang Region which was held in the Municipality of Kendal on 3-8 May 2012.
- International Seminar “*Islamic Finance 2012*” in Bandung on 7-8 May 2012.
- Sharia Multi Products & Services “1st Sharia Industry & Economy Expo” which was held in Banda Aceh from 4-12 August 2012.
- Silaturahmi Forum & Performance Evaluation of East Java Sharia Banking as well as the Discussion on Principle Issues of Sharia Banking Products which was held at Bank Indonesia Building in Surabaya on 17 October 2012.
- Sharia Savings Week – iB Goes to School 2012 with the theme “iB is my choice” which was held across all High School/ Vocational High School/ Public and Private Islamic High Schools in Surabaya from 18 October–9 November 2012.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

- Expo “Kampung Syariah 2012” yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 6-9 Desember 2012.
 - Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah dan Bazaar Perbankan Syariah ‘iB Vaganza – Serunya BerBank Syariah’ yang diselenggarakan di Menara Radius Prawiro – Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jakarta pada tanggal 17-19 Desember 2012.
2. Kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan, BII UUS bersama Maybank Islamic Berhad secara rutin menyelenggarakan kegiatan berkorban yang diselenggarakan pada saat Hari Raya Idul Adha. Kegiatan Qurban Perdana Maybank 2012/1433 H diselenggarakan pada tanggal 27 November 2012, dipusatkan di Jakarta di Musholla Al Mujahidin Jatinegara, Jakarta Timur dan untuk wilayah Bandung dilaksanakan di Rumah Pematangan Hewan Komplek Kota Baru, Cibaduyut, Kec. Dayeuhkolot, Bandung.
 3. Kegiatan *awareness* perbankan Syariah lainnya juga dilakukan dalam rangkaian kegiatan iB Vaganza – Serunya BerBank Syariah bersama dengan Bank Indonesia – Departemen Perbankan Syariah dan 20 BUS & UUS, yaitu ‘iB Peduli & Berbagi’ antara lain menyelenggarakan Khitanan Massal di Komplek Masjid BI Thamrin Jakarta, donasi ke pusat Thalassemia dan pasien kurang mampu di RSCM Jakarta, pengobatan gratis masyarakat kurang mampu, serta donasi kepada PPPA Daarul Qur’an – Tangerang.
- “Kampung Syariah 2012” expo which was held in Bandung on 6-9 December 2012.
 - Sharia Banking Year End Seminar and Sharia Banking Bazaar ‘iB Vaganza – the Excitement of Sharia Banking’ which was held at Radius Prawiro Tower – Bank Indonesia Office Complex Jakarta from 17-19 December 2012.
2. Social activities as a form of concern for communities in need, BII UUS in collaboration with Maybank Islamic Berhad regularly organised events held at the time of sacrifice in Eid al-Adha. The Maybank Qurban Perdana Activity 2012/1433 H was held on 27 November 2012, centered in Jakarta at the Al Mujahidin Mosque Jatinegara, East Jakarta and for the Bandung region was held at the Butchering House of Kota Baru Complex, Cibaduyut, Dayeuhkolot, Bandung.
 3. Sharia banking awareness activities were also carried out in conjunction with the iB Vaganza – the Excitement of Banking in Sharia series of events, in collaboration with Bank Indonesia - Sharia Banking Department and 20 BUS & UUS, namely ‘iB Caring & Sharing’ among others by organising Mass Circumcision in the Mosque Complex of BI Thamrin Jakarta, donations to the Thalassemia center and underprivileged patients in RSCM Jakarta, free treatment for poor communities, as well as donations to the PPPA Daarul Qur’an – Tangerang.

Produk Program dan Proyek

1. Mengembangkan produk program pembiayaan untuk usaha mikro melalui produk pembiayaan BII Mitra Amanah Syariah (BII Minna), telah diimplementasikan untuk *pilot project* pada bulan Maret 2012.
2. Produk Program Kerja sama dengan WOM Finance yang telah diimplementasikan pada bulan Agustus 2012 dan kerja sama dengan BII Finance masih dalam *review* Bank Indonesia, hal ini untuk mendukung pertumbuhan Syariah di segmen konsumer, khususnya pembiayaan otomotif.
3. Proyek menata kembali Syariah sebagai penyedia produk perbankan Syariah, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis Syariah melalui “Line of Business – LoB” yang ada di BII dengan model “Leverage” serta melakukan penyalarsan fungsi yang ada di BII UUS dengan BII, proyek ini telah dilakukan *kick off* pada tanggal 21 November 2012.

Programme Products and Projects

1. Developing financing products for the micro-financing programme through the BII Mitra Amanah (BII Minna), implemented for the pilot project in March 2012.
2. Product Programme of Cooperation with WOM Finance which was implemented in August 2012 and cooperation with BII Finance that is still under reviewed by Bank Indonesia, which is to support the growth of Sharia in the consumer segment, especially in auto financing.
3. Reorganising project of Sharia as the provider of Sharia banking products, in order to develop the growth of Sharia business through “Line of Business – LoB” which exists in BII with the “Leverage” model as well as conducting functions alignment in BII UUS with BII, the kick off for this project was carried out on 21 November 2012.

Pengembangan Jaringan Distribusi

1. BII UUS terus mengembangkan jaringan kantornya dengan membuka satu Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) di Pasar Jatinegara.
2. Selain itu BII UUS membuka 11 kantor Layanan Syariah (LS) di CBD Ciledug, Pondok Gede, Cibinong, wilayah Cibubur meliputi Kota Wisata dan Kranggan Permai, serta wilayah Bogor meliputi Surya Kencana, Kapten Muslihat, Jalan Baru/Soleh Iskandar, Cileungsi, Tajur serta Baranangsiang.
3. Untuk mendukung segmen pembiayaan mikro yang digarap oleh BII UUS melalui produk pembiayaan BII Mitra Amanah Syariah (BII Minna), KCPS Pasar Jatinegara serta LS Depok, Pondok Gede dan CBD Ciledug dibuka untuk mempermudah penetrasi kepada nasabah pembiayaan mikro.

Per 31 Desember 2012, jumlah jaringan kantor BII UUS adalah satu Kantor Pusat, lima Kantor Cabang Syariah (KCS) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Banda Aceh, satu Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan 105 kantor Layanan Syariah (LS).

Pengembangan Organisasi

Sejalan dengan implementasi inisiatif IMPACT *project* Syariah sebagai penyedia produk, maka pada tahun 2012 sedang dilakukan re-organisasi struktur BII UUS.

Secara umum rencana ruang lingkup pekerjaan BII UUS sebagai berikut:

1. *Product Management*, yang akan mengelola pengembangan produk SME, Komersial & Korporasi; dan pengembangan produk Konsumer.
2. *Syariah Compliance and Advisory*, yang akan bertugas mengelola Syariah Komite sesuai dengan kebijakan BI (Pemerintah), memberikan opini & saran yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam mengembangkan serta menjalankan bisnis dan memberikan saran yang berkaitan dengan hukum (legalitas) serta dokumentasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan bisnis.
3. *Sales @ Distribution*, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan penjualan dan jalur distribusi semua produk syariah dengan unit kerja terkait agar strategi marketing dan komunikasi berjalan dengan efektif.
4. *Strategic @ Implementation*, yang akan mengelola *Strategic Planning, Implementation and Business Performance Monitoring*.

Development of Distribution Network

1. BII UUS continuously develops its office network with the opening of a Sharia Sub-Branch Office (KCPS) at Pasar Jatinegara.
2. In addition, BII UUS opened 11 Offices Channeling (OC) in CBD Ciledug, Pondok Gede, Cibinong, Cibubur area including Kota Wisata and Kranggan Permai, as well as in the Bogor area including Surya Kencana, Kapten Muslihat, Jalan Baru/Soleh Iskandar, Cileungsi, Tajur and Baranangsiang.
3. To support the microfinance segment managed by BII UUS through the financing product BII Mitra Amanah Syariah (BII Minna), KCPS Pasar Jatinegara as well as LS Depok, Pondok Gede and CBD Ciledug were opened to facilitate access for micro financing consumers.

As of 31 December 2012, the total number of BII UUS offices are one Sharia Head Office, five Sharia Branch Offices (KCS) in Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya and Banda Aceh, one Sharia Sub-Branch Office (KCPS) and 105 Offices Channeling (OC).

Organisational Development

In line with the IMPACT initiative on Sharia as a product provider of Sharia Banking, in 2012 a reorganisation of BII UUS structure was performed.

In general, the scope of the work plan of BII UUS is as follows:

1. Product Management, which will manage the development of SME as well as Commercial & Corporate products; and Consumer product development.
2. Syariah Compliance and Advisory, which will manage the Sharia Committee in accordance with the policies of BI (Government), providing opinions and suggestions related to sharia principles in developing as well as conducting business and providing suggestions related to legalities as well as documentation in all business related aspects.
3. Sales & Distribution, responsible for organising and coordinating sales and distribution channels of all sharia products with related business units, facilitating the marketing and communication strategy to perform effectively.
4. Strategy & Implementation, which will manage Strategic Planning and Implementation and Business Performance Monitoring.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM, BII UUS melakukan:

1. Sosialisasi dan training Perbankan Syariah (Syariah Banking Workshop) bagi karyawan BII yang berada di KC/KCP BII Konvensional yang ditunjuk untuk menjual ataupun melakukan proses transaksi perbankan Syariah.
2. Training eksternal dan internal di bidang Risk Management, Super Service Excellence, Legal Syariah, Financial Analysis dll.

Kinerja Keuangan

Selama 2012, BII UUS berhasil meningkatkan kinerja keuangannya secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat pada laba bersih yang dibukukan sebesar Rp52 miliar, meningkat 117% dibandingkan laba bersih tahun 2011 sebesar Rp24 miliar. Total dana pihak ketiga juga mengalami kenaikan sebesar 50% dari Rp404 miliar menjadi Rp606 miliar, terutama berasal dari total CASA dan deposito masing-masing sebesar Rp107 miliar dan Rp500 miliar.

Pembiayaan BII UUS juga meningkat secara signifikan sebesar 423% dari Rp360 miliar menjadi Rp1,882 triliun pada 2012. Pertumbuhan pembiayaan (yoy) yang signifikan terjadi pada segmen Konsumer.

Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) periode Desember 2012 mampu dikelola secara baik sebesar 0,49%.

Penghargaan Yang Diperoleh

Beberapa penghargaan berhasil diraih oleh BII UUS selama tahun 2012, antara lain:

1. 'Indonesia Service to Care Champion 2012' kategori Saving Account – Islamic Banking melalui Indonesia Service to Care Index yang dilakukan oleh Marketeers bekerja sama dengan lembaga riset MarkPlus Insight.
2. Peringkat ketiga terbaik dalam kategori 'Best Syariah Overall Performance', peringkat pertama 'Best Security' dan peringkat ketiga 'Best Teller' dalam penghargaan Banking Service Excellence Award 2012 yang diselenggarakan oleh Marketing Research Indonesia (MRI) bersama majalah Infobank.

Human Resource (HR) Development

To improve the capabilities and competence of HR, BII UUS conducts the following:

1. Sharia Banking Workshops for BII employees who are in Conventional BII Branch/Sub-Branch Offices and who are appointed to sell or perform Sharia banking transactions.
2. Internal and external trainings in Risk Management, Service Excellence, Sharia Law, Financial Analysis etc.

Financial Performance

During 2012, BII UUS successfully improved its financial performance significantly compared to the previous year. This is reflected in the net profit, which was recorded at Rp52 billion, an increase of 117% compared to the net profit in 2011 amounting to Rp24 billion. Total deposits also increased by 50% from Rp404 billion to Rp606 billion, mainly originating from the total CASA and time deposits amounting respectively Rp107 billion and Rp500 billion.

BII UUS financing also increased significantly by 423% from Rp360 billion to Rp1,882 billion in 2012. The financing growth (yoy) increase occurred in the Consumer segment.

Non Performing Financing/NPF ratio for the December 2012 period was managed well with 0.49%.

Awards Obtained

Several awards which were successfully acquired by BII UUS in 2012 include:

1. 'Indonesia Service to Care Champion 2012' for the category Saving Account – Islamic Banking through Indonesia Service to Care Index which was organised by Marketeers in collaboration with the research institution MarkPlus Insight.
2. Ranked third in the category 'Best Syariah Overall Performance', ranked first in the category 'Best Security' and ranked third in the category 'Best Teller' in the Banking Service Excellence Award 2012 organised by Marketing Research Indonesia (MRI) and Infobank magazine.

Strategi Pengembangan

Momentum pertumbuhan dan kinerja pertumbuhan usaha yang berhasil direalisasikan hingga saat ini diharapkan dapat terjaga baik dan terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar dengan kualitas aset yang baik.

Dengan tetap memperhatikan perkembangan terakhir kinerja Bank serta mencermati kondisi perekonomian Indonesia dan global, maka telah ditetapkan beberapa rencana dan inisiatif penting yang akan dilakukan oleh BII UUS selama 2013, yaitu:

1. Menjadi pemain utama di bisnis Syariah dengan menawarkan solusi bisnis Syariah di seluruh segmen bisnis.
2. Melakukan perubahan Bisnis Model Syariah untuk lebih meningkatkan pertumbuhan bisnis yang ingin dicapai dengan memanfaatkan tenaga pemasaran dari BII Konvensional untuk memasarkan seluruh produk Syariah melalui optimalisasi kantor Layanan Syariah (*Office Channeling* – OC) yang ada (*leverage model*).
3. Melanjutkan kerja sama dengan *Line of Business* (LOB) dalam kegiatan *joint promo* seperti *Linkage Program*, Pameran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Advertising*, dll.
4. Meluncurkan beberapa produk dan jasa serta melakukan *review* terhadap produk-produk yang ada untuk lebih meningkatkan keunggulan kompetitif, antara lain Produk Gadai Emas Syariah, KPR Syariah dengan prinsip Musyarakah Muttanaqisah, *Corporate Leasing*, *Warehouse Financing*, Sertifikat Investasi Komoditi Murabahah, Sertifikat Investasi Murabahah Antarbank Imbal Hasil Tetap, *Foreign Exchange (Spot, Forward dan Cross Currency Hedging)* serta Tabungan Woman One Syariah.

Sharia Risk Governance

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BII UUS telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko terhadap seluruh kegiatan BII UUS merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko BII termasuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Development Strategy

The growth and business growth momentum successfully realized to date is expected to be maintained as well as continuously and sustainably improved to increase market share with good asset quality.

With due consideration of the latest Bank performance developments as well as examining the Indonesian and global economic conditions, several plans and initiatives for BII UUS have been established for 2013, namely:

1. To become a major player in the Sharia business by offering Sharia business solutions in all business segments.
2. To conduct changes in the Sharia Business Model to further improve business growth by utilizing BII Conventional marketing personnel to market all Sharia products by optimising the existing Office Channeling (*leverage model*).
3. Continuing the cooperation with the Lines of Business (LOB) in joint promo activities such as Linkage Programme, Small and Medium Enterprise (SME) Expo, Advertising, etc.
4. Launching several products and services as well as conducting reviews of existing products to further enhance the competitive advantage, among others the Sharia Gold Broking Pawn, Sharia Mortgage with Musyarakah Muttanaqisah principle, Corporate Leasing, Warehouse Financing, Fix Interbank Murabahah Commodity Investment Certificate, Foreign Exchange (Spot, Forward and Cross Currency Hedging) as well as Woman One Syariah Savings.

Sharia Risk Governance

In conducting its business, BII UUS has taken steps to mitigate risks by considering compliance with the Sharia principles as stipulated in Bank Indonesia Regulation No.13/23/PBI/2011 dated 2 November 2011 on the Application of Risk Management for Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units.

Implementation of Risk Management for all BII UUS activities is an integral part of the implementation of BII Risk Management including by the Risk Management Committee and the Risk Management Working Unit.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

BII UUS telah mengkonsolidasikan pelaporan profil Risiko dengan BII yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Selama 2012, pelaporan profil Risiko BII UUS meliputi laporan profil Risiko periode Juni, September dan Desember.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pembentukan, susunan, tugas dan tanggung jawab DPS merujuk kepada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Per 31 Desember 2012, anggota DPS berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya ditunjuk sebagai ketua dengan komposisi sebagai berikut:

BII UUS has consolidated the Risk profile reporting with BII which includes credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. During 2012, the reporting of BII UUS risk profiles covers the Risk profile report for the periods ending June, September and December.

Sharia Supervisory Board

Sharia Supervisory Board (SSB) is the board in charge of providing counsel and advice to the Board of Directors and oversees the activities of the Bank to comply with Sharia principles.

Formation, composition, roles and responsibilities of the SSB refers to the Law No. 21 year 2008 on Sharia Banking, Bank Indonesia Regulation No. 11/10/PBI/2009 dated 19 March 2009 on Islamic Business Unit, as well as Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 7 December 2009 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit.

Number and Composition of Sharia Supervisory Board

As of December 31, 2012, members of the DPS consists of 3 (three) persons, one of whom is appointed as chairman, as per the following composition:

No	Nama Name	Jabatan Position	Rekomendasi DSN-MUI DSN-MUI Recommendation	Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi BII Recommendation of BII Remuneration and Nomination Committee	Persetujuan RUPS GMS Approval	Masa Jabatan Term of Office
1	Dr. M. Anwar Ibrahim MA	Ketua Chairman	U - 0 3 7 / D S N - MUI/11/2003	Memorandum No.M.2012.004/ DIR OPS tanggal 22 Februari 2012 perihal Pemberhentian dan Penetapan Kembali Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Berita Acara RUPST PT BII Tbk. Nomor 32 tanggal 19 April 2012. Minutes of the Annual GMS PT BII Tbk. No. 32 dated 19 April 2012.	19 April 2012 sd RUPST tahun 2015 19 April 2012 to 2015 Annual GMS
2	Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahravi SH MM	Anggota Member	U - 0 3 7 / D S N - MUI/11/2003	Memorandum No.M.2012.004/DIR OPS dated 22 February 2012 on Dismissal and Reappointment of the Sharia Supervisory Board (DPS)		
3	Dr. Abdul Jabar Majid MA	Anggota Member	U - 0 3 7 / D S N - MUI/11/2003			

Anggota DPS telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu memiliki integritas dan kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum serta memiliki reputasi keuangan yang baik.

Rangkap Jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah

Sesuai PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, anggota DPS diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai anggota DPS maksimal pada 4 lembaga keuangan Syariah lainnya, namun dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan atau Unit Usaha Syariah sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS.

Rangkap jabatan anggota DPS sebagai berikut:

No	Nama Name	Perusahaan Company	Posisi Position
1	Dr. M. Anwar Ibrahim MA	1. OCBC NISP 2. Prudential	Ketua DPS SSB Chairman Ketua DPS SSB Chairman
2	Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi SH MM	1. Tokyo Marine Insurance Indonesia 2. NSC Pembiayaan Motor Berjenjang 3. PT Pegadaian Unit Syariah 4. IBF Leasing Alat Berat Syariah	Anggota DPS SSB Member Anggota DPS SSB Member Anggota DPS SSB Member Anggota DPS SSB Member
3	Dr. Abdul Jabar Majid MA	1. WOM Finance	Ketua DPS SSB Chairman

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang membawahi UUS serta mengawasi kegiatan BII UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang meliputi antara lain:

- Melakukan penilaian dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BII UUS.
- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BII UUS agar sesuai dengan fatwa DSN - MUI.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BII UUS yang belum ada fatwanya.
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BII UUS.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja BII UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

SSB members are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, namely to have the integrity and competence, at minimum to have the knowledge and experience in the field of *mu'amalah* Sharia and knowledge in banking and/or finance in general as well as having a good financial reputation.

Dual Function of Sharia Supervisory Board Members

In accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 on Islamic Business Unit, SSB members are allowed to concurrently serve as a SSB member of a maximum of 4 other Islamic financial institutions, but prohibited from holding a consultant position in Islamic Commercial Banks and or Islamic Business Unit as set in PBI No. 11/33/PBI/2009 on Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Commercial Banks and or Islamic Business Unit.

Dual function as a SSB members are as follows:

Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

In accordance with the provisions of Bank Indonesia, the duties and responsibilities of the SSB are to provide advice and suggestions to the Director in charge of UUS as well as to oversee the activities of BII UUS to conform to Sharia principles including the following:

- Assesses and ensures compliance with Sharia principles in the operational guidelines and products issued by BII UUS.
- Supervises the process of new product developments in order to conform to the Fatwas of the National Sharia Board - Indonesia Council of Ulama (DSN-MUI).
- Requests for fatwas to the National Sharia Board - Indonesia Council of Ulama for new products which yet have no fatwa.
- Conducts periodic reviews for compliance with the Sharia Principles on the mechanisms of funding and disbursement of funds and services of BII UUS.
- Requests data and information relating to the Sharia aspects of BII UUS working unit in its tasks implementation.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

- f. Menyampaikan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran.
 - g. Senantiasa melakukan analisa terhadap produk dan layanan jasa baru dalam bentuk Opini DPS yang di dalamnya disampaikan kesesuaian produk dan layanan yang akan diluncurkan dengan Fatwa DSN-MUI.
- f. Conveys the monitoring results as outlined in the SSB Oversight Report every 6 months.
 - g. Always analyses new products and services, set forth in the form of SSB Opinion, which includes conformity of products and services that will be launched with Fatwas from the DSN-MUI.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut di atas, DPS diberi kewenangan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat BII dan BII UUS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan yang ada pada BII UUS.
 - b. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip Syariah dan akad yang dikeluarkan oleh BII UUS.
 - c. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BII dan/atau BII UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan.
 - d. Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direktur yang membawahi UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- a. Inspect and request explanations from BII and BII UUS officials on the purpose, characteristics, (Standard Operating Procedure (SOP) and policy-contract agreements that are used on the products and financial activities at BII UUS.
 - b. Review and recommend all policies, systems, SOPs, and products associated with Sharia principles and covenants issued by BII UUS.
 - c. Inspect, observe, inquire and/or confirm with employees of BII and/or BII UUS and/or customers to strengthen the results of examinations.
 - d. Ask for all necessary data and information to the Director in charge of UUS in the implementation of tasks.

Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, BII UUS akan membentuk unit kerja Syariah Compliance and Advisory yang bertugas mengelola pelaksanaan kegiatan DPS, Rapat DPS, mengadministrasi permohonan dan hasil opini DPS serta kewajiban pelaporan hasil pengawasan DPS kepada Bank Indonesia.

To be able to carry out the above stated duties and responsibilities, the SSB is authorised to do the following:

To assist the implementation of the duties and responsibilities of the SSB, BII UUS will establish Sharia Compliance and Advisory unit in charge of managing the implementation of SSB activities, SSB Meeting, administering requests and results of SSB opinions as well as the obligations of the result reporting of SSB monitoring to Bank Indonesia.

Selama 2012, DPS telah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat, saran, opini terhadap produk dan kegiatan BII UUS agar senantiasa sesuai dengan Prinsip Syariah yang tercermin dari beberapa rangkaian Rapat Dewan Pengawas Syariah di bawah ini.

During 2012, the SSB provided supervision, advice, suggestions, and opinions on BII UUS products and activities to always conform to the Sharia Principles as reflected in a series of SSB Meetings below.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan. Selama 2012, DPS telah menyelenggarakan 26 kali rapat dengan tingkat kehadiran anggota DPS sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Meeting

In accordance with the provision of Bank Indonesia, SSB Meetings shall be held at least once a month. During 2012, the SSB has held 26 meetings with SSB member attendance as follows:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance %
Dr. M. Anwar Ibrahim MA	19	73%
Prof. Drs. H. Muh. Nahar Nahrawi SH MM	24	92%
Dr. Abdul Jabar Majid MA	24	92%

Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh keputusan DPS dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

Decision-making in meetings conducted by SSB deliberation is reached by consensus. All SSB decisions are recorded in the minutes of the meetings which is the collective decision of all SSB members.

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama 2012, Agenda Rapat DPS adalah sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Meeting Agenda

In 2012, SSB Meeting Agenda is as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	
1	5 Januari 2012 5 January 2012	Akad dan Syarat & Ketentuan Umum Syariah (SKUS) produk Penghimpunan Dana	The Agreement and Sharia General Terms & Conditions (SKUS) of Funding Products
2	12 Januari 2012 12 January 2012	AI Qardh dan Pelunasan	AI Qardh and Settlements
3	19 Januari 2012 19 January 2012	a. AI Qardh dan Pelunasan (Lanjutan) b. Opini 1 : Draft Akad-akad dan SKUS Produk BII Syariah Opini 2 : Draft Klausula Biaya-biaya yang dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank	a. AI Qardh and Settlements (continued) b. Opinion 1 : Agreement drafts and BII Sharia Products SKUS. Opinion 2 : Clause drafts on Costs that can be changed by the Bank at any time.
4	26 Januari 2012 26 January 2012	a. Evaluasi Murabahah Emas b. Presentasi Syariah Micro Financing (SMF) di BI	a. Evaluation on Gold Murabahah b. Sharia Micro Financing (SMF) Presentation at BI
5	2 Februari 2012 2 February 2012	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II tahun 2011	Report Preparation of SSB Supervision Results for Semester II in 2011
6	9 Februari 2012 9 February 2012	Pembiayaan terhadap WOM Finance untuk Sepeda Motor	Financing facilities on WOM for motorcycles
7	16 Februari 2012 16 February 2012	a. Tabungan Emas Mudharabah dan Sukuk Ijarah - Tabungan Emas Mudharabah - Sukuk Ijarah dengan PT BLT b. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II tahun 2011 (Lanjutan)	a. Mudharabah Gold Savings and Ijarah Sharia Bonds - Mudharabah Gold Savings. - Ijarah Sharia Bonds with PT BLT. b. Report Preparation of SSB Supervision Results for Semester II in 2011 (continued)
8	23 Februari 2012 23 February 2012	Finalisasi Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II tahun 2011	Report Finalisation of SSB Supervision Results for Semester II in 2011
9	8 Maret 2012 8 March 2012	Akad Pembiayaan untuk WOM Finance dalam Bentuk <i>Channeling</i>	Financing Agreement for WOM Finance in the form of Channeling
10	29 Maret 2012 29 March 2012	Penggunaan Asuransi Konvensional untuk Nasabah <i>Take Over</i> dari BA	Utilisation of Conventional Insurance for Customers Take Over
11	5 April 2012 5 April 2012	Perubahan Nisbah atas Deposito yang Diperpanjang Secara Otomatis.	Ratio Changing on Automatic Roll-Over Time Deposits
12	10 Mei 2012 10 May 2012	a. Penggunaan Asuransi Jiwa Konvensional untuk Pembiayaan KPRS. b. Pembiayaan <i>Joint financing</i> ke WOM Syariah.	a. Utilisation of Conventional Life Insurance for KPRS Financing b. Joint financing to WOM Syariah
13	31 Mei 2012 31 May 2012	Pembiayaan <i>Joint Financing</i> ke WOM Syariah	Joint Financing to WOM Syariah
14	7 Juni 2012 7 June 2012	Pengambilalihan Pembiayaan Murabahah dari WOM	Murabahah Financing TakeOver from WOM
15	19 Juni 2012 19 June 2012	Perjanjian Hutang Subordinasi	Subordinated Loan Agreement
16	26 Juli 2012 26 July 2012	Pembiayaan <i>Joint Financing</i> ke WOM Syariah (Lanjutan)	Joint Financing to WOM Syariah (continued)

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

No.	Tanggal Date	Agenda	
17	9 Agustus 2012 9 August 2012	Pembiayaan <i>Joint Financing</i> ke BII Finance (Lanjutan)	Joint Financing to BII Finance (continued)
18	6 September 2012 6 September 2012	Pembahasan peluang & kebutuhan pendanaan dari PT BII Finance Center (BII Finance)	Discussion on funding opportunities and needs of PT BII Finance Center (BII Finance)
19	13 September 2012 13 September 2012	<i>Reorganize</i> Syariah Unit as a Product Provider	Reorganises the Sharia Unit as a Product Provider
20	18 Oktober 2012 18 October 2012	a. Commodity Murabahah (CM) b. Penerbitan Buku Pemilikan Kendaraan Motor (BPKB) pada Pembiayaan WOM Finance c. Pengenaan Takwid untuk TPJ	a. Commodity Murabahah (CM) b. Issuance of Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) on WOM Finance Financing c. Imposition of Takwid to TPJ
21	24 Oktober 2012 24 October 2012	Pemberian Spesial Bonus ('athaya) untuk Jasa Giro dengan Akad Wadiah	Provision of Special Bonus ('athaya) for Account Services with Wadiah Agreement
22	8 November 2012 8 November 2012	Pemberian Spesial Bonus ('athaya) untuk Jasa Giro dengan Akad Wadiah (Lanjutan)	Provision of Special Bonus ('athaya) for Account Services with Wadiah Agreement (continued)
23	29 November 2012 29 November 2012	a. Konversi Mata Uang dan Ganti Rugi pada Produk BII Rumah Syariah b. Perubahan Nisbah dan Pemberian Hadiah Berupa Barang pada Produk BII Tabungan Musafir iB Gold	a. Currency Conversion and Compensation on BII Rumah Syariah product b. Ratio Changing and Provision of Prizes in the form of Goods for Musafir Savings iB Gold product
24	13 Desember 2012 13 December 2012	Strategi Manajemen Syariah Berkaitan dengan DPS	Sharia Management Strategy related to SSB
25	20 Desember 2012 20 December 2012	a. Meeting Regular Antara DPS, Direktur UUS dan Direktur Kepatuhan b. Leverage Pembiayaan Syariah c. Produk Ar-Rahn	a. Regular Meeting between the SSB, Director in charge of UUS and Director of Compliance. b. Sharia Financing Leverage c. Ar-Rahn product
26	27 Desember 2012 27 December 2012	Kriteria Nasabah yang Diperbolehkan untuk Penempatan Dana	Criteria of Customers Allowed to Place Funds

Opini Dewan Pengawas Syariah

Selama 2012, DPS telah mengeluarkan 18 opini Syariah baik yang berkaitan dengan produk, transaksi maupun operasional.

Opini DPS yang telah dikeluarkan selama 2012 adalah sebagai berikut:

Opinion of the Sharia Supervisory Board

During 2012, SSB issued 18 Sharia opinions in relations to products, transactions, and operations.

SSB opinions issued during the year 2012 are as follows:

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
1	19 Januari 2012 19 January 2012	M.2012.01/BOC-Syariah Supervisory	<p>Draft Akad-akad dan Syarat & Ketentuan Umum Syariah (SKUS) Produk-produk BII Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akad Mudharabah untuk produk penghimpunan dana BII Tabungan Musafir iB, BII Tabungan Investasi iB, BII Deposito iB, akad Wadi'ah untuk produk BII Giro iB telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, tentang Giro, No: 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. - Syarat dan Ketentuan Umum Syariah (SKUS) dapat dibuat menjadi satu untuk semua jenis akad dan untuk semua produk penghimpunan dana <p>Drafts on Principal and Sharia General Terms & Conditions (SKUS) on BII Syariah products</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah Contract for funding products of BII Tabungan Musafir iB, BII Tabungan Investasi iB, BII Deposito iB, Wadi'ah Contract for BII Giro iB product has complied with the Fatwa provision of DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, on Current Account, No.02/DSN-MUI/IV/2000, on Savings and No. 03/DSN-MUI/IV/2000 on Deposits. - Sharia General Terms & Conditions (SKUS) can be produced into one form for all types of contracts and for all funding products.

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
2	19 Januari 2012 19 January 2012	M.2012.02/BOC-Syariah Supervisory	<p>Pencantuman Klausula Biaya-biaya dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank dalam akad Syariah, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa penentuan biaya tersebut sesuai dengan biaya riil yang diperhitungkan oleh bank pada waktu perubahan tersebut. - Perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak nasabah. <p>Costs Clause Inclusion that can be amended by the Bank at any time in Sharia contracts, with the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The determination of the cost is in line with the real costs calculated by the Bank at the time of the amendment. - The amendment shall be submitted in writing to the customer.
3	29 Maret 2012 29 March 2012	M.2012.03/BOC-Syariah Supervisory	<p>Coverage Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran Konvensional Atas Nasabah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada prinsipnya bank Syariah harus menggunakan asuransi Syariah untuk meng-cover Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah. - Dalam hubungan dengan kasus nasabah <i>take over</i> yang telah di-cover oleh asuransi konvensional, maka Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran konvensional tersebut boleh dilanjutkan karena kondisi darurat yang akan menyebabkan kerugian besar bagi nasabah bila dilakukan pemindahan ke asuransi syariah. Namun bila terjadi perpanjangan masa pembiayaan, maka asuransi bagi perpanjangan pembiayaan tersebut harus menggunakan asuransi syariah. <p>Conventional Life and Fire Insurance Coverage for Customers</p> <ul style="list-style-type: none"> - In principle, Sharia banks must use Sharia insurance to cover Life and Fire Insurance for customers who receive financing from Sharia banks. - In relation to cases of take-over customers who are covered by conventional insurance, the conventional Life and Fire Insurance may be continued due to emergency conditions which may cause great harm to the customer if the transfer to sharia insurance is conducted. However, in the event of payment extension, the insurance for the payment extension must use Sharia insurance.
4	5 April 2012 5 April 2012	M.2012.04/BOC-Syariah Supervisory	<p>Perubahan Nisbah atas Deposito yang Diperpanjang secara Otomatis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan nisbah bagi hasil deposito harus dengan persetujuan nasabah, namun perubahan nisbah bagi hasil deposito yang diperpanjang secara otomatis boleh dilakukan oleh bank sesuai dengan nisbah yang berlaku pada waktu perpanjangan, dengan mencantumkan hak bank untuk memperbaharui nisbah tersebut di dalam akad awal ketika pembukaan deposito. (lihat Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito). - Khusus bagi nasabah yang diberikan nisbah spesial, maka perubahan tersebut sebaiknya diberitahukan kepada nasabah, terutama bila terjadi penurunan nisbah. <p>Ratio Changing on Automatic Roll-Over Time Deposits</p> <ul style="list-style-type: none"> - The changing in time deposit profit sharing ratio shall have an approval from the customer, however the changing of the profit sharing ratio which are automatically rolled-over may be executed by the Bank in accordance to the ratio in effect at the time of the roll-over, by stating the rights of the Bank to amend the ratio in the initial contract when opening the time deposit. (refer to Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000, on Mudharabah Financing (Qiradh) and Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 on Time Deposits). - Specifically for customers who are given a special ratio, such changes should be notified to the customers, especially when the ratio has decreased.
5	10 Mei 2012 10 May 2012	M.2012.05/BOC-Syariah Supervisory	<p>Penggunaan Asuransi Jiwa Konvensional untuk Pembiayaan KPRS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada prinsipnya bank Syariah harus menggunakan asuransi Syariah untuk meng-cover Asuransi Jiwa bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah. - Dalam hal bila Asuransi Syariah tidak bisa meng-cover-nya, maka dalam kondisi darurat, boleh di-cover dengan Asuransi Jiwa Konvensional. <p>Utilisation of Conventional Life Insurance for KPRS Financing</p> <ul style="list-style-type: none"> - In principle, Sharia banks must use Sharia insurance to cover Life Insurance for customers who receive financing from Sharia banks. - In the event Sharia insurance cannot cover it, in emergency, may be covered with Conventional Life Insurance.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
6	14 Mei 2012 14 May 2012	M.2012.06/BOC-Syariah Supervisory	<p>Pembiayaan <i>Joint Financing</i> ke WOM Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> - BII Syariah mewakilkan proses pelaksanaan pembiayaan kepada WOM Syariah dengan akad Wakalah bil Ujrah. Untuk itu, WOM diberikan ujarah sebagai wakil BII Syariah dalam memproses akad pembiayaan kepada nasabah, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Besarnya ujarah harus disepakati oleh kedua belah pihak. b. <i>Review</i> terhadap ujarah dapat dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, bila terdapat indikasi kuat, jika tidak dilakukan <i>review</i> akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan rencana <i>review</i> dimaksud harus dicantumkan dalam akad. c. Akad wakalah bil ujarah ini harus memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa No. 56/DSN-MUI/IV/2007, tentang Ketentuan <i>Review</i> Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah, dan Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006, tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. - Akad BII dengan nasabah pembeli motor dilakukan dengan akad Murabahah, dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Murabahah, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>), Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, serta Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. <p>Joint Financing to WOM Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> - WOM Syariah represents BII Syariah in the implementation of financing process with a Wakalah bil Ujrah contract. For that, as representative, WOM was given ujarah by BII Syariah in processing financing contracts to customers, with the following conditions: <ul style="list-style-type: none"> a. Amount of ujarah must be agreed upon by both parties. b. Review on the ujarah may be conducted with approval of both parties, in the event there is a strong indication, that if the review is not performed, it will cause loss to one of the parties, and the above stated review plan shall be included in the contract. c. This wakalah bil ujarah contract shall take into account the Fatwa of DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 on Wakalah, Fatwa No. 56/DSN-MUI/V/2007, on Ujrah Review Provision on Sharia Financial Institutions, and Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006, on Wakalah bil Ujrah Contract on Sharia Insurance and Re-Insurance. - The contract between BII and the customer/motorcycle buyer shall be done under the Murabahah contract, with due observance of the Fatwa of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah, Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 on Murabahah Down-Payment, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 on Discounts in Murabahah, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 on Settlement Discounts in Murabahah, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 on Receivables Discounts in Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>), Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 on Receivables Settlement for Customers Who Are Not Able to Pay, and Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 on Rescheduling of Murabahah Receivables, as well as Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 on Wakalah.

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
7	31 Mei 2012 31 May 2012	M.2012.07/BOC-Syariah Supervisory	<p>Pembiayaan <i>Joint Financing</i> ke BII Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> - BII Syariah mewakilkan proses pembiayaan kepada BII Finance dengan akad Wakalah untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor yang dimohonkan oleh nasabah, dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. - Akad BII Syariah dengan nasabah pembeli kendaraan bermotor adalah akad Murabahah, dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Murabahah, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>), Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. - BII Syariah dapat memberikan sebagian keuntungan murabahah tersebut kepada BII Finance dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. <p>Joint Financing to BII Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> - BII Finance represents BII Syariah in the implementation of financing process with Wakalah contract for purchases of vehicles requested by the customers, with due observance of the Fatwa of DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 on Wakalah. - The contract between BII and the customer/motorcycle buyer shall be done under the Murabahah contract, with due observance of the Fatwa of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah, Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 on Murabahah Down-Payment, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 on Murabahah Discounts, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 on Settlement Discounts in Murabahah, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 on Receivables Discounts in Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>), Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 on Receivables Settlement for Customers Who Are Not Able to Pay, and Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 on Rescheduling of Murabahah Receivables. - BII Syariah may provide some of the murabahah profits to BII Finance with a ratio which has been agreed upon by both parties.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
8	14 Juni 2012 14 June 2012	M.2012.08/BOC-Syariah Supervisory	<p>Pengambilalihan Pembiayaan Murabahah dari WOM Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, maka pengambilalihan pembiayaan murabahah oleh BII Syariah dan WOM Finance Syariah dapat dilakukan dengan melakukan Anjak Piutang Syariah dengan menggunakan akad Wakalah bil Ujrah, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak WOM Finance Syariah yang mempunyai piutang mewakili kepada BII Syariah untuk melakukan administrasi piutang dari nasabah tersebut. - Pihak BII Syariah dapat memberikan dana talangan dalam bentuk Qard kepada WOM Finance Syariah sebesar nilai piutang. - BII Syariah berhak mendapat ujarah wakalah dari proses administrasi piutang yang diwakilkan oleh WOM Finance Syariah. - Besar <i>fee</i> disepakati dicantumkan dalam bentuk nominal dan dituangkan dalam akad. - Ujrah bagi BII Syariah dibayarkan sesuai kesepakatan BII Syariah dengan WOM Finance Syariah. - Tidak dibenarkan adanya keterkaitan antara akad wakalah bil ujarah dengan akad qard antara BII Syariah dan WOM Finance Syariah. <p>Murabahah Financing Takeover from WOM In accordance with the Fatwa of DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 on Factoring of Sharia Receivables, the murabahah financing take-over by BII Syariah and WOM Finance Syariah may be done by conducting the factoring of Sharia Receivables using the Wakalah bil Ujrah contract, with the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WOM Finance Syariah party with the receivables gives authorisation to BII Syariah to perform receivables administration from the customer. - BII Syariah party may provide escrow in the form of Qard to WOM Finance Syariah in the amount of the receivables. - BII Syariah is entitled for ujarah wakalah from the receivables administration process authorised by WOM Finance Syariah. - Agreed upon fee amount is stated in nominal form and written in the contract. - Ujrah for BII Syariah shall be paid as stated in the agreement between BII Syariah and WOM Finance Syariah. - Affiliation between the wakalah bil ujarah contract with the qard contract between BII Syariah and WOM Finance Syariah is unwarranted.
9	19 Juni 2012 19 June 2012	M.2012.09/BOC-Syariah Supervisory	<p>Review atas Draft Perjanjian Hutang Subordinasi Perjanjian Hutang Subordinasi tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.</p> <p>Review on the Subordinated Loan Agreement Draft The Subordinated Loan Agreement has met the Sharia principles in accordance to the Fatwa of DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on Musyarakah Financing.</p>

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
10	16 Juli 2012 16 July 2012	M.2012.10/BOC-Syariah Supervisory	<p>Pembiayaan <i>Joint Financing</i> ke BII Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> - BII Syariah mewakilkan proses pembiayaan kepada BII Finance dengan akad Wakalah untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor yang dimohonkan oleh nasabah, dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. - Akad BII Syariah dengan nasabah pembeli kendaraan bermotor adalah akad Murabahah, dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, serta fatwa-fatwa lain yang terkait Murabahah, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Fatwa No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, b. Fatwa No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, c. Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, d. Fatwa No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>), e. Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dan f. Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. - BII Syariah dapat memberikan sebagian keuntungan murabahah tersebut kepada BII Finance dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. - Dengan demikian Opini DPS terdahulu no. M. 2012.06/BOC-Syariah Supervisory tanggal 14 Mei 2012 dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. <p>Joint Financing to BII Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> - BII Syariah gives authority to BII Finance for the financing process with Wakalah contract to finance the purchase of vehicles requested by customers, with due observance of the Fatwa of DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 on Wakalah. - The contract between BII Syariah and the customer/the vehicle buyer is a Murabahah contract with due observance of the Fatwa of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah, as well as other fatwas related to Murabahah, among others:: <ul style="list-style-type: none"> a. Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 on Down-Payment in Murabahah, b. Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 on Discounts in Murabahah, c. Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 on Settlement Discounts in Murabahah, d. Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 on Receivables Discounts in Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>), e. Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 on Receivables Settlement for Customers Who Are Not Able to Pay, and f. Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 on Rescheduling of Murabahah Receivables . - BII Syariah may provide some of the murabahah profits to BII Finance with a ratio which has been agreed upon by both parties. - Therefore the previous SSB opinion No. M. 2012.06/BOC-Syariah Supervisory dated 14 May 2012 is cancelled and deemed null and void.
11	17 September 2012 17 September 2012	M.2012.11/BOC-Syariah Supervisory	<p><i>Reorganize Syariah Unit as a Product Provider</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa program tersebut pada prinsipnya dapat dan layak diaplikasikan karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. - Program tersebut memerlukan pembekalan pengetahuan produk Syariah, etika dan moral Syariah yang efektif dan komprehensif terhadap setiap karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan dan penanggung jawab operasional pemasaran di setiap cabang dan unit. - Dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang cermat dan terus-menerus dari Unit Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). <p><i>Reorganise Syariah Unit as a Product Provider</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - In principle, the programme is applicable and feasible because there are no issues that are contrary to Sharia principles. - The programme requires a provisioning of Sharia products knowledge, effective and comprehensive Sharia ethics and morals for all employees involved in the implementation and marketing operations and who are responsible in each branch and unit. - Programme implementation requires meticulous and continuous monitoring from the Sharia Unit and Sharia Supervisory Board (SSB).

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
12	17 September 2012 17 September 2012	M.2012.12/BOC-Syariah Supervisory	<p>Pembiayaan <i>Joint Financing</i> ke BII Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> - BII Syariah mewakilkan proses pembiayaan kepada BII Finance dengan akad Wakalah untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor yang dimohonkan oleh nasabah, dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, dengan pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa BII Finance adalah anak perusahaan BII, yang 99,9% modalnya dimiliki oleh BII, dan yang 0,01 % adalah milik karyawan BII juga. b. Bahwa semua risiko 100 % berada di pihak BII Syariah. c. Penghasilan BII Finance di samping mendapat bagian dari margin murabahah juga dari biaya administrasi dan diskon asuransi. - Akad BII Syariah dengan nasabah pembeli kendaraan bermotor adalah akad Murabahah, dengan memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>), Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. - BII Syariah dapat memberikan sebagian keuntungan murabahah tersebut kepada BII Finance dengan limit yang disepakati oleh kedua belah pihak. <p>Joint Financing to BII Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> - BII Syariah gives authorisation to BII Finance with Wakalah contract to finance the purchase of vehicles requested by customer, with due observance of the Fatwa of DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 on Wakalah, with the following conditions: <ol style="list-style-type: none"> a. BII Finance is a subsidiary of BII, of which 99.9% capital is owned by BII, and 0.01% is owned by BII employees. b. 100% of risk falls on BII Syariah. c. Revenue of BII Finance additionally comes from the murabahah margin share and from administration fees and insurance discount. - The contract between BII and the customer/the vehicle buyer shall be done under the Murabahah contract, with due observance of the Fatwa of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah, Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 on Murabahah Advances, Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 on Murabahah Discounts, Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 on Settlement Discounts in Murabahah, Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 on Receivables Discounts in Murabahah (<i>Khashm Fi Al-Murabahah</i>), Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 on Receivables Settlement for Customers Who Are Not Able to Pay, and Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 on Rescheduling of Murabahah Receivables. - BII Syariah may provide some of the murabahah profit to BII Finance with an agreed upon limit by both parties.

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
13	18 Oktober 2012 18 October 2012	M.2012.13/BOC-Syariah Supervisory	<p>Transaksi Murabahah Komoditi (Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada dasarnya untuk transaksi murabahah komoditi dalam hal ini Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. - Semua persyaratan sebagaimana tersebut dalam fatwa harus dipenuhi secara sempurna. - Supaya dipastikan pihak <i>trader</i> yang menjual komoditi tidak boleh menjadi pembeli komoditas yang sama. - Pihak bank selaku konsumen komoditi benar-benar membutuhkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. <p>Murabahah Commodity Transaction (Interbank Murabahah Commodity Investment Certificates Based on Sharia Principles)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basically for murabahah commodity transactions in this regard, an Interbank Murabahah Commodity Investment Certificate Based on Sharia Principles is allowed according to the Fatwa of DSN-MUI No.82/DSN-MUI/VIII/2011 on Commodity Trading Based on Sharia Principles in the Commodity Exchange. - All conditions stated in the fatwa shall be fully fulfilled. - Traders who sell the commodities must be ensured not to also be the buyer of the same commodity. - The Bank as the commodity consumer is really in need of fresh funds to meet liquidity needs.
14	8 November 2012 8 November 2012	M.2012.14/BOC-Syariah Supervisory	<p>Pemberian Spesial Bonus Rekening Giro</p> <p>Pemberian spesial bonus (<i>'athaya</i>) untuk pemegang rekening giro tertentu agar setia/loyal menempatkan dana di rekening giro tersebut pada prinsipnya diperbolehkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spesial bonus kepada nasabah bersifat sukarela sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. - Spesial bonus tersebut tidak disyaratkan dan tidak dicantumkan dalam akad. <p>Provision of Current Account Special Bonus</p> <p>The provision of special bonus (<i>'athaya</i>) for certain current account holders in order for them to be faithful/ loyal in placing their funds in the current accounts is in principle allowed with the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Special bonus to the customers is voluntary, in accordance to the Fatwa of DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 on Current Account. - Special bonus is not required and is not included in the contract.
15	29 November 2012 29 November 2012	M.2012.15/BOC-Syariah Supervisory	<p>Perubahan Nisbah Tabungan dan Keikutsertaan BII Tabungan Musafir iB Gold dalam Program Promo Biingkisan Beruntun 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan nisbah bagi hasil tabungan dapat dilakukan, dengan persetujuan nasabah. - BII Tabungan Musafir iB Gold dapat diikutsertakan dalam Program Promo Biingkisan 2012 dengan ketentuan, bahwa biingkisan tersebut diambil dari bagi hasil pihak BII Syariah. - Bagi nasabah yang mencairkan tabungannya pada waktu sebelum jatuh tempo dapat dikenakan <i>ta'widh</i> (ganti rugi) sebesar kerugian riil yang diderita oleh Bank. (Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004). <p>Changing in Savings Ratio and Participation in BII Tabungan Musafir iB Gold in the Promo Programme "Biingkisan Beruntun 2012"</p> <ul style="list-style-type: none"> - The changing in the savings' profit sharing ratio can be carried out, with approval of the customer. - BII Tabungan Musafir iB Gold may participate in the Promo Programme "Biingkisan 2012", with the condition that the gift is taken from the results of profit sharing from the BII Syariah party. - For customers who redeemed their savings prior to maturity may be subjected to <i>ta'widh</i> (administration fee) in the amount of the real losses suffered by the Bank. (Fatwa of DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004).

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

No	Tanggal Date	No. Opini No. Opinion	Opini Opinion
16	6 Desember 2012 6 December 2012	M.2012.16/BOC-Syariah Supervisory	<p>Penerbitan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebelum dilakukan Akad Pembiayaan Murabahah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah satu syarat pembiayaan Murabahah bahwa barang yang akan dibiayai dimiliki terlebih dahulu oleh pihak yang membiayai. Sedangkan akad pembiayaan adalah bukti bahwa nasabah akan membelinya. - Oleh sebab itu, semestinya penerbitan BPKB dilakukan setelah akad pembiayaan murabahah dilaksanakan. <p>Issuance of Motor Vehicle Ownership Book prior to the execution of Murabahah Financing Contract</p> <ul style="list-style-type: none"> - One of the Murabahah financing conditions is that the goods to be financed are initially owned by the party who will finance it. While the financing contract is the proof that the customer will purchase it. - Therefore, the issuance of Motor Vehicle Ownership Book is conducted after the murabahah financing contract has been executed.
17	20 Desember 2012 20 December 2012	M.2012.17/BOC-Syariah Supervisory	<p>BII Rumah Syariah dengan akad Musyarakah Muttanaqisah (MMQ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam akad MMQ, BII Syariah wajib berjanji untuk menjual seluruh porsinya secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. - Kadar porsi kepemilikan BII Syariah terhadap rumah yang menjadi objek MMQ akan berkurang akibat pembayaran oleh nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. - Biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban nasabah. - Apabila rumah yang menjadi objek MMQ tersebut disewa oleh nasabah bersangkutan, maka akad ijarahnya dapat dicantumkan dalam akad MMQ. <p>BII Rumah Syariah with Musyarakah Muttanaqisah (MMQ) contract</p> <ul style="list-style-type: none"> - In an MMQ contract, BII Syariah shall promise to sell the entire portion gradually and it is mandatory for the customer to buy it. - The ownership portion level of BII Syariah on the house that is the MMQ object will diminish due to payments by the customer shall be clear and agreed upon in the contract. - The cost for the musyarakah asset acquirement shall be a joint cost, while the cost for the transfer of ownership shall be the cost of the customer. - In the event the house that is the MMQ object is rented out by the customer concerned, the ijarah contract may be included in the MMQ contract.
18	27 Desember 2012 27 December 2012	M.2012.18/BOC-Syariah Supervisory	<p>Pemberian Keputusan Kredit dan Unit Usaha Syariah oleh Komite Kredit Konvensional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. - Apabila terdapat hal-hal yang diragukan dari sisi Syariah supaya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengawas Syariah. <p>Credit Grading Decision and Sharia Business Unit by the Conventional Credit Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> - The financing is not contradictory to Sharia principles. - Event of questionable issues in terms of Sharia shall be discussed with the Sharia Supervisory Board.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai ketentuan, DPS menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode semester berakhir. BII UUS telah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS Semester 1 dan Semester 2 2012 kepada Bank Indonesia masing-masing melalui surat No.S.2012.077/DIR OPS & IT tanggal 27 Agustus 2012 dan No.S.2013.014/PRESDIR tanggal 27 Februari 2013.

Sharia Supervisory Board Oversight Results Report

In accordance to the provisions, the SSB submits its SSB Oversight Results Report twice a year to Bank Indonesia not more than two months after the semester ends. BII UUS reported the results of SSB monitoring for Semester 1 and Semester 2 of 2012 to Bank Indonesia respectively through letters No.S.2012.077/DIR OPS & IT dated 27 August 2012 and No.S.2013.014/PRESDIR dated 27 February 2013.

Laporan Hasil Pengawasan DPS pada 2012 antara lain meliputi:

SSB Oversight Results Report in 2012 includes among others:

Semester	Pengawasan terhadap Produk Baru Bank Supervision on New Products of the Bank	Pengawasan terhadap Kegiatan Bank Supervision on the Activities of the Bank			
		Penghimpunan Dana Funding		Pembiayaan Financing	
		Mudharabah	Wadiah	Murabahah	Musarakah & Mudharabah
I	<p>Pembiayaan <i>joint financing</i> ke BII Finance dan WOM Syariah.</p> <p>DPS telah melakukan review atas program produk ini dan mengeluarkan empat opini berkaitan dengan pembiayaan <i>joint financing</i> ini dengan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI.</p> <p>Joint financing to BII Finance and WOM Syariah.</p> <p>SSB conducted reviews on this product programme and submitted four opinions related to this joint financing with due observance of the fatwas of DSN-MUI.</p>	<p>Meliputi produk BII Tabungan Musafir iB, BII Tabungan Investasi iB dan BII Deposito iB.</p> <p>DPS mengeluarkan dua opini berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad Mudharabah.</p> <p>Including BII Tabungan Musafir iB, BII Tabungan Investasi iB, and BII Deposito iB products.</p> <p>The SSB submitted two opinions related to the fund raising under the Mudharabah contract.</p>	<p>Meliputi produk BII Giro iB dan BII TabunganKu iB, dan mengeluarkan satu opini berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad Wadiah.</p> <p>Including BII Giro iB and BII TabunganKu iB and submitted one opinion related to the fund raising under the Wadiah contract.</p>	<p>BII UUS menyalurkan pembiayaan dengan Penambahan Fasilitas akad Murabahah.</p> <p>DPS mengeluarkan tiga opini berkaitan dengan penyaluran pembiayaan Murabahah.</p> <p>BII UUS disbursed financing with Murabahah contract Facility Addition.</p> <p>The SSB submitted three opinions related to the financing disbursement under the Murabahah contract.</p>	<p>Pengawasan terhadap Pembiayaan Musarakah dan Mudharabah BII UUS, meliputi pembiayaan SME, Commercial dan Corporate.</p> <p>BII UUS telah menyalurkan pembiayaan dengan penambahan fasilitas akad Musarakah, dan mengeluarkan satu opini berkaitan dengan kegiatan pembiayaan modal kerja dengan akad Musarakah.</p> <p>Supervision on Musarakah and Mudharabah Financing of BII UUS, including the financing for SME, Commercial, and Corporate.</p> <p>BII UUS disbursed financing with Musarakah contract Facility Addition, and submitted one opinion related to the working capital financing under the Musarakah contract.</p>

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Semester	Pengawasan terhadap Produk Baru Bank Supervision on New Products of the Bank	Pengawasan terhadap Kegiatan Bank Supervision on the Activities of the Bank			
		Penghimpunan Dana Funding		Pembiayaan Financing	
		Mudharabah	Wadiah	Murabahah	Musyarakah & Mudharabah
II	<p>Proses pengembangan produk baru BII UUS yaitu pembiayaan <i>joint financing</i> ke BII Finance dan WOM Syariah, serta produk BII Rumah Syariah dengan akad Musyarakah Muttanaqisah (MMQ).</p> <p>DPS telah melakukan review atas program produk ini dan mengeluarkan tiga opini berkaitan dengan pembiayaan <i>joint financing</i> dan MMQ ini dengan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI.</p> <p>New BII UUS product development process, namely the joint financing to BII Finance and WOM Syariah, as well as the BII Rumah Syariah product under the Musyarakah Muttanaqisah (MMQ) contract.</p> <p>The SSB has performed reviews on these products and have submitted three opinions related to the joint financing and MMQ with due observance of the fatwas of DSN-MUI.</p>	<p>Meliputi produk BII Tabungan Musafir iB, BII Tabungan Investasi iB dan BII Deposito iB, dan mengeluarkan satu opini berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad Mudharabah.</p> <p>Including BII Tabungan Musafir iB, BII Tabungan Investasi iB, and BII Deposito iB products and submitted one opinion related to fund raising under the Mudharabah contract.</p>	<p>Meliputi produk BII Giro iB dan BII TabunganKu iB.</p> <p>Including the products BII Giro iB and BII TabunganKu iB.</p>	<p>BII UUS menyalurkan pembiayaan dengan Penambahan Fasilitas akad Murabahah.</p> <p>Analisa kelayakan usaha dan karakteristik debitur untuk memperoleh pembiayaan tersebut telah melalui analisa team SMEC & Risk Management, serta diperiksa oleh Internal Control Unit (ICU) Syariah, dan secara berkala diperiksa oleh SKAI.</p> <p>DPS mengeluarkan tiga opini berkaitan dengan penyaluran pembiayaan Murabahah</p> <p>BII UUS disbursed financing with Murabahah contract Facility Addition.</p> <p>Analysis of business feasibility and customer characteristics to obtain financing has been through the analysis of the SMEC and Risk Management team, as well as being examined by the Sharia Internal Control Unit (ICU), and periodically inspected by the Internal Audit Unit (SKAI).</p> <p>The SSB has submitted three opinions related to the Murabahah financing disbursement.</p>	-

Keseluruhan transaksi pembukaan rekening dan penyaluran pembiayaan tersebut telah melalui pemeriksaan Internal Control Unit (ICU) BII UUS dan DPS telah menetapkan uji sampel transaksi sekurang-kurangnya satu transaksi setiap bulan dengan memperhatikan pemenuhan prinsip Syariah.

Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Total remunerasi yang dibayarkan kepada DPS selama 2012 yang meliputi gaji adalah sebesar Rp461 juta.

All account openings and funding disbursement transactions underwent inspection of the BII UUS Internal Control Unit (ICU) and the SSB has determined transaction sample tests of at least one transaction per month with respect to compliance with Sharia principles.

Sharia Supervisory Board Remuneration

Total remuneration paid to the SSB in 2012, including the salary is in the amount of Rp461 million.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Type of Remuneration and other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Total Amount Received in 1 Year	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Rupiah Million
1. Remunerasi Remuneration	3	461
2. Fasilitas Lainnya Other Facilities	-	-
a. Yang dapat dimiliki That can be owned		
b. Yang tidak dapat dimiliki That cannot be owned		
Total	3	461

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun Total Remuneration*) per person in 1 Year	Jumlah DPS Number of SSB
Di atas Rp2 miliar Over Rp2 billion	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar Over Rp1 billion up to Rp2 billion	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Over Rp500 million up to Rp1 billion	-
Rp500 juta ke bawah Under Rp500 million	3

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura) | received in financial form (non natura)

Daftar Konsultan dan Penasehat

Pada 2012, BII UUS telah menggunakan konsultan untuk proyek yang bersifat khusus dan didasari dengan proses pemilihan dan kontrak yang jelas. Konsultan tersebut independen, profesional dan memiliki kualifikasi yang memadai. Konsultan yang pernah digunakan oleh BII UUS selama 2012 adalah sebagai berikut:

List of Consultants And Advisors

During 2012, BII UUS used consultants and advisors on a project specific basis and based on a selection process and a clear contract. The independent and professional consultants have adequate qualifications. Consultants used by BII UUS in 2012 were as follows:

Nama Perusahaan Konsultan Name of Consultant Company	Bidang/Area Field/Area	Keterangan Description
Harta Insan Kharimah (Group)	Pembiayaan Financing	Konsultasi proyek produk Pembiayaan Mikro (lanjutan) Consulting Project Financing microfinance products

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

"*Internal Fraud*" adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional BII UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan BII UUS secara signifikan, yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selama 2012, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) di BII UUS.

Internal Fraud

Internal fraud is a distortion/fraud committed by the Board of Commissioners, Board of Directors, management, permanent and temporary staff (honorary and outsourced) in relation to BII operational activities and work processes that financially harms the Bank with more than a Rp100,000,000 (One Hundred Million Rupiah) loss.

During 2012, there were no internal frauds in BII UUS.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Internal Fraud (dalam 1 tahun) Internal Fraud (within 1 year)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Number of cases Performed By					
	Dewan Komisaris/Direksi Board of Commissioners/ Directors		Pegawai Tetap Permanent Staff		Pegawai tidak Tetap Non Permanent Staff	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan Have been settled	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS In the process of BII UUS internal settlement	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya Have not attempted solutions	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Have been followed up through the legal process	-	-	-	-	-	-

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BII UUS

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BII UUS selama periode 2012 adalah sebagai berikut:

Legal Issues and Settlement Efforts by BII UUS

Civil and criminal issues facing BII UUS during the 2012 period were as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Number	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Have been resolved (obtained binding legal force)	2	-
Dalam proses penyelesaian In the process of being resolved	1	1
Total	3	1

Penghimpunan Dana oleh Deposan Inti

Per 31 Desember 2012, deposan inti BII UUS adalah sebagai berikut:

Funds Collection by Depositors

As of 31 December 2012, core BII UUS depositors were as follows:

(Jutaan Rupiah) | (Rupiah Millions)

No	Nama Deposan Depositor's Name	Giro Current Account (Rp)	Tabungan Savings (Rp)	Deposito Time Deposit (Rp)	Total (Rp)
1	A	-	-	140.000,00	140.000,00
2	B	-	-	75.000,00	75.000,00
3	C	-	-	62.000,00	62.000,00
4	D	32,7	-	28.700,00	28.732,70
5	E	-	-	22.045,40	22.045,40
6	F	18.144,60	-	-	18.144,60
7	G	11.247,10	-	5.000,00	16.247,10
8	H	-	-	14.622,30	14.622,30
9	I	-	-	12.192,2	12.192,20
10	J	-	-	10.000,00	10.000,00

Pembiayaan kepada Debitur Inti

Per 31 Desember 2012, debitur inti BII UUS adalah sebagai berikut:

Funds Disbursement to Financing Customers

As of 31 December 2012, core debtors of BII UUS were as follows:

(Jutaan Rupiah) | (Rupiah Millions)

No	Nama Debitur Debtor's Name	Pembiayaan Berdasarkan Akad (Rp) Financing Based on Contract (Rp)						Nominal
		Murabahah	Salam	Istishna	Mudharabah	Musyarakah	IMBT	
1	A	40.400	-	-	-	-	-	40.400
2	B	-	-	-	-	35.266	-	35.266
3	C	-	-	-	-	29.637	-	29.637
4	D	-	-	-	15.885	-	-	15.884
5	E	-	-	-	-	12.168	-	12.167
6	F	8.642	-	-	-	-	-	8.641
7	G	7.426	-	-	-	-	-	7.426
8	H	-	-	-	-	6.500	-	6.500
9	I	-	-	-	-	3.958	-	3.958
10	J	3.800	-	-	-	-	-	3.800

Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial

Penerimaan Dana Kebajikan (Qardh) BII UUS per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp387.797.681,59 dan selama 2012 telah mendonasikan Dana Sosial untuk amal sebesar Rp71.100.000,00 serta menyisakan saldo sebesar Rp316.697.681,59 dengan rincian sebagai berikut:

Donations Granted for Social Purposes

Benevolence Fund Receipts (Qardh) of BII UUS as of 31 Desember 2012 were in the amount of Rp387.797.681.59 and during 2012 donations to a charity Social Fund were in the amount of Rp71.100.000.00, leaving a balance of Rp316.697.681.59 with the following details:

Bulan Month	Kegiatan Activities	Penerima Dana Fund Recipient	Jumlah Dana Total Funds
Februari	Pembangunan Gedung Sekolah Yatim & Dhuafa Construction of Orphans and Dhuafa Schools	Yayasan Islam Al Anshar Bekasi Al Anshar Islamic Foundation Bekasi	Rp10.000.000,-
Februari	Peduli Gadisha – sebuah proyek kemanusiaan untuk membantu balita penderita kebocoran usus Gadisha Care – a humanitarian project to help toddlers with bowel leakage	Karyawati BII KCP Tanjung Duren Jakarta Barat Employee of BII KCP Tanjung Duren, West Jakarta	Rp 5.000.000,-
Mei	Renovasi Musholla Assyukuriyah Jagakarsa, Jakarta Selatan Renovation of Assyukuriyah Mosque in Jagakarsa, South Jakarta	Panitia Renovasi Musholla Assyukuriyah Renovation Committee of Assyukuriyah Mosque	Rp 2.500.000,-
Mei	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433H – Musholla Al Mujahidin Jatinegara, Jakarta Timur Commemoration of the Birth of the Prophet Muhammad SAW 1433H – Al Mujahidin Mosque in Jatinegara, East Jakarta	Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433H – Musholla Al Mujahidin Jatinegara, Jakarta Timur The Committee for the Commemoration of the Birth of Prophet Muhammad SAW 1433H – Al Mujahidin Mosque in Jatinegara, East Jakarta	Rp 300.000,-
Juni	Bantuan dana pengobatan individu untuk penderita kanker serviks Financial assistance for individual treatment of cervical cancer patients	Pramubakti BII Jatinegara Office Boy, BII Jatinegara	Rp 2.000.000,-
Juli	Renovasi & Pembangunan Masjid Riyadlussholihin Cipinang, Jakarta Timur Renovation & Construction of Riyadlussholihin Mosque in Cipinang, East Jakarta	Pengurus Masjid Riyadlussholihin Cipinang, Jakarta Timur Caretaker of Riyadlussholihin Mosque in Cipinang, East Jakarta	Rp 5.000.000,-

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Bulan Month	Kegiatan Activities	Penerima Dana Fund Recipient	Jumlah Dana Total Funds
Juli	Pembangunan Masjid Sab'ah Depok Construction of Sab'ah Mosque in Depok	Panitia Pembangunan Masjid Sab'ah Depok Construction Committee of Sab'ah Mosque in Depok	Rp 5.000.000,-
Juli	Renovasi & Pembangunan Masjid Nurul Ittihad Tangerang Renovation & Construction of Nurul Ittihad Mosque in Tangerang	Panitia Renovasi & Pembangunan Masjid Nurul Ittihad Tangerang Renovation & Construction Committee of Nurul Ittihad Mosque in Tangerang	Rp 5.000.000,-
Agustus	Renovasi Musholla KCS Surabaya/KCP Darmo Surabaya Renovation of KCS Surabaya/ KCP Darmo Mosques in Surabaya	Panitia Renovasi Musholla KCS Surabaya/ KCP Darmo Surabaya Renovation Committee of KCS Surabaya/ KCP Darmo Mosques in Surabaya	Rp 2.000.000,-
Agustus	Pembangunan Pondok Pesantren & Gedung Diniyah Takmilyah Awaliyah 'Nurul Anshar' Bekasi Construction of Islamic Boarding School & 'Nurul Anshar' Diniyah Takmilyah Awaliyah Building in Bekasi	Pengurus & Panitia Pembangunan Pondok Pesantren & Gedung Diniyah Takmilyah Awaliyah 'Nurul Anshar' Bekasi Caretaker & Construction Committee of Islamic Boarding School & 'Nurul Anshar' Diniyah Takmilyah Awaliyah Building in Bekasi	Rp 5.000.000,-
September	Bantuan Beasiswa Santri Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang Banten Scholarships for Students in An-Nawawi Tanara Islamic Boarding School in Serang - Banten	Pesantren Ahmad Syauqi QQ. Pesantren An-Nawawi Ahmad Syauqi Islamic Boarding School QQ. An-Nawawi Islamic Boarding School	Rp10.800.000,-
Oktober	Pemotongan Hewan Qurban di BII Syariah Cattle Sacrificing at BII Syariah	Musholla Al Mujahidin Jatinegara, Jakarta Timur Al Mujahidin Jatinegara Mosque, in East Jakarta	Rp18.500.000,-
Desember	CSR event iB Vaganza – Serunya BerBank Syariah (rangkaiannya kegiatan Bulan Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh BI bersama 20 BUS & UUS dan Manajemen Masjid BI) sebesar Rp10.000.000,- (akan dibukukan di tahun 2013) CSR event iB Vaganza – the Excitement of Banking in Sharia (series of activities in Sharia Banking Month organised by BI in collaboration with 20 BUS & UUS and BI Mosque Management) in the amount of Rp10,000,000,- (will be recorded in the 2013 fiscal year)	- Yayasan sosial, antara lain PPPA Daarul Quran Tangerang - Khitanan massal - Pengobatan gratis untuk masyarakat kurang mampu dan pasien kurang mampu di RSCM Jakarta - Social Foundation, among others PPPA Daarul Quran in Tangerang - Mass circumcision - Free treatment for underprivileged communities and patients in RSCM Jakarta	
TOTAL			Rp71.100.000,-

Bentuk tanggung jawab sosial BII UUS diimplementasikan dengan selalu menyalurkan dana sosial yang berhasil dikumpulkan BII UUS baik dari dana Zakat & Infaq/Shadaqah (ZIS) maupun dana kebajikan (Qardhul Hasan) yang berasal dari denda, pendapatan non-halal (bukan hak BII UUS) dan dana sosial lainnya.

BII UUS's social responsibility is implemented by distributing social funds collected by BII UUS from the funds of Zakat & Infaq/Sadaqah (ZIS) and benevolence funds (Qardhul Hasan) derived from fines, non-halal revenues (not the right of BII UUS) and other social funds.

Selama 2012, BII UUS telah menyalurkan dana ZIS sebagai berikut:

During 2012, BII UUS distributed ZIS funds as follows:

Dana ZIS | ZIS Fund

Dana Fund	Sumber Dana Source of Fund	Penggunaan Dana Fund Usage	Saldo Balance
ZAKAT			
Saldo awal Initial balance	23.720.299,77		
Penerimaan Zakat Karyawan Zakat Income from Employees	23.935.607,22		
Penerimaan lain-lain Other Income	1.333.759,82		
Jumlah Penerimaan Dana Total Income	25.269.367,04		
Jumlah Saldo Total Balance			48.989.666,81
Fakir Miskin Poor & Needy		32.100.000,00	
Operasional lainnya Other Operational		-	
Total Penyaluran Dana Total Disbursement		32.100.000,00	
Sisa Saldo Remaining Balance			16.889.666,81
INFAQ/SHADAQAH			
Saldo awal Initial balance	2.610.216,77		
Penerimaan Infaq/Shadaqah Income from Infaq/Shadaqah	2.944.168,92		
Penerimaan lain-lain Other Income	93.227,33		
Jumlah Penerimaan Dana Total Income	3.037.396,25		
Jumlah Saldo Total Balance			5.647.613,02
Kegiatan Sosial Social Activities		400.000,00	
Operasional lainnya Other Operational		-	
Kegiatan Pemotongan Hewan Qurban Cattle Sacrifice activity		-	
Total Penggunaan Dana Total Expense		400.000,00	
Sisa Saldo Remaining Balance			5.247.613,02

Pelaporan Internal

Dalam hal pelaporan internal, BII UUS telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang handal dan sumber daya manusia yang kompeten, serta memiliki IT *security system* yang memadai sehingga informasi UUS tersedia secara akurat dan tepat waktu.

Laporan internal BII UUS meliputi Laporan Keuangan & Akuntansi, Laporan Manajemen Risiko, Laporan Kepatuhan, Laporan Know Your Customer (KYC) dan Laporan Marketing Budget Tracking yang dilaporkan kepada unit-unit kerja di Bank.

Internal Reporting

In terms of internal reporting, UUS has been supported by management information systems that are reliable and by competent human resources, as well as having an adequate IT security system so that UUS information availability is accurate and timely.

BII UUS internal reports include Financial & Accounting, Risk Management Reports, Compliance Reports, Know Your Customer Reports (KYC) and the Marketing Budget Tracking Reports and these are reported to work units in the Bank.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Selama 2012, laporan-laporan internal BII UUS adalah sebagai berikut: During 2012, BII UUS internal reports were as follows:

Laporan Report	Frekuensi Frequency	Keterangan	Description
KEUANGAN & AKUNTANSI FINANCE & ACCOUNTING			
Laporan Publikasi Syariah (LPS) Sharia Publication Report (LPS)	triwulan quarterly	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Aset BII UUS	Reports on Balance Sheet, Profit/Loss, Assets of BII UUS
Monthly Business Report	bulanan monthly	Laporan kegiatan bulanan mengenai <i>financing @ projects</i> BII UUS	Monthly activity reports on BII UUS financing & projects
Result Management Report (RMR)	bulanan monthly	Laporan mengenai data keuangan BII UUS	BII UUS financial report
Laporan Bank Umum (LBU) Basel versi Excel Basel General Bank Report (LBU) Excel version	bulanan monthly	Laporan mengenai data keuangan BII UUS	BII UUS financial report
Laporan <i>un-used</i> pembiayaan komitmen & kontinjensi Reports on un-used commitment & contingency financing	bulanan monthly	Laporan mengenai <i>un-used</i> pembiayaan komitmen & kontinjensi	Un-used commitment & contingency financing reports
Customer with collectibility (SM & NPF)	bulanan monthly	Laporan mengenai debitur dengan klasifikasi <i>Special Mention</i> dan <i>Non Performing Financing</i> BII UUS	Reports on debtors with Special Mention classification and Non Performing Financing of BII UUS
Laporan Profit Distribusi Bagi Hasil dan Bonus Reports of Profit Sharing Distribution and Bonus	bulanan monthly	Laporan mengenai hasil investasi yang ditanamkan oleh nasabah	Report on investment results placed by customers
Laporan GWM Syariah Reports on Sharia Minimum Statutory Reserve Requirement	bulanan monthly	Laporan mengenai Giro Wajib Minimum BII UUS	Reports on Sharia Minimum Statutory Reserve Requirement of BII UUS
Laporan Keuangan <i>Backdated</i> Reports on Backdated Finance	bulanan monthly	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Rekapitulasi <i>Backdate</i> BII UUS	Reports on Balance Sheet, Profit/Loss, and Backdated Recapitulation of BII UUS
Laporan NPL dan Credit Restructure Reports on NPL and Credit Restructuring	bulanan monthly	Laporan mengenai kredit bermasalah dan restrukturisasi kredit UUS	Reports on non-performing loans and credit restructurisation of BII UUS
Laporan Sektor Ekonomi Syariah Reports of Islamic Economic Sector	bulanan monthly	Laporan mengenai pengelompokan pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi	Reports of the financing based on the economic sectors grouping
Laporan Keuangan Bank (LKB) Consolidated Financial Statements of the Bank (LKB)	bulanan monthly	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi, Aset dan Distribusi Bagi Hasil BII UUS	Reports on Balance Sheet, Profit/Loss, Assets, and Profit Sharing Distribution of BII UUS
Laporan Monitoring Dana Usaha Syariah Reports on Sharia fund Monitoring	bulanan monthly	Laporan mengenai modal kerja BII UUS, yaitu dana bersih Bank pada UUS	Reports on working capital of BII UUS, net proceeds between the Bank and BII UUS
Sistem Informasi Debitur (SID) Debtor Information System (SID)	bulanan monthly	Pelaporan kolektibilitas surat berharga yang dimiliki melalui <i>website</i> BI	Reports on collectibility of securities through the BI website
LKPBU	bulanan monthly	Laporan penggunaan kartu ATM baik yang baru buka maupun yang sudah tutup	Reports on the use of ATM cards both recently opened and closed
KPMM/ATMR	bulanan monthly	Laporan Aktiva Tertimbang yang dimiliki terhadap modal dan risiko	Reports on weighted assets to capital and risk
LBUS	bulanan monthly	Laporan Neraca, R/L, Pembiayaan serta Rekening Administratif per cabang dan konsolidasi melalui <i>website</i> BI	Reports on Balance Sheet, Profit/Loss, Financing, as well as Administrative Account of each branch and consolidation through the BI website
Maturity Profile	bulanan monthly	Laporan jatuh tempo arus kas	Reports on cash flow maturity
Weekly Performance Report	mingguan weekly	Laporan kegiatan mingguan mengenai <i>financing @ projects</i> UUS	Reports on weekly activities regarding UUS financing and projects

Laporan Report	Frekuensi Frequency	Keterangan	Description
Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS) Periodic Reports of Sharia Bank (LBBUS)	mingguan weekly	Laporan mengenai Neraca, Laba/Rugi dan Aset BII UUS	Reports on the Balance Sheet, Profit/Loss, and Assets of BII UUS
Outstanding Surat Berharga Outstanding Securities	mingguan weekly	Pelaporan kolektibilitas surat berharga yang dimiliki ke FAD	Reports on the collectibility of securities to FAD
Daily Performance Report	harian daily	Laporan mengenai pendanaan (<i>funding</i>) di Layanan Syariah	Reports on funding in Office Channeling
Performance outstanding and un-used facility	harian daily	Laporan mengenai <i>outstanding</i> pembiayaan BII UUS	Reports on the outstanding financing of BII UUS
Past-due Report	harian daily	Laporan mengenai debitur macet BII UUS	Reports on bad debtors of BII UUS
Performance Report on Funding & Financing	harian daily	Laporan <i>tracking</i> Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan BII UUS	Reports on Third Party Funds and Financing tracking of BII UUS
Laporan BII - UUS BII – UUS reports	harian daily	Laporan mengenai Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Surat Berharga BII UUS	Reports on Third Party Funds, Financing, and Securities of BII UUS
Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Commercial Bank Daily Report (LHBU) Form 102, 201, 604	harian daily	Laporan harian <i>Interbank online</i> ke <i>website</i> BI	Daily reports on online Interbank to the BI website
Subledger	harian daily	Laporan Neraca Harian dan R/L per cabang dan konsolidasi untuk kepentingan pembukuan cabang	Reports on the Daily Balance and Profit/Loss of each branch and consolidation for branch bookkeeping
MANAJEMEN RISIKO			
Risk Compliance Self Assessment (RCSA)	triwulan quarterly	Laporan mengenai temuan pemeriksaan terkait dengan manajemen risiko BII UUS	Report on the audit findings related to BII UUS risk management
Risk Profile	triwulan quarterly	Laporan Profil Risiko	Risk Profile Report
KEPATUHAN			
Compliance Plan Self Assessment (CPSA)	semester	Laporan mengenai pemenuhan kepatuhan BII UUS	Reports on BII UUS compliance
KYC			
Laporan KYC KYC Report	bulanan monthly	Laporan mengenai pengisian data nasabah yang tidak lengkap	Reports on customers with incomplete data
Laporan KYC KYC Report	harian daily	Laporan mengenai nasabah yang <i>out of profile</i>	Reports on “out of profile” customers
MARKETING COMMUNICATION			
Marketing Budget Tracking	bulanan monthly	Laporan mengenai kegiatan dan budget promosi, iklan & reklame dan <i>sponsorship</i> BII UUS	Reports on activities and budget of promotion, ads & billboards, as well sponsorship of BII UUS

Hasil Self Assessment GCG

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, pada 2012, BII UUS melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan GCG.

Hasil penilaian *self assessment* atas pelaksanaan GCG BII UUS sebagai berikut:

GCG Self Assessment Results

In accordance with Bank Indonesia regulation, in 2012, BII UUS conducted a self assessment of the adequacy of the implementation of corporate governance.

Results of self assessment for the implementation of BII UUS corporate governance are as follows:

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

No	Faktor Factor	2012			Catatan	Notes
		Bobot Weight	Peringkat Rating	Nilai Score		
		(a)	(b)	(a) x (b)		
1	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS</p> <p>The implementation of the duties and responsibilities of the Director in charge of UUS</p>	35%	1,17	0,41	<p>Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BII UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah dan bertanggung jawab terhadap strategi pengembangan BII UUS, serta menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.</p>	<p>The Director in charge of UUS is fully responsible for the implementation and management of BII UUS based on the prudent and Sharia principles and responsible for the strategic development of BII UUS, as well as provides data and information to Sharia Supervisory Board (SSB) related to the compliance of Sharia Principles that is accurate, relevant and timely.</p>
2	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah</p> <p>The implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board</p>	20%	1,34	0,27	<p>Pembentukan, susunan, tugas dan tanggung jawab DPS merujuk kepada ketentuan Bank Indonesia, yaitu memiliki integritas dan kompetensi, pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu'amalah dan perbankan/keuangan serta memiliki reputasi keuangan yang baik.</p> <p>DPS telah transparan atas rangkap jabatan serta tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi</p> <p>DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang membawahi UUS serta mengawasi kegiatan BII UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.</p>	<p>Formation, composition, roles and responsibilities of the SSB refers to BI regulations, namely to have the integrity and competence, knowledge and experience in the field of mu'amalah Sharia and banking/finance as well as having a good financial reputation.</p> <p>The SSB is transparent in respect to concurrent positions as well as free of conflict of interest.</p> <p>The duties and responsibilities of the SSB are to provide advice and suggestions to the Director in charge of UUS as well as to oversee the activities of BII UUS to conform to Sharia principles.</p>
3	<p>Pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa</p> <p>The implementation of Sharia principles in the activities of fund collection and disbursement of funds as well as services</p>	10%	1,20	0,12	<p>BII UUS telah memenuhi Prinsip Syariah dalam produk UUS, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa.</p>	<p>BII UUS's products, funding and financing activities as well as services have conformed with Sharia principles.</p>
4	<p>Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti</p> <p>The disbursement of funds to finance prime customers and deposit taking by prime depositors</p>	10%	1,83	0,18	<p>UUS telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta memiliki kebijakan dan prosedur yang terkini atas penyaluran dana kepada nasabah inti.</p>	<p>UUS has applied prudent principles and has updated the policy procedure for financing to prime customers.</p>

No	Faktor Factor	2012			Catatan	Notes
		Bobot Weight	Peringkat Rating	Nilai Score		
		(a)	(b)	(a) x (b)		
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal Transparency of financial and non financial condition, reports on the implementation of corporate governance and internal reporting	25%	1,53	0,38	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal telah sesuai dengan ketentuan.	Transparency of financial and non financial conditions, GCG implementation report and internal reporting have conformed with regulations.
	Nilai Komposit Composite Score	100%		1,36		
	Predikat Komposit Composite Rating	Sangat Baik Very Good				

Nilai Komposit	Composite Rating Predikat Komposit	Composite Score
Nilai Komposit < 1.5	Excellent Sangat Baik	Composite Score < 1.5
1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5	Good Baik	1.5 ≤ Composite Score < 2.5
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Sufficient Cukup Baik	2.5 ≤ Composite Score < 3.5
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Insufficient Kurang Baik	3.5 ≤ Composite Score < 4.5
4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Poor Tidak Baik	4.5 ≤ Composite Score ≤ 5

Nilai Komposit dan Predikat

Hasil *self assessment* pelaksanaan GCG BII UUS 2012 menunjukkan Predikat Komposit "Sangat Baik" dengan Nilai Komposit "1,36".

Kelemahan dan Penyebab

Hasil *self assessment* GCG tahun 2012 menunjukkan bahwa tidak terdapat kelemahan signifikan dalam penerapan GCG di BII UUS.

Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance

Peran aktif Direktur UUS dan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya serta komitmen seluruh pihak dalam organisasi BII UUS dan unit terkait, maka pelaksanaan GCG di BII UUS dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariah.

Composite Score and Rating

The result of the implementation of GCG BII UUS 2012 self assessment recorded a "Very Good" Composite Predicate with a Composite Score of "1.36".

Weakness and Causes

The results of the 2012 GCG self assessment showed that there were no significant weaknesses with the implementation of GCG at BII UUS.

Strength in Implementing Good Corporate Governance

With the active role of the Director in Charge of UUS and the Sharia Supervisory Board in ensuring that Sharia principles are fulfilled as regards business activities, as well as commitment of all parties within the organization and related units, the implementation of GCG at BII UUS has been carried out in accordance with prevailing rules and regulations as well as in strict adherence to Sharia principles.

Laporan GCG Unit Usaha Syariah

GCG Report of Sharia Business Unit

Tindak Lanjut

BII UUS melanjutkan komitmen untuk senantiasa menyempurnakan pelaksanaan GCG dengan mengembangkan bisnis perbankan yang sehat, terpercaya dan bertujuan untuk melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memenuhi prinsip Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan Syariah.

Follow Up

BII UUS continues the commitment to continuously refine the implementation of GCG by develop a banking business that is sound, reliable and aims to protect the interests of stakeholders as well as improve compliance with regulations laws and regulations that meet Sharia principles by the Fatwas from the National Sharia Board – Indonesia Council of Ulama (DSN-MUI) as well as the ethical values that apply generally to the Sharia banking industry.

Lembar Persetujuan Approval Sheet PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Direksi | Board of Directors



Dato' Khairussaleh Ramli
Presiden Direktur | President Director



Dato' Khairussaleh Ramli
Direktur UUS | Director in Charge of UUS

Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board



Dr. M. Anwar Ibrahim, MA.
Chairman | Ketua



Prof. Dr. H. Muh. Nahar Nahravi, SH. MM.
Anggota | Member



Dr. Abdul Jabar Majid, MA.
Anggota | Member